



katalog/Catalog: 4401002

Statistik Kriminal 2020

Criminal Statistics 2020



BADAN PUSAT STATISTIK
BPS-Statistics Indonesia

Statistik Kriminal 2020

Criminal Statistics 2020



STATISTIK KRIMINAL 2020

Crime Statistics 2020

ISSN: 2089-5291

Nomor Publikasi/Publication Number: 04330.2002

Katalog/Catalog: 4401002

Ukuran Buku/Book Size: 17.6 x 25 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages: xxxii + 282 halaman

Naskah/Manuscript :

Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan

Sub-directorate of Politics and Security Statistics

Penyunting/Editor :

Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan

Sub-directorate of Politics and Security Statistics

Desain Kover oleh/Cover Designed by:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Sub-directorate of Statistical Compilation and Publication

Penerbit/Published by :

BPS RI/BPS-Statistics Indonesia

Pencetak/Printed by : Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi/Graphics by : freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/ atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia

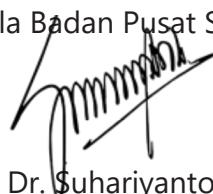
Kata Pengantar

Publikasi Statistik Kriminal 2020 merupakan publikasi yang diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum terkait data kriminalitas di Indonesia. Publikasi ini menyajikan data statistik di bidang kriminal antar waktu. Penerbitan publikasi ini akan sangat bermanfaat untuk memonitor perkembangan dan pencapaian program-program pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Data yang disajikan pada publikasi ini merupakan data yang berasal dari tiga sumber, yaitu data registrasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dihasilkan BPS. Data registrasi Polri menggambarkan situasi keamanan berdasarkan pencatatan kejadian kejahatan yang dilaporkan masyarakat atau kejadian yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Data Susenas menggambarkan pengalaman menjadi korban kejahatan berdasarkan informasi dari rumah tangga/individu korban kejahatan. Data Podes menggambarkan situasi keamanan di wilayah desa/kelurahan yang bersumber dari keterangan kepala desa/lurah. Karena cara pendekatan pengumpulan data yang berbeda, ketiga jenis data tersebut tidak dapat secara langsung dibandingkan tetapi bisa saling melengkapi (komplementer).

Akhir kata, kami berharap agar publikasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pengambil keputusan sebagai acuan atau rujukan dalam rangka penyusunan arah dan kebijakan pembangunan nasional terutama pembangunan di bidang keamanan. Kami menyadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu berbagai masukan, kritik, dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan publikasi di masa mendatang.

Jakarta, November 2020
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suharyanto

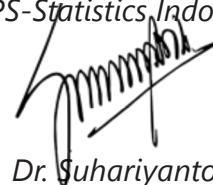
Preface

The 2020 Crime Statistics publication is a publication which is published to meet the needs of public regarding crime data in Indonesia. This publication provides statistical series data on crime. This publication will be very useful for monitoring the progress and achievement of development programs in the field of security and public order.

The data presented in this publication is from three sources, namely the registration data of the Indonesian National Police (Polri), the National Socio-Economic Survey (Susenas), and the Village Potential Data Collection (Podes) produced by BPS. The National Police registration data illustrates the security situation based on the recording of crimes reported by the public or incidents where the perpetrators were caught by the police. The Susenas data describes the experience of being a crime victim based on information from the household/individual of the crime victim. The Podes data describes the security situation in the villages/kelurahan area, which is sourced from the information of the village head/Lurah. Due to the different approaches to data collection, the three types of data cannot be directly compared but can complement each other (complementary).

Finally, we hope that this publication can be usefull, especially for the decision makers as a reference in order to formulate the direction and policies of national development, especially development in the security sector. We recognize that this publication is far from perfect. For this reason, various inputs, criticisms, and suggestions are needed to improve future editions of this publications.

Jakarta, November 2020
BPS-Statistics Indonesia



Dr. Suharyanto

Ringkasan Eksekutif

Publikasi Statistik Kriminal 2020 menyajikan gambaran umum mengenai tingkat dan perkembangan kriminalitas di Indonesia selama periode tahun 2017–2019. Informasi yang disajikan mencakup tiga pendekatan utama statistik kriminal, yakni pendekatan pelaku (Data Registrasi Kepolisian), korban (Data Survei Sosial Ekonomi Nasional-Susenas), dan kewilayahan (Pendataan Potensi Desa/Podes).

Data registrasi Polri mencatat bahwa selama periode tahun 2017–2019 jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung menurun. Jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada 2017 sebanyak 336.652 kejadian. Angka ini menurun menjadi sebanyak 294.281 kejadian pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 menjadi 269.324 kejadian. Indikator tingkat kejahatan (*crime rate*) selama periode tahun 2017–2019 juga mengalami penurunan. Tingkat risiko terkena tindak kejahatan setiap 100 ribu penduduk pada tahun 2017 adalah sebesar 129, menjadi 113 pada tahun 2018, dan menurun menjadi 103 pada tahun 2019.

Indikator kriminalitas lainnya selama periode 2017–2019 juga menunjukkan pola perkembangan yang serupa. Selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*) adalah 00.01'33" (1 menit 33 detik) pada tahun 2017 dan menjadi sebesar 00.01'47" (1 menit 47 detik) pada tahun 2018. Interval *crime clock* menjadi semakin panjang pada tahun 2019, yaitu sebesar 00.01'57" (1 menit 57 detik). Interval *crime clock* yang semakin panjang menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin menurun.

Data Susenas yang menggambarkan persentase penduduk menjadi korban kejahatan di Indonesia selama periode tahun 2018–2019 juga memperlihatkan pola yang sama dengan data Kepolisian, yaitu cenderung menurun. Persentase penduduk korban kejahatan mengalami penurunan dari 1,11 persen pada tahun 2018 menjadi 1,01 persen pada tahun 2019. Data Susenas juga menunjukkan tingkat persentase korban kejahatan yang melapor ke Polisi masih relatif rendah. Pada tahun 2018 korban kejahatan yang melapor ke Polisi sebesar 23,92 persen, dan pada tahun 2019 menurun menjadi 22,19 persen.

Selain data kejadian kejahatan yang bersumber data Kepolisian dan Susenas, kejadian kejahatan dapat dilihat berdasarkan ruang lingkup kewilayahan dengan berbasis desa. Berdasarkan data Podes, Selama periode 2011 – 2018, jenis kejadian pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi pada desa/kelurahan di Indonesia, jumlahnya mencapai lebih dari 36–45 persen dari seluruh desa/kelurahan.

Executive Summary

The 2020 Criminal Statistics publication presents an overview of the level and trend of crime in Indonesia during the period 2017–2019. The information presented includes three main approaches to criminal statistics, such as the perpetrator's approach (Police Registration Data), the victim's approach (National Socio-Economic Survey-Susenas), and the regional approach (Village Potential Data-Podes).

Police registration data records that during 2017–2019 the number of incidents of crime or criminal acts in Indonesia tended to decline. The number of crime total in 2017 was 336,652 incidents. This number decreased to 294,281 incidents in 2018 and 269,324 incidents in 2019. Crime rate indicator during the 2017–2019 period also showed a decline pattern. The level of risk of being exposed to crime for every 100,000 people in 2017 was 129, to 113 in 2018, and decreased to 103 in 2019.

Other crime indicators during the 2017–2019 period also show a similar pattern. The time interval between the occurrence of a crime (crime clock) is 00.01'33 " (1 minute 33 seconds) in 2017 and became 00.01'47 " (1 minute 47 seconds) in 2018. Then crime clock interval became even longer in 2019 which was 00.01'57 " (1 minute 57 seconds). The longer time interval shows that the intensity of the crime is decreasing.

Susenas data, which is describing the percentage of the population who became victims of crime in Indonesia during the 2018–2019 period, also shows the same pattern as the Police data, a declining pattern. The percentage of victims of crime has decreased from 1.11 percent in 2018 to 1.01 percent in 2019. Susenas data also shows that the percentage of victims who reported to the police is relatively low. In 2018 it was 23.92 percent, and in 2019 it decreased to 22.19 percent.

In addition to data on crime incidents that are sourced from Police and Susenas, crime incidents can be seen based on regional scope (village-based). Based on Podes data, during the period 2011 - 2018, theft was the most common crime in villages/kelurahan in Indonesia, reaching more than 36-45 percent of all villages/kelurahan.

Daftar Isi

Table of Contents

Kata Pengantar/ <i>Preface</i>	iii
Ringkasan Eksekutif/ <i>Executive Summary</i>	v
Daftar isi/ <i>Table of Contents</i>	vii
Daftar Gambar/ <i>List of Figures</i>	xii
Daftar Tabel Lampiran/ <i>List of Appendix Tables</i>	xix
Bab 1 Pendahuluan	1
Latar Belakang	3
Tujuan	4
Ruang Lingkup	4
Sistematika Penyajian	5
Bab 2 Kejadian Kejahatan	7
Angka Kejahatan Secara Umum (Nasional)	9
Angka Kejahatan Secara Umum (Provinsi/Polda)	10
Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi	12
Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan)	14
Kejahatan Terhadap Fisik/Badan	16
Kejahatan Terhadap Kesusilaan	18
Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang	19
Kejahatan Terhadap Hak/milik dengan Penggunaan Kekerasan	20
Kejahatan Terhadap Hak/milik tanpa Penggunaan Kekerasan	22

Kejahatan Terkait Narkotika	25
Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi	26
Gambaran Kejadian Kejahatan Secara Kewilayahannya	28
Konflik Massal	36
Upaya Menjaga Keamanan	40
Bab 3 Korban Kejahatan	43
Penduduk Korban Kejahatan	45
Tingkat Pelaporan	50
Bab 4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Terkait Keamanan	51
Chapter 1 Introduction	63
<i>Background</i>	65
<i>Purpose</i>	66
<i>Scope</i>	66
<i>Writing System</i>	66
Chapter 2 Crime Incidents	69
<i>General Crime Number (National)</i>	71
<i>General Crime Number (Province/Regional Police)</i>	72
<i>Crime Number based on Classification</i>	74
<i>Crime Against Life (Homicide)</i>	76
<i>Crime Against Physical/Body (Violence)</i>	78

<i>Crime Related to Sexual Violence</i>	78
<i>Crime Against People Freedom</i>	81
<i>Crime Against Rightss/Property With Violence</i>	82
<i>Crime Against Rights/Property Without Violence</i>	83
<i>Crime Related to Narcotics</i>	85
<i>Crime Related to Fraud, Embezzlement, and Corruption</i>	86
<i>Description of Crime Incidents Based on Territorial</i>	89
<i>Mass Conflict</i>	96
<i>Efforts to Maintain Security</i>	99
<i>Chapter 3 Victims of Crime</i>	103
<i>Crime Victims Population</i>	105
<i>Police Reporting Rate</i>	110
<i>Chapter 4 Indicators of Sustainable Development Goals (SDGs) Related to Security</i>	111
<i>Daftar Pustaka/References</i>	121
<i>Catatan Teknis/Technical Note</i>	125
<i>Jenis dan Sumber Data/Type and Source of Data</i>	127
<i>Konsep dan Definisi/Concept and Definitions</i>	131
<i>Penjelasan Teknis/Technical Explanations</i>	135
<i>Lampiran/Appendix</i>	137
<i>Penghitungan Sampling Error/Calculation of Sampling Error</i>	249

https://www.bps.go.id

Daftar Gambar

List of Figures

II. KEJADIAN KEJAHATAN

2.1	Jumlah Kejahatan dan Tingkat Risiko Kejahatan 2017–2019	9
2.2	Jumlah Kejahatan yang dilaporkan Menurut Polda/Provinsi 2019	11
2.3	Tingkat Risiko Terkena Kejahatan Menurut Polda/Provinsi, 2019	12
2.4	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa, 2015 – 2019	14
2.5	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa Menurut Polda, 2019	15
2.6	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan, 2015-2019	16
2.7	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan Menurut Polda, 2019	17
2.8	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusastraan, 2015-2019	18
2.9	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusastraan Menurut Polda,2019	19
2.10	Jumlah Kejadian dan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, 2015-2019	20
2.11	Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Menurut Polda, 2019	21
2.12	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan, 2015 – 2019	22
2.13	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan Menurut Polda, 2019	23

2.14 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan, 2015 – 2019	24
2.15 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan Menurut Polda, 2019	24
2.16 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika, 2015 – 2019 ...	25
2.17 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika Menurut Polda, 2019	26
2.18 Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi, 2015 – 2019	27
2.19 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi Menurut Polda, 2019	28
2.20 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, 2011, 2014, dan 2018	29
2.21 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018	30
2.22 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018	31
2.23 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi 2018	32
2.24 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian (Tanpa Kekerasan) Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018	33
2.25 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018	34

2.26	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018	35
2.27	Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal. 2011, 2014, dan 2018	37
2.28	Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Tipenya, 2014 dan 2018	38
2.29	Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Penyelesaiannya, 2014 dan 2018	39
2.30	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, 2018	39
2.31	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2011, 2014, dan 2018	40
2.32	Persentase Desa/Kelurahan yang terdapat Pos Polisi Menurut Provinsi, 2018	41

III. KORBAN KEJAHATAN

3.1	Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan, 2018–2019	45
3.2	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin, 2018–2019	46
3.3	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Umur, 2018–2019	46
3.4	Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Provinsi, 2018–2019	47

3.5	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan jenis Kelamin dan Provinsi, 2019	48
3.6	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Usia dan Provinsi, 2019	49
3.7	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi, 2018-2019	50

IV. INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) TERKAIT KEAMANAN

4.1	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir, 2015 – 2019	56
4.2	Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2017	57
4.3	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi, 2015 – 2019	58
4.4	Perkembangan IPAK 2012 – 2020	59
4.5	Persentase Masyarakat yang Pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan, Tahun 2020	60
4.6	Persentase Masyarakat Pelaku Usaha yang Pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan, tahun 2020	61

II. CRIME INCIDENTS

2.1	<i>Crime Total and Crime Rate, 2017-2019</i>	71
2.2	<i>The Number of Reported Crimes by Regional Police/Province, 2019</i>	73
2.3	<i>Crime Rate by Regional Police/Province, 2019</i>	74
2.4	<i>The Number of Crimes Against Life (Homicide), 2015-2019 ..</i>	76

2.5	<i>The Number of Crimes Against Life (Homicide) by Regional Police, 2015-2019</i>	77
2.6	<i>The Number of Crime Against Physical/Body (Violence), 2015-2019</i>	78
2.7	<i>The Number of Crime Against Physical/Body (Violence) by Regional Police, 2019</i>	79
2.8	<i>The Number of Crimes Related to Sexual Violence, 2015-2019</i>	79
2.9	<i>The Number of Crimes Related to Sexual Violence by Regional Police, 2019</i>	80
2.10	<i>The Number of Crime Against People Freedom, 2015-2019 ...</i>	81
2.11	<i>The Number of Crime Against People Freedom by Regional Police, 2019</i>	82
2.12	<i>The Number of Crime Against Rights/Property With Violence, 2015-2019</i>	83
2.13	<i>The Number of Crime Against Rights/Property Without Violence by Regional Police, 2019</i>	84
2.14	<i>The Number of Crime Against Rights/Property Without Violence, 2015-2019</i>	84
2.15	<i>The Number of Crime Against Rights/Property Without Violence by Regional Police, 2019</i>	85
2.16	<i>The Number of Crimes Related to Narcotics, 2015-2019</i>	86
2.17	<i>The Number of Crimes Related to Narcotics by Regional Police, 2019</i>	87
2.18	<i>The Number of Crimes Related to Fraud, Embezzlement, and Corruption, 2015-2019</i>	87

2.19	<i>The Number of Crimes Related to Fraud, Embezzlement, and Corruption by Regional Police, 2019</i>	88
2.20	<i>The Number of Villages/Kelurahan Where Crimes Occured in the Last Year by the Type of Crimes, 2011, 2014, and 2018.....</i>	89
2.21	<i>The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Homicide Crimes in the Last Year by Province, 2018</i>	90
2.22	<i>The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Homicide Crimes in the Last Year by Province, 2018</i>	91
2.23	<i>The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Violent Theft in the Last Year by Province 2018</i>	92
2.24	<i>The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Theft (Without Violence) in the Last Year by Province, 2018</i>	93
2.25	<i>The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Assault During the Last Year by Province, 2018</i>	94
2.26	<i>The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Drug Abuse and Trafficking During the Last Year by Province, 2018</i>	95
2.27	<i>The Percentage of Villages/Kelurahan throughout Indonesia Ever Happened Mass Fights, 2011, 2014, and 2018</i>	96
2.28	<i>The Percentage of Villages/Kelurahan throughout Indonesia Ever Happened Mass Fights by the Types, 2014 and 2018</i>	97
2.29	<i>The Percentage of Villages/Kelurahan throughout Indonesia Ever Happened Mass Fights by the Settlement, 2014 and 2018</i>	98
2.30	<i>The Number and The Percentage of Villages/Kelurahan with Mass Conflict Events During the Last Year by Province, 2018</i>	98

2.31	<i>The Percentage of Villages/Kelurahan by Type of Efforts by Citizens for Maintaining Security, 2011, 2014, and 2018</i>	100
2.32	<i>The Percentage of Villages/Kelurahan with Police Stations by Province, 2018</i>	101

III. VICTIMS OF CRIME

3.1	<i>The Percentage of Population of Crimes Victims, 2018–2019</i>	105
3.2	<i>The Characteristics of the Population of Crime Victims by Sex, 2018–2019</i>	106
3.3	<i>The Characteristics of the Population of Crime Victims by Age Group, 2018–2019</i>	106
3.4	<i>The Percentage of Population of Crime Victims by Province, 2018–2019</i>	107
3.5	<i>The Number of the Population of Crime Victims by Sex and Province, 2019</i>	108
3.6	<i>The Number of the Population of Crime Victims by Age Group and Province, 2019</i>	109
3.7	<i>The Percentage of Population of Crime Victims Reporting to the Police, 2018-2019</i>	110

IV. INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) RELATED TO SECURITY

4.1	<i>The Proportion of Population who Become Victims of Violent crime in the Last 12 Months, 2015-2019</i>	115
4.2	<i>The Percentage of Households that Feel Safe Walking Alone Around the Area They Live by Province, 2017</i>	116
4.3	<i>The Proportion of Victims of Violence in the Last 12 Months Who Reported to the Police, 2015-2019</i>	117
4.4	<i>IPAK in 2012 - 2020</i>	118

4.5 <i>The Percentage of People Who Have Dealt with Public Services and Spent Money/Goods/Facilities Exceeding Provisions</i>	119
4.6 <i>The Percentage of Business Actors Who Have Dealt with Public Services and Spent Money/Goods/Facilities Exceeding Provisions</i>	120

Daftar Lampiran

List of Appendix

II. KEJADIAN KEJAHATAN/CRIME INCIDENTS

Sumber Data/Source: Kepolisian RI/National Police

2.1.1 Indikator Kriminalitas Nasional, 2017-2019 <i>National Crime Indicator, 2017-2019</i>	140
2.1.2 Peringkat Polda Menurut Jumlah Kejahatan dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan, 2019 <i>Regional Police Rank by Crime Total and Crime Rate, 2019</i>	141
2.1.3 Jumlah Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2017-2019 <i>Crime Total by Regional Police, 2017-2019</i>	142
2.1.4 Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan Menurut Kepolisian Daerah, 2017-2019 <i>Crime Cleared by Regional Police, 2017-2019</i>	143
2.1.5 Persentase Penyelesaian Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2017-2019 <i>Clearance Rate by Regional Police, 2017-2019</i>	144
2.1.6 Selang Waktu Terjadinya Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2017-2019 <i>Crime Clock by Regional Police, 2017-2019</i>	145

Sumber Data/Source: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/National Police

2.1.7 Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Daerah, 2017-2019 <i>Crime Rate Per 100.000 Population by Regional Police, 2017-2019</i>	146
2.1.8 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok Jenis Kejahatan, 2017-2019 <i>Crime Total by Type of Crime, 2017-2019</i>	147

2.1.9 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan, 2019 <i>Crime Total by Type of Crime and Month, 2019</i>	148
2.1.10 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2017 <i>Crime Total by Type of Crime and Regional Police, 2017</i>	152
2.1.11 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2018 <i>Crime Total by Type of Crime and Regional Police, 2018</i>	158
2.1.12 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2019 <i>Crime Total by Type of Crime and Regional Police, 2019</i>	164

Sumber Data/Source: : Potensi Desa/Village Potential

2.2.1 Jumlah Desa/Kelurahan, 2011, 2014, dan 2018 <i>Number Of Villages/Kelurahan, 2011, 2014, And-2018</i>	172
2.2.2 Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mengalami Kejadian Tindak Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Tindak Kejahatan, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Number of Villages/Kelurahan that have Experienced Incidents of Crime During the Last Year by Type of Crime</i>	173
2.2.3 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Homicide During the Last Year by Province</i>	174
2.2.4 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Assault During the Last Year by Province</i>	175
2.2.5. Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011,	

2014, dan 2018 <i>The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Rape During the Last Year by Province</i>	176
2.2.6 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014 , dan 2018 <i>The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Violent Theft During the Last Year by Province ...</i>	177
2.2.7 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Theft During the Last Year by Province</i>	178
2.2.8 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Fraud/Embezzlement During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018</i>	179
2.2.9 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Arson During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018</i>	180
2.2.10 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Human Trafficking During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018</i>	181
2.2.11 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Number of Villages/Kelurahan where there have been</i>	

<i>Incidents of Drug Abuse/Trafficking During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018</i>	182
2.2.12 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Gambling During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018</i>	183
2.2.13 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Homicide During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018</i>	184
2.2.14 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Assault During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018</i>	185
2.2.15 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018 <i>The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Rape During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018</i>	186
2.2.16 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Violent Theft During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018</i>	187
2.2.17 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	

	<i>The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Theft During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018</i>	188
2.2.18	Percentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/ Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Fraud/Embezzlement During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018</i>	189
2.2.19	Percentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Arson During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018</i>	190
2.2.20	Percentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Human Trafficking During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018</i>	191
2.2.21	Percentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Drug Abuse/Trafficking During the Last Year by Province</i>	192
2.2.22	Percentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Gambling During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018</i>	193

Sumber Data/Source: : Potensi Desa/Village Potential

2.3.1 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia Menurut Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal yang Terjadi, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Number and the Percentage of Villages/Kelurahan by Some Characteristics of Massive Fighting Incident Within Last Year, 2011, 2014, and 2018</i>	196
2.3.2 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Number and the Percentage of Villages/Kelurahan with Massive Fighting Incident Within Last Year by province, 2011, 2014, dan 2018</i>	197
2.3.3 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2011 <i>The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Mass Fights During the Last Year by Province and Type of Mass Fights, 2011</i>	198
2.3.4 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014 <i>The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Mass Fights During the Last Year by Province and Type of Mass Fights, 2014</i>	200
2.3.5 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018 <i>The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Mass Fights During the Last Year by Province and Type of Mass Fights, 2018</i>	202
2.3.6 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2011 <i>The Number and the Percentage of Villages/Kelurahan by Some Characteristics of Massive Fighting Incident Within Last Year, 2011</i>	

<i>The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Mass Fights During the Last Year by Province and Type of Mass Fights, 2011</i>	204
2.3.7 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014 <i>The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Mass Fights During the Last Year by Province and Type of Mass Fights, 2014</i>	206
2.3.8 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018 <i>The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Mass Fights During the Last Year by Province and Type of Mass Fights, 2018</i>	208
2.3.9 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal dan Mampu Menyelesaiannya Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Number and The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Mass Fights and Able to Resolve Them During the Last Year by Province, 2011, 2014, and 2018</i>	210

Sumber Data/Source: : Potensi Desa/Village Potential

2.4.1 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Number and The Percentage of Villages/Kelurahan by Type of Efforts by Citizens for Maintaining Security, 2011, 2014 and 2018</i>	212
2.4.2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2011 <i>The Number of Villages/Kelurahan by Type of Efforts by Citizens for Maintaining Security by Province, 2011</i>	213

2.4.3 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2014 <i>The Number of Villages/Kelurahan by Type of Efforts by Citizens for Maintaining Security by Province, 2014</i>	214
2.4.4 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2018 <i>The Number of Villages/Kelurahan by Type of Efforts by Citizens for Maintaining Security by Province, 2018</i>	215
2.4.5 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2011 <i>The Percentage of Villages/Kelurahan by Type of Efforts by Citizens for Maintaining Security by Province, 2011</i>	216
2.4.6 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2014 <i>The Percentage of Villages/Kelurahan by Type of Efforts by Citizens for Maintaining Security by Province, 2014</i>	217
2.4.7 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2018 <i>The Percentage of Villages/Kelurahan by Type of Efforts by Citizens for Maintaining Security by Province, 2018</i>	218
2.4.8 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membangun Pos Keamanan Lingkungan Menurut Provinsi, 2011,2014, dan 2018 <i>The Number and The Percentage of Villages/Kelurahan with Citizen Efforts to Maintain Security by Built Security Post by Province, 2011,2014, and 2018</i>	219
2.4.9 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membentuk Regu Keamanan Lingkungan Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Number and The Percentage of Villages/Kelurahan with Citizen Efforts to Maintain Security by Forming Neighborhood Security Team by Province, 2011,2014, and 2018</i>	220

2.4.10	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Menambah Anggota Hansip/Linmas Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Number and The Percentage of Villages/Kelurahan with Citizen Efforts to Maintain Security by Adding the Number of Neighborhood Security Members by Province, 2011,2014, and 2018</i>	221
2.4.11	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Memeriksa Setiap Warga Luar Desa yang Masuk (Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan*) Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018 <i>The Number and The Percentage of Villages/Kelurahan with Citizen Efforts to Maintain Security by Checking Every Outsider Who Enter the Villages/Kelurahan (Reporting Guests Staying More than 24 Hours to Neighborhood Officials) by Province, 2011,2014, and 2018.....</i>	222
2.4.12	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2014 <i>The Number of Villages/Kelurahan by Existence of Police Stations and Easiness of Access to Police Stations by Province, 2014</i>	223
2.4.13	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2018 <i>The Number of Villages/Kelurahan by Existence of Police Stations and Easiness of Access to Police Stations by Province, 2018</i>	224
2.4.14	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2014 <i>The Percentage of Villages/Kelurahan by Existence of Police Stations and Easiness of Access to Police Stations by Province, 2014</i>	225

2.4.15	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2018 <i>The Percentage of Villages/Kelurahan by Existence of Police Stations and Easiness of Access to Police Stations by Province, 2018</i>	226
III. KORBAN KEJAHATAN/VICTIMS OF CRIME		
Sumber Data/Source: Survei Sosial Ekonomi Nasional/ National Socio-Economic Survey		
3.1.1	Persentase Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang Dialami, 2018-2019 <i>The Percentage of Crime Victims by Type of Crime Experienced, 2018-2019</i>	228
3.1.2	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2018-2019 <i>The Percentage of Crime Victims by Province, 2018-2019</i>	229
3.1.3	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin, 2018-2019 <i>The Characteristics of Crime Victims by Sex, 2018-2019</i>	230
3.1.4	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur, 2018-2019 <i>The Characteristics of Crime Victims by Age Group, 2018-2019</i>	231
3.1.5	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2018-2019 <i>The Percentage of Theft Victims by Province, 2018-2019</i>	232
3.1.6	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Penganiayaan Menurut Provinsi, 2018-2019 <i>The Percentage of Assault Victims by Province, 2018-2019</i>	233

3.1.7	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Menurut Provinsi, 2018-2019 <i>The Percentage of Robbery Victims by Province, 2018-2019</i>	234
3.1.8	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pelecehan Seksual dengan Kekerasan Menurut Provinsi, 2018-2019 <i>The Percentage of Sexual Harassment with Violence Victims by Province, 2018-2019</i>	235
3.1.9	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Lainnya Menurut Provinsi, 2018-2019 <i>The Percentage of Victims of Other Crimes by Province, 2018-2019</i>	236
3.1.10	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2018-2019 <i>The Percentage of Population of Crime Victims Reporting to the Police by Province, 2018-2019</i>	237
3.1.11	Persentase Penduduk yang Pernah Melapor dan Mendapatkan/Ditemani Bantuan Hukum Menurut Provinsi, 2019 <i>Percentage of Population Who Have Reported and Received/Accompanied by Legal Aid by Province, 2019</i>	238
3.1.12	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melapor ke Polisi Menurut Jenis Kejahatan dan Provinsi, 2019 <i>The Percentage of the Population Victims of Crime Reporting to the Police by Type of Crime and Province, 2019</i>	239

IV. INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) TERKAIT KEAMANAN/INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) RELATED TO SECURITY

**Sumber Data/Source: Survei Sosial Ekonomi Nasional/
National Socio-Economic Survey**

4.1.1	Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2017
-------	--

<i>The Percentage of Households that Feel Safe Walk Alone in Their Neighborhood by Province, 2017</i>	242
4.1.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kekhawatiran Ketika Melakukan Perjalanan dari dan Menuju Tempat Kerja/Aktivitas Menurut Provinsi, 2017 <i>The Percentage of Households by Concern When Travelling to and from Workplace/Place of Activity by Province, 2017</i>	243
4.1.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Kekhawatiran Ketika Meninggalkan Rumah dalam Keadaan Tidak Berpenghuni Menurut Provinsi, 2017 <i>The Percentage of Households by Concerns When Leaving Their Homes Uninhabited by Province, 2017</i>	244
4.1.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Pengamanan yang Digunakan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal, 2017 <i>The Percentage of Households by Type of Security Used in the Neighborhood, 2017</i>	245
4.1.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Pengamanan yang Digunakan di Tempat Tinggal/Rumah, 2017 <i>The Percentage of Households by Type of Security Used in Residence/House, 2017</i>	246

PENGHITUNGAN SAMPLING ERROR/CALCUALTION OF SAMPLING ERROR

5.1 <i>Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2019 - Laki-laki Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Crime by Province, 2019 - Male</i>	253
5.2 <i>Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2019 - Perempuan Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Crime by Province, 2019 - Female</i>	255
5.3 <i>Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2019 - Perkotaan</i>	

	<i>Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Crime by Province, 2019 - Urban</i>	257
5.4	<i>Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2019 - Perdesaan</i> <i>Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Crime by Province, 2019 - Rural</i>	259
5.5	<i>Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2019 - Total</i> <i>Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Crime by Province, 2019 - Total</i>	261
5.6	<i>Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2019 - Laki-laki</i> <i>Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Theft Crime by Province, 2019 - Male</i>	263
5.7	<i>Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2019 - Perempuan</i> <i>Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Theft Crime by Province, 2019 - Female</i>	265
5.8	<i>Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2019 - Perkotaan</i> <i>Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Theft Crime by Province, 2019 - Urban</i>	267
5.9	<i>Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2019 - Perdesaan</i> <i>Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Theft Crime by Province, 2019 - Rural</i>	269
5.10	<i>Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2019 - Perdesaan</i>	

<i>Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Theft Crime by Province, 2019 - Rural</i>	271
5.11 <i>Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Pernah Melaporkan Kejadian Kejahatan Menurut Provinsi, 2019 - Laki-laki</i> <i>Sampling Error Percentage of Population Who Have Reported Incidents of Crime by Province, 2019 - Male</i>	273
5.12 <i>Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Pernah Melaporkan Kejadian Kejahatan Menurut Provinsi, 2019 - Perempuan</i> <i>Sampling Error Percentage of Population Who Have Reported Incidents of Crime by Province, 2019 - Female</i>	275
5.13 <i>Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Pernah Melaporkan Kejadian Kejahatan Menurut Provinsi, 2019 - Perkotaan</i> <i>Sampling Error Percentage of Population Who Have Reported Incidents of Crime by Province, 2019 - Urban</i>	277
5.14 <i>Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Pernah Melaporkan Kejadian Kejahatan Menurut Provinsi, 2019 - Perdesaan</i> <i>Sampling Error Percentage of Population Who Have Reported Incidents of Crime by Province, 2019 - Rural</i>	279
5.15 <i>Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Pernah Melaporkan Kejadian Kejahatan Menurut Provinsi, 2019 - Perdesaan</i> <i>Sampling Error Percentage of Population Who Have Reported Incidents of Crime by Province, 2019 - Rural</i>	281

01 PENDAHULUAN

“ Penulisan publikasi Statistik Kriminal 2020 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik kriminal secara berkala dan berkesinambungan





https://www.bps.go.id



BAB I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum, serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Maslow (1943) dalam teori hierarki kebutuhan manusia, rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting.

Rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut memengaruhi



keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

TUJUAN

Penulisan publikasi Statistik Kriminal 2020 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik kriminal secara berkala dan berkesinambungan. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah dalam rangka memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, penyusunan publikasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan yang terjadi di Indonesia.

RUANG LINGKUP

Publikasi ini menyajikan gambaran kejadian kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan yang terjadi di Indonesia, baik pada level provinsi maupun level nasional. Khusus untuk data yang bersumber dari Mabes Polri disajikan menurut wilayah/daerah Kepolisian (Polda) dan nasional.

Sesuai dengan ketersediaan data, untuk keseluruhan statistik dan indikator mengenai kejadian tindak kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan disajikan selama tiga tahun terakhir berturut-turut, yaitu tahun 2017, 2018, dan 2019. Untuk keseluruhan statistik dan indikator mengenai kejadian perkelahian massal disajikan selama tiga periode terakhir, yaitu tahun 2011, 2014, dan 2018.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam beberapa bagian (Bab) yang disusun secara sistematis. Bab I menjelaskan latar belakang dan tujuan penyusunan publikasi. Bab II menyajikan gambaran umum dan perkembangan kejadian kejahatan termasuk kejadian kejahatan berdasarkan data polisi dan gambaran kejadian kejahatan dan konflik secara kewilayahan bersumber dari Podes. Bab III menyajikan data korban kejahatan berdasarkan karakteristik demografi dan sosial ekonomi. Bab IV menyajikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait keamanan. Catatan teknis menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini, meliputi jenis dan sumber data, konsep/definisi, dan penjelasan mengenai statistik/indikator yang disajikan. Pada bagian terakhir terdapat daftar pustaka dan tabel lampiran.



https://www.bps.go.id

02 KEJADIAN KEJAHATAN

“ Jumlah kejadian kejahatan di Indonesia tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya





https://www.bps.go.id



BAB II. KEJADIAN KEJAHATAN

Angka Kejahatan Secara Umum (Nasional)

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Meski demikian perlu kehatian-hatian dalam memaknai angka kejahatan secara umum karena merupakan aritmetika sederhana yang menggabung semua jenis kejahatan dalam perhitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya (Savitz, 1978).

Selama periode tahun 2017-2019, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung menurun. Seperti yang disajikan pada Gambar 2.1.a, data Polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada 2017 sebanyak 336.652 kejadian, menurun menjadi sebanyak 294.281 kejadian pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019 menjadi 269.324 kejadian.

Sejalan dengan *crime total*, tingkat resiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk juga mengalami penurunan selama 3 tahun, yaitu 129 tahun 2017, menjadi 113 tahun 2018, dan menjadi 103 tahun 2019. *Crime rate* merupakan angka yang dapatmenunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya.

Gambar 2.1.a Jumlah Kejahanan, 2017 – 2019



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Gambar 2.1.b Tingkat Risiko Kejahatan, 2017 – 2019**

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

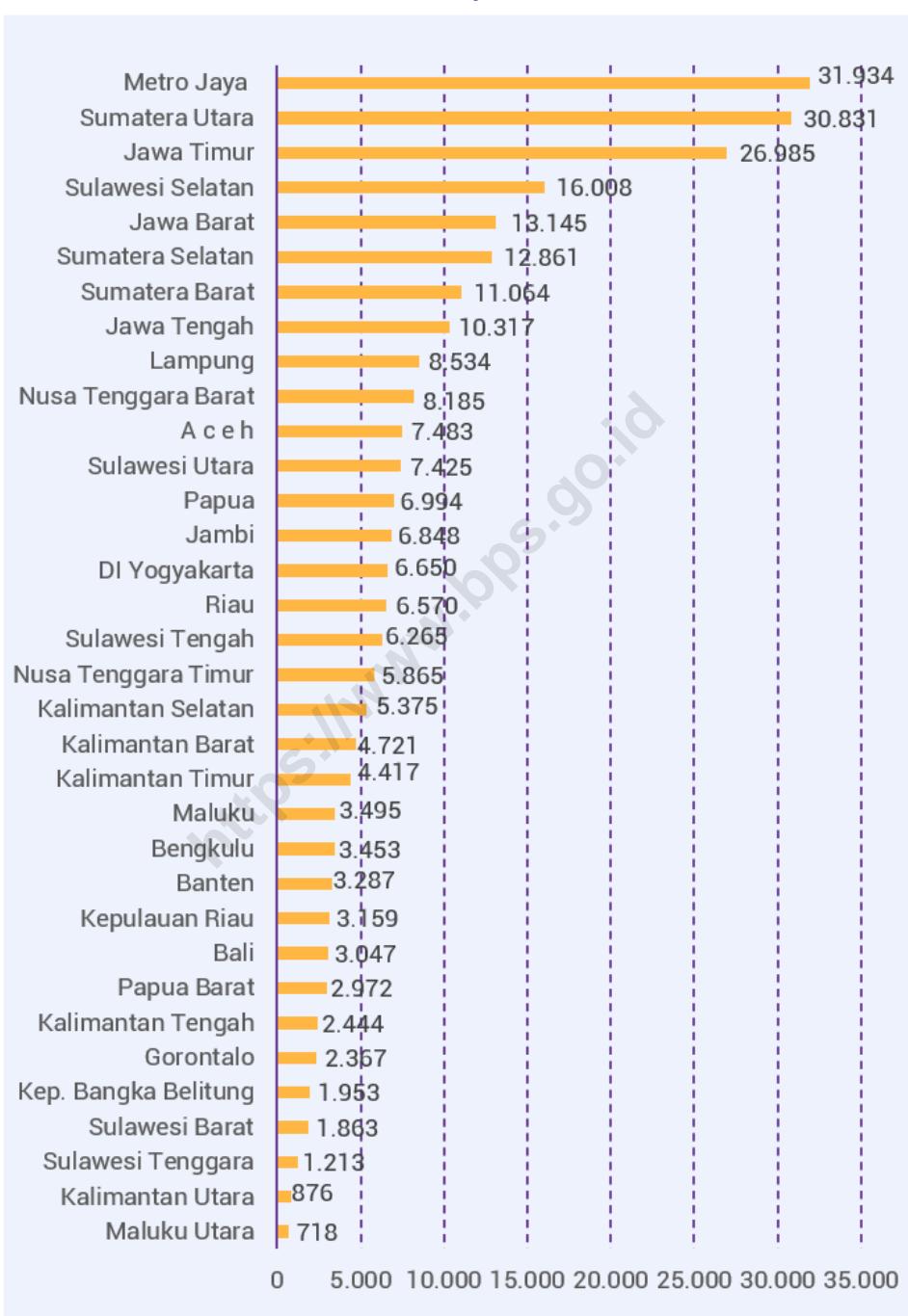
Indikator kriminalitas lainnya selama periode 2017-2019 juga menunjukkan pola perkembangan yang serupa. Selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*) 00.01'33" (1 menit 33 detik) pada tahun 2017 dan menjadi sebesar 00.01'47" (1 menit 47 detik) pada tahun 2018. Intervalnya menjadi semakin panjang pada tahun 2019 yaitu menjadi sebesar 00.01'57" (1 menit 57 detik). Interval waktu yang semakin panjang menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin menurun.

Angka Kejahatan Secara Umum (Provinsi/Polda)

Dari sisi jumlah kejahatan untuk level provinsi/polda selama tahun 2019, Polda Metro Jaya mencatat jumlah kejahatan terbanyak (31.934 kejadian), disusul oleh Polda Sumatera Utara (30.831 kejadian), dan Polda Jawa Timur (26.985 kejadian). Sementara itu, Polda Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara, merupakan tiga wilayah dengan jumlah kejahatan paling sedikit, yaitu berturut-turut sebanyak 1.213; 876; dan 718 (lihat Gambar 2.2).

Terkait *crime rate*, Papua Barat mencatat tingkat kejahatan tertinggi, yakni 325 (setiap 100.000 penduduk) disusul oleh Polda Sulawesi Utara (302) dan Sumatera Utara (216). Sementara wilayah dengan tingkat kejahatan (*crime rate*) terendah adalah Jawa Tengah dan Jawa Barat.

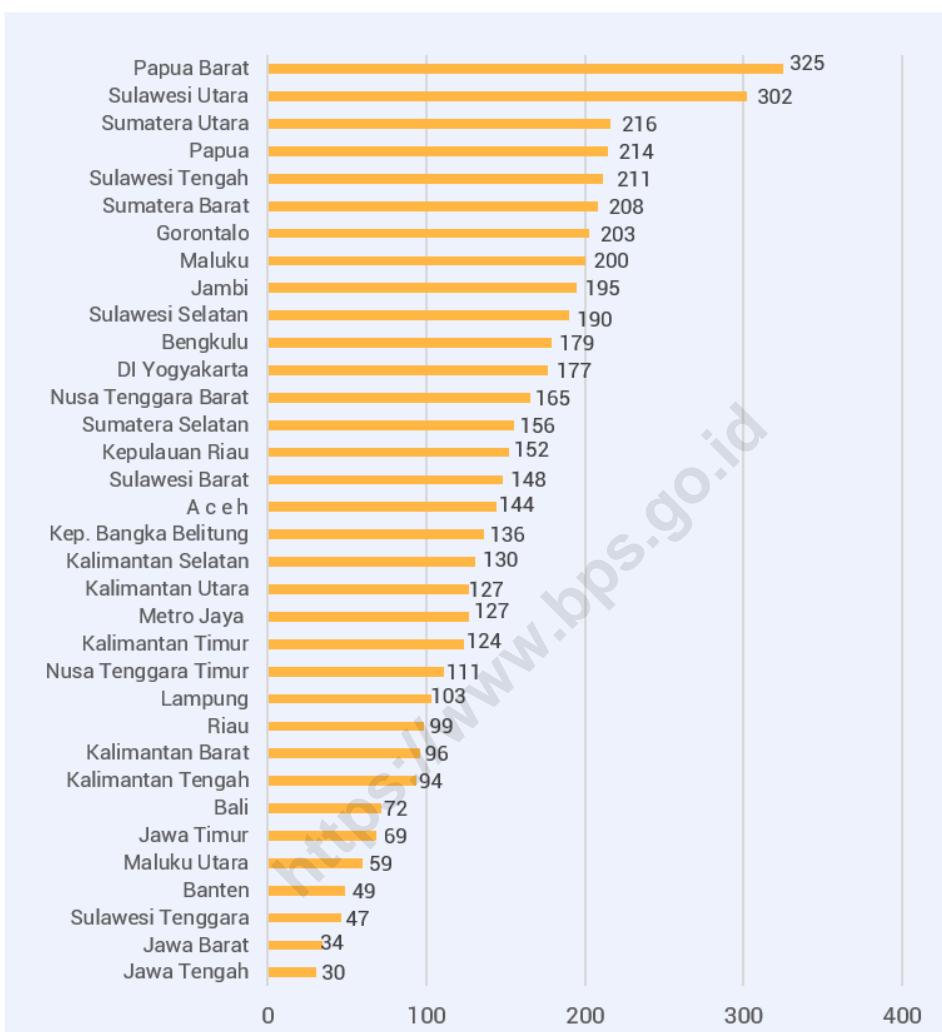
Gambar 2.2 Jumlah Kejahatan yang dilaporkan Menurut Polda/Provinsi, 2019



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri



Gambar 2.3 Tingkat Risiko Terkena Kejahatan Menurut Polda/Provinsi, 2019



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi

Jumlah kejahatan (*crime total*) dan tingkat risiko terkena kejahatan (*crime rate*) hanya menggambarkan peristiwa kejahatan secara umum. Angka kejahatan tersebut dapat lebih bermanfaat khususnya dalam menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan tingkat kerawanan suatu wilayah apabila dilihat secara lebih detail. Publikasi ini mengelompokkan jenis kejahatan berdasarkan beberapa kriteria, yakni:

1. Target dari kejadian kejahatan (orang, harta benda, ketertiban umum, negara, dan sebagainya).
2. Tingkat keseriusan kejahatan (kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap hak milik/barang, dan sebagainya).
3. Bagaimana kejahatan tersebut dilakukan (kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan, kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan, dan sebagainya).

Hal ini secara umum sejalan dengan pengelompokan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan *The International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS) yang digagas Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*) (UNODC, 2015).

Berikut klasifikasi kejahatan yang terdapat di dalam publikasi ini:

No	Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan
1	Kejadian terhadap Nyawa	Pembunuhan
2	Kejadian terhadap Fisik/Badan	Penganiayaan Berat Penganiayaan Ringan Kekerasan dalam Rumah Tangga
3	Kejadian terhadap Kesusastraan	Perkosaan Pencabulan
4	Kejadian terhadap Kemerdekaan Orang	Penculikan Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
5	Kejadian terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi) Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam)
6	Kejadian terhadap Hak Milik/Barang	Pencurian Pencurian dengan pemberatan Pencurian Kendaraan Bermotor Pengrusakan/Penghancuran Barang Pembakaran dengan Sengaja Penadahan
7	Kejadian Terkait Narkotika	Narkotika dan Psikotropika



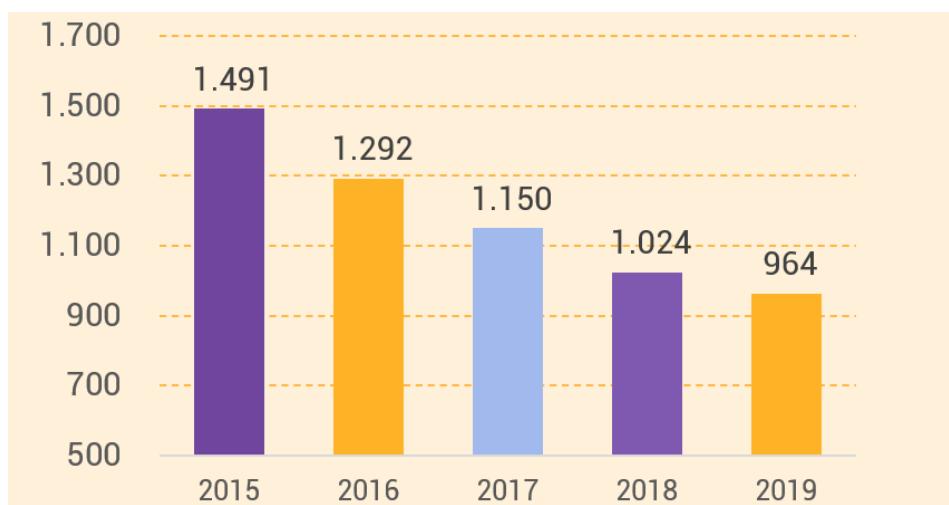
No	Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan
8	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	Penipuan/Perbuatan Curang Penggelapan Korupsi
9	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	Terhadap Ketertiban Umum

Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan)

Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan) merupakan salah satu kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional, selain itu juga merupakan kejahatan yang paling berat hukumannya dalam KUHP Indonesia. Jumlah kejadian kejadian tidak mencerminkan jumlah korban karena pada satu kejadian bisa jadi lebih dari satu orang.

Selama periode lima tahun terakhir, jumlah kejadian kejahanan terhadap nyawa (pembunuhan) di Indonesia cenderung menurun. Gambar 2.4 memperlihatkan jumlah kejadian kejahanan terhadap nyawa pada tahun 2015 hingga 2019 mengalami penurunan Pada tahun 2015 tercatat ada 1.491 kejadian (tertinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir). Angka ini menurun pada tahun 2016 menjadi 1.292 kejadian, tahun 2018 menjadi 1.024 kejadian, dan turun kembali menjadi 964 kejadian pada tahun 2019.

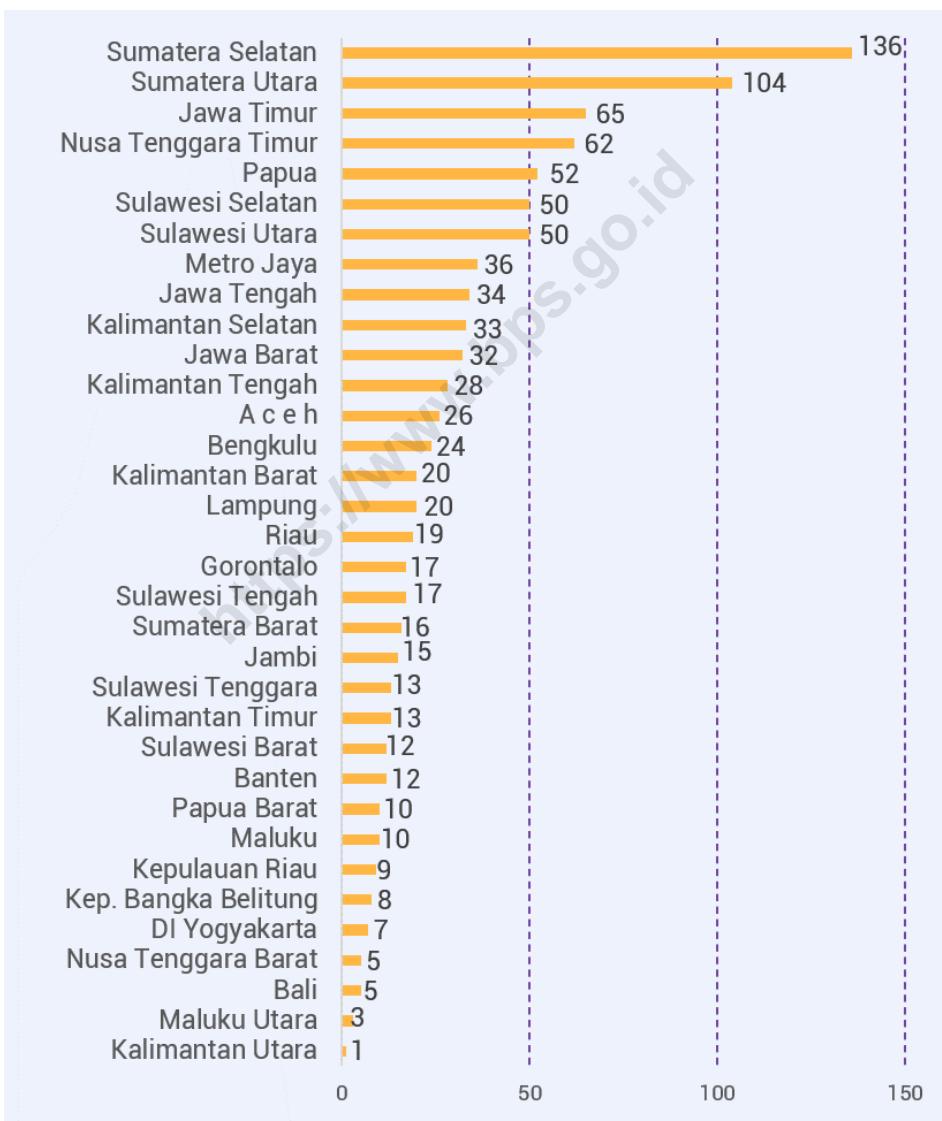
Gambar 2.4 Jumlah Kejadian Kejahanan Terhadap Nyawa, 2015-2019



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Berdasarkan Gambar 2.5 dapat dilihat bahwa tiga Polda yang memiliki jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa terbesar adalah Polda Sumatera Selatan (136 kejadian), Sumatera Utara (104 kejadian), dan Jawa Timur (65 kejadian). Wilayah dengan jumlah kejadian paling sedikit terdapat di Bali, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara dengan jumlah kejadian masing-masing sebanyak lima, tiga, dan satu kejadian.

Gambar 2.5 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa Menurut Polda, 2019



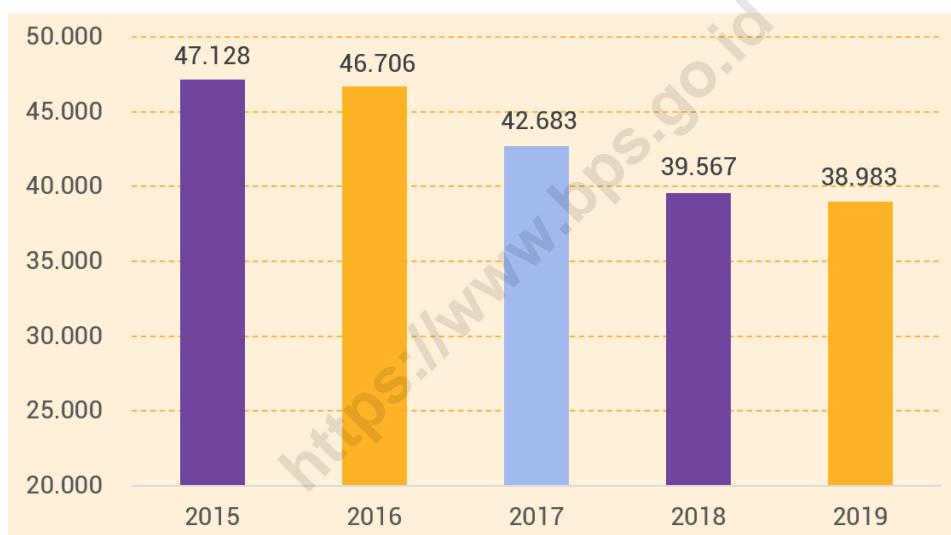
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri



Kejadian Terhadap Fisik/Badan (*Violence*)

Kejadian terhadap fisik termasuk di dalamnya adalah penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk kejadian kejadian terhadap fisik/badan (*violence*) pada 2019 jumlah kejadian di Indonesia cenderung menurun. Berdasarkan Gambar 2.6, pada tahun 2018 terjadi 39.567 kejadian, pada tahun 2019 menurun menjadi 38.983 kejadian.

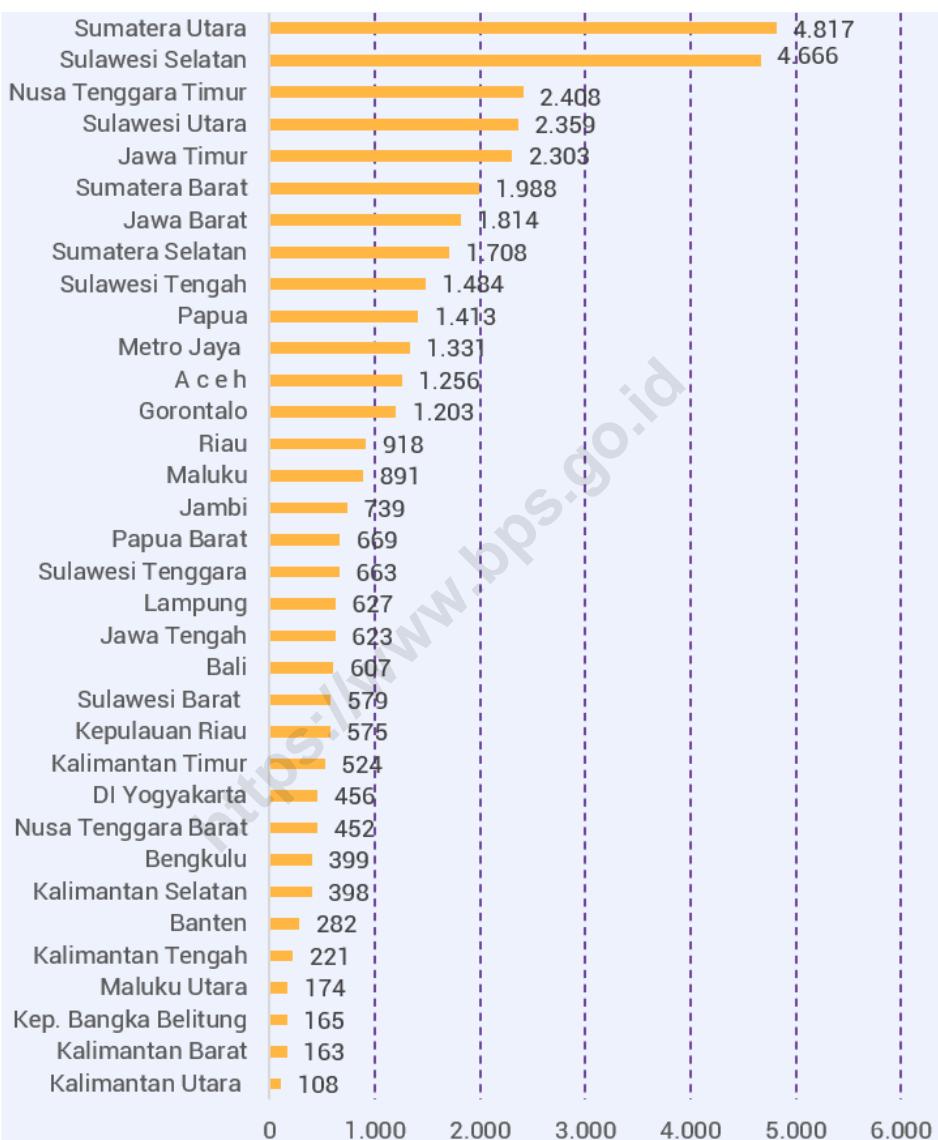
Gambar 2.6 Jumlah Kejadian Kejadian Terhadap Fisik/Badan, 2015-2019



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Dari Gambar 2.7 dapat dilihat bahwa jumlah kejadian kejadian terhadap fisik/badan paling banyak terjadi di Polda Sumatera Utara dengan 4.817 kejadian. Polda dengan jumlah kejadian terbanyak kedua adalah Sulawesi Selatan, yaitu sebanyak 4.666 kejadian. Dua Polda yang terdapat kejadian kejadian terhadap fisik paling sedikit adalah provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, masing-masing sebanyak 163 dan 108 kejadian.

Gambar 2.7 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan Menurut Polda, 2019



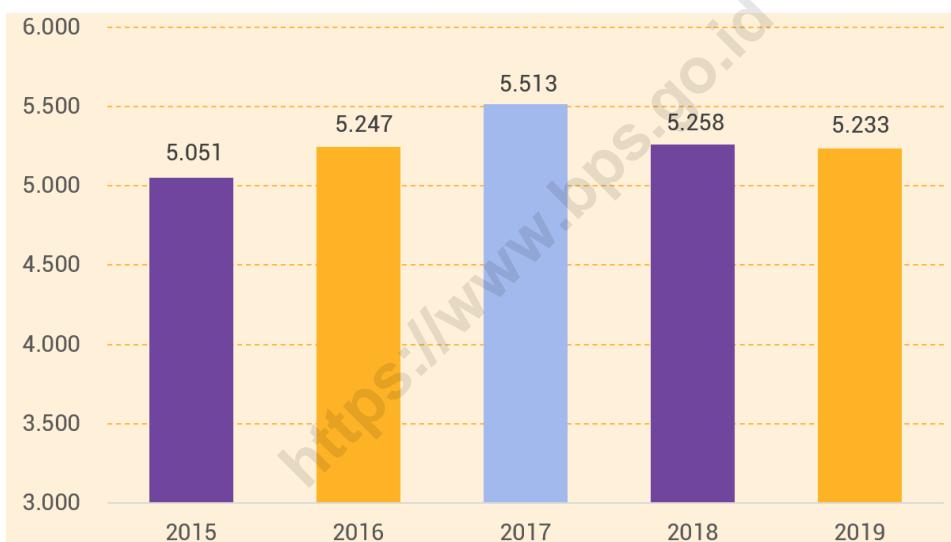
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri



Kejahatan Terhadap Kesusilaan

Dalam klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan terdiri dari jenis kejahatan perkosaan dan pencabulan. Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan (perkosaan dan pencabulan) di Indonesia selama 2015-2019 berfluktuasi. Gambar 2.8 memperlihatkan bahwa pada tahun 2017 tercatat sebanyak 5.513 kejadian kejahatan terhadap kesusilaan, pada tahun 2018 menurun menjadi 5.258 kejadian. Kemudian jumlah kejadian menurun pada tahun 2019 menjadi 5.233 kejadian.

Gambar 2.8 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan, 2015-2019

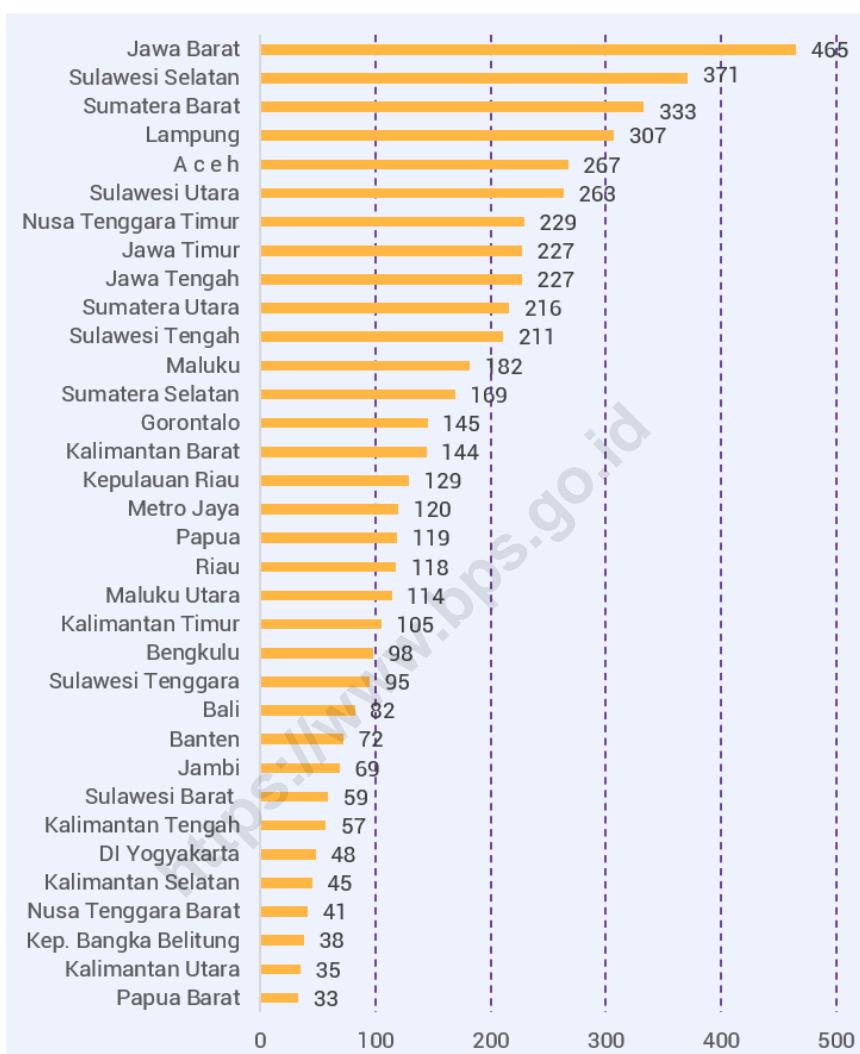


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.9 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Polda Jawa Barat merupakan wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 465 kejadian. Di posisi kedua dan ketiga adalah Polda Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat, masing-masing sebanyak 371 kejadian dan 333 kejadian.

Wilayah dengan jumlah kejadian paling sedikit adalah Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Papua Barat. Jumlah kejadian di ketiga Polda tersebut masing-masing 38 kejadian, 35 kejadian dan 33 kejadian.

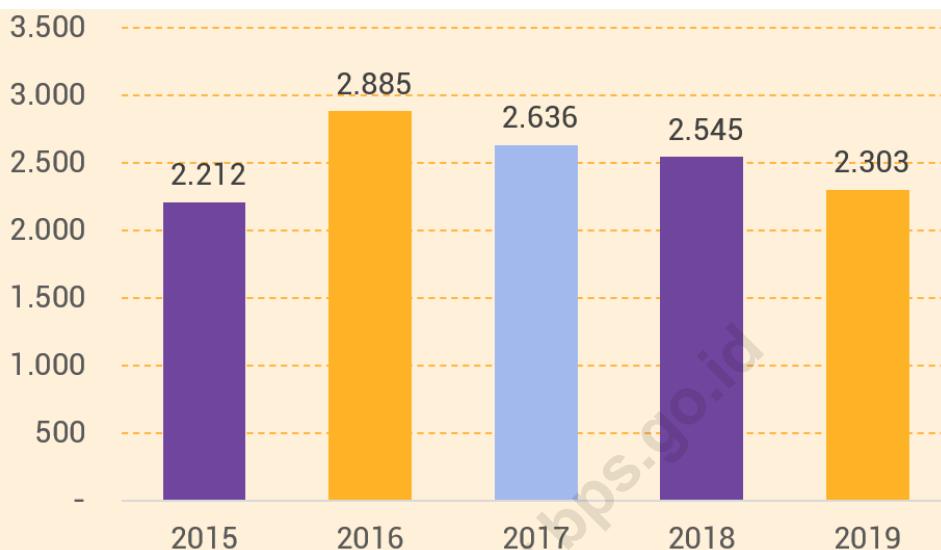
Gambar 2.9 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusailaan Menurut Polda, 2019



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Kejahanan Terhadap Kemerdekaan Orang

Dalam klasifikasi kejahanan terhadap kemerdekaan orang terdiri dari jenis kejahanan penculikan dan mempekerjakan anak di bawah umur. Untuk kejadian kejahanan terhadap kemerdekaan orang pada 2016-2019 cenderung menurun. Berdasarkan Gambar 2.10 pada 2017 terjadi 2.636 kejadian, dan menurun menjadi 2.545 kejadian pada 2018. Kemudian menurun lagi menjadi 2.303 kejadian pada tahun 2019.

**Gambar 2.10 Jumlah Kejadian dan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, 2015 – 2019**

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

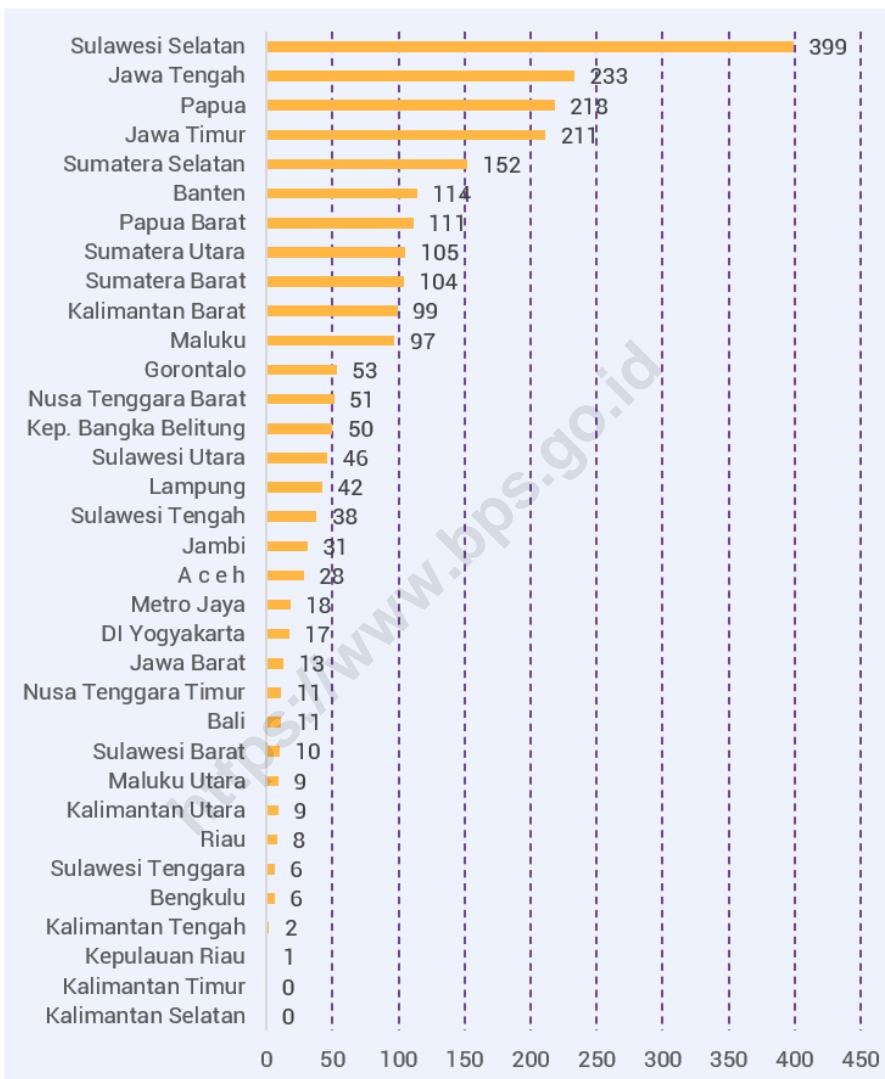
Gambar 2.11 menunjukkan kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang di tahun 2019 berdasarkan polda/provinsi. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa di Sulawesi Selatan terdapat kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang terbanyak yaitu sebanyak 399.

Di posisi kedua terdapat wilayah Jawa Tengah, yaitu sebanyak 233 kejadian. Sementara Wilayah Papua berada di posisi ketiga dengan kejadian sebanyak 218 kejadian. Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur merupakan Polda di posisi terakhir karena di wilayah tersebut kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang untuk tahun 2019 tidak tercatat.

Kejahatan Terhadap Hak/milik dengan Penggunaan Kekerasan

Jenis kejadian terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan ini secara hierarki tergolong tinggi karena selain menyangkut kejadian terhadap properti juga merupakan kejadian terhadap fisik. Yang termasuk dalam kejadian ini adalah adalah Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi), dan Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam).

Gambar 2.11 Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Menurut Polda, 2019

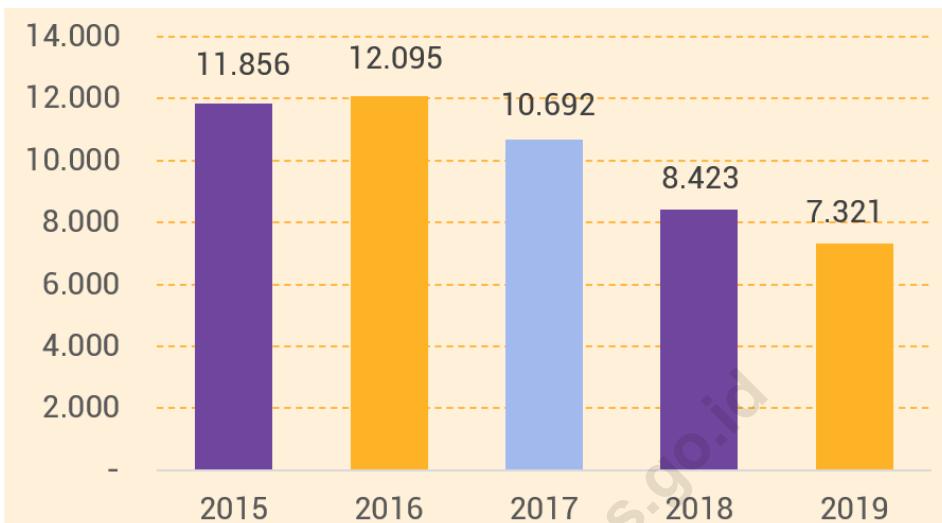


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Pada tahun 2019 jumlah kejadian kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan di Indonesia menurun. Seperti yang disajikan pada Gambar 2.12, jumlah kejadian kejahatan terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan pada tahun 2019 sebanyak 7.321 kejadian, menurun dibanding tahun 2018 sebanyak 8.423 kejadian.



Gambar 2.12 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan, 2015 – 2019



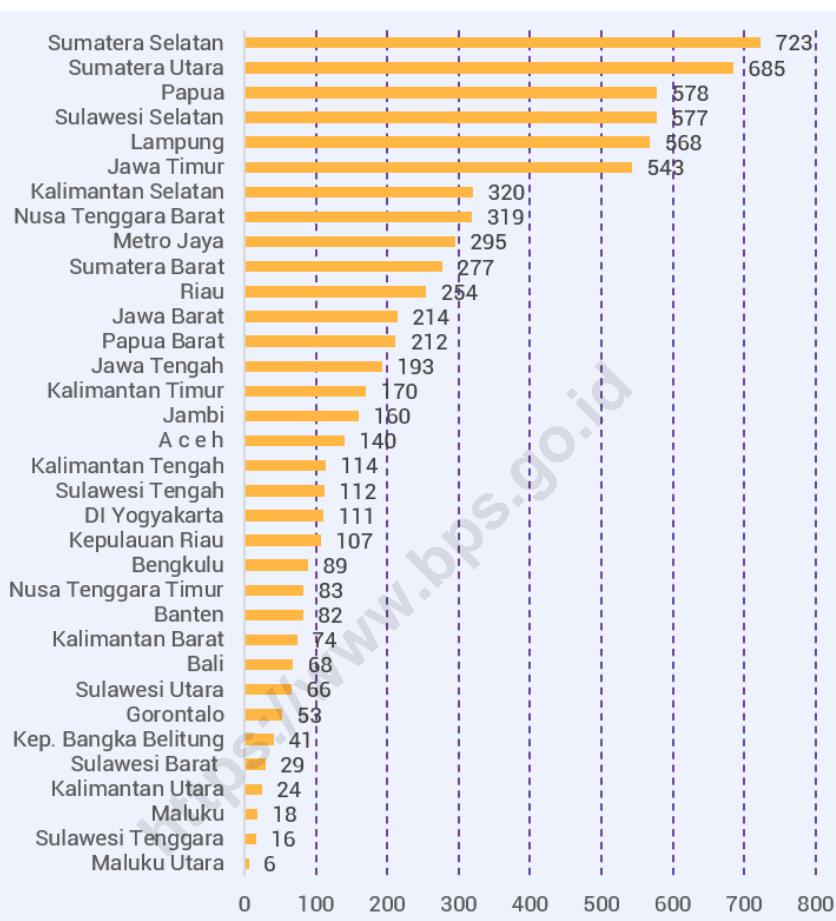
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.13 menunjukkan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang dengan kekerasan di tahun 2019. Wilayah dengan jumlah kejadian terbanyak adalah Polda Sumatera Selatan, yaitu sebanyak 723 kejadian. Di posisi kedua terbanyak adalah Sumatera Utara dengan 685 kejadian. Dua wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan paling sedikit adalah Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara masing-masing terjadi sebanyak 16 dan 6 kejadian.

Kejahanan terhadap Hak/Milik tanpa Penggunaan Kekerasan

Klasifikasi kejahanan terhadap hak/milik tanpa penggunaan kekerasan ini termasuk pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengrusakan/ penghancuran barang, pembakaran dengan sengaja, dan penadahan. Jumlah kejahanan terhadap hak/milik tanpa penggunaan kekerasan selama periode 2017–2019 cenderung menurun. Berdasarkan Gambar 2.14 pada 2017 terjadi 107.042 kejadian, menjadi 90.757 kejadian pada 2018, dan menurun menjadi 80.450 kejadian pada tahun 2019.

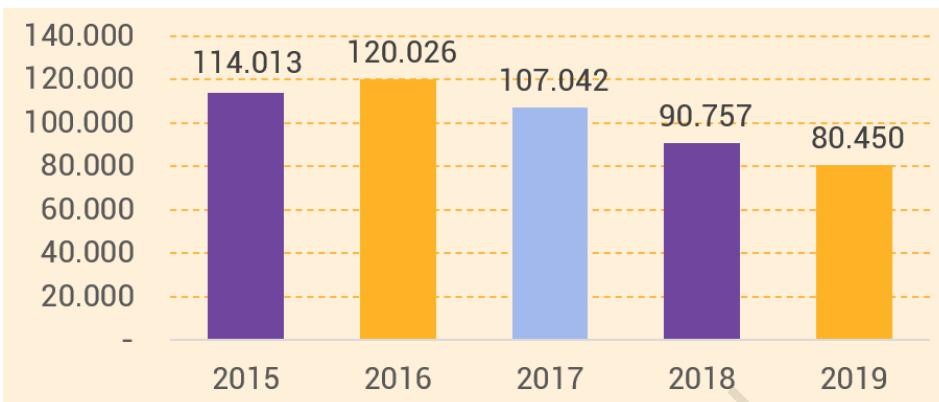
Gambar 2.13 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan Menurut Polda, 2019



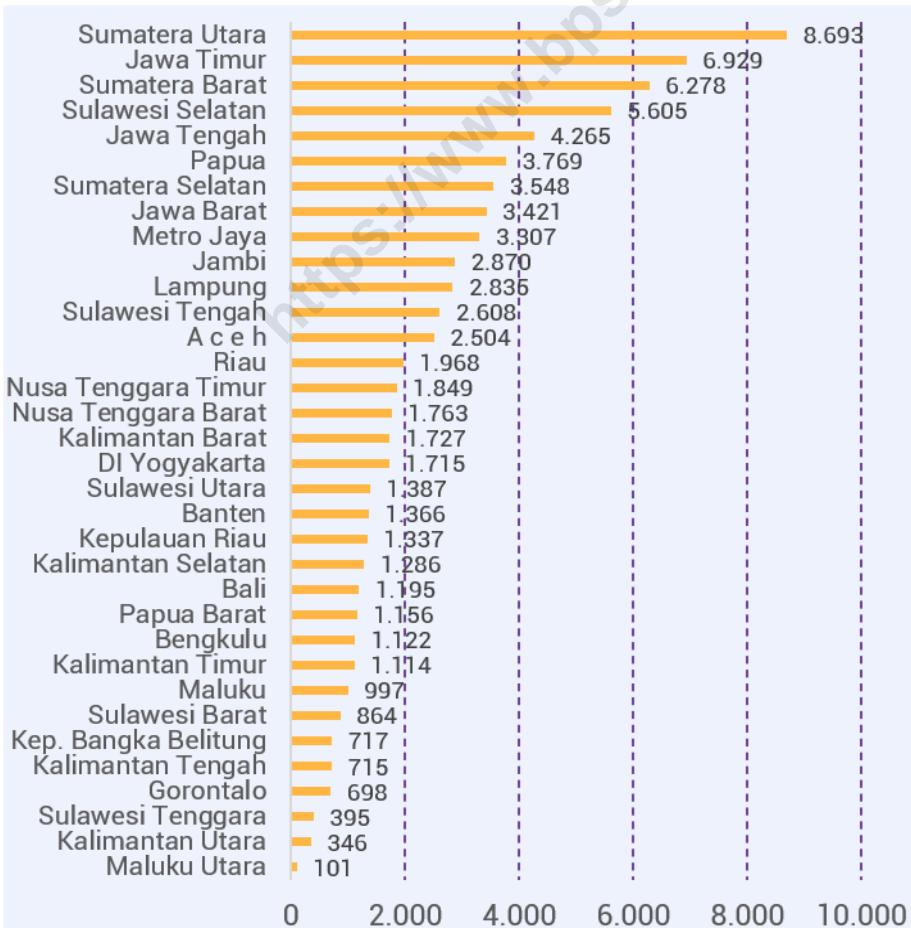
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Kejadian kejahatan pencurian tanpa penggunaan kekerasan merupakan jenis kejahatan yang paling banyak jumlahnya setiap tahunnya. Kejahatan ini banyak didominasi oleh kejahatan pencurian biasa dan pencurian kendaraan bermotor.

Gambar 2.15 menunjukkan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan. Polda Sumatera Utara menduduki peringkat pertama dengan 8.693 kejadian kejahatan. Di posisi kedua terdapat wilayah Jawa Timur dengan 6.929 kejadian. Dua wilayah dengan jumlah kejadian paling sedikit adalah Polda Kalimantan Utara dan Maluku Utara masing-masing sebanyak 346 dan 101 kejadian.

**Gambar 2.14 Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Hak/Milik tanpa Penggunaan Kekerasan, 2015 – 2019**

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.15 Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Hak/Milik tanpa Penggunaan Kekerasan Menurut Polda, 2019

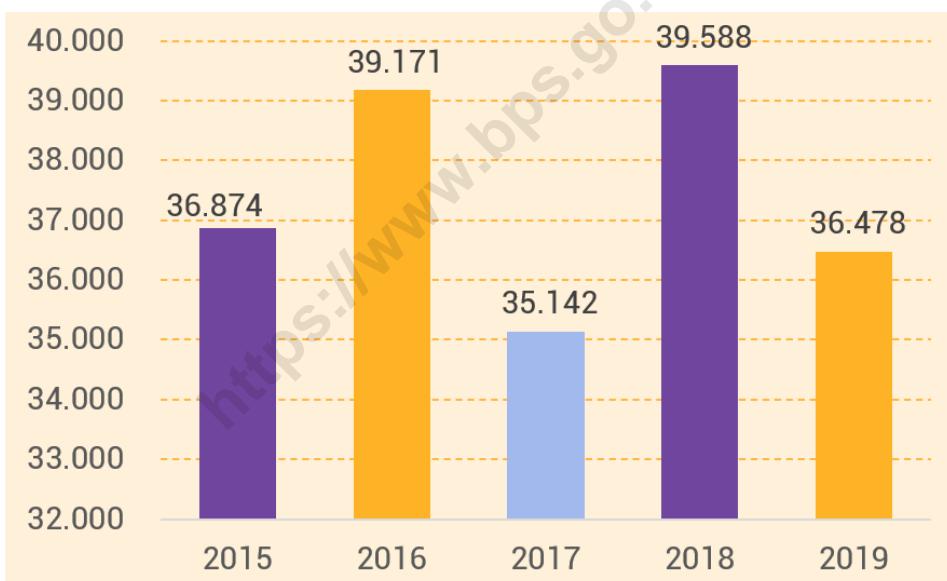
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Kejahatan Terkait Narkotika

Kejahatan terkait narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Pada tahun 2019, jenis kejahatan ini memiliki pola yang mirip dengan jenis kejahatan lainnya. Berdasarkan Gambar 2.16, jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika di Indonesia pada 2015 – 2019 cenderung fluktuatif.

Gambar tersebut memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 39.588 kejadian. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2017 (35.142 kejadian). Namun, pada tahun 2019 angka ini turun menjadi 36.478 kejadian.

Gambar 2.16 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika, 2015 – 2019

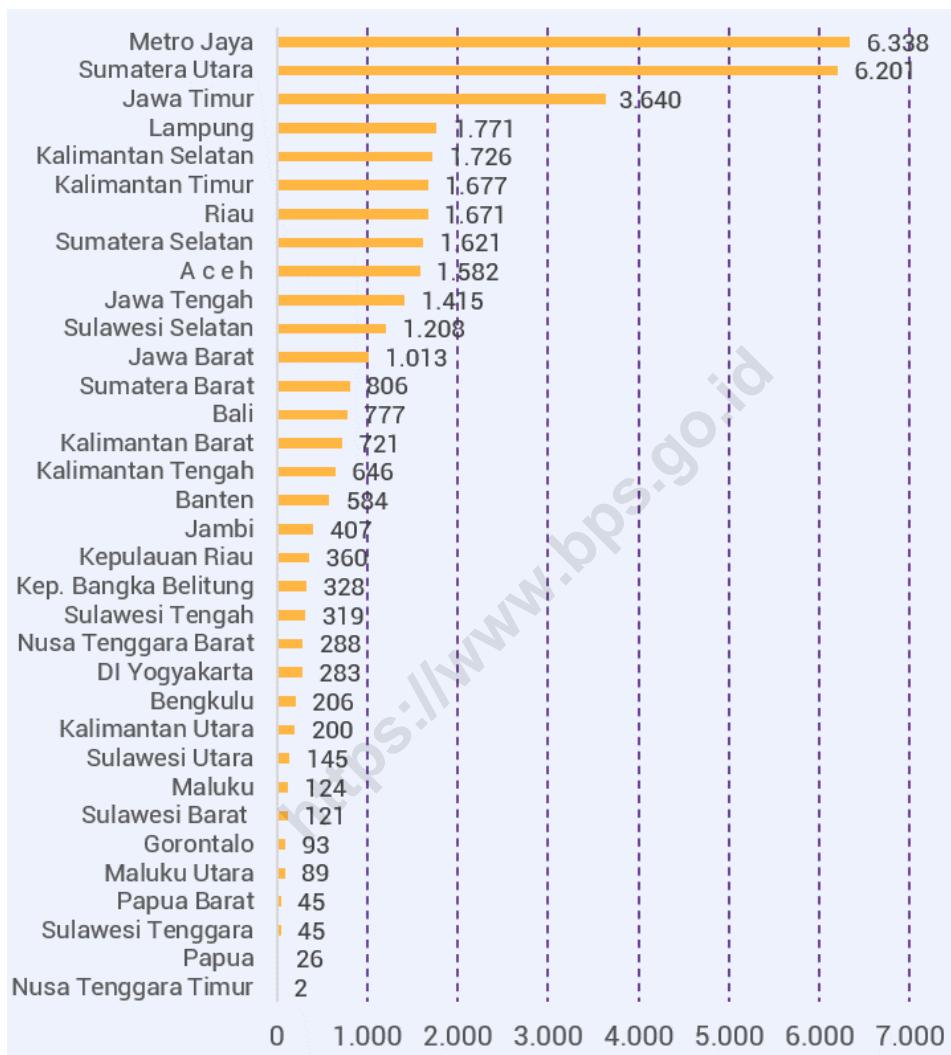


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.17 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 tiga wilayah dengan jumlah kejahatan terkait narkotika paling banyak adalah Metro Jaya sebanyak 6.338 kejadian, Sumatera Utara sebanyak 6.201 kejadian, dan Jawa Timur sebanyak 3.640 kejadian. Gambar 2.17 juga menunjukkan bahwa pada tahun 2019 tiga wilayah dengan jumlah kejahatan terkait narkotika terendah adalah Polda Sulawesi Tenggara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur masing-masing sebanyak 45 kejadian, 26 kejadian, dan 2 kejadian. Sebagai informasi, kejahatan yang termasuk dalam kelompok kejahatan terkait narkotika adalah kejahatan narkotika dan psikotropika.



Gambar 2.17 Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Narkotika Menurut Polda, 2019



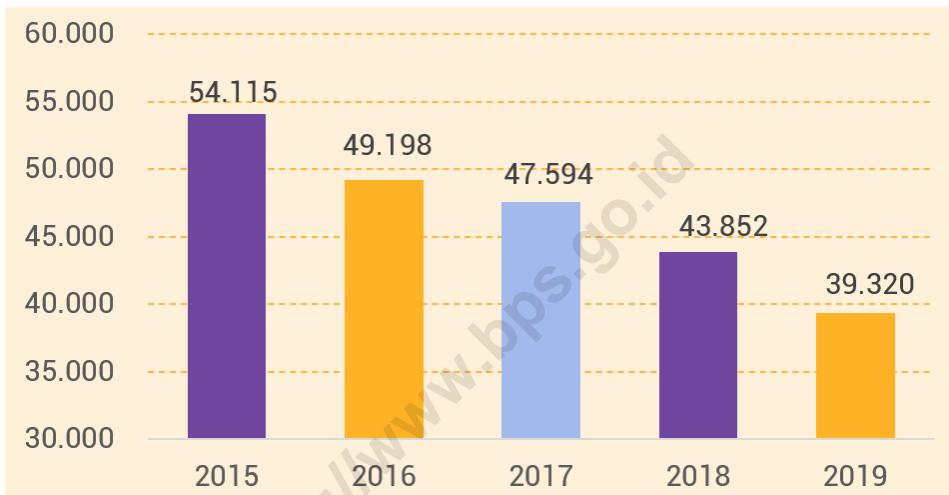
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi

Gambar 2.18 menunjukkan kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi yang tercatat di Polri selama periode 2015–2019 cenderung menurun. Pada 2015 terjadi 54.115 kejadian, pada 2016 tercatat 49.198 kejadian, sementara pada 2017 menjadi 47.594

kejadian, pada 2018 menjadi 43.852 kejadian. Kemudian pada 2019 turun kembali menjadi 39.320 kejadian.

Gambar 2.18 Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi, 2015 – 2019



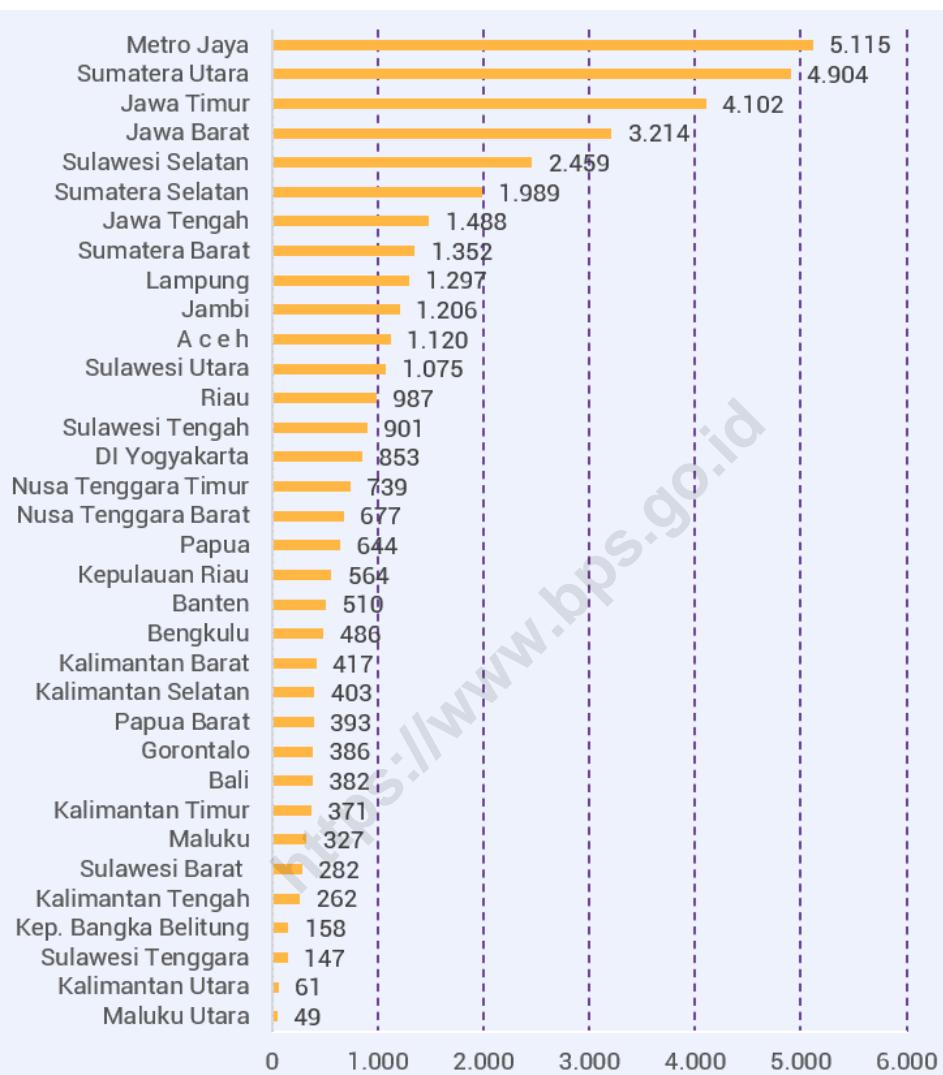
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.19 menunjukkan bahwa Polda dengan jumlah kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi terbanyak adalah Metro Jaya, yaitu sebanyak 5.115 kejadian. Polda dengan jumlah kejadian kedua terbanyak adalah Polda Sumatera Utara, yaitu sebanyak 4.904 kejadian.

Gambar 2.19 juga menunjukkan wilayah Kalimantan Utara dan Maluku Utara adalah wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan ini yang paling sedikit, yaitu masing-masing sebanyak 61 dan 49 kejadian. Penipuan merupakan jenis kejahatan yang paling banyak terjadi dalam klasifikasi kejahatan ini.



Gambar 2.19 Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi Menurut Polda, 2019



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambaran Kejadian Kejahatan Secara Kewilayah

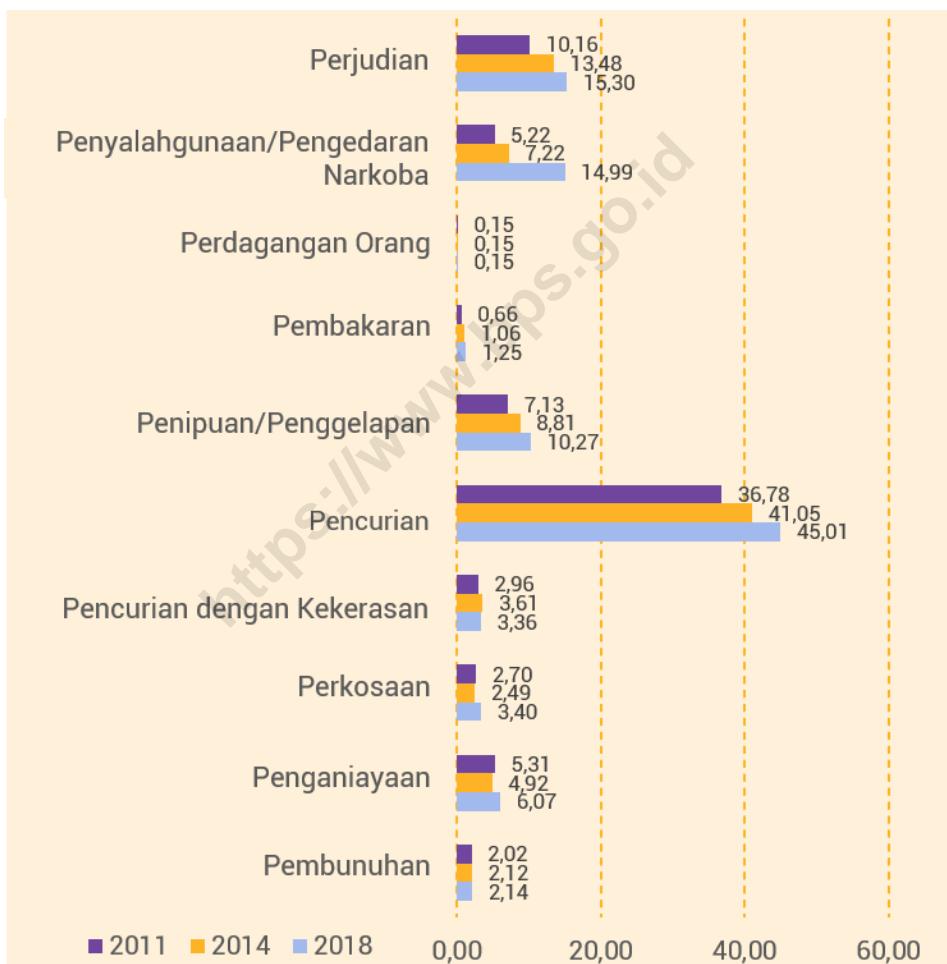
Data kejadian kejahatan pada bahasan sebelumnya bersumber dari data Polri yang menggunakan pendekatan pelaku. Selain menggunakan pendekatan tersebut, kejadian kejahatan juga dapat dilihat berdasarkan ruang lingkup kewilayahan/regional.

Bagian ini akan memperlihatkan gambaran situasi dan perkembangan kejadian kejahatan yang dialami oleh masyarakat berdasarkan cakupan jumlah desa/kelurahan yang pernah mengalami

kejadian kejahatan. Data ini diperoleh dari Pendataan Potensi Desa yang dilakukan oleh BPS tiap tiga tahun.

Pada Gambar 2.20 dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2011-2018, jenis kejahatan pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi di desa/kelurahan di Indonesia. Jumlah kejadian pencurian tersebut mencapai sekitar 36-45 persen dari seluruh desa.

Gambar 2.20 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, 2011, 2014, dan 2018



Sumber: Pendataan Potensi Desa, BPS

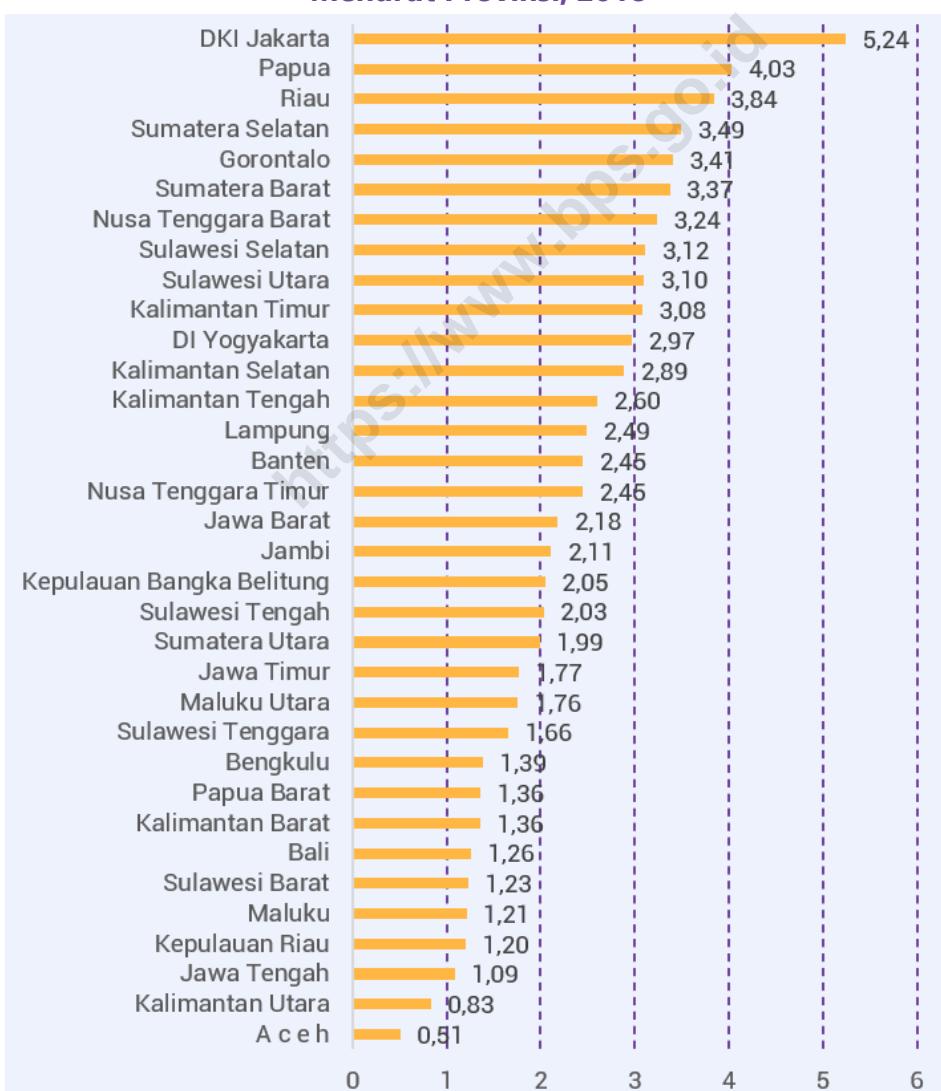
Persentase desa yang mengalami kejadian pencurian pada periode 2011-2018 terus meningkat. Pada tahun 2011 terdapat 36,78 persen desa yang mengalami kejadian pencurian. Pada tahun 2014 angka tersebut naik menjadi 41,05 persen dan pada tahun 2018 menjadi 45,01 persen. Selama tahun 2018, dari beberapa jenis kejahatan yang diukur, terdapat enam jenis kejahatan yang mengalami peningkatan,



yakni jenis kejahatan pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, pencurian, penipuan/penggelapan, pembakaran dengan sengaja, penyalahgunaan/pengedaran narkoba, dan perjudian.

Berdasarkan Gambar 2.21 dari sisi jumlah, lima provinsi dengan persentase desa/kelurahannya yang pernah terjadi kejahatan pembunuhan terbesar (perbandingan jumlah desa/ kelurahan yang mengalami kejadian dibagi total jumlah desa/kelurahan di satu provinsi), berturut-turut adalah DKI Jakarta (5,24 persen), Papua (4,03 persen), Riau (3,84 persen), dan Sumatera Selatan (3,49 persen).

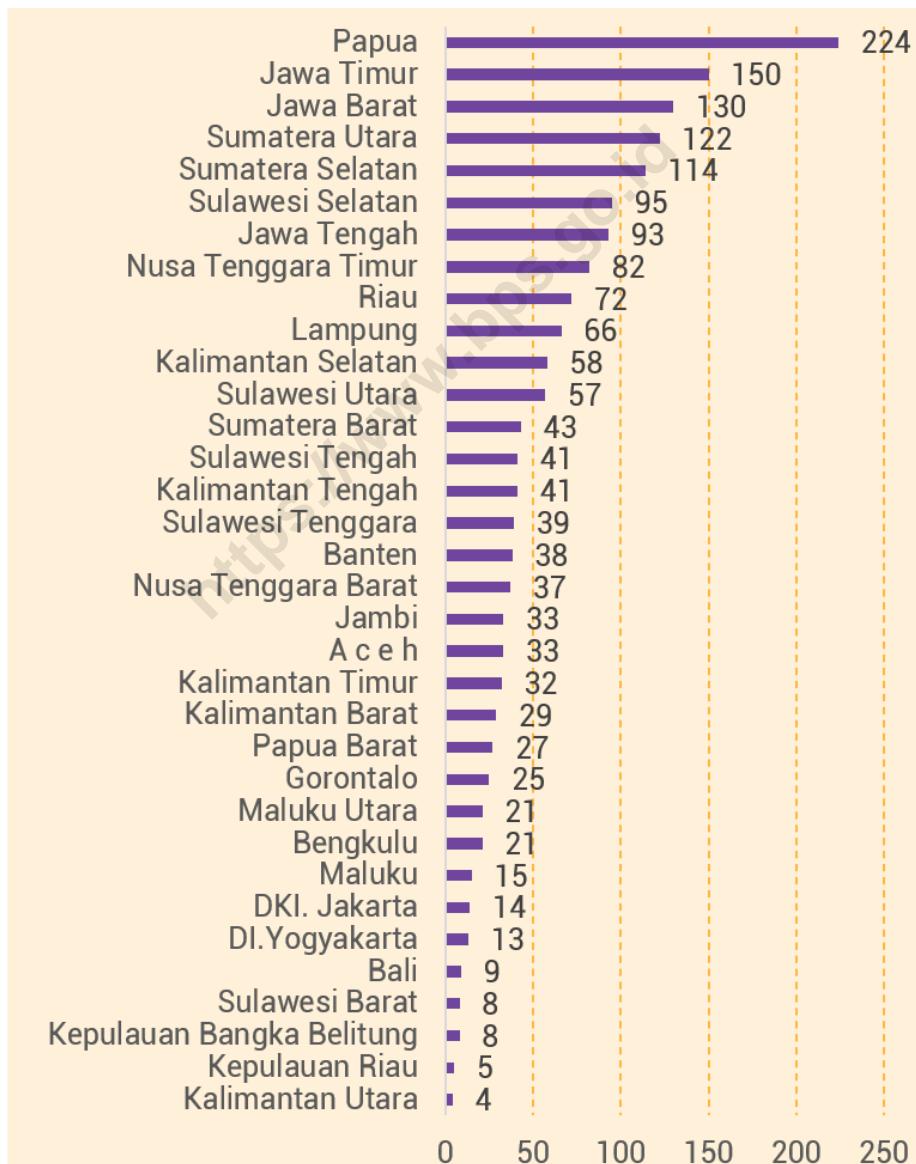
Gambar 2.21 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018



Sumber: Pendataan Potensi Desa, BPS

Gambar 2.22 menyajikan jumlah desa/kelurahan yang mengalami kejadian kejahatan selama setahun terakhir. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa tiga provinsi dengan jumlah desa/kelurahan yang pernah ada kejadian kejahatan pembunuhan dengan jumlah paling besar adalah Papua, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Gambar 2.22 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018

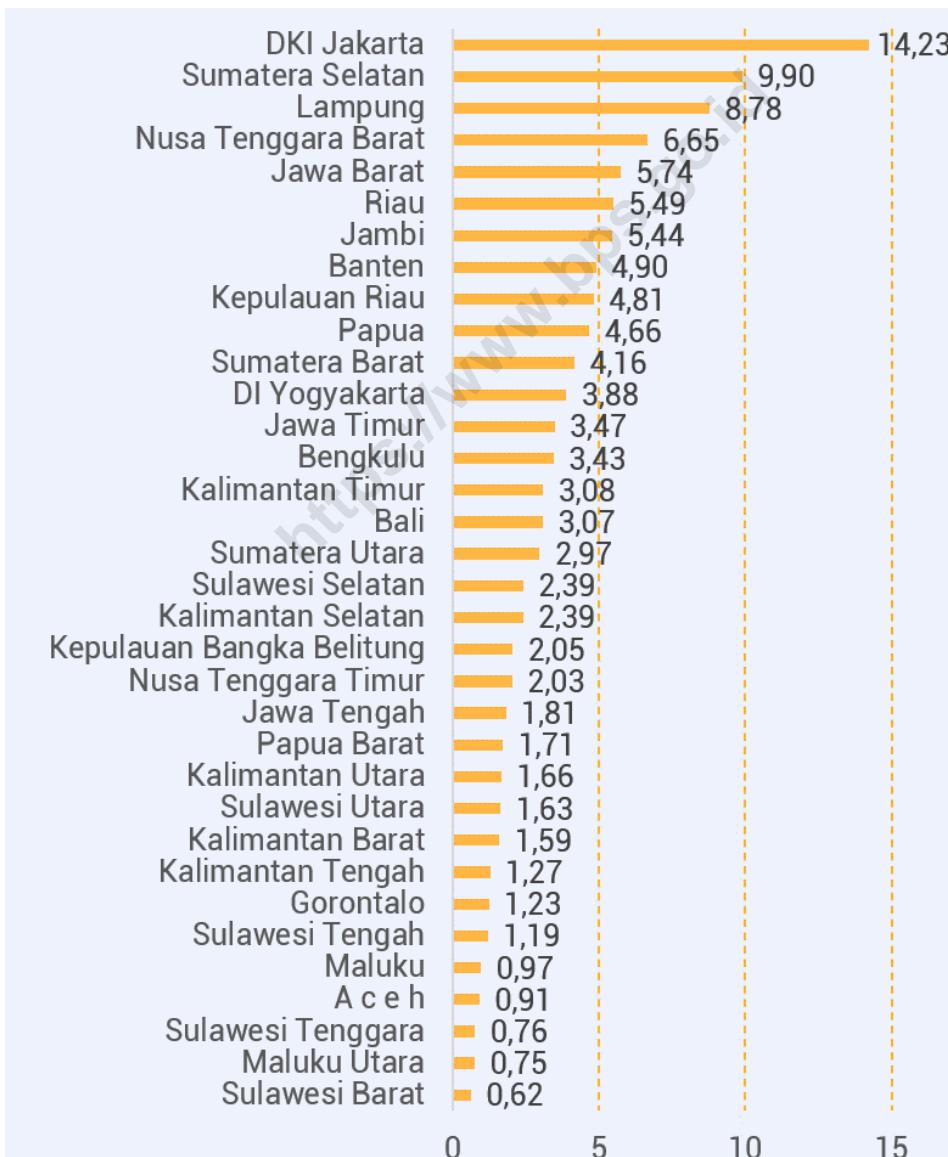


Sumber: Pendataan Potensi Desa, BPS



Berdasarkan Gambar 2.23, pada 2018 rentang persentase kejadian kejahatan pencurian dengan kekerasan pada 34 provinsi berkisar 0,62–14,23 persen. Tiga provinsi yang persentase desa/kelurahannya yang pernah terjadi kejadian pembunuhan terbesar (perbandingan jumlah desa/kelurahan yang mengalami kejadian dibagi total jumlah desa/kelurahan di satu provinsi), berturut-turut adalah DKI Jakarta (14,23 persen), Sumatera Selatan (9,90 persen), dan Lampung (8,78 persen).

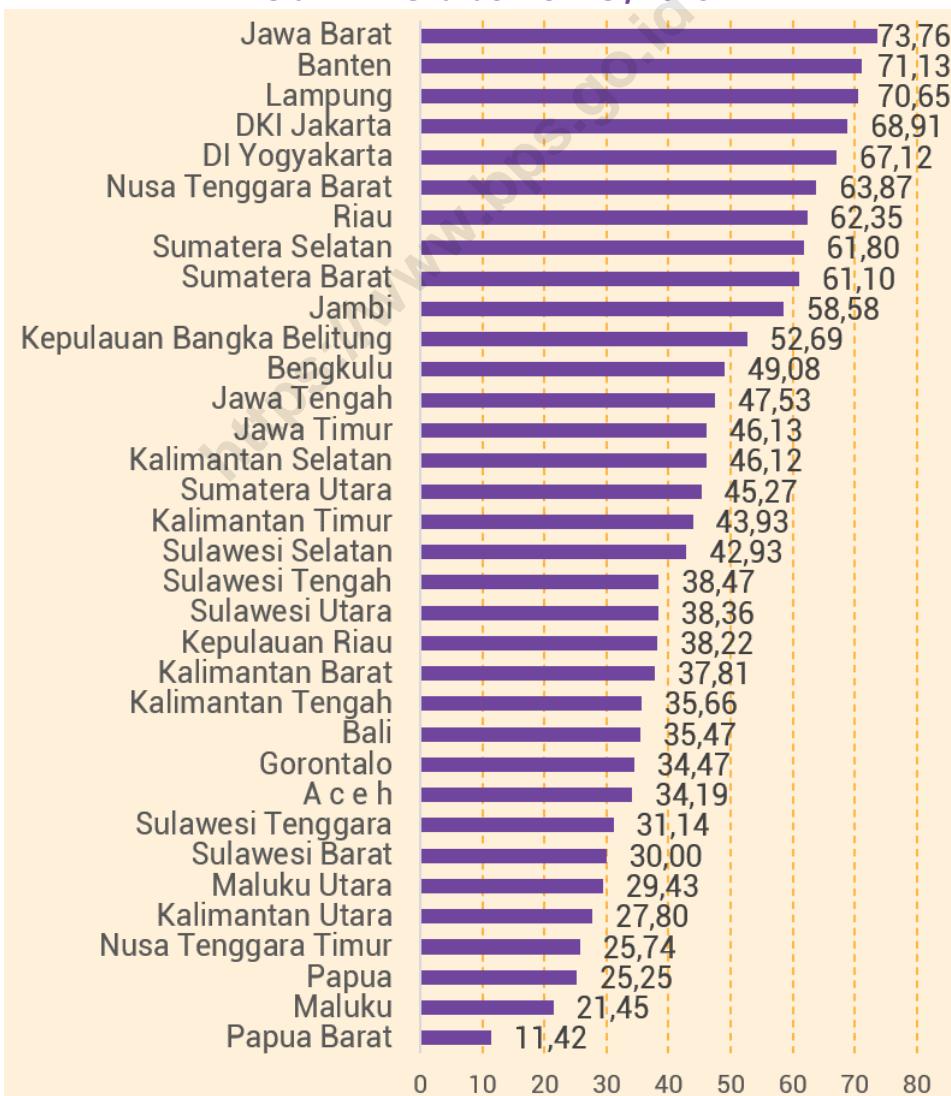
Gambar 2.23 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018



Sumber: Pendataan Potensi Desa, BPS

Untuk kejadian pencurian tanpa kekerasan seperti yang disajikan pada Gambar 2.24, rentang persentase desa/kelurahan yang mengalami pencurian tanpa kekerasan selama tahun 2018 berada pada kisaran 11,42–73,76 persen dari total desa/kelurahan di masing-masing provinsi. Tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahannya yang pernah terjadi kejadian pencurian (tanpa kekerasan) terbesar (perbandingan jumlah desa/kelurahan yang mengalami kejadian dibagi total jumlah desa/kelurahan di satu provinsi), berturut-turut adalah Jawa Barat (73,76 persen), Banten (71,13 persen), dan Lampung (70,65 persen).

Gambar 2.24 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian (Tanpa Kekerasan) Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018

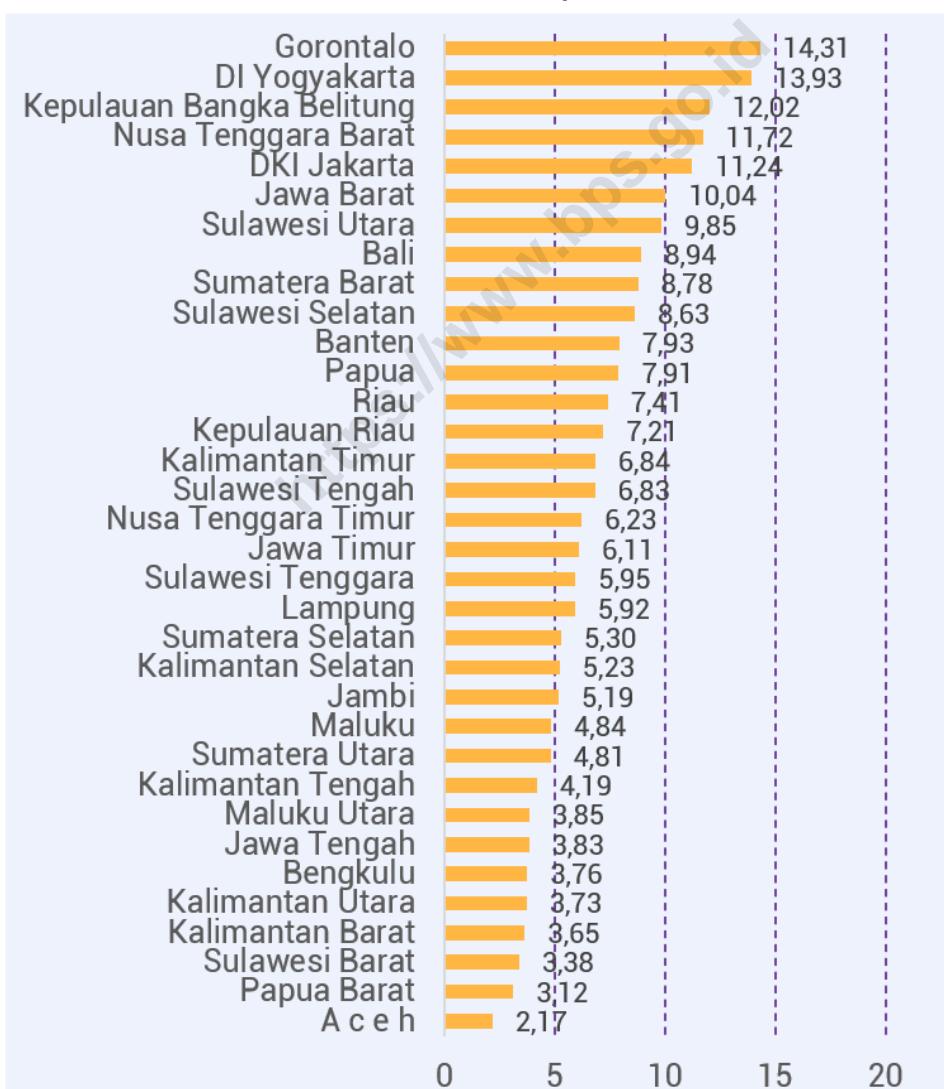


Sumber: Pendataan Potensi Desa, BPS



Untuk kejadian penganiayaan seperti yang disajikan pada Gambar 2.25, rentang persentase desa/kelurahan yang mengalami penganiayaan selama tahun 2018 berada pada kisaran 2,17–14,31 persen dari total desa/kelurahan di masing-masing provinsi. Tiga provinsi yang persentase desa/kelurahannya pernah terjadi kejadian penganiayaan terbesar (perbandingan jumlah desa/kelurahan yang mengalami kejadian dibagi total jumlah desa/kelurahan di satu provinsi) berturut-turut adalah Gorontalo (14,31 persen), DI Yogyakarta (13,93 persen), dan Kepulauan Bangka Belitung (12,02 persen).

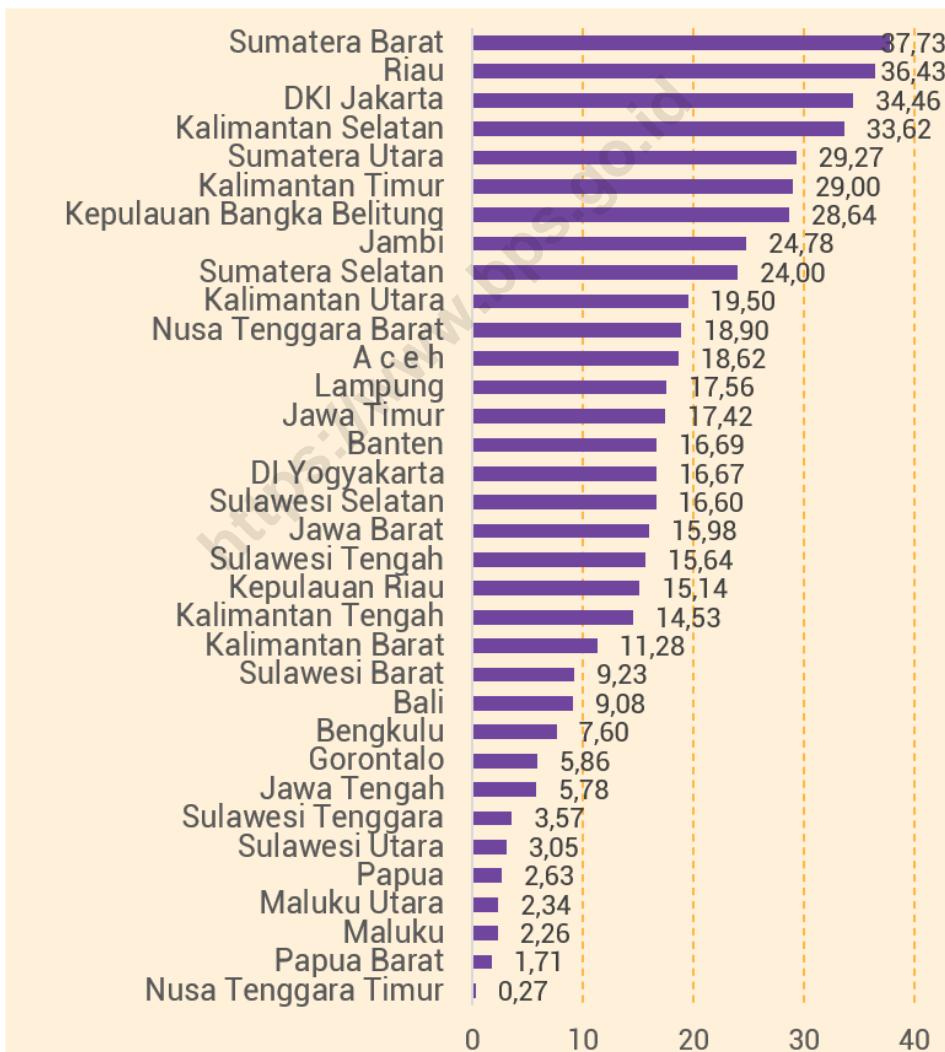
Gambar 2.25 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018



Sumber: Pendataan Potensi Desa, BPS

Dari keseluruhan jenis kejahatan yang terjadi selama periode tahun 2018 di berbagai wilayah di Indonesia, salah satu jenis peristiwa yang mendapat perhatian khusus adalah kejadian penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Seperti yang disajikan pada Gambar 2.26, kejadiannya telah merebak di sejumlah desa/kelurahan pada semua provinsi di Indonesia, seperti halnya kejadian kejahatan pencurian dan penganiayaan.

Gambar 2.26 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018



Sumber: Pendataan Potensi Desa, BPS



Cakupan kejadian kejahatan narkoba pada hampir keseluruhan provinsi selama periode tahun 2018 berada pada kisaran 0,27–37,73 persen dari total desa/kelurahan di masing-masing provinsi. Tiga provinsi yang persentase desa/kelurahannya yang pernah terjadi kejadian penyalahgunaan dan peredaran narkoba terbesar (perbandingan jumlah desa/kelurahan yang mengalami kejadian dibagi total jumlah desa/kelurahan di satu provinsi), berturut-turut adalah Sumatera Barat (37,73 persen), Riau (36,43 persen), dan DKI Jakarta (34,46 persen).

Konflik Massal

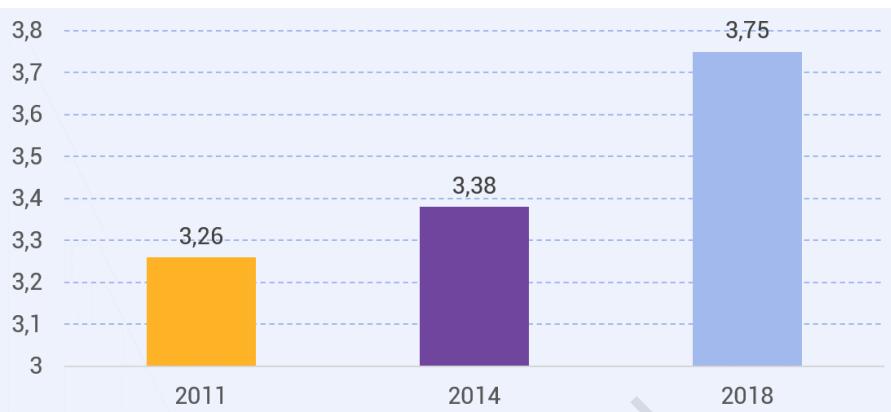
Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai fenomena konflik berupa perkelahian massal yang terjadi di Indonesia serta perkembangannya selama satu dekade terakhir. Aspek yang dilihat meliputi jenis dan cakupan kejadian perkelahian massal serta upaya penyelesaiannya. Selain dapat dikategorikan sebagai kejahatan, perkelahian massal dianggap sebagai suatu kondisi yang dapat menganggu keamanan.

Secara etimologi konflik berasal dari kata kerja Latin "*configere*" yang berarti saling memukul (Hafidhuddin, 2001). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekconan, perselisihan, pertentangan. Secara terminologi, Soekanto (2005) mendefinisikan pertentangan atau pertikaian (konflik) adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Konflik yang ekstrim akan berujung pada kekerasan dan menimbulkan perkelahian massal.

Data yang menjadi sumber utama merupakan data kewilayahan (*spatial data*) yang diperoleh dari data Statistik Potensi Desa (Podes). Unit observasi dalam pengumpulan data statistik Podes adalah seluruh desa/kelurahan di wilayah Indonesia. Sejalan dengan itu, kajian mengenai perkelahian massal pada bagian ini secara umum akan dilihat dari cakupan jumlah atau persentase desa/kelurahan yang menjadi ajang atau lokasi kejadian tersebut.

Seperti yang disajikan pada Gambar 2.27, hasil Podes 2011, 2014, dan 2018 memperlihatkan kecenderungan peningkatan jumlah dan persentase desa/kelurahan yang mengalami perkelahian massal. Jumlah desa/kelurahan yang mengalami kejadian perkelahian massal selama setahun terakhir terus meningkat dari 3,26 persen desa/kelurahan pada tahun 2011 menjadi 3,38 persen desa/kelurahan pada tahun 2014, kemudian pada 2018 meningkat kembali menjadi 3,75 persen pada 2018.

Gambar 2.27 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal, 2011 2014, dan 2018



Sumber: Pendataan Potensi Desa, BPS

Jenis kejadian perkelahian massal yang dicakup dalam Podes 2018 meliputi perkelahian antar kelompok warga, perkelahian warga antar desa/kelurahan, perkelahian warga dengan aparat keamanan, perkelahian warga dengan aparat pemerintah, perkelahian antar pelajar, dan perkelahian antar suku. Hasil Podes 2018 menunjukkan bahwa perkelahian antar kelompok warga merupakan perkelahian massal yang paling sering terjadi, disusul oleh perkelahian warga antar desa/kelurahan. Persentase desa/kelurahan yang mengalami perkelahian antar kelompok warga sebesar 1,71 persen di tahun 2014 meningkat menjadi 1,99 persen di tahun 2018 (Gambar 2.28).

Pemerintah menyadari kerawanan konflik di Indonesia dapat menciptakan perpecahan. Olehkarena itu, sebagai upaya menanggulangi isu konflik pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pemerintah berperan aktif dalam setiap penyelesaian segala bentuk konflik atau benturan fisik dan kekerasan lainnya yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang menganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Gurr dalam Soetopo (2001) menjelaskan bahwa strategi yang dipandang lebih efektif dalam pengelolaan konflik meliputi: (1) konsistensi damai, yaitu mengendalikan konflik dengan cara tidak saling mengganggu dan saling merugikan, dengan menetapkan peraturan yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan secara ketat dan konsekuensi; (2) dengan mediasi (perantara). Jika konflik menemui jalan buntu, masing-masing bisa menunjuk pada pihak ketiga untuk menjadi perantara yang berperan secara jujur dan adil serta tidak memihak.



Gambar 2.28 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Tipenya, 2014 dan 2018

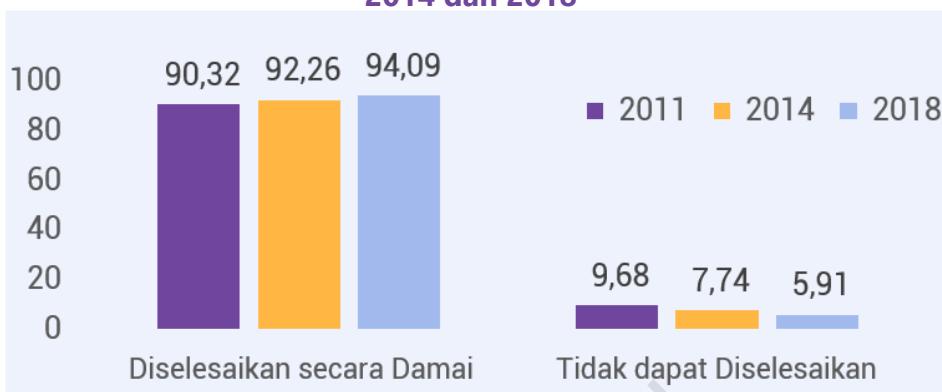


Sumber: Pendataan Potensi Desa, BPS

Data Podes 2011, 2014, dan 2018 menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen insiden perkelahian massal yang sering terjadi sudah dapat diselesaikan (Gambar 2.29). Namun, masih terdapat kejadian dimana diperlukan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk segera menuntaskan konflik massal yang terjadi di wilayah desa/kelurahan tempat tinggalnya, sehingga sekitar 5,91 persen konflik yang belum dapat diselesaikan segera menemukan solusinya.

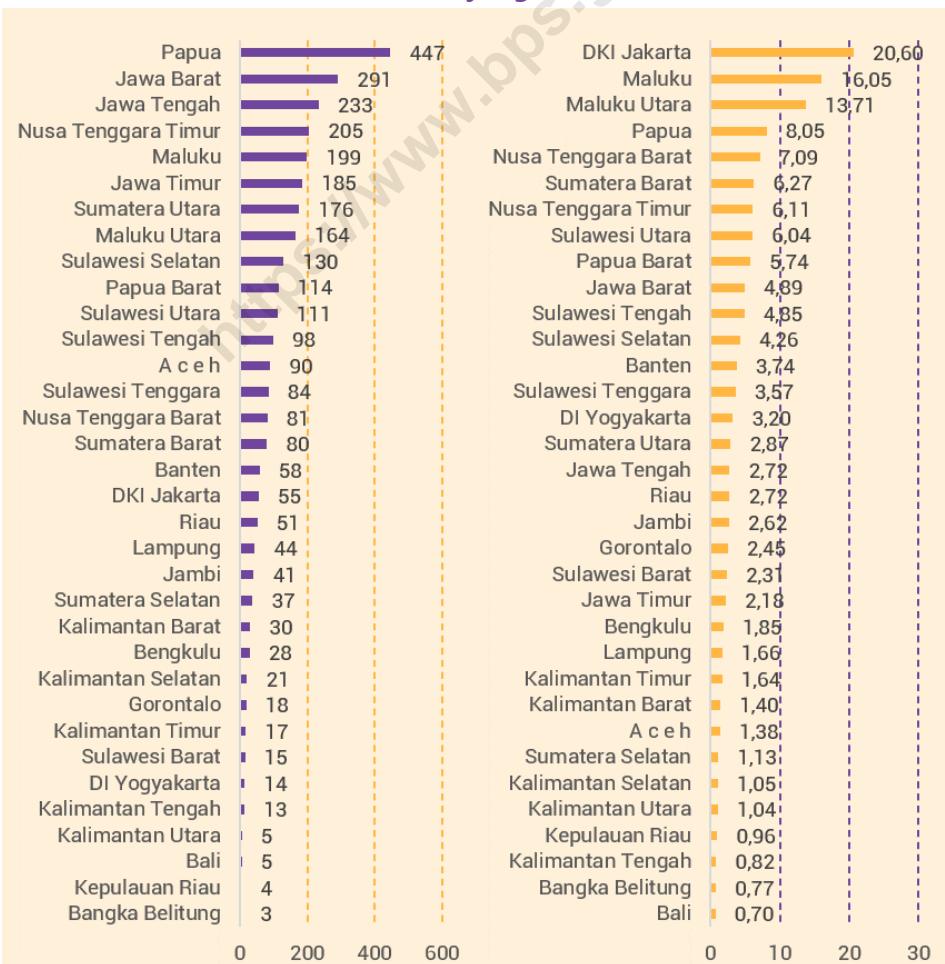
Apabila kita melihat lebih rinci ke provinsi, kita dapat melihat variasi dalam perkembangan kejadian perkelahian massal. Selama periode 2018, Provinsi DKI Jakarta (20,60 persen), Maluku (16,05 persen), dan Maluku Utara (13,71 persen) merupakan provinsi dengan persentase terbesar desa/kelurahan yang pernah mengalami perkelahian massal setahun terakhir. Sementara dari jumlahnya, provinsi dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak yang pernah mengalami perkelahian adalah Papua (447), Jawa Barat (291), dan Jawa Tengah (233).

Gambar 2.29 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Penyelesaiannya, 2014 dan 2018



Sumber: Pendataan Potensi Desa, BPS

Gambar 2.30 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, 2018



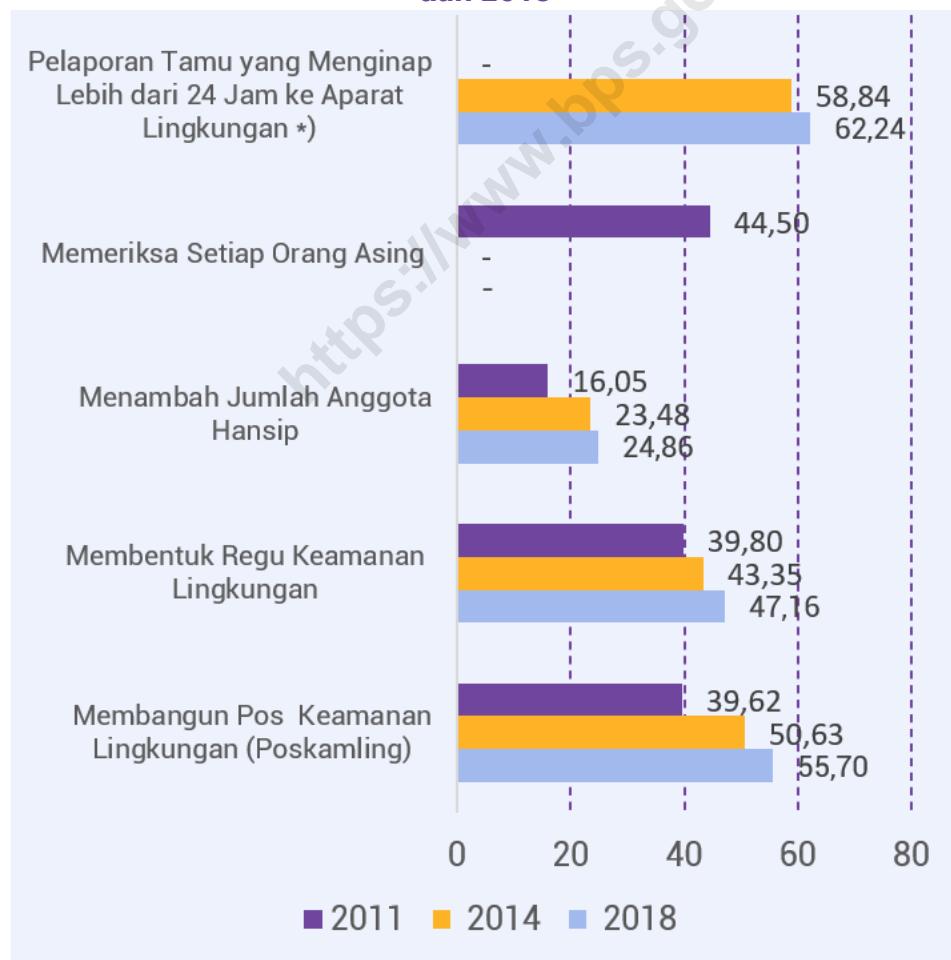
Sumber: Pendataan Potensi Desa, BPS



Upaya Menjaga Keamanan

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai upaya dan partisipasi masyarakat yang dilakukan untuk menjaga keamanan di lingkungan desa/kelurahan tempat tinggalnya dan perkembangannya selama satu dekade terakhir. Data yang digunakan merupakan data kewilayahan (*spatial data*) dengan unit observasi seluruh desa/kelurahan yang ada di wilayah Indonesia (pendataan Potensi Desa). Sejalan dengan itu, tingkat dan perkembangan upaya dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan pada bagian ini akan dilihat dari cakupan dan perkembangan jumlah desa/kelurahan yang melakukan upaya tersebut.

Gambar 2.31 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2011, 2014, dan 2018

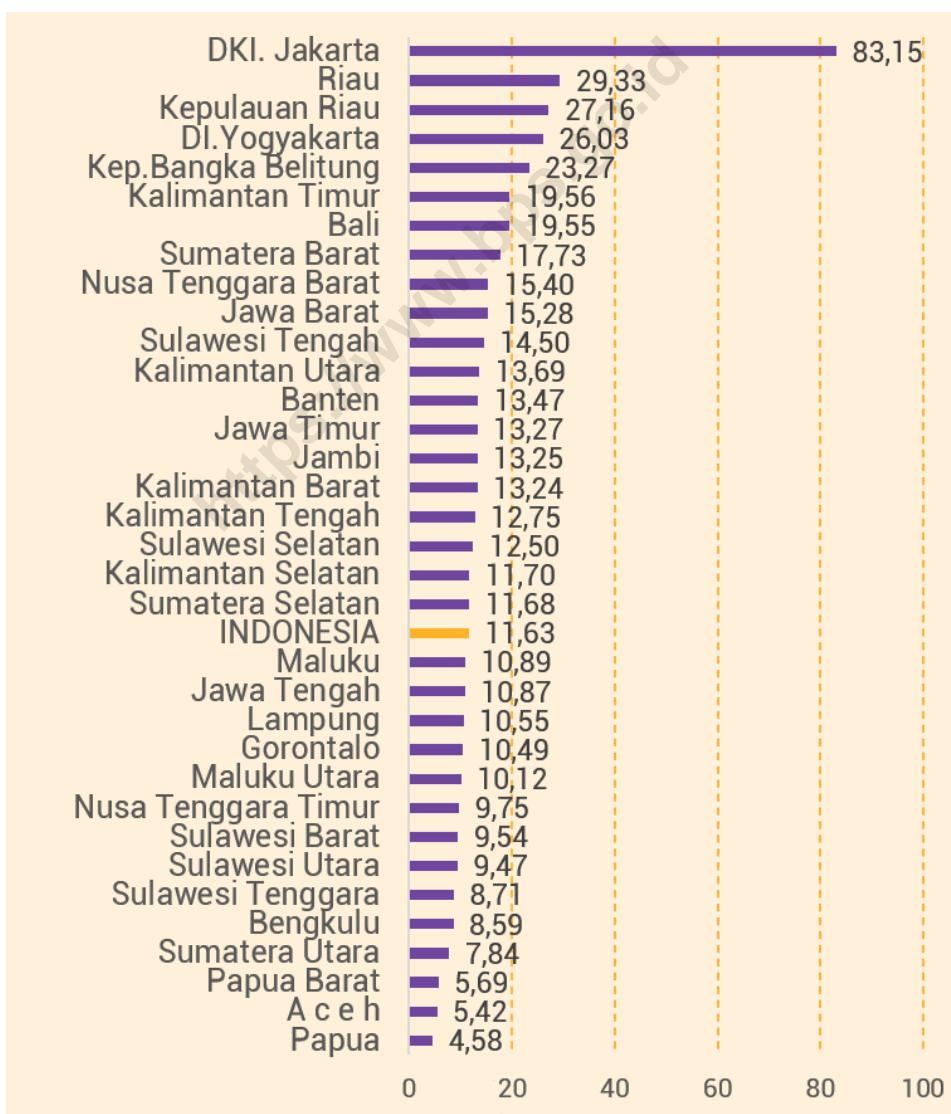


Sumbe: Diolah dari Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Keterangan: *) Pada Podes 2014 pertanyaan Memeriksa Setiap Orang Asing diubah menjadi Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan

Dari Gambar 2.31 terlihat bahwa upaya yang paling banyak dilakukan oleh warga desa untuk menjaga keamanan selama tahun 2018 secara berturut-turut adalah melakukan pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan, membangun pos keamanan lingkungan (poskamling), membentuk regu keamanan lingkungan, dan menambah jumlah anggota hansip/linmas. Pada 2018 lebih dari separuh Desa/Kelurahan di Indonesia melakukan kegiatan menjaga keamanan dengan menggiatkan pelaporan tamu dan membangun pos keamanan lingkungan (poskamling).

Gambar 2.32 Persentase Desa/Kelurahan yang terdapat Pos Polisi Menurut Provinsi, 2018



Sumber: Diolah dari Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

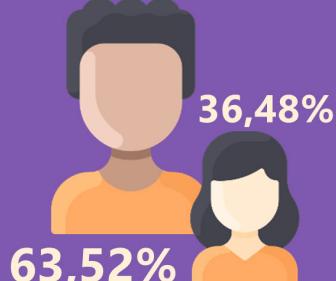


Gambaran upaya dan partisipasi masyarakat desa dalam menjaga keamanan dirinci menurut provinsi selama periode 2011-2018 disajikan pada tabel lampiran. Dari tabel-tabel tersebut terlihat bahwa upaya warga untuk menjaga keamanan dengan membangun pos keamanan lingkungan (poskamling) meningkat hampir di seluruh provinsi di Indonesia.

Selain dari aspek warga, upaya menjaga keamanan dan ketertiban juga merupakan fungsi dari aparat berwenang dalam hal ini adalah polisi. Data Podes menyajikan Desa/kelurahan yang pada wilayahnya terdapat keberadaan pos polisi. Gambar 2.32. menunjukkan hanya sekitar 11,63 persen dari keseluruhan Desa/kelurahan di Indonesia yang di wilayahnya terdapat keberadaan pos polisi (termasuk Polsek, Polres, dan Polda). Namun, dari sekitar 88,37 persen Desa/kelurahan yang tidak ada pos polisi sekitar 80,75 persen diantaranya menyatakan akses ke pos polisi terdekat cenderung mudah dan mudah sekali.

03 KORBAN KEJAHATAN

1,01% penduduk Indonesia mengalami kejahatan pada tahun 2019



Laki-laki lebih banyak menjadi korban kejahatan daripada perempuan di tahun 2019



Sebagian besar penduduk yang menjadi korban kejahatan di tahun 2019 adalah kalangan dewasa



22,19% penduduk Indonesia yang menjadi korban kejahatan melaporkannya ke polisi pada tahun 2019



21,46% penduduk yang pernah melapor mendapatkan/ ditemani bantuan hukum pada tahun 2019



https://www.bps.go.id



BAB III. KORBAN KEJAHATAN

Penduduk Korban Kejahatan

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai jumlah dan karakteristik korban kejahatan, kejadian kejahatan yang dialami serta perkembangannya selama periode dua tahun terakhir. Data yang diperoleh berasal dari salah satu bagian Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yakni pada Blok IX Susenas Keterangan Korban kejahatan.

Susenas 2019 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2018. Sedangkan Susenas 2020 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2019. Survei Korban Kejahatan (*victimization surveys*) yang ideal dirancang khusus untuk mencatat perkiraan viktimas yang ditunjukkan oleh sampel representatif populasi (Hagan, 1989).

Gambar 3.1 menunjukkan pada tahun 2019, persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan sebesar 1,01 persen dari populasi penduduk Indonesia. Persentase tersebut menurun dibandingkan pengalaman masyarakat pada tahun 2018 (1,11 persen).

Gambar 3.1 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan 2018–2019



Sumber: Susenas 2019-2020

Dari 1,01 persen penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dapat dilihat polanya berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Komposisi penduduk korban kejahatan menurut jenis kelamin disajikan pada gambar 3.2. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada



tahun 2018 dan 2019, sebagian besar penduduk yang menjadi korban kejahatan berjenis kelamin laki-laki dengan persentase lebih dari 60 persen. Pada tahun 2019, persentase perempuan yang menjadi korban kejahatan sedikit mengalami penurunan.

Gambar 3.2 Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin, 2018–2019

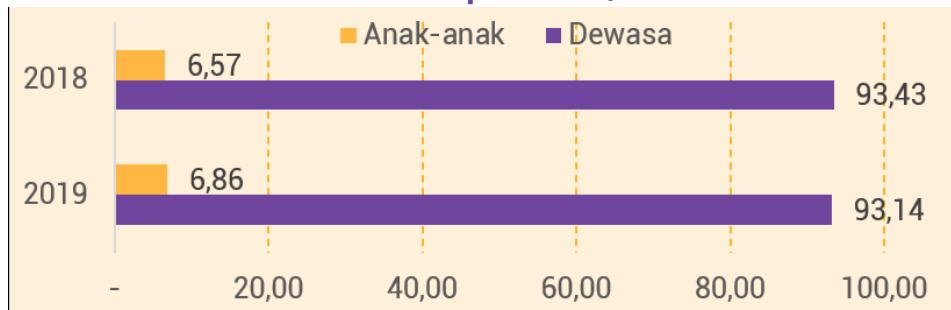


Sumber: Susenas 2019-2020

Keterangan: Persentase dihitung terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk.

Selama periode 2018-2019, sebagian besar penduduk yang menjadi korban kejahatan adalah kalangan dewasa. Gambar 3.3 menunjukkan bahwa perkembangan persentase penduduk korban kejahatan dari kelompok umur dewasa cenderung stabil. Pada tahun 2019, penduduk kelompok umur dewasa yang menjadi korban kejahatan sebesar 93,14 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2018 (93,43 persen).

Gambar 3.3 Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Umur, 2018–2019

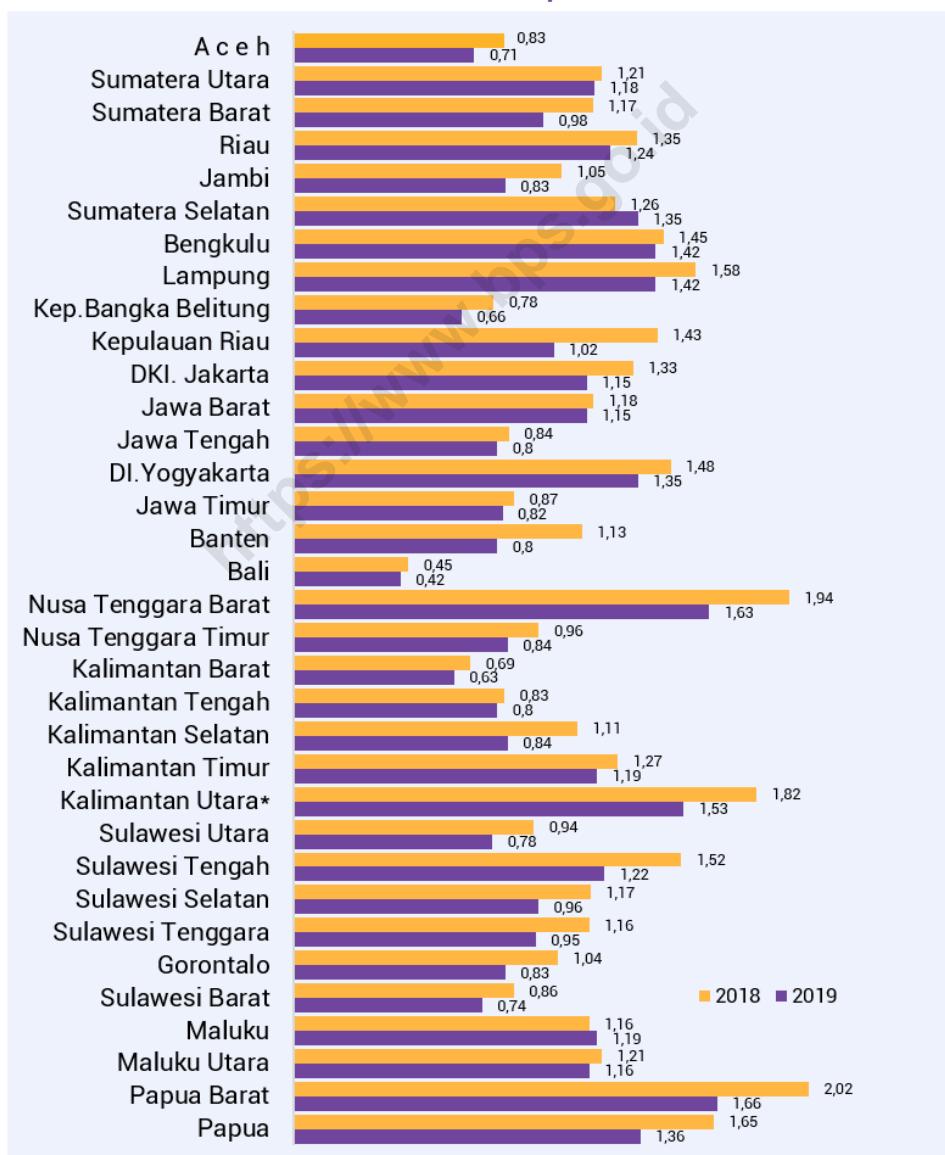


Sumber: Susenas Kor Blok IX

Apabila dilihat berdasarkan wilayah, persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan persentasenya menurun di 32 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu,

Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua (lihat gambar 3.4). Dari seluruh provinsi yang mengalami penurunan pada 2019, paling besar terjadi di provinsi Kepulauan Riau.

Gambar 3.4 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Provinsi, 2018–2019

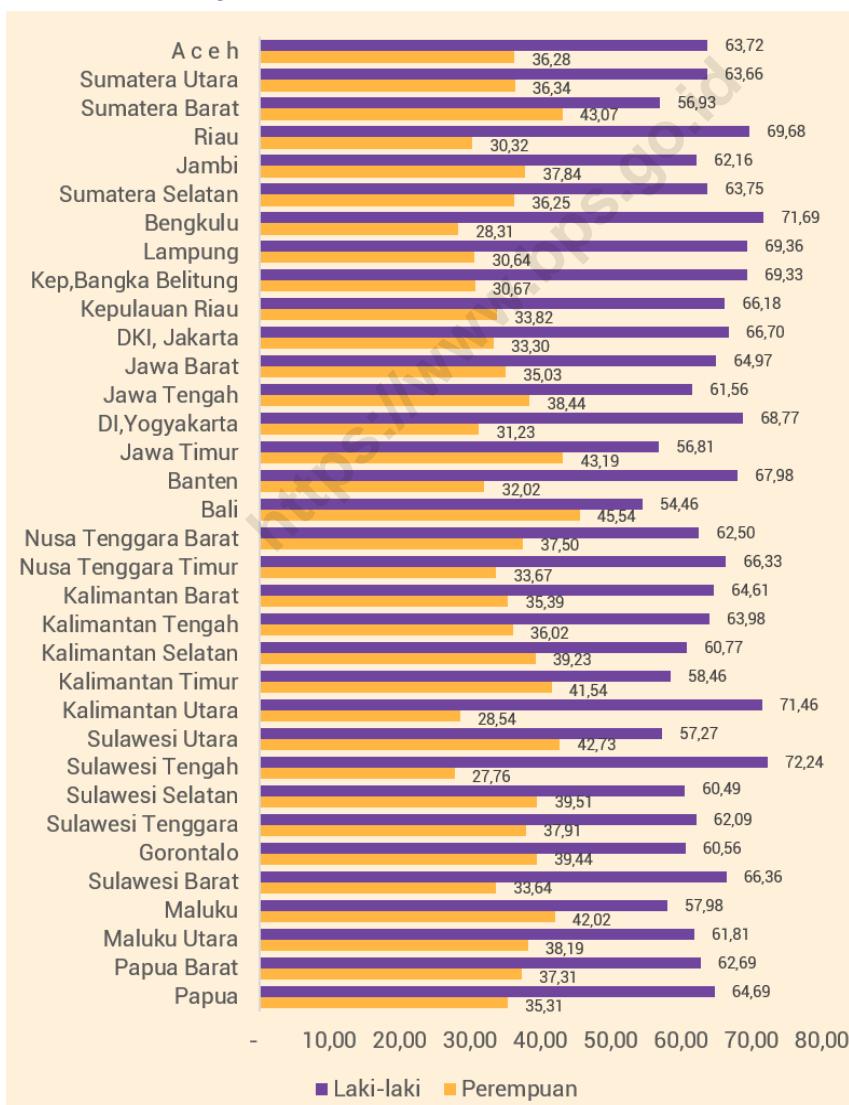


Sumber: Susenas 2019-2020



Komposisi penduduk korban kejahatan selama periode tahun 2019 pada setiap provinsi secara umum serupa dengan komposisi secara nasional. Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan di sebagian besar provinsi lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Pada tahun 2019, persentase penduduk korban kejahatan yang berjenis kelamin perempuan terbesar berturut-turut adalah provinsi Bali (45,54 persen), Jawa Timur (43,19 persen), dan Sumatera Barat (43,07 persen).

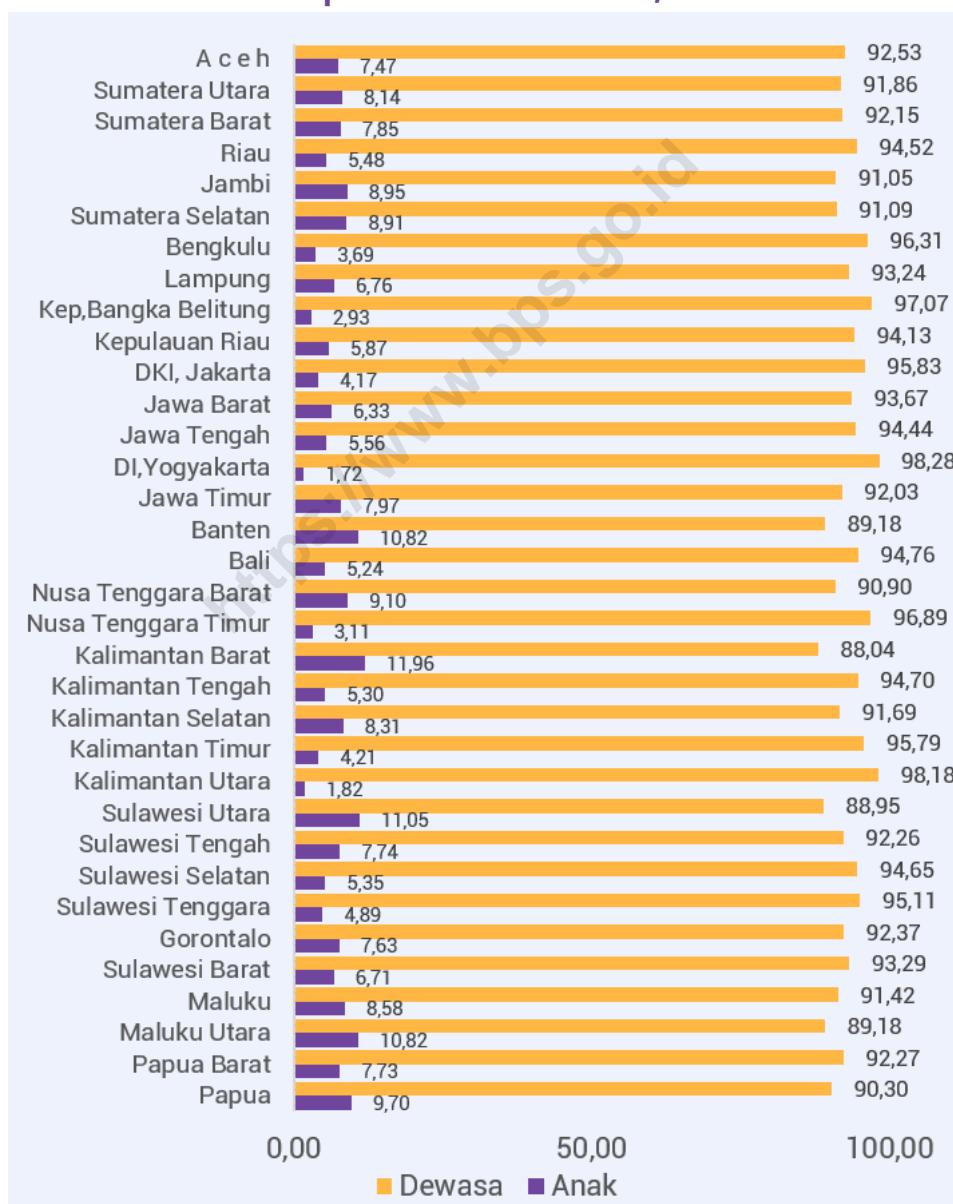
Gambar 3.5 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan jenis Kelamin dan Provinsi, 2019



Sumber: Susenas 2020

Sementara itu, komposisi penduduk korban kejahatan menurut kelompok umur secara keseluruhan untuk semua provinsi menunjukkan bahwa persentase anak-anak yang menjadi korban kejahatan lebih kecil dari penduduk dewasa (lihat Gambar 3.6). Pada tahun 2019, provinsi dengan persentase penduduk korban kejahatan pada kelompok umur anak-anak terbesar berturut-turut adalah provinsi Kalimantan Barat (11,96), Sulawesi Utara (11,05), dan Banten (10,82).

Gambar 3.6 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Umur dan Provinsi, 2019



Sumber: Susenas 2020



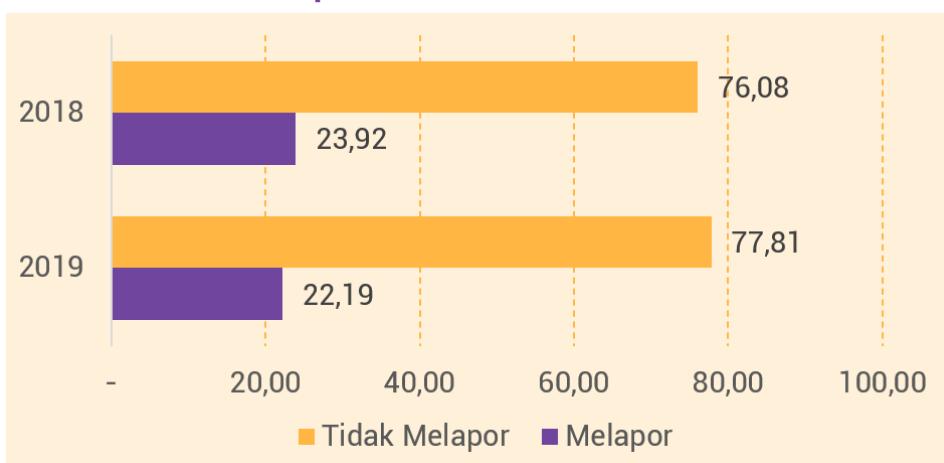
Tingkat Pelaporan Kepada Polisi

Data Susenas menunjukkan tingkat persentase melapor ke Polisi (*police report rate*) setiap tahun masih relatif rendah. Pada periode 2018–2019, secara total (Gambar 3.7) persentase penduduk Indonesia yang pernah mengalami kejadian kejahatan kemudian melaporkan ke polisi kejadian yang dialaminya besarnya tidak lebih dari 25 persen. Pada tahun 2019 persentasenya sebesar 22,19 persen, menurun jika dibandingkan tahun 2018 (23,92 persen). Angka tersebut menunjukkan jumlah masyarakat yang melapor ketika mengalami kejadian masalah masih rendah. Dengan kata lain, data registrasi polisi masih belum menggambarkan keseluruhan kejadian kejahatan yang dialami oleh masyarakat. Data-data ini menunjukkan angka gelap kejadian (*dark number*) masih relatif tinggi.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara dalam UU 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Seperti yang disajikan pada Tabel 3.1.11 (lampiran) secara nasional pada 2019 terdapat 21,46 persen masyarakat yang Pernah Melapor dan Mendapatkan/Ditemani Bantuan Hukum. Apabila dilihat berdasarkan provinsi, Sulawesi Barat (56,56 persen) dan Gorontalo (54,74 persen), merupakan provinsi dengan angka yang paling tinggi.

Gambar 3.7 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi, 2018–2019



Sumber: Susenas 2019-2020

04 INDIKATOR SDGS TERKAIT KEAMANAN

PERKEMBANGAN IPAK 2012-2020



IPAK Indonesia 2020 **sebesar 3,84** dari skala 0-5. Angka ini **lebih tinggi 0,14 poin** dibandingkan dengan IPAK 2019

JUMLAH KEJADIAN PEMBUNUHAN

964 kejadian di tahun 2019



PROPORSI PELAKU BISNIS YANG MEMBAYAR/ DIMINTA SUAP OLEH PEJABAT PUBLIK



19,97%
di tahun 2020

9,65%
akses sendiri

10,32%
melalui perantara



0,06%
di tahun 2019



https://www.bps.go.id



BAB IV. INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) TERKAIT KEAMANAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Agenda 2030 telah dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya *United Nations General Assembly* (UNGA) di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. TPB/SDGs yang cakupan dan substansinya selaras dengan Nawacita, terdiri atas 17 Tujuan dan 169 Target.

Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global. Dari 169 target yang ada, terdapat beberapa indikator yang terkait keamanan, diantaranya sebagai berikut:

Indikator	Sumber Data	Frekuensi Waktu Pengumpulan Data
16.1.1.(a). Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kepolisian Republik Indonesia.	Tahunan
16.1.3. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejadian kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Tahunan
16.1.4. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Modul Ketahanan Sosial	Tiga Tahunan
16.3.1. Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Tahunan
16.5.1. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Survei Perilaku Anti Korupsi (SPA)	Tahunan

Indikator <i>Indicator</i>	Sumber Data <i>Data Source</i>	Frekuensi Waktu Pengumpulan Data <i>Data Collection Time Frequency</i>
16.5.2. Proporsi pelaku bisnis yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik, atau diminta untuk menerima suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir	Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAk)	Tahunan

Target 16.1.1.(a). Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir

Kasus kejahatan pembunuhan adalah kasus-kasus yang terjadi akibat kejahatan tindakan pembunuhan, yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua-Kejahatan, Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang diukur adalah dalam kurun waktu satu tahun terakhir atau 12 bulan terakhir.

Pada tahun 2015 tercatat 1.491 kejadian (tertinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir). Angka ini menurun pada tahun 2016 menjadi 1.292 kejadian, 2017 menjadi 1.150 kejadian, 2018 menjadi 1.024 kejadian, dan pada 2019 menurun kembali menjadi 964 kejadian.

Di tingkat nasional dan internasional, indikator ini dipergunakan untuk mengukur kejahatan kekerasan yang paling ekstrem dan mengindikasikan lemah dan kurangnya tingkat keamanan di masyarakat. Keamanan dari kekerasan adalah salah satu prasyarat bagi individu untuk merasakan hidup yang aman dan aktif. Data ini menunjukkan risiko yang dihadapi masyarakat terhadap kematian akibat pembunuhan.

Target 16.1.3. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir

Korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Dalam konteks ini cakupan korban kejahatan

kekerasan terkait penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual. Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampukan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya).

Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, penggeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.

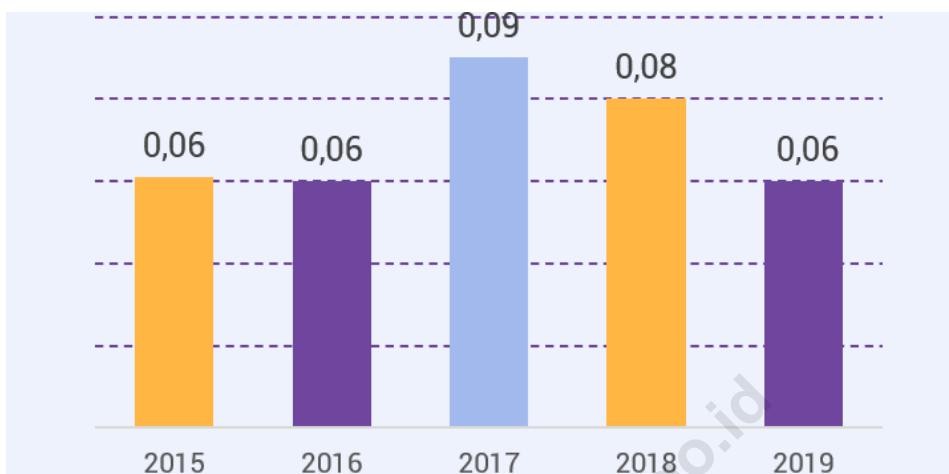
Pencurian dengan kekerasan adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat mlarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampukan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Pelecehan seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesuisilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.

Seperti yang disajikan pada Gambar 4.1, pada tahun 2019 tercatat proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan menurun menjadi 0,06 persen, dari 0,08 persen pada tahun 2018. Cara perhitungannya adalah jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan lalu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut dikali 100 persen.



Gambar 4.1 Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir, 2015– 2019



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS

Target 16.1.4. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya

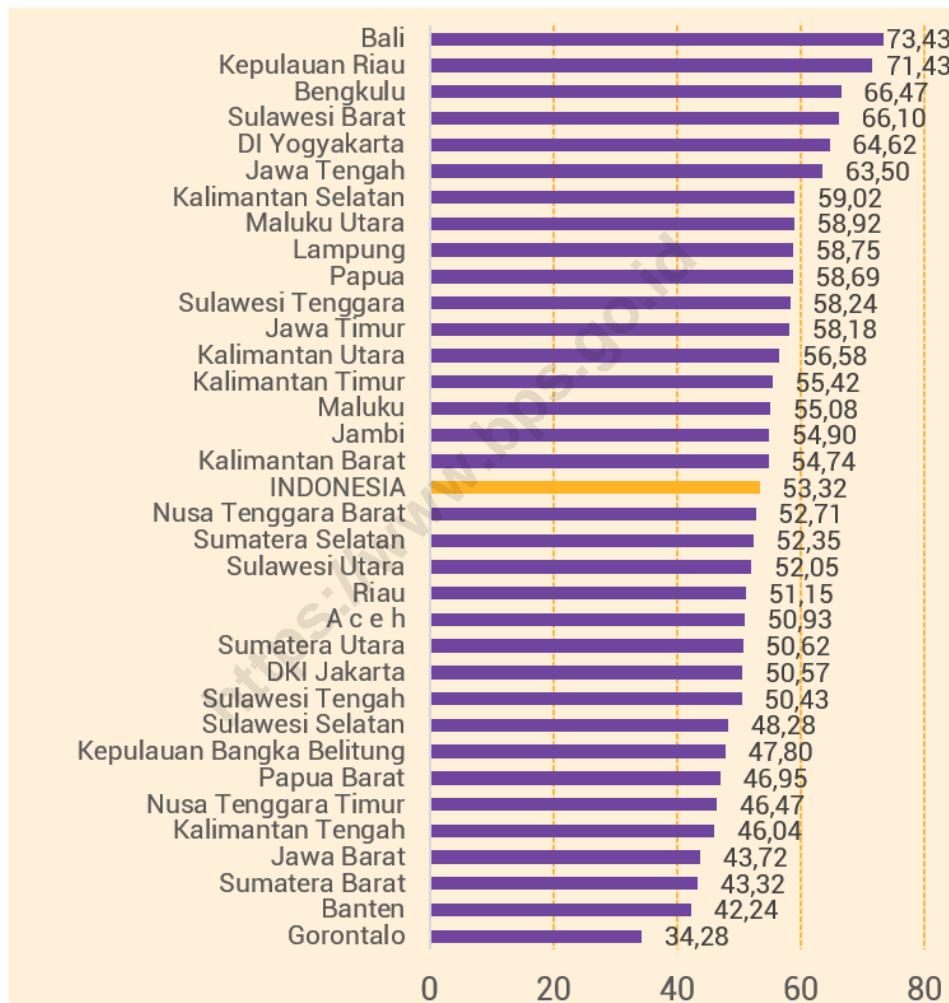
Rasa aman adalah kebutuhan dasar dan merupakan hak dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Bahkan dalam *Universal Declaration of Human Rights* mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan hak akan kemerdekaan dan keamanan badan.

Target 16.1.4 dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah proporsi rumah tangga yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Tujuannya adalah sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Rasa aman diukur dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga tahun.

Berdasarkan Gambar 4.2. pada tahun 2017 menunjukkan persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya secara nasional sekitar 53,32 persen. Dengan kata

lain, hampir separuh masyarakat masih merasa khawatir ketika berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.

Gambar 4.2. Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS

Apabila kita melihat lebih rinci ke provinsi, kita dapat melihat variasi dalam persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya. Selama periode 2017, Provinsi Bali merupakan provinsi dengan persentase terbesar masyarakatnya yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya. Sementara provinsi dengan persentase terkecil adalah Provinsi Gorontalo.



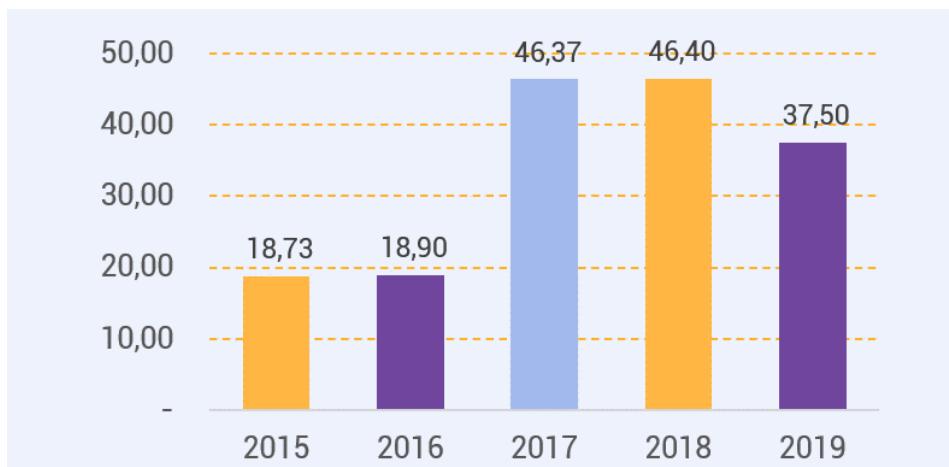
Target 16.3.1. Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan kepada Polisi

Tujuan dari indikator ini adalah untuk melihat akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak berwenang. Jika pihak berwenang tidak menerima laporan atau diperintahkan terjadinya korban maka tidak akan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan penyelidikan dan tindakan pengadilan. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga berwenang maupun polisi dan lembaga penegak hukum lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya.

Meningkatnya jumlah pelapor dan laporan menunjukkan bahwa kekerasan tidak dapat diterima dan harus dilaporkan. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan kesadaran untuk melapor, serta kepercayaan kepada pihak berwenang telah meningkat.

Seperti yang disajikan pada Gambar 4.3, pada tahun 2019 tercatat proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dan melaporkan kepada polisi sebesar 37,50 persen. Cara perhitungannya adalah Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi dibagi dengan jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir dikalikan 100% (Sebagai catatan, tahun 2015 dan 2016 merupakan pelaporan kejahatan untuk semua jenis kejahatan).

Gambar 4.3 Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada Polisi, 2015 – 2019



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS



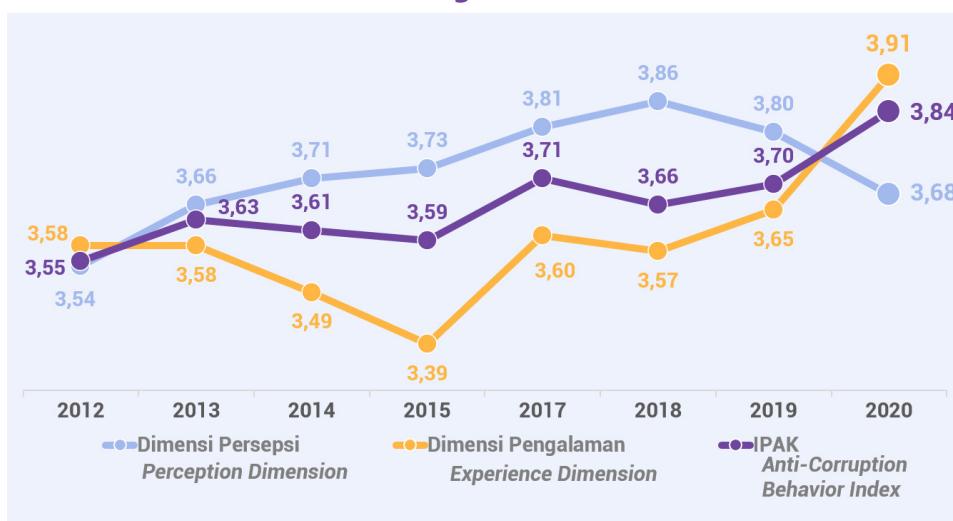
Target 16.5.1. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi melalui Survei Perilaku Anti Korupsi. Survei ini telah dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020, kecuali tahun 2016. Untuk tahun 2020, SPAK dilaksanakan di 34 provinsi dengan jumlah sampel sebesar 10.040 responden. Oleh karena itu, analisis mengenai perilaku anti korupsi hanya dapat dilakukan sampai level nasional.

Survei Perilaku Anti Korupsi bertujuan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.

Gambar 4.4. Perkembangan IPAK Tahun 2012 – 2020



Sumber: Survei Perilaku Anti Korupsi 2020



Jika dilihat perkembangannya, IPAK cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2012 sampai tahun 2020 (Gambar 4.4). Pada tahun 2012, IPAK sebesar 3,55 dan meningkat di tahun 2013 menjadi 3,63. Akan tetapi, IPAK terus turun hingga tahun 2015 dan mencapai skor 3,59. IPAK kembali meningkat di tahun 2017 menjadi 3,71. Tahun 2018 IPAK mengalami penurunan (3,66), tetapi pada tahun 2019 (3,70) mulai kembali mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 angka IPAK menjadi 3,84. Nilai IPAK semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Proporsi masyarakat yang mengeluarkan uang/barang/fasilitas melebihi ketentuan ketika berurusan dengan layanan publik, selama 12 bulan terakhir.

Pada tahun 2020 masih terdapat 16,79 persen masyarakat yang pernah mengeluarkan uang/barang/fasilitas melebihi ketentuan ketika berurusan dengan layanan publik. Masyarakat tersebut mengeluarkan uang/barang/fasilitas baik ketika mengakses layanan publik sendiri (8,84 persen) maupun melalui perantara (7,95 persen). Sementara itu, terdapat 83,21 persen masyarakat yang tidak pernah mengeluarkan uang/barang/fasilitas melebihi ketentuan ketika berurusan dengan layanan publik 12 bulan terakhir.

Gambar 4.5. Persentase Masyarakat yang Pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan, Tahun 2020



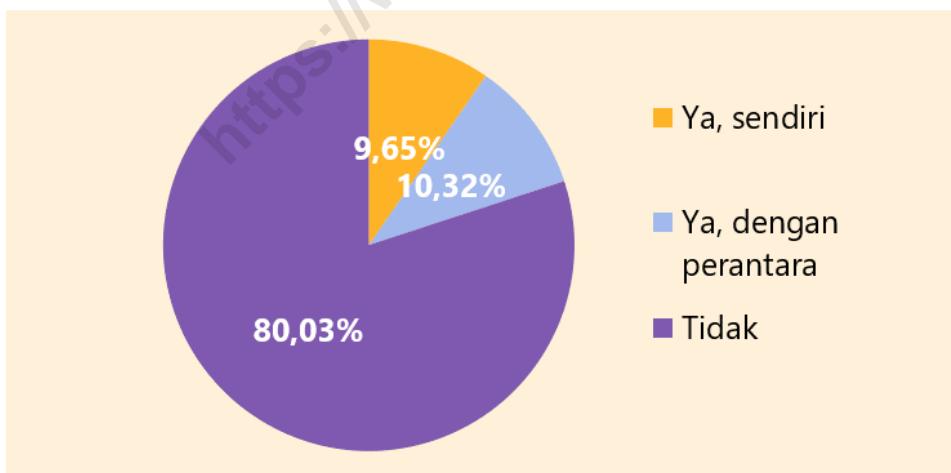
Sumber: Survei Perilaku Anti Korupsi 2020



Target 16.5.2. Proporsi pelaku usaha yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik, atau diminta untuk menerima suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir.

Salah satu indikator SDGs terkait korupsi pada goal 16 adalah indikator 16.5.2, fokusnya adalah bagaimana pelaku usaha memiliki pengalaman ketika berurusan dengan pelayanan publik. Hasil SPAK 2020 menunjukkan bahwa 19,97 persen pelaku usaha pernah mengeluarkan uang/barang/ fasilitas melebihi ketentuan ketika berurusan dengan layanan publik. Pelaku usaha tersebut mengeluarkan uang/barang/ fasilitas baik ketika mengakses layanan publik baik sendiri (9,65 persen) maupun melalui perantara (10,32 persen) (Gambar 4.6). Sementara itu, terdapat 80,03 persen pelaku usaha yang tidak pernah mengeluarkan uang/barang/fasilitas melebihi ketentuan ketika berurusan dengan layanan publik 12 bulan terakhir.

Gambar 4.6. Persentase Masyarakat Pelaku Usaha yang Pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/ Fasilitas Melebihi Ketentuan, tahun 2020



Sumber: Survei Perilaku Anti Korupsi 2020



https://www.bps.go.id

01 INTRODUCTION

“

The 2020 Crime Statistics publication is intended to meet the need for regular and continuous criminal statistics data





https://www.bps.go.id



BAB I. PENDAHULUAN

BACKGROUND

The fundamental needs of every human being consist of biological needs such as food, water, and sleep, and social needs, such as social status, social roles, self-actualization and security. Nowadays it can be said that security is one of the basic human needs in carrying out daily activities. According to Maslow (1943) in the theory of human needs hierarchy, security is at the second level below basic human needs such as cloth, food, and shelter. This shows that security is an important human need.

Safety feeling is one of the basic rights that must be obtained or enjoyed by everyone. This is stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28G paragraph 1 which states: "Everyone has the right to protection of personal, family, honor, dignity, and property under his authority, and is entitled to safety feeling and protection from the threat of fear to do or not do something that is a human rights.

Along with that, one of the obligations of the government and the Indonesian state is to provide safety feeling to all of its people, as mandated in the Preamble to the 1945 Constitution which reads: "The Government and the State of Indonesia which protects all the people of Indonesia and all of Indonesia's blood spilled". This obligation is also explicitly stated in Article 30 paragraph (4), the Second Amendment to the 1945 Constitution states that The Indonesian National Police (Polri) is a state instrument that maintains public security and order and has the responsibility to protect, serve the public, and uphold the law.

Security is a very broad variable because it covers various aspects and dimensions, ranging from political, legal, defense, security, social, and economic dimensions. Statistics and indicators which are commonly used to measure the public's safety feeling are negative indicators, for example, the total number of crime (total crime), the number of people at risk of crime (crime rate) per 100,000 population. The higher the crime rate shows the more crime in the public which is an indication that the condition of the public becomes increasingly insecure.

Efforts to meet and create a sense of security in the public are strategic steps that also influence the success of national development. The creation and fulfillment of security in the public will build a conducive atmosphere for the public to carry out various activities including economic activities. This condition on a macro scale will create national stability which is one of the prerequisites for achieving development to create a just and prosperous public.



PURPOSE

The 2020 Crime Statistics publication is intended to meet the need for regular and continuous criminal statistical data. The availability of this data is very useful as a basis for preparing sectoral development planning in the field of security and public order as well as national development planning to improve overall public welfare.

In general, the purpose of this publication is to obtain a macro picture of the current situation and condition of public security and its development over the past few years. Specifically, this publication is also intended to obtain a complete picture of the characteristics of crime incidents, perpetrators of crime, and victims of crime that occurred in Indonesia.

SCOPE

This publication presents an overview of crime incidents, perpetrators of crime, and victims of crime that occurred in Indonesia, both at the provincial and national levels. Data sourced from the National Police Headquarters are specifically presented according to the region of the police (polda) and national.

According to the availability of the data, for overall statistics and indicators regarding the incidence of crime, perpetrators of crime and victims of crime are presented for the last three years in a row, namely in 2017, 2018, and 2019. For all statistics and indicators regarding the occurrence of mass fights are presented during the last three periods, namely 2011, 2014, and 2018.

WRITING SYSTEM

This publication as a whole is presented in several chapters which are compiled systematically. Chapter I explains the background and purpose of the preparation of the publication. Chapter II presents an overview and development of crime incidents including crime incidents based on police data and a description of crime incidents and territorial conflicts originating from Podes. Chapter III presents data on victims of crime based on demographic and socio-economic characteristics. Chapter IV presents indicators of Sustainable Development Goals (SDGs)



related to security. The technical notes describe the methodology which is used in the preparation of this publication, including the types and sources of data, concepts/definitions, and explanations regarding the statistics/indicators presented in the last section there is a bibliography and attachment table.

https://www.bps.go.id



https://www.bps.go.id

02 CRIME INCIDENTS

“ The number of crime incidents in Indonesia tends to decline in 2019 compared to previous year.



The highest crime incidents by regional police in 2019



https://www.bps.go.id



CHAPTER II. CRIME INCIDENTS

General Crime Number (National)

The indicators commonly used to measure crime are the number of crimes (total crime), crime rates per 100,000 population (crime rate), and the time interval for a crime (crime clock). However, we need to be careful in interpreting crime rates in general because it is simple arithmetic that combines all types of crime in calculations without considering the seriousness (Savitz, 1978).

During 2017–2019, the number of incidents of crime or criminal acts in Indonesia tended to decline. As shown in Figure 2.1.a, the National Police's data shows the number of total crime incidents (total crime) in 2017 was 336,652 incidents, decreased to 294,281 incidents in 2018, and decreased in 2019 to 269,324 incidents.

In line with the total crime, the level of risk of being exposed to crime (crime rate) for every 100,000 population also decreased in 2019 by 103. This figure decreased from 129 in 2017 and 113 in 2018. The crime rate is a number that indicates the level of vulnerability of a crime in a certain city at a certain time. The higher the crime rate shows a higher level of vulnerability to crime in a certain regions, and vice versa.

Other indicators of crime during the 2017–2019 period also show a similar pattern. The time interval for the occurrence of a crime (crime clock) 00.01'33" (1 minute 33 seconds) in 2017 and becomes 00.01'47"

Figure 2.1.a Crime Total, 2017-2019



Source: Operations Control Bureau, National Police

**Figure 2.1.b Crime Rate, 2017-2019**

Source: Operations Control Bureau, National Police

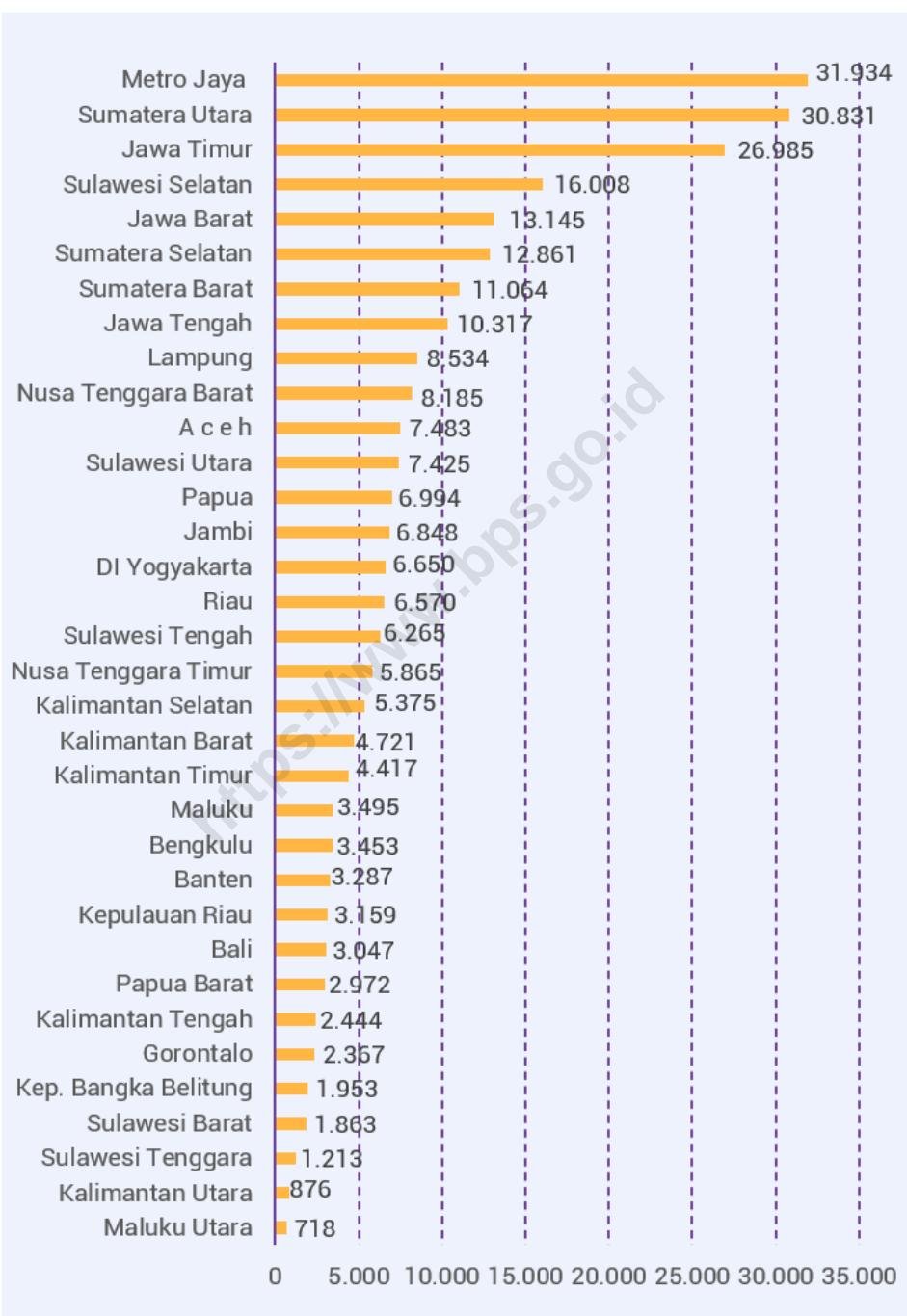
(1 minute 47 seconds) in 2018. The interval became longer in 2019 to 00.01'57" (1 minute 57 seconds). The longer time interval shows that the intensity of the crime is decreasing.

General Crime Number (Province/Regional Police)

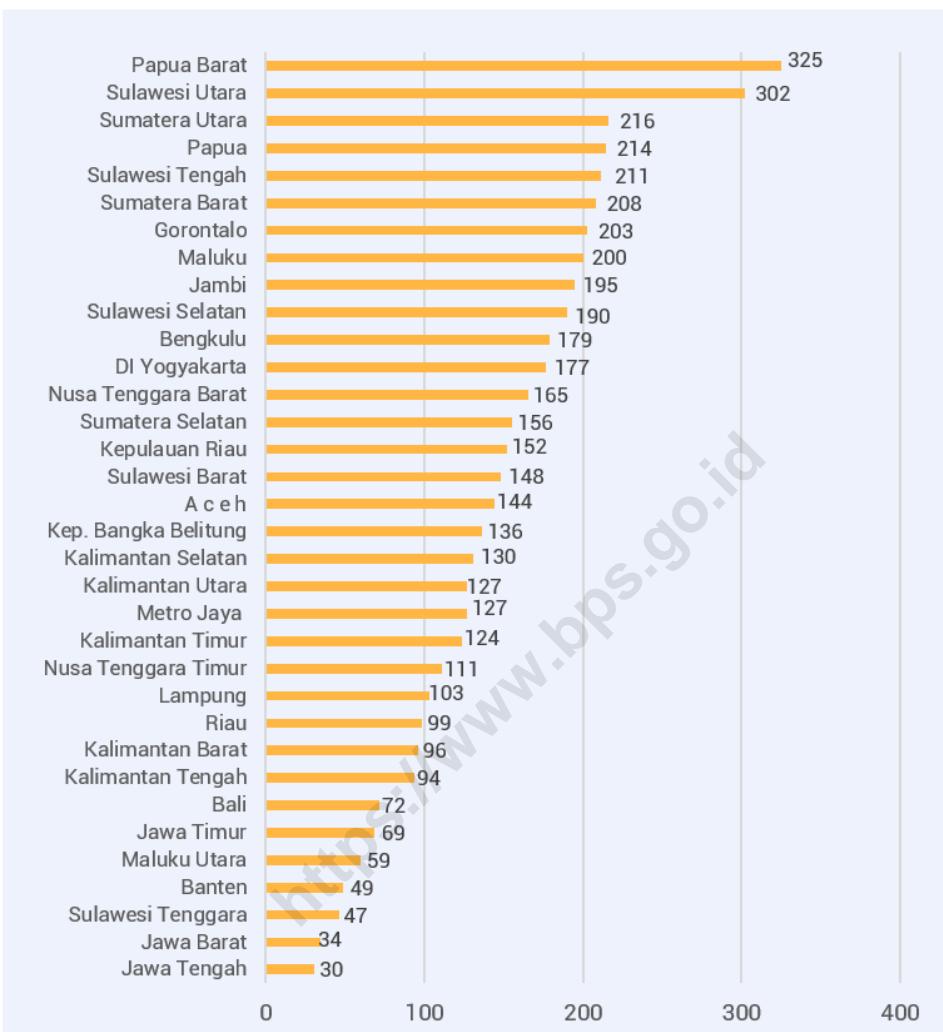
In terms of the number of crimes at the provincial / regional police level during 2019, Metro Jaya Regional Police recorded the highest number of crimes (31,934 incidents), followed by the Sumatera Utara Regional Police (30,831 incidents), and the Jawa Timur Regional Police (26,985 incidents). Meanwhile, the Regional Police of Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, and Maluku Utara, were the three regions with the least number of crimes with the number of consecutive crimes of 1,213; 876; and 718 (see Figure 2.2).

Regarding the crime rate, Papua Barat recorded the highest crime rate at 325 (every 100,000 population), followed by the Sulawesi Utara Regional Police (302) and Sumatera Utara (216). Meanwhile, the regions with the lowest crime rates were Jawa Tengah and Jawa Barat.

Figure 2.2 The Number of Reported Crimes by Regional Police/ Province, 2019



Source: Operations Control Bureau, National Police

**Figure 2.3 Crime Rate by Regional Police/Province, 2019**

Source: Operations Control Bureau, National Police

Crime Number Based on Classification

The amount of crime (total crime) and the level of risk of being exposed to crime (crime rate) only illustrates the crime event in general. The crime rate can be more useful especially in describing the condition of security and public order (Kamtibmas) and the level of vulnerability of an area when viewed in more detail. This publication classifies types of crime based on several criteria, namely:

1. The target of the crime events (people, property, public order, the country, etc.)

2. The level of seriousness of the crime (the crime against life, the crime against physical, the crime against property rights, etc.).
3. How the crime was committed (the crime against rights/property with violence, the crime against rights/property without violence, and so on).

This is generally in line with the groupings contained in the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS) initiated by the United Nations Institution (UN), namely the UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) (UNODC, 2015).

The following classification of crime contained in this publication:

No	Crime Classification	Type of Crimes
1	<i>Crimes Against Life</i>	-Homicide
2	<i>Crimes Against Body (Violence)</i>	-Severe Assault -Light Assault -Domestic Violence
3	<i>Crimes related to Sexual Violence</i>	-Rape -Sexual Abuse
4	<i>Crimes Against People Freedom</i>	-Kidnapping -Child Employment
5	<i>Crimes Against Rights/Property Involving Violence</i>	-Robbery -Robbery Using Firearms -Robbery Using Sharp Objects
6	<i>Crimes Against Rights/Property Without Violence</i>	-Theft -Burglary -Motor Vehicle Theft -Vandalism -Arson -Receiving Stolen Goods
7	<i>Crime Related Narcotics</i>	-Narcotics and Psychotropics
8	<i>Crimes related to Fraud, Embezzlement and Corruption</i>	-Fraud -Embezzlement -Corruption
9	<i>Crime Against Public Order</i>	-Crime Against Public Order

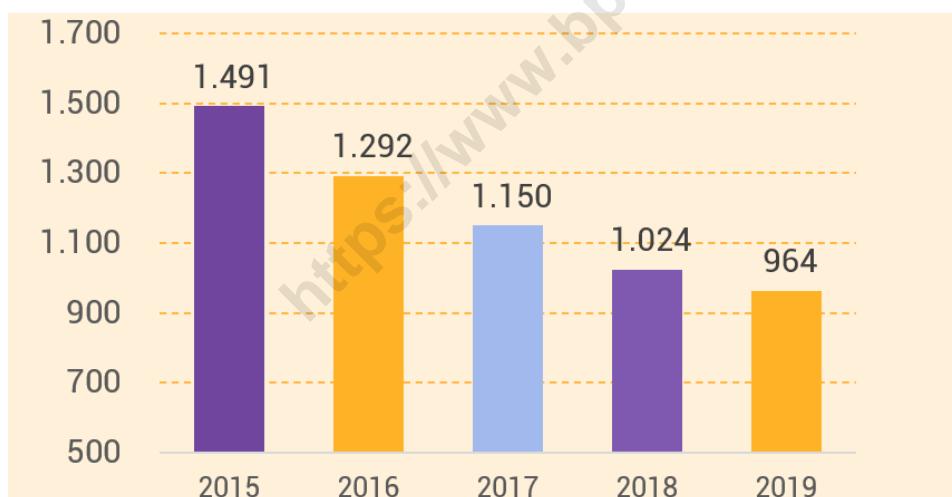


Crime Against Life (Homicide)

Crime Against Life (Murder/Homicide) is one of the crimes with the highest hierarchy in the international crime classification. Besides that, it is also the most severe punishment in the Indonesian Criminal Code. The number of incidents does not reflect the number of victims because in one incident it could be more than one person.

During the last five years, the number of incidents of crimes against life (homicide) in Indonesia has a decreasing trend. Figure 2.4 shows the number of crimes against life incidents from 2015 to 2019 has decreased. In 2015 there were 1,491 incidents (the highest in the last five years). This figure decreased in 2016 to 1,292 incidents, in 2018 to 1,024 incidents, and decreased again to 964 incidents in 2019.

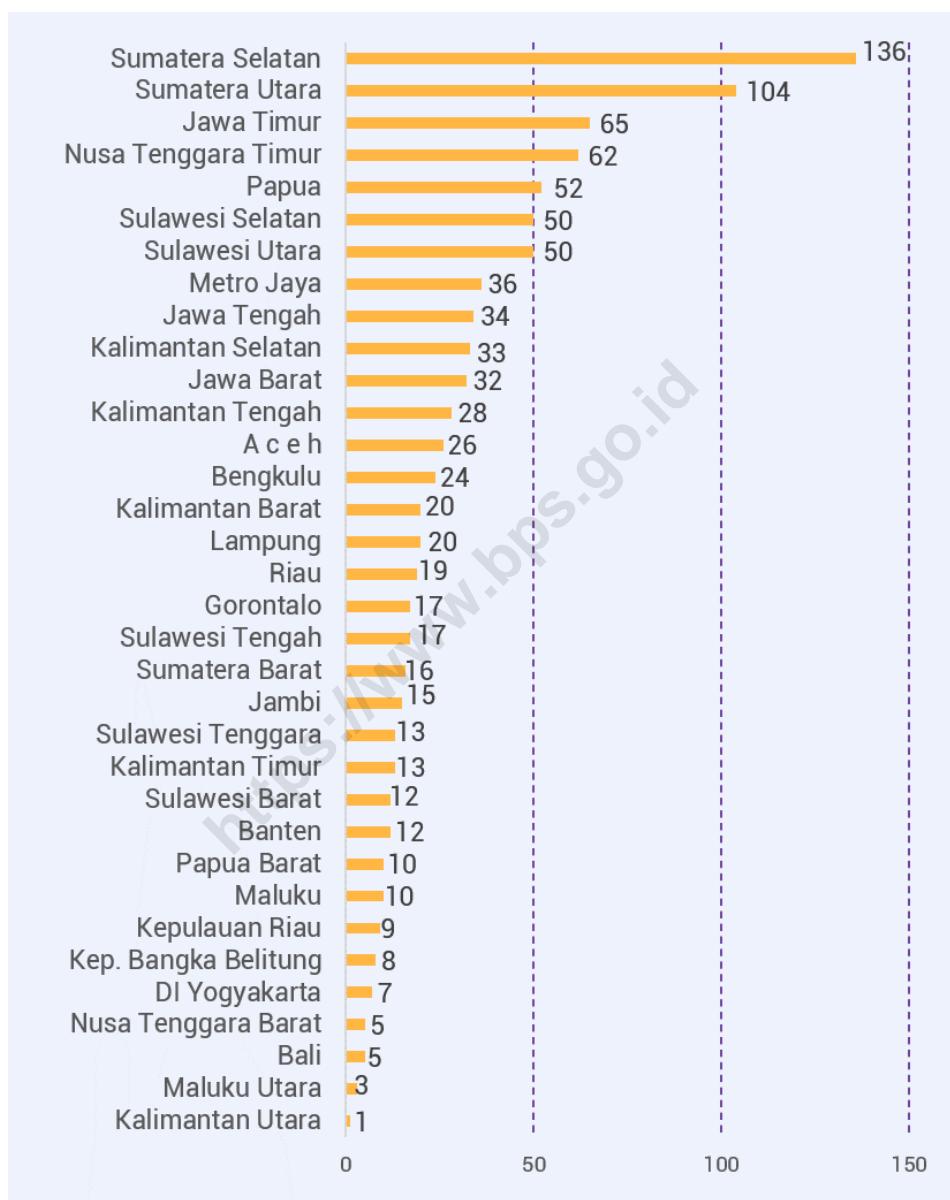
Figure 2.4 The Number of Crimes Against Life (Homicide), 2015-2019



Source: Operations Control Bureau, National Police

Based on Figure 2.5, it can be seen that the three regions with the largest number of crimes against life were Regional Police of Sumatera Selatan (136 incidents), Sumatera Utara (104 incidents), and Jawa Timur (65 incidents). The areas with the least number of incidents were in Bali, Maluku Utara, and Kalimantan Utara with five, three, and one incident respectively.

Figure 2.5 The Number of Crimes Against Life (Homicide) by Regional Police, 2015- 2019



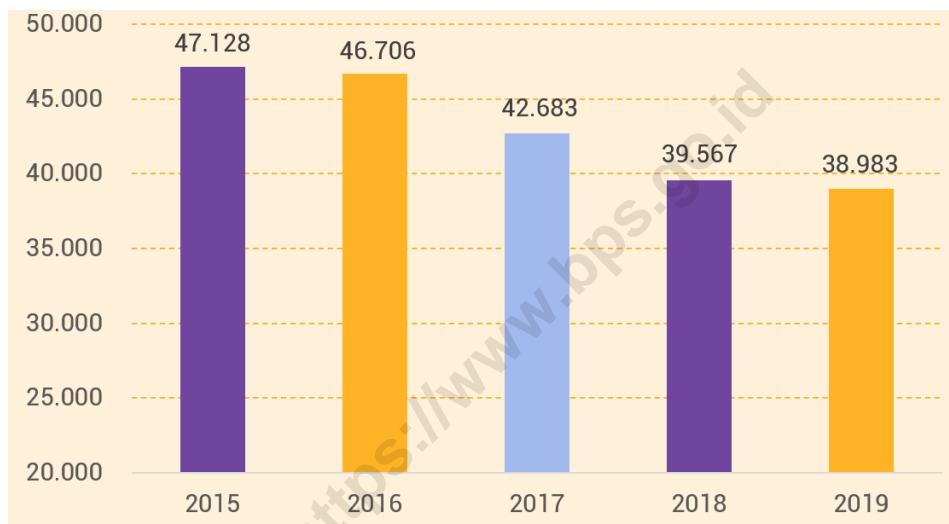
Source: Operations Control Bureau, National Police



Crime Against Physical/Body (Violence)

Crimes against physical/body include light assault, severe assault, and domestic violence. For incidents of crime against physical/body (violence) in 2019, the number of incidents in Indonesia tends to decrease. Based on Figure 2.6, in 2018 there were 39,567 incidents, meanwhile, in 2019 it decreased to 38,983 incidents.

Figure 2.6 The Number of Crime Againsts Physical/Body (Violence), 2015-2019



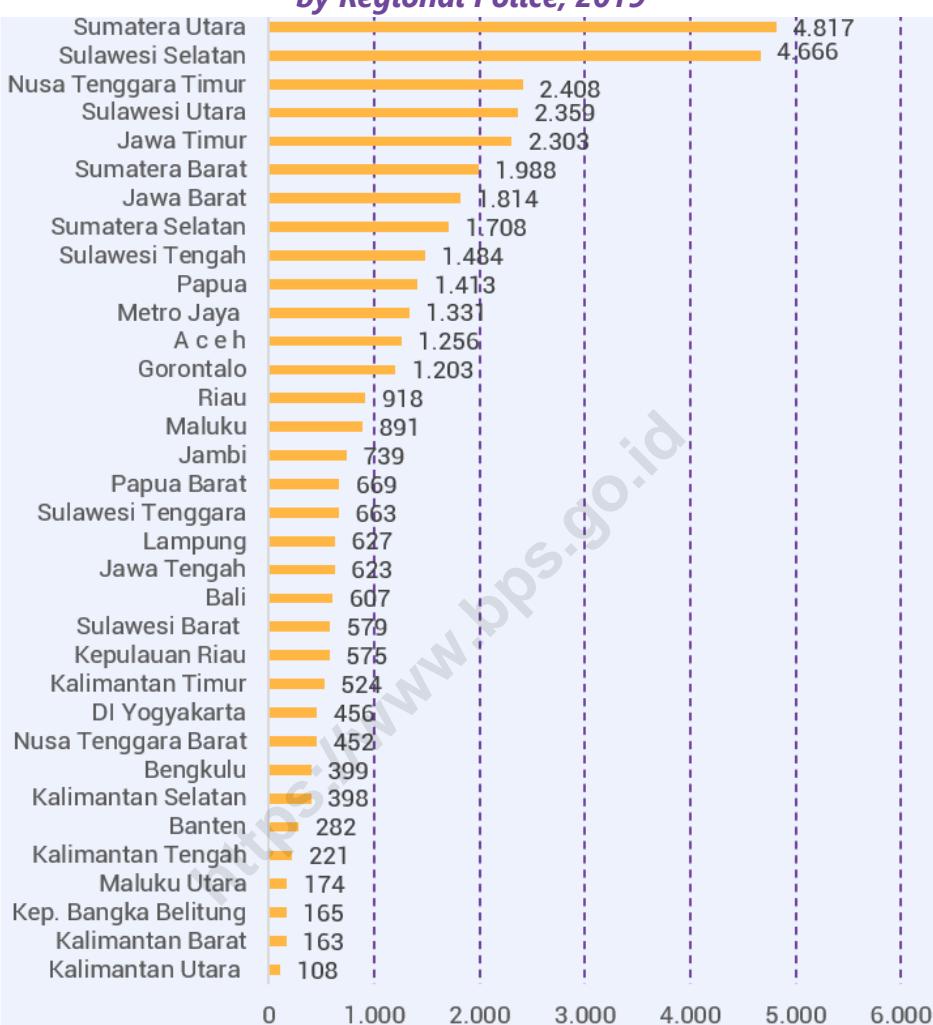
Source: Operations Control Bureau, National Police

From Figure 2.7 it can be seen that the highest number of incidents of crime against physical/body occurred in the Sumatera Utara Regional Police with 4,817 incidents. The region with the second-highest number of incidents was Sulawesi Selatan, with 4,666 incidents. The two regions with the fewest incidents of physical crimes were Kalimantan Barat and Kalimantan Utara, with 163 and 108 incidents, respectively.

Crime Related to Sexual Violence

The classification of crimes related to sexual violence consists of the types of crimes of rape and sexual abuse. The number of incidents of crimes related to sexual violence (rape and sexual abuse) in Indonesia during 2015-2019 has fluctuated. Figure 2.8 shows that in 2017 there were 5.513 incidents of crimes related to sexual violence, in 2018 it decreased to 5.258 incidents. Then the number of crimes decreased in 2019 to 5.233 incidents.

Figure 2.7 The Number of Crime Against Physical/Body (Violence) by Regional Police, 2019



Source: Operations Control Bureau, National Police

Figure 2.8 The Number of Crimes Related to Sexual Violence, 2015-2019



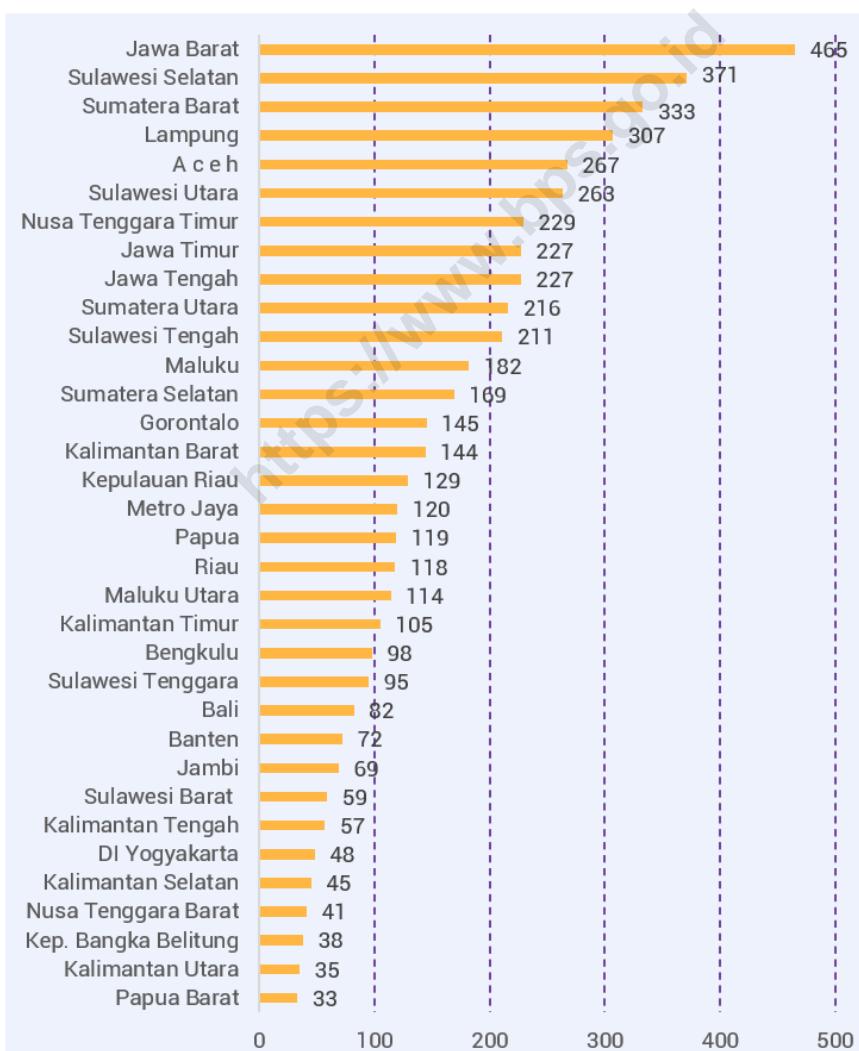
Source: Operations Control Bureau, National Police



Figure 2.9 shows that in 2018 the Jawa Barat Regional Police was the region with the highest number of crimes related to sexual violence in Indonesia, with 465 incidents. In second and third positions were the Regional Police of Sulawesi Selatan and Sumatera Barat, with 371 incidents and 333 incidents, respectively.

The region with the fewest incidents were the Regional Police of Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, and Papua Barat. The number of incidents in the three Polda were 38 incidents, 35 incidents and 33 incidents.

Figure 2.9 The Number of Crimes Related to Sexual Violence by Regional Police, 2019

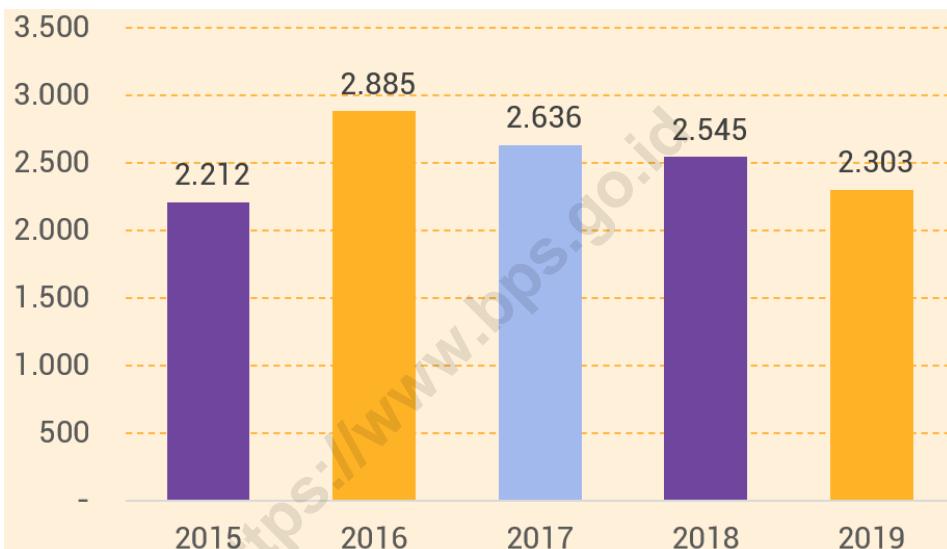


Source: Operations Control Bureau, National Police

Crime Against People Freedom

In the classification of crimes against people freedoms, it consists of the types of crimes of kidnapping and child employment. The incidents of crimes against people's freedom in 2016-2019 tend to decrease. Based on Figure 2.10 in 2017 there were 2,636 incidents and decreased to 2,545 incidents in 2018. Then it decreased again to 2,303 incidents in 2019.

Figure 2.10 The Number of Crime Against People Freedom, 2015-2019



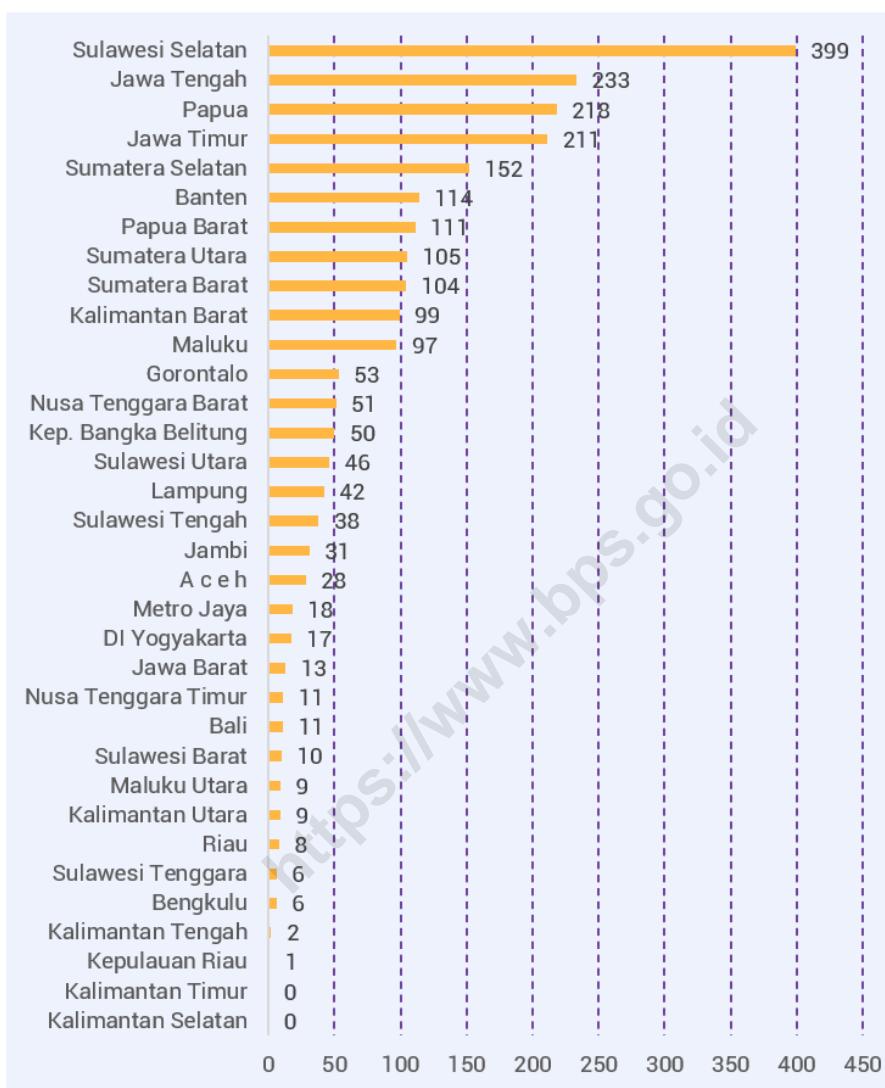
Source: Operations Control Bureau, National Police

Figure 2.11 shows the incidence of crimes against people's freedoms in 2019 by regional police/province. In this figure, it can be seen that in Sulawesi Selatan, there were the most incidents of crimes against people's freedom with 399 incidents.

In the second position is the Jawa Tengah region, with 233 incidents. Meanwhile, Papua is in third position with 218 incidents. Kalimantan Selatan and Kalimantan Timur are the Regional Police in the last position because in those regions there were no recorded incidents of this crime in 2019.



Figure 2.11 The Number of Crime Against People Freedom by Regional Police, 2019



Source: Operations Control Bureau, National Police

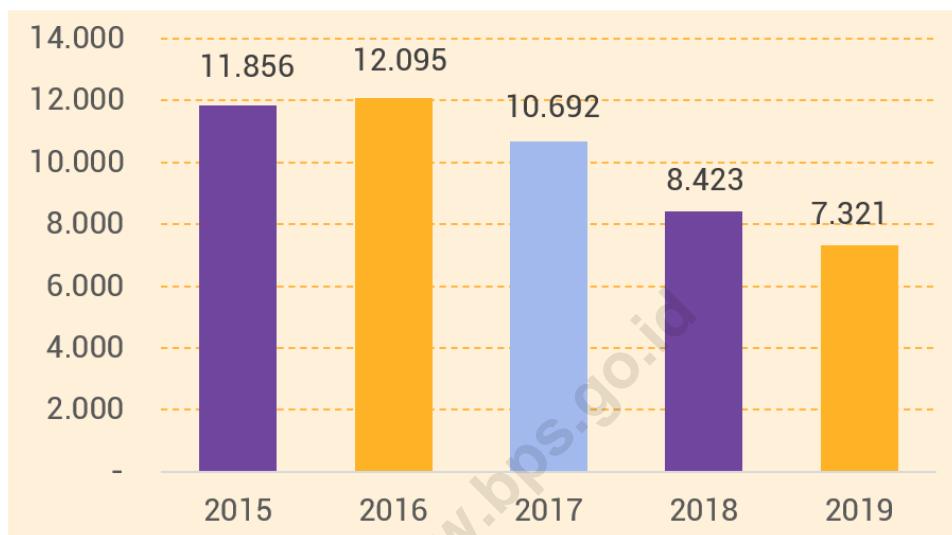
Crime Against Rights/Property with Violence

This type of crime against property involving violence is hierarchically classified as high because in addition to dealing with crimes against property, it is also a crime against physical. Types of this crime are robbery, robbery using firearms, and robbery using sharp weapons.

In 2019 the number of incidents of crimes against property involving violence in Indonesia decreased. As shown in Figure 2.12, the number

of incidents of crimes against property involving violence in 2019 was 7,321 incidents, a decrease compared to 2018 which was 8,423 incidents.

Figure 2.12 The Number of Crime Against Rights/Property with Violence, 2015-2019



Source: Operations Control Bureau, National Police

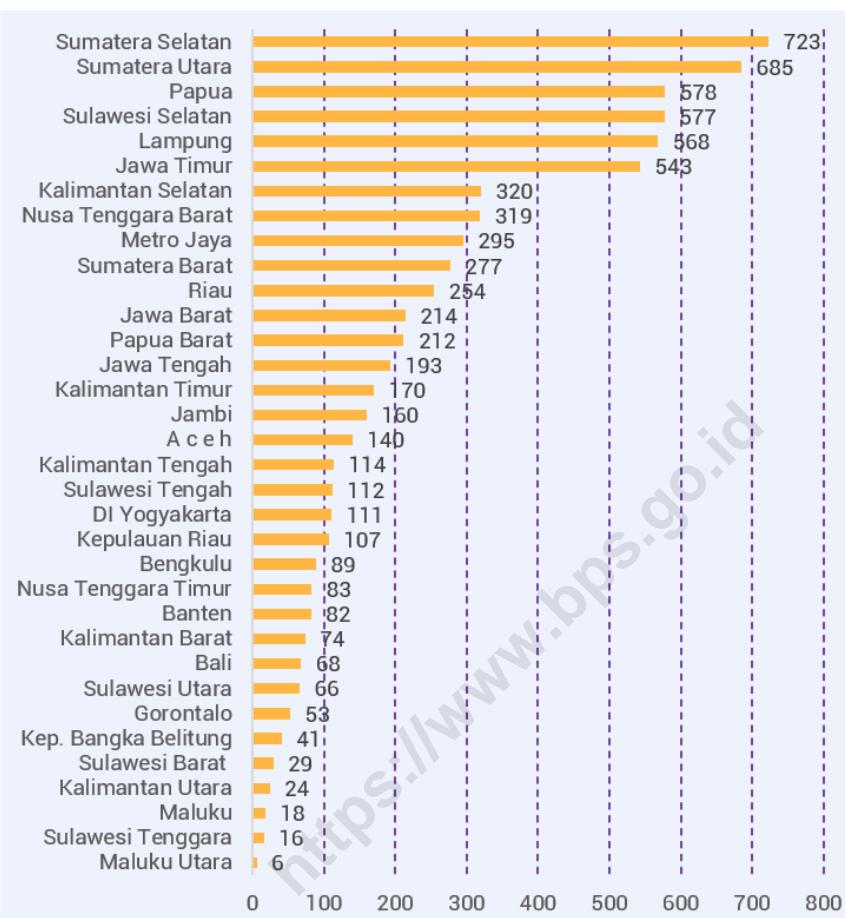
Figure 2.13 shows the number of incidents of crimes against rights/property with violence in 2019. The area with the highest number of incidents was the Sumatera Selatan Regional Police, with 723 incidents. In the second position, Sumatera Utara, with 685 incidents. The two regions with the least number of crime incidents were Sulawesi Tenggara and Maluku Utara, with 16 and 6 incidents, respectively.

Crime Against Rightss/Property without Violence

Crime against rights/property without violence includes theft, burglary, motor vehicle theft, vandalism, arson, and receiving stolen goods. The number of incidents of crimes against property without involving violence during the 2017–2019 period tends to decline. Based on Figure 2.14 in 2017 there were 107,042 incidents, to 90,757 incidents in 2018, and decreased to 80,450 incidents in 2019. Crimes against property without involving violence is the most common type of crime each year. Ordinary theft and motor vehicle theft are dominating this crime.



Figure 2.13 The Number of Crime Against Rights/Property with Violence by Regional Police, 2019



Source: Operations Control Bureau, National Police

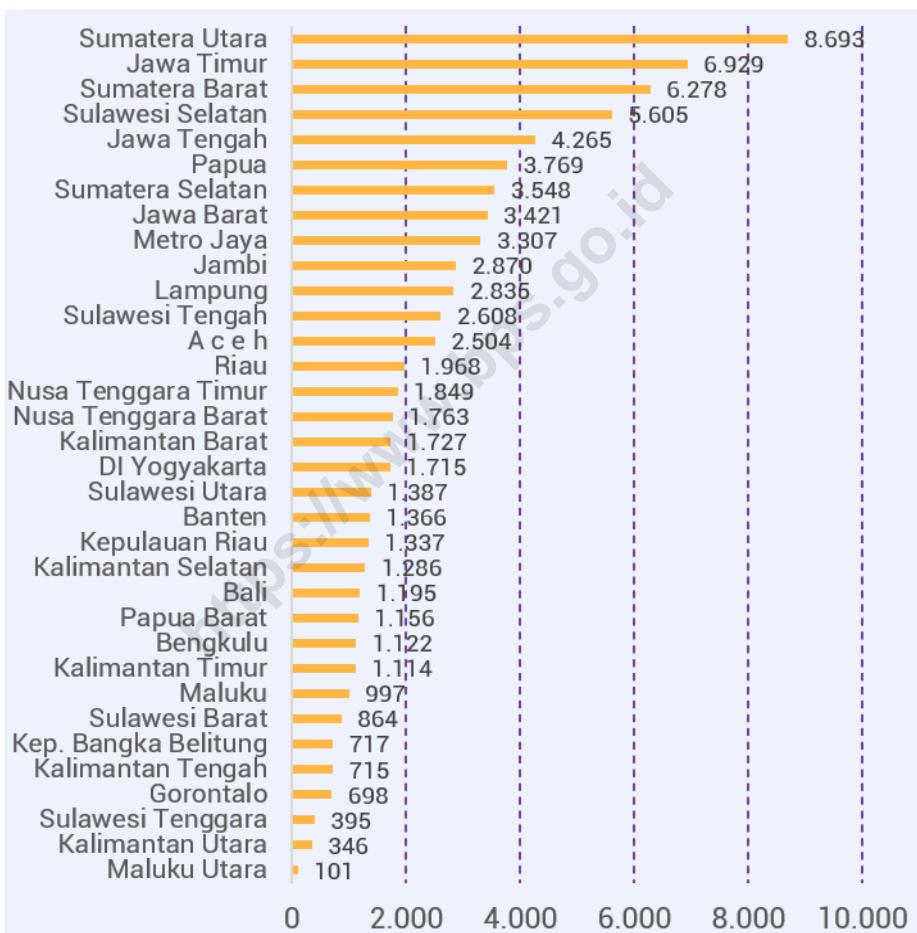
Figure 2.14 The Number of Crime Againts Rights/Property Without the Use of Violence, 2015-2019



Source: Operations Control Bureau, National Police

Figure 2.15 shows the number of incidents of crime against property without involving violence. The Sumatera Utara Regional Police was in first place with 8,693 crimes. In second place is the Jawa Timur region with 6,929 incidents. The two regions with the least number of incidents were Kalimantan Utara and Maluku Utara with 346 and 101 incidents, respectively.

Figure 2.15 The Number of Crime Against Rights/Property Without of Violence by Regional Police, 2019



Source: Operations Control Bureau, National Police

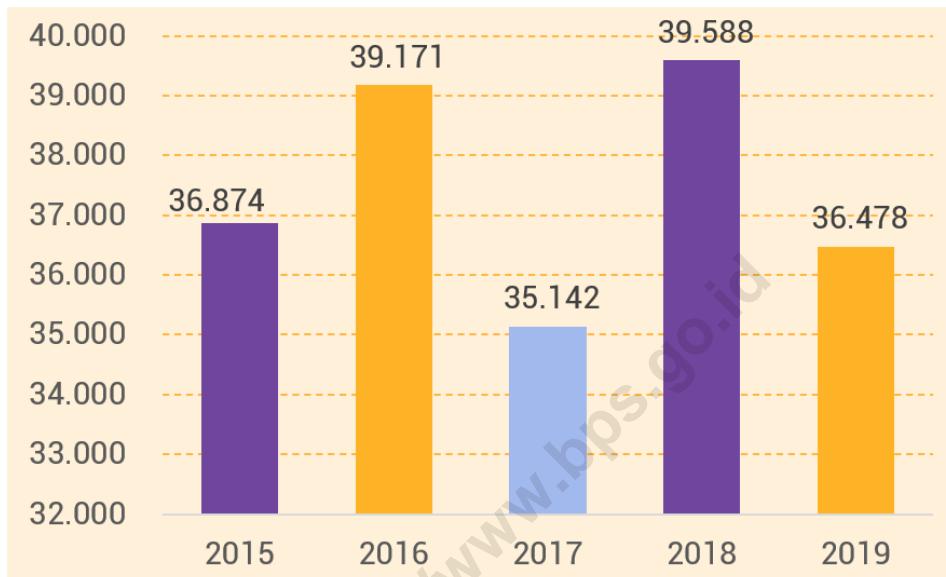
Crime Related to Narcotics

Narcotics related crimes are included in extraordinary crimes. In 2019, this type of crime had a similar pattern to other types of crime. Based on Figure 2.16, the number of incidents of narcotics-related crimes in Indonesia in 2015-2019 tends to fluctuate.



This figure shows that the highest number of narcotics related crimes occurred in 2018 with 39,588 incidents. This figure has increased compared to 2017 (35,142 incidents). However, in 2019 this figure decreased to 36,478 incidents.

Figure 2.16 The Number of Crimes Related to Narcotics, 2015-2019



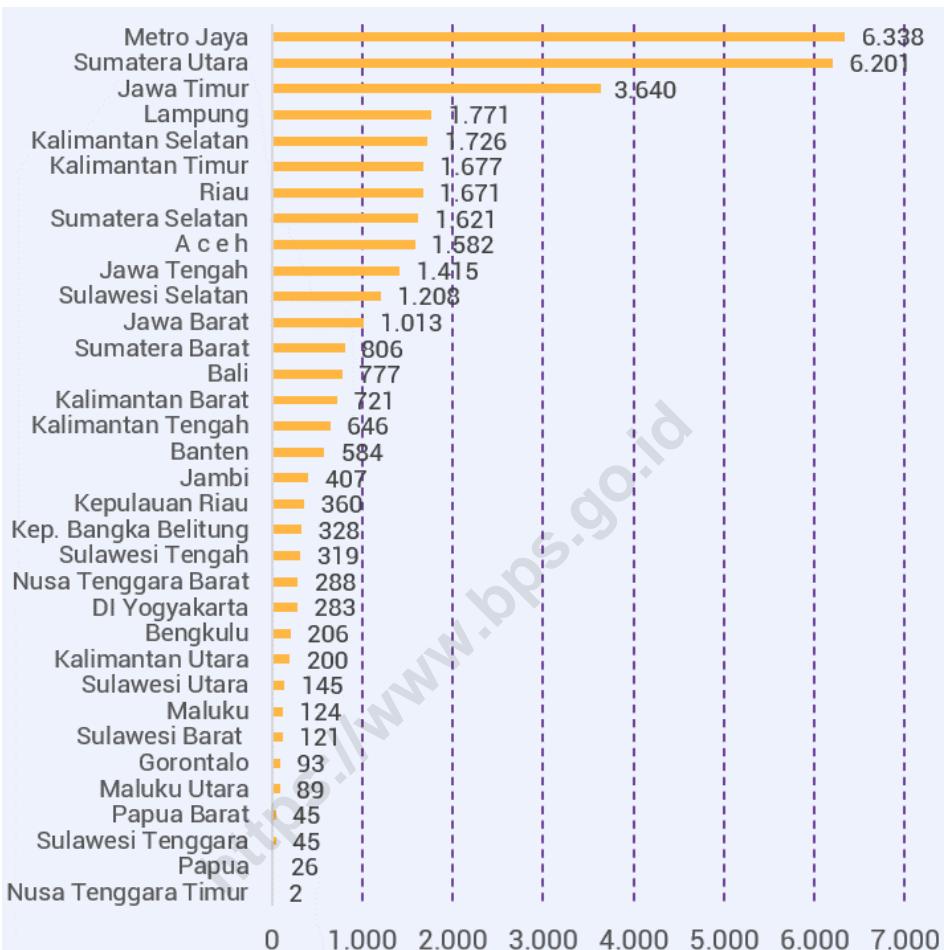
Source: Operations Control Bureau, National Police

Figure 2.17 shows that in 2019 the three regions with the most number of narcotics-related crimes were Metro Jaya with 6,338 incidents, Sumatera Utara with 6,201 incidents, and Jawa Timur with 3,640 incidents. Figure 2.17 also shows the regions with the lowest number of incidents were the Regional Police of Sulawesi Tenggara, Papua, and Nusa Tenggara Timur, each with 45 incidents, 26 incidents and 2 incidents. For information, crimes that are included in the crime related to drugs are narcotics and psychotropic crimes.

Crime Related to Fraud, Embezzlement, and Corruption

Figure 2.18 shows the incidence of crimes related to fraud, embezzlement, and corruption recorded by the Police during the 2015-2019 period tended to decline. In 2015 there were 54,115 incidents, in 2016 there were 49,198 incidents, while in 2017 there were 47,594 incidents, and in 2018 there 43,852 incidents. Then in 2019 it fell back to 39,320 incidents.

Figure 2.17 The Number of Crimes Related to Narcotics by Regional Police, 2019



Source: Operations Control Bureau, National Police

Figure 2.18 The Number of Crimes Related to Fraud, Embezzlement, and Corruption, 2015-2019



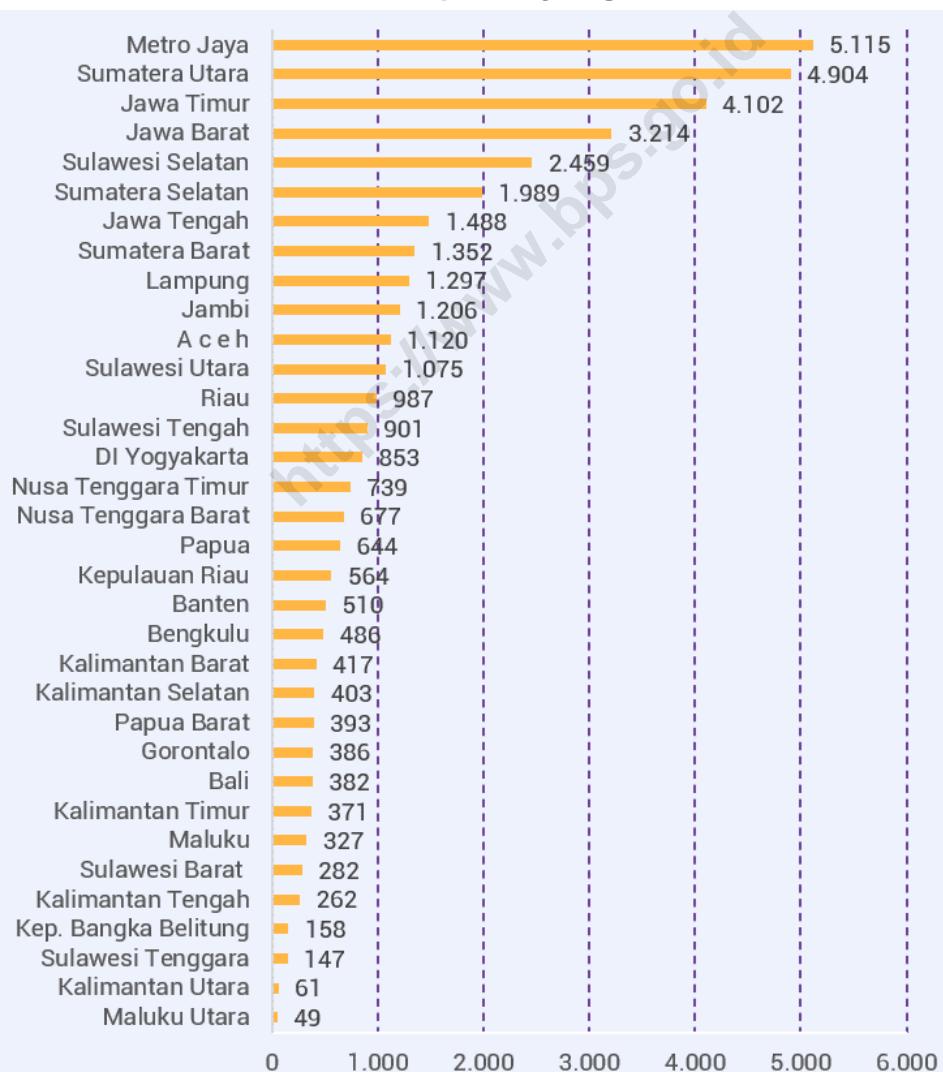
Source: Operations Control Bureau, National Police



Figure 2.19 shows that the regional police with the highest number of crimes related to fraud, embezzlement and corruption is Metro Jaya, which has 5,115 incidents. Meanwhile, the regional police with the second highest number of incidents was the Sumatera Utara Regional Police, with 4,904 incidents.

Figure 2.19 also show that Kalimantan Utara and Maluku Utara were the areas with the lowest number of these crimes, namely 61 and 49 incidents, respectively. Fraud is the type of crime that occurs most frequently in this crime classification.

Figure 2.19 The Number of Crimes Related to Fraud, Embezzlement, and Corruption by Regional Police, 2019



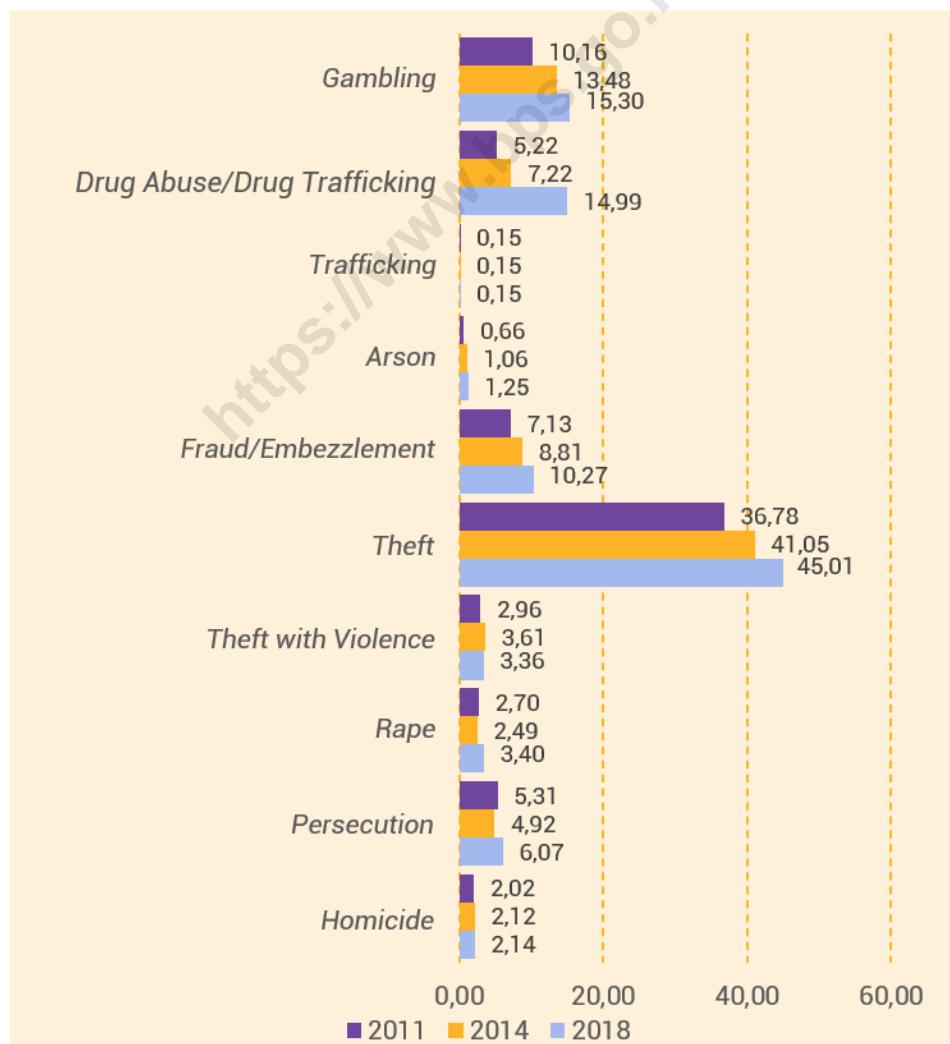
Source: Operations Control Bureau, National Police

Description of Crime Incidents Based on Territorial

The crime incidence data in the previous discussion was sourced from the National Police's data which used the perpetrator approach. In addition, the incidence of crime can also be seen based on territorial/regional scope.

This section will show an overview of the situation and progress of crime incidents experienced by the people based on the coverage of the number of villages/kelurahan that have experienced crimes. This data is obtained from the Village Potential Statistics which is conducted by BPS every three years.

Figure 2.20 The Number of Villages/Kelurahan Where Crimes Occured in the Last Year by the Type of Crimes, 2011, 2014, and 2018



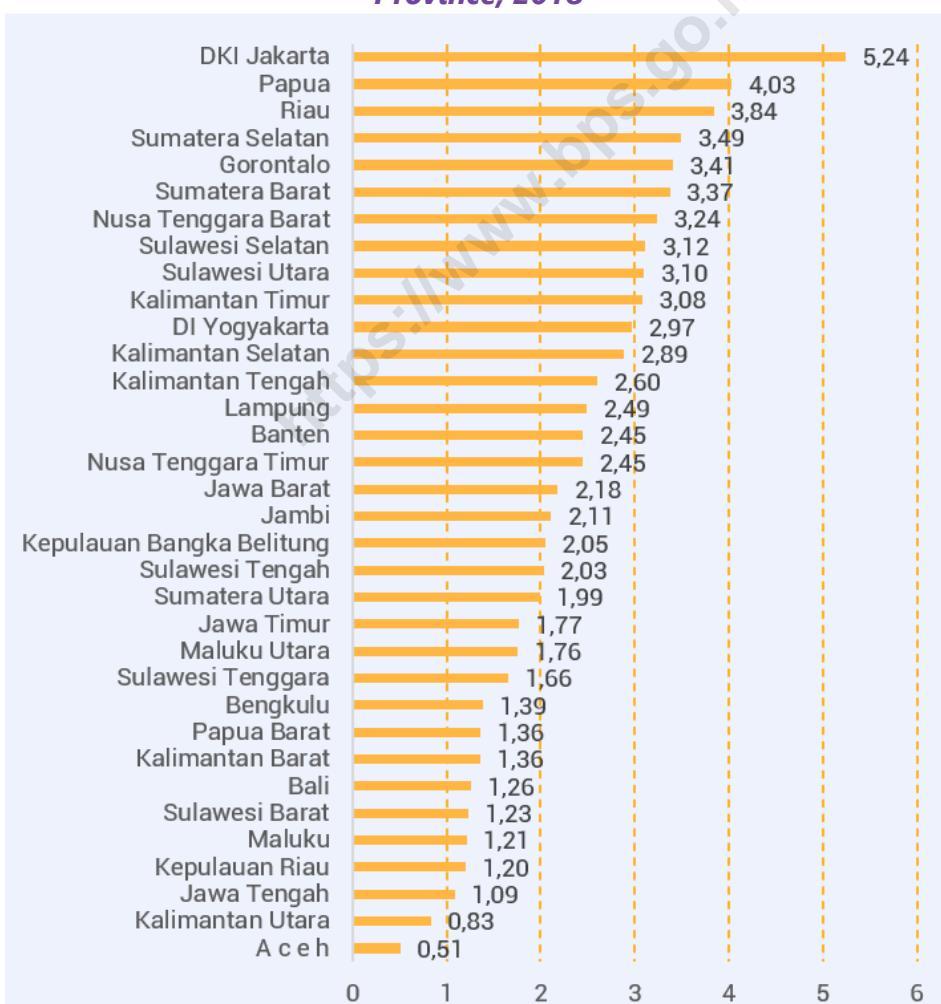
Source: Village Potential Statistics, BPS



In Figure 2.20 it can be seen that during the 2011-2018 period, theft was the most common crime in villages/ kelurahan in Indonesia. The number of theft incidents reached more than 36-45 percent of all villages.

The percentage of villages that experienced theft in the 2011-2018 period continued to increase. In 2011, 36.78 percent of villages experienced thefts. In 2014 this number increased to 41.05 percent and in 2018 to 45.01 percent. During 2018, from several types of crimes measured, there were six types of crime that experienced an increase, homicide, assault, rape, theft, fraud/embezzlement, arson, drug abuse/trafficking, and gambling.

Figure 2.21 The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Homicide Crimes in the Last Year by Province, 2018

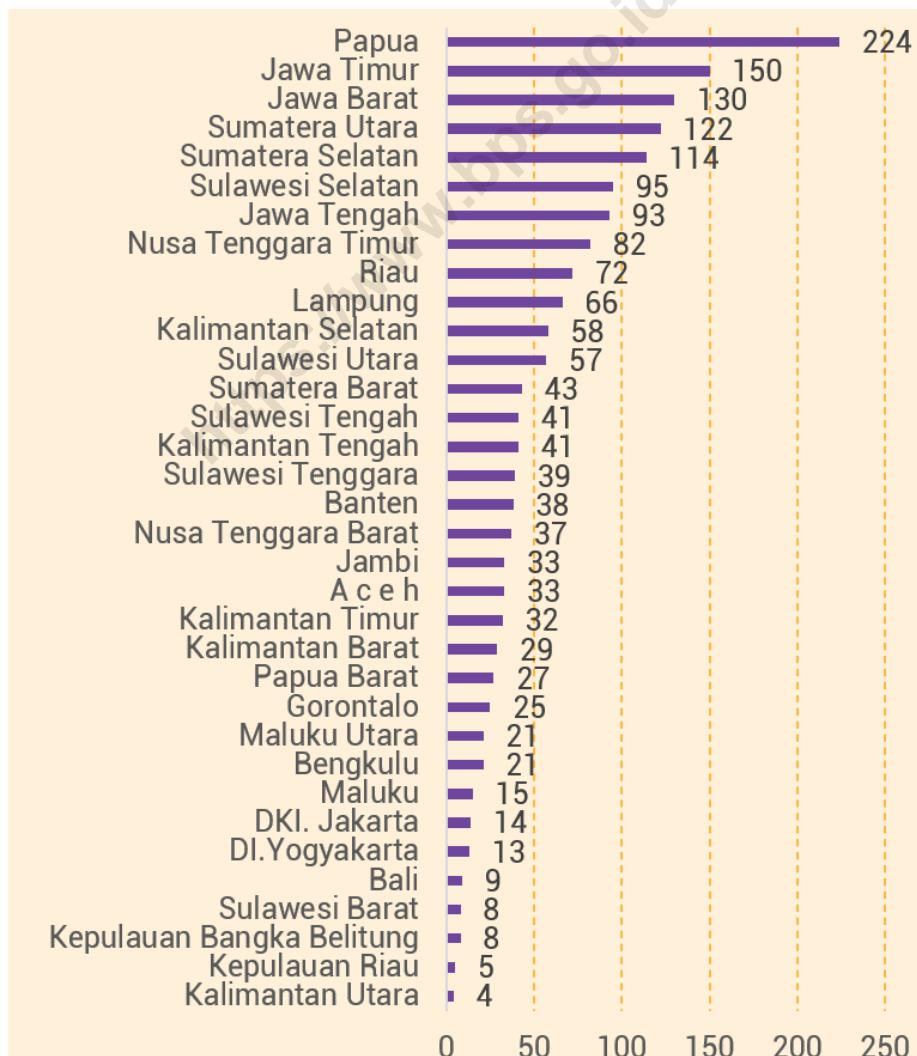


Source: Village Potential Statistics, BPS

Based on Figure 2.21 in terms of numbers, the five provinces with the largest percentage of villages/kelurahan where the crime of murder were committed (the ratio of the number of villages/kelurahan that experienced the incident divided by the total number of villages/kelurahan in one province) are DKI Jakarta (5.24), percent, Papua (4.03 percent), Riau (3.84 percent), and Sumatera Selatan (3.49 percent), respectively.

When viewed from the number of villages/kelurahan that have experienced murder crimes during the past year (Figure 2.22), some provinces had largest number. Those provinces are Papua, Jawa Timur, and Jawa Barat.

Figure 2.22 The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Homicide Crimes in the Last Year by Province, 2018

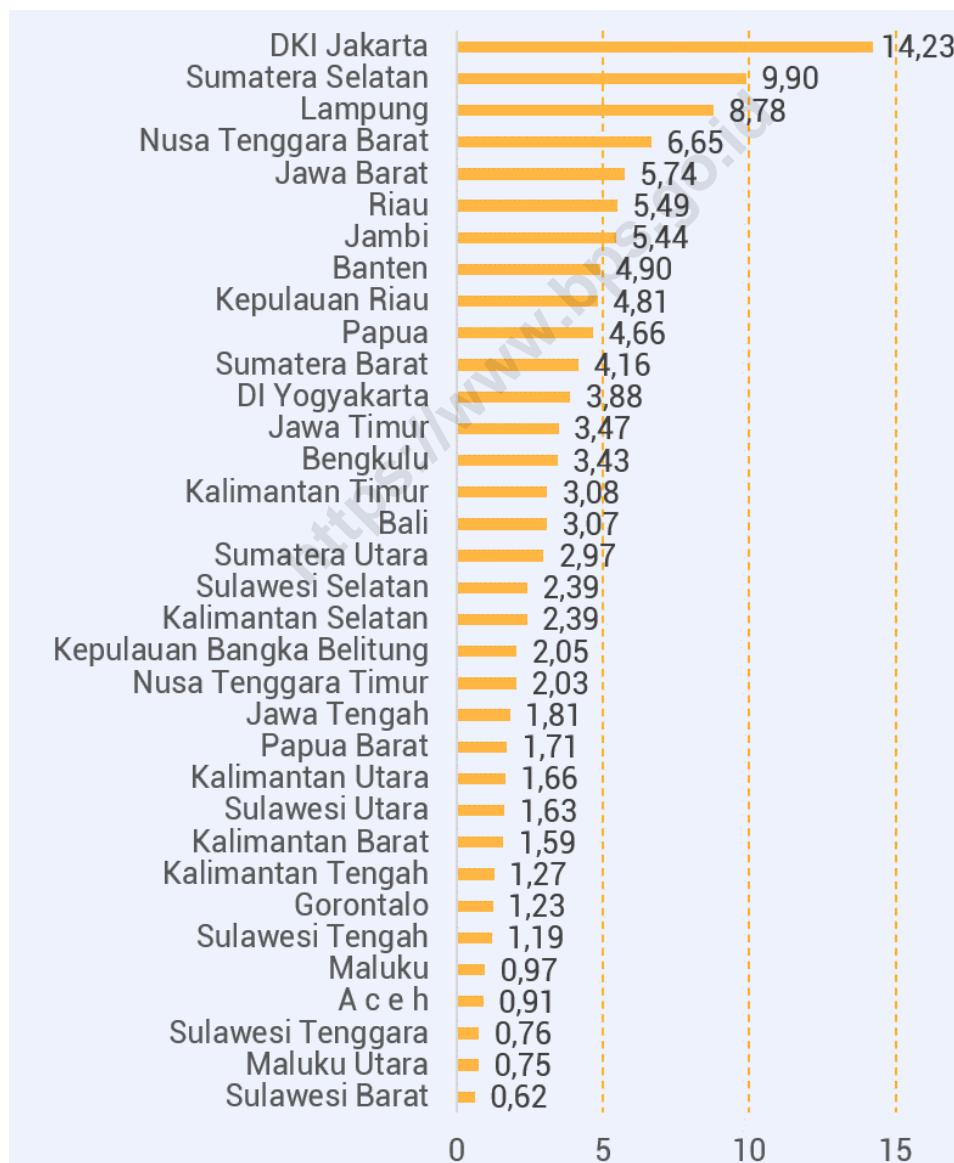


Source: Village Potential Statistics, BPS



Based on Figure 2.23, in 2018 the percentage range of violent theft crimes in 34 provinces ranged from 0.62 to 14.23 percent. Three provinces with the largest percentage of villages/kelurahan where murder crimes have occurred (the ratio of the number of villages that experienced the incident divided by the total number of villages/kelurahan in one province) were DKI Jakarta (14.23 percent), Sumatera Selatan (9.90 percent), and Lampung (8.78 percent).

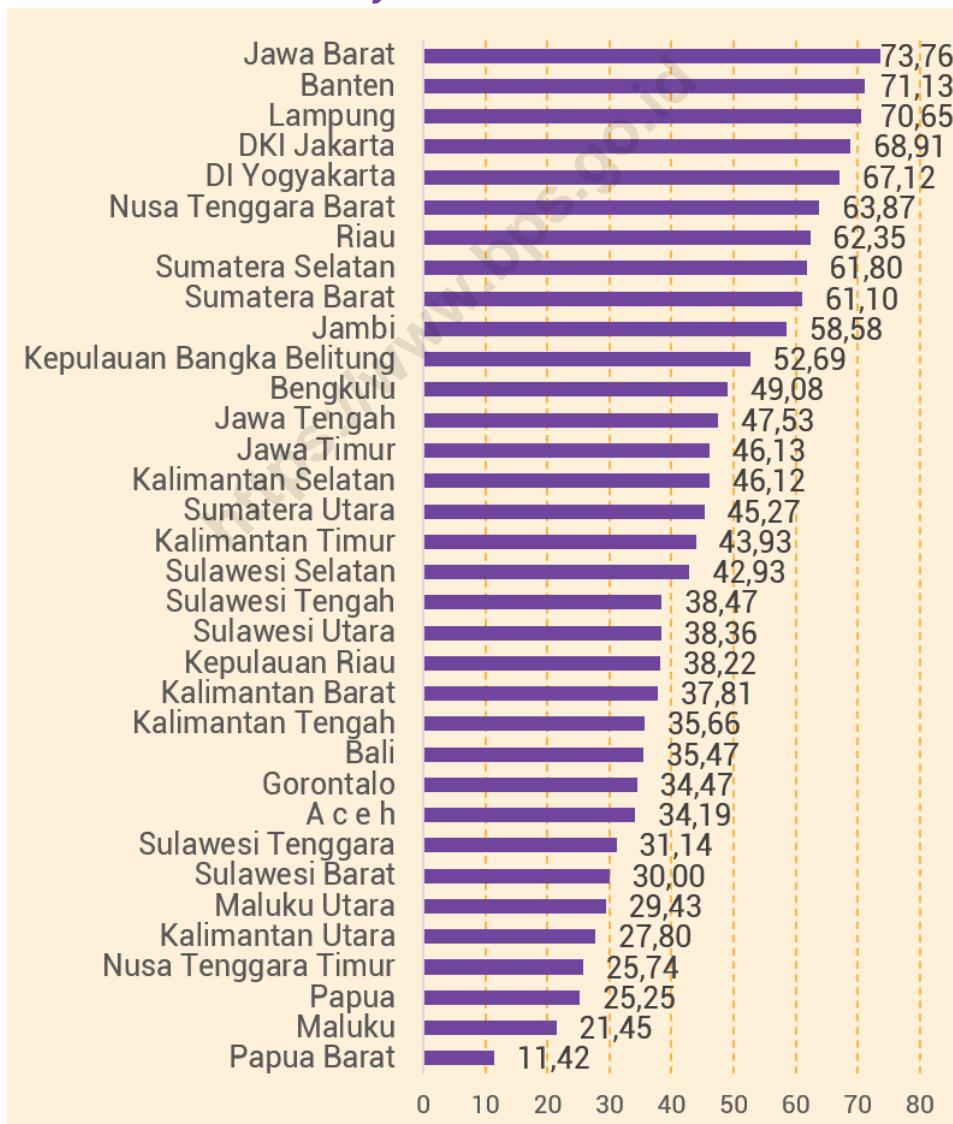
Figure 2.23 The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Violent Theft in the Last Year by Province, 2018



Source: Village Potential Statistics, BPS

For the incidence of theft without violence as presented in Figure 2.24, the percentage range of villages that experienced theft during 2018 is in the range of 11.42 - 73.76 percent of the total villages in each province. Three provinces with the largest percentage of villages/kelurahan where there have been crimes of theft (without violence) (the ratio of the number of villages that experienced the incident divided by the total number of villages in one province), respectively were Jawa Barat (73.76 percent), Banten (71.13 percent), and Lampung (70.65 percent).

Figure 2.24 The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Theft (Without Violence) in the Last Year by Province, 2018

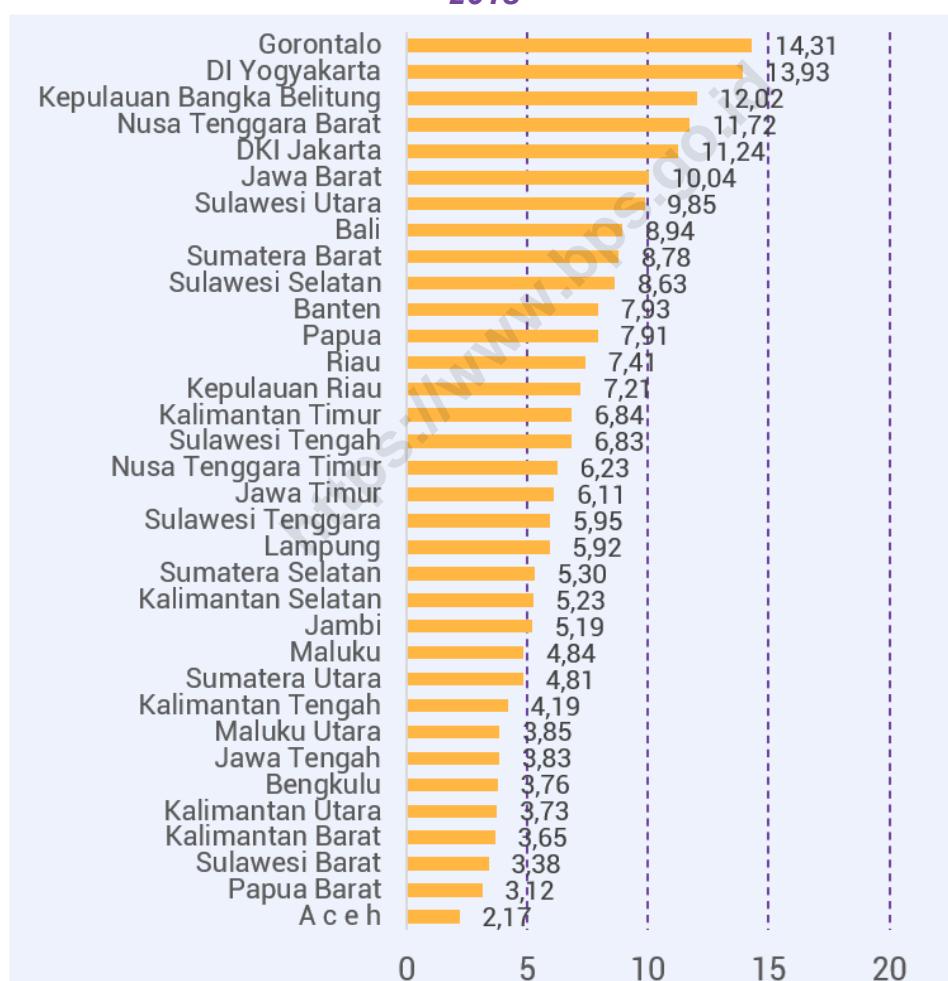


Source: Village Potential Statistics, BPS



For incidents of assault as shown in Figure 2.25, the percentage range of villages/kelurahan that experienced assault during 2018 is in the range of 2.17 - 14.31 percent of the total villages/kelurahan in each province. The three provinces with the highest percentage of crimes of assault (the ratio of the number of villages/kelurahan that experienced the incident divided by the total number of villages/kelurahan in one province) were Gorontalo (14.31 percent), DI Yogyakarta (13.93 percent), and Kepulauan Bangka Belitung (12.02 percent).

Figure 2.25 The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Assault During the Last Year by Province, 2018

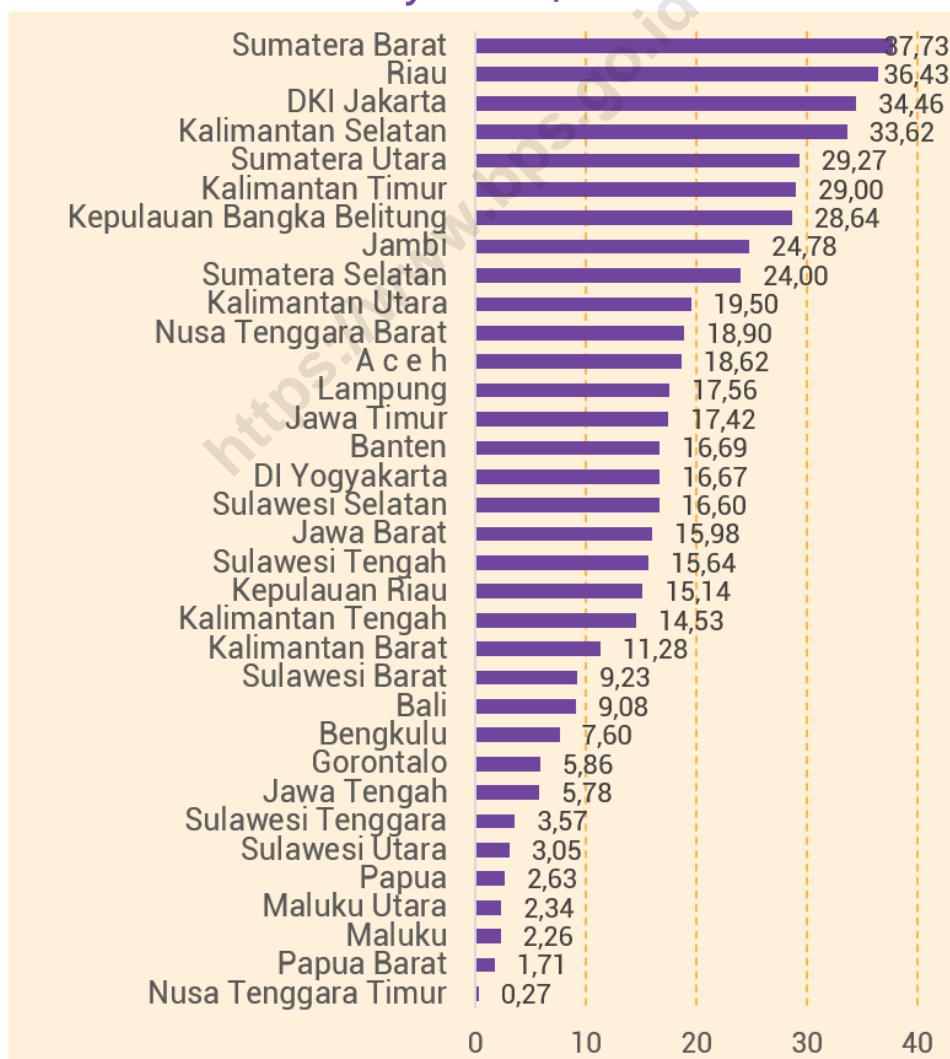


Source: Village Potential Statistics, BPS

Of the total types of crimes that occurred during the 2018 period in various regions in Indonesia, one type of incident that received special attention was the incident of drug abuse and trafficking. As shown in

Figure 2.26, the incident has spread to a number of villages in all provinces in Indonesia, as is the case of theft and maltreatment. The coverage of drug crimes in almost all provinces during the 2018 period was in the range of 0.27 - 37.73 percent of the total villages in each province. The three provinces with the largest percentage of villages where drug abuse and trafficking have occurred (the ratio of the number of villages that have experienced the incident divided by the total number of villages in one province), respectively are West Sumatra (37.73 percent), Riau (36.43 percent), and DKI Jakarta (34.46 percent).

Figure 2.26 The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Drug Abuse and Trafficking During the Last Year by Province, 2018



Source: Village Potential Statistics, BPS



Mass Conflict

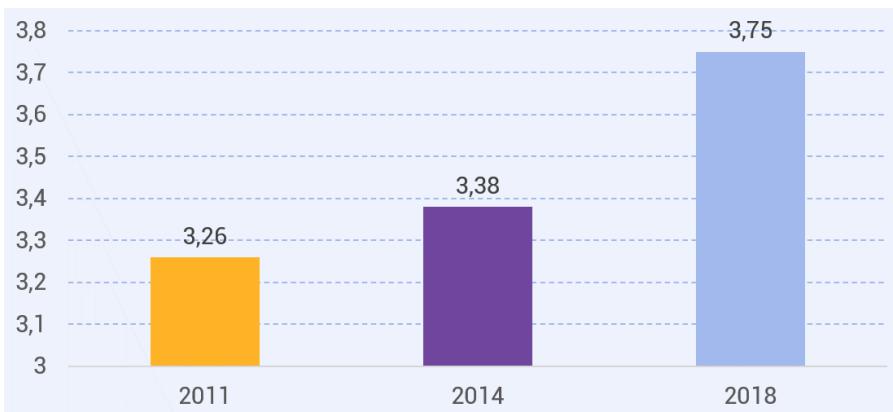
This section provides an overview of the phenomenon of conflict in the form of mass fighting that occurred in Indonesia and its development over the past decade. Aspects seen include the type and scope of mass fights and the efforts to resolve them. Apart from being categorized as a crime, mass fights are considered a condition that can disturb security.

Etymologically, conflict comes from the Latin verb "configere" which means to hit each other (Hafidhuddin, 2001). In the Big Indonesian Dictionary, conflict is quarrels, disputes, contradictions. In terminology, Soekanto (2005) defines contradiction or dispute (conflict) is a social process in which individuals or groups try to fulfill their goals by challenging the opposing party accompanied by threats and / or violence. Extreme conflicts will lead to violence and mass fighting.

The main source data is spatial data obtained from Village Potential Statistics (Podes). The observation unit in collecting Podes statistical data is all villages in the territory of Indonesia. In line with that, the study of mass fights in this section will generally be seen from the coverage of the number or percentage of villages that were the scene or location of the incident.

As shown in Figure 2.27, the results of the 2011, 2014, and 2018 Podes show an increasing trend in the number and percentage of villages experiencing mass fights. The number of villages/kelurahan that experienced mass fights during the past year continued to increase from 3.26 percent of villages/kelurahan in 2011 to 3.38 percent of villages/kelurahan in 2014, then in 2018 it increased again to 3.75 percent in 2018.

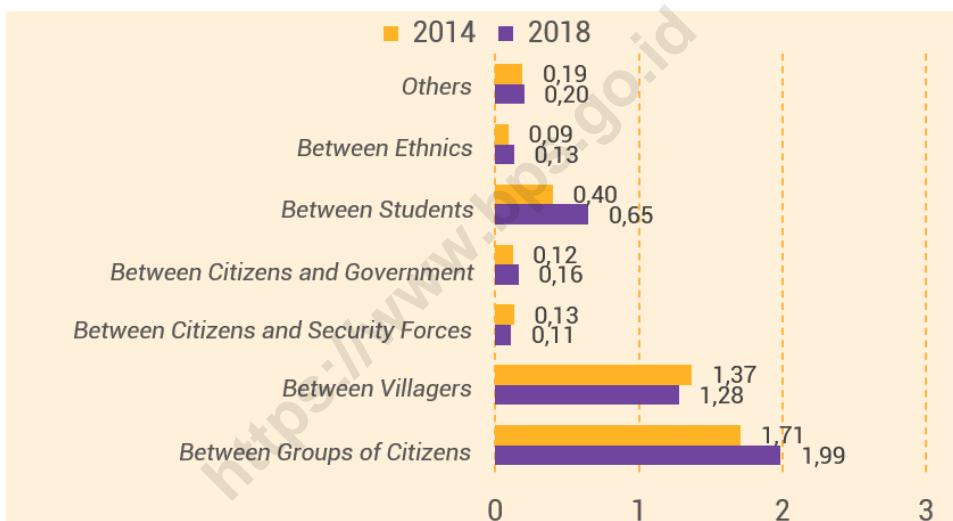
Figure 2.27 The Percentage of Villages/Kelurahan throughout Indonesia Ever Happened Mass Fights, 2011, 2014, and 2018



Source: Village Potential Statistics, BPS

Types of mass fighting incidents covered in Podes 2018 include fights between groups of residents, fights between villagers, citizen fights with security forces, fights between residents and government officials, fights between students, and fights between ethnic. The 2018 Podes results show that fights between groups of residents were the most frequent mass fights, followed by fights between villagers. The percentage of villages/kelurahan that experienced fights between groups of residents was 1.71 percent in 2014, increasing to 1.99 percent in 2018 (figure 2.28).

Figure 2.28 The Percentage of Villages/Kelurahan throughout Indonesia Ever Happened Mass Fights by the Types, 2014 and 2018



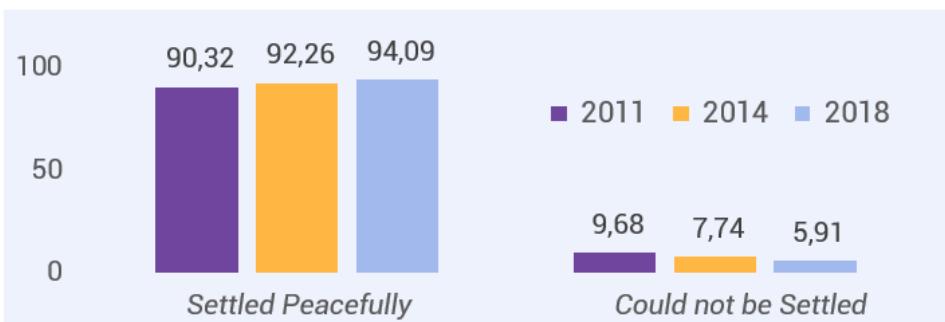
Source: Village Potential Statistics, BPS

The government realizes that the vulnerability of conflict in Indonesia can create divisions. Therefore, as an effort to overcome the issue of conflict the government has passed Law no. 7 of 2012 concerning the handling of social conflicts. In this law, it is stated that the government plays an active role in resolving all forms of conflicts or physical clashes and other violence that cause insecurity and social disintegration which disturbs national stability and hinders national development.

Gurr in Soetopo (2001) explained that strategies that are seen as more effective in managing conflict, include: (1) peaceful consistency, namely controlling conflict in a way that does not interfere with and harms one another, by establishing regulations that refer to peace and are implemented strictly and consistently; (2) with mediation (intermediary). If the conflict is deadlocked, each of them can point to a third party to act as an intermediary who plays an honest and fair role and is impartial.

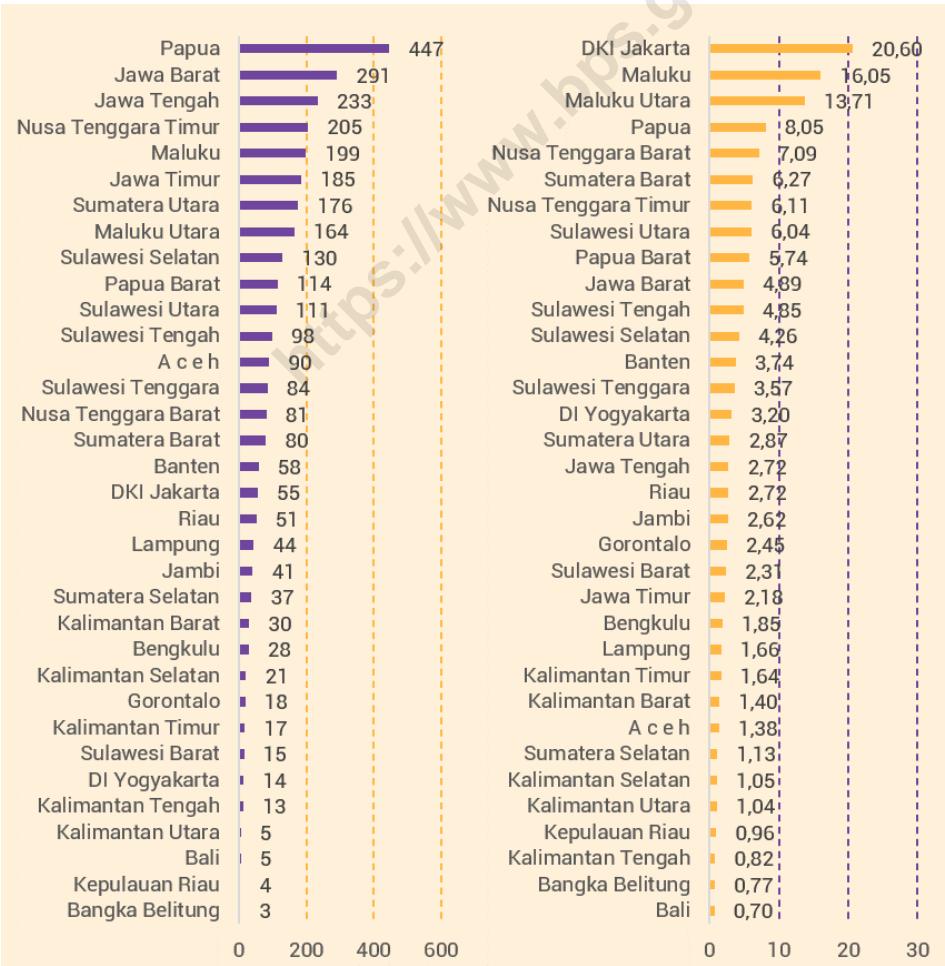


Figure 2.29 The Percentage of Villages/Kelurahan throughout Indonesia Ever Happened Mass Fights by the Settlement, 2014 and 2018



Source: Village Potential Statistics, BPS

Figure 2.30 The Number and The Percentage of Villages/Kelurahan with Mass Conflict Events During the Last Year by Province, 2018



Source: Village Potential Statistics, BPS

Podes data for 2011, 2014, and 2018 show that more than 90 percent) of the frequent mass fighting incidents have been resolved (Figure 2.29). However, there are still incidents where public participation and awareness are needed to immediately resolve the mass conflict that occurred in their villages/kelurahan, so that about 5.91 percent of conflicts that cannot be resolved immediately find a solution.

If we look in more detail at the provinces, we can see variations in the development of the incidence of mass fighting. During the 2018 period, the provinces of DKI Jakarta (20,60 percent), Maluku (16,05 percent), and Maluku Utara (13,71 percent) were the provinces with the largest percentage of villages that had experienced mass fights in the past year. Meanwhile, in terms of numbers, the provinces with the highest number of villages that have experienced fighting are Papua (447), Jawa Barat (291), and Jawa Tengah (233).

Efforts to Maintain Security

This section provides an overview of the efforts and community participation undertaken to maintain security in the village/kelurahan where they live and their development over the past decade. The data used is regional data (spatial data) with the observation unit of all villages/kelurahan in the territory of Indonesia (Village Potential data collection).

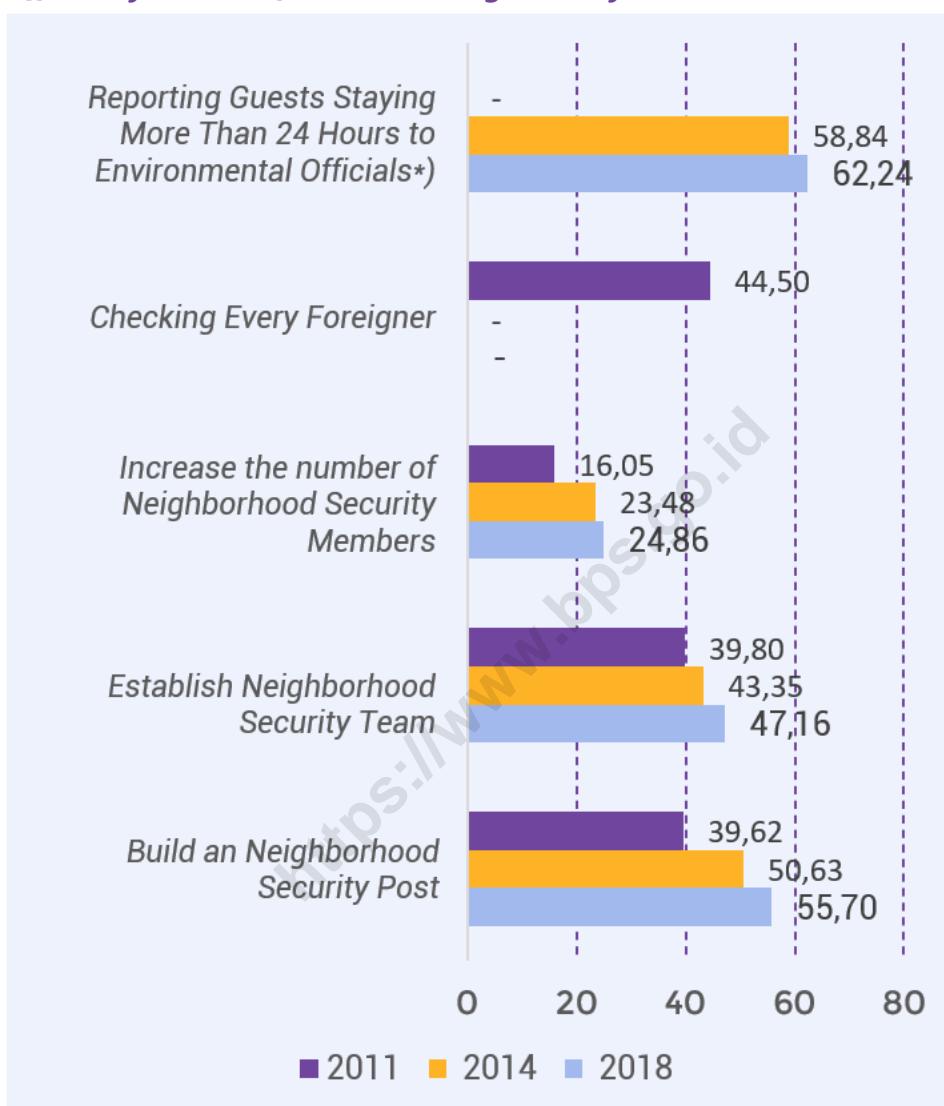
In line with that, the level and development of efforts and community participation to maintain security in this section will be seen from the scope and development of the number of villages/kelurahan that are making these efforts.

From Figure 2.31, it can be seen that the most efforts made by villagers to maintain security during 2018 in succession were reporting guests staying more than 24 hours to environmental officials, building environmental security posts (poskamling), forming environmental security teams, and increasing the number of members of the hansip / linmas. In 2018 more than half of the villages / kelurahan in Indonesia carried out activities to maintain security by intensifying guest reporting and building environmental security posts (poskamling).

A description of the efforts and participation of village communities in maintaining security in detail by province during the 2011-2018 period is presented in the attachment table. From these tables, it can be seen that the efforts of citizens to maintain security by building environmental security posts (poskamling) have increased in almost all provinces in



Figure 2.31 The Percentage of Villages/Kelurahan by Type of Efforts by Citizens for Maintaining Security, 2011, 2014, and 2018



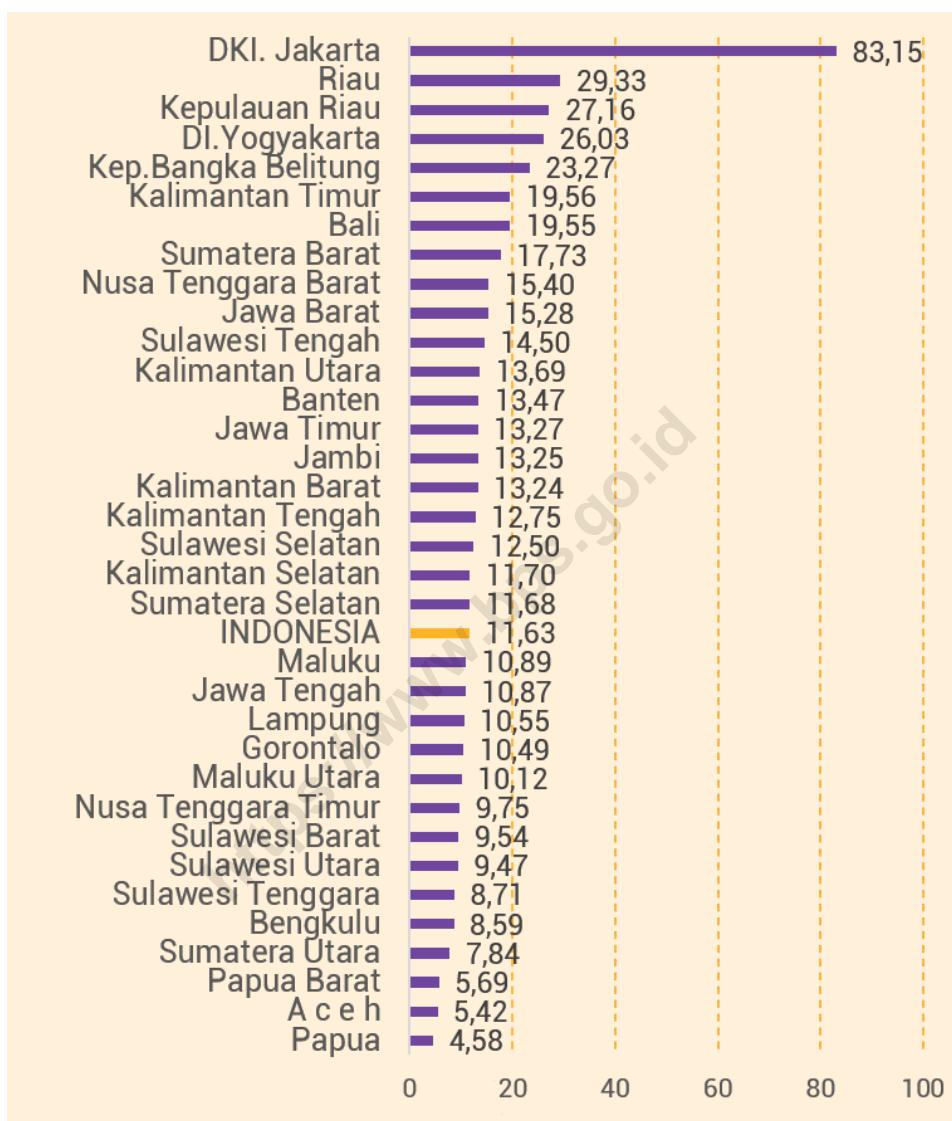
Source: Processed from Podes 2011, Podes 2014, and Podes 2018

Note: *) In Podes 2014 the question Checking Every Foreigner is changed to Reporting Guests Staying More than 24 Hours to Environmental Officials

Indonesia.

Apart from the citizen aspect, efforts to maintain security and order are also a function of the authorized apparatus, in this case the Police. The Podes data shows the villages/kelurahan in which there are police posts. As shown in Figure 2.32 shows that only about 11.63 percent of all villages/kelurahan in Indonesia have police posts in their territory (including Polsek, Polres, and Polda). However, from around 88.37 percent of villages/kelurahan that do not have a police post, around 80.75 percent of them stated that access to the nearest Police Station tends to be easy

Figure 2.32 The Percentage of Villages/Kelurahan with Police Stations by Province, 2018



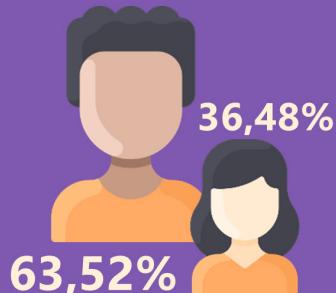
Source: Processed from Podes 2011, Podes 2014, and Podes 2018



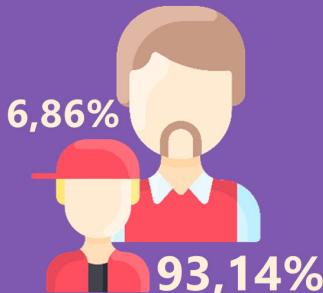
https://www.bps.go.id

03 VICTIMS OF CRIME

1,01% of population of Indonesia became victims of crime in 2019



More males became victims of crime than females in 2019



Most of the population who became victims of crime in 2019 were adults



22,19% of population of Indonesia who were victims of crime reported the experience to the police in 2019



21,46% of population who reported the experience receiving/accompanied by legal aid in 2019



https://www.bps.go.id



CHAPTER III. VICTIMS OF CRIME

Crime Victims Population

This section provides an overview of the number and characteristics of crime victims, the incidents of crime experienced and their developments over the past two years. The data obtained came from one of the sections of the National Socio-Economic Survey (Susenas), namely in Block IX Susenas Information on Crime Victims.

The 2019 Susenas describes the experiences of respondents from 1 January to 31 December 2018. Meanwhile, the 2020 Susenas describes the experiences of respondents from 1 January to 31 December 2019. Ideal victimization surveys are specifically designed to record estimates of victimization represented by a representative sample of the population (Hagan, 1989).

Figure 3.1 shows that in 2019, the percentage of the population who became victims of crime was 1.01 percent of the population of Indonesia. This percentage decreased compared to the experience of the public in 2018 (1.11 percent).

Figure 3.1 The Percentage of Population of Crimes Victims, 2018–2019



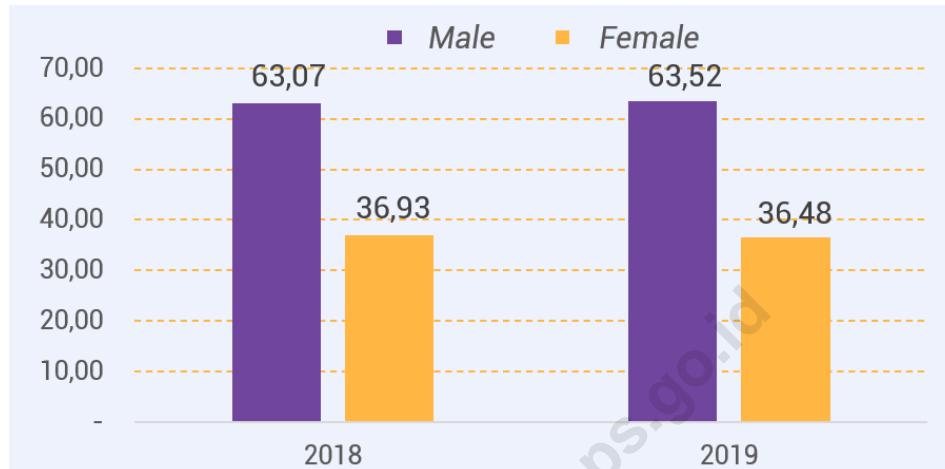
Source: National Socio-Economic Survey 2019-2020

From 1.01 percent of the population who have been victims of crime, the pattern can be seen based on sex and age group. The composition of the population of crime victims by sex is presented in Figure 3.2. From this figure, it can be seen that in 2018 and 2019, the majority of the population who became victims of crimes were male with a percentage



of more than 60 percent. In 2019, the percentage of women who were victims of crime decreased slightly.

Figure 3.2 The Characteristics of the Population of Crime Victims by Sex, 2018–2019

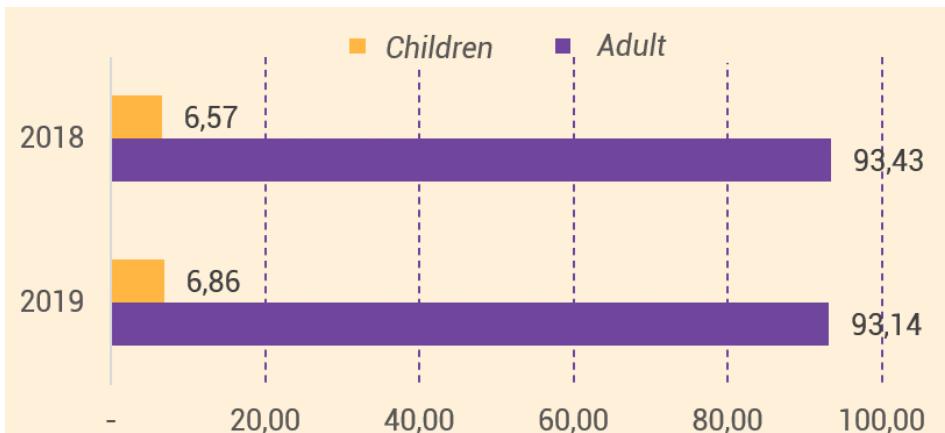


Source: National Socio-Economic Survey 2019-2020

Description: The percentage is calculated for the entire population of victims of crime, not for the total population

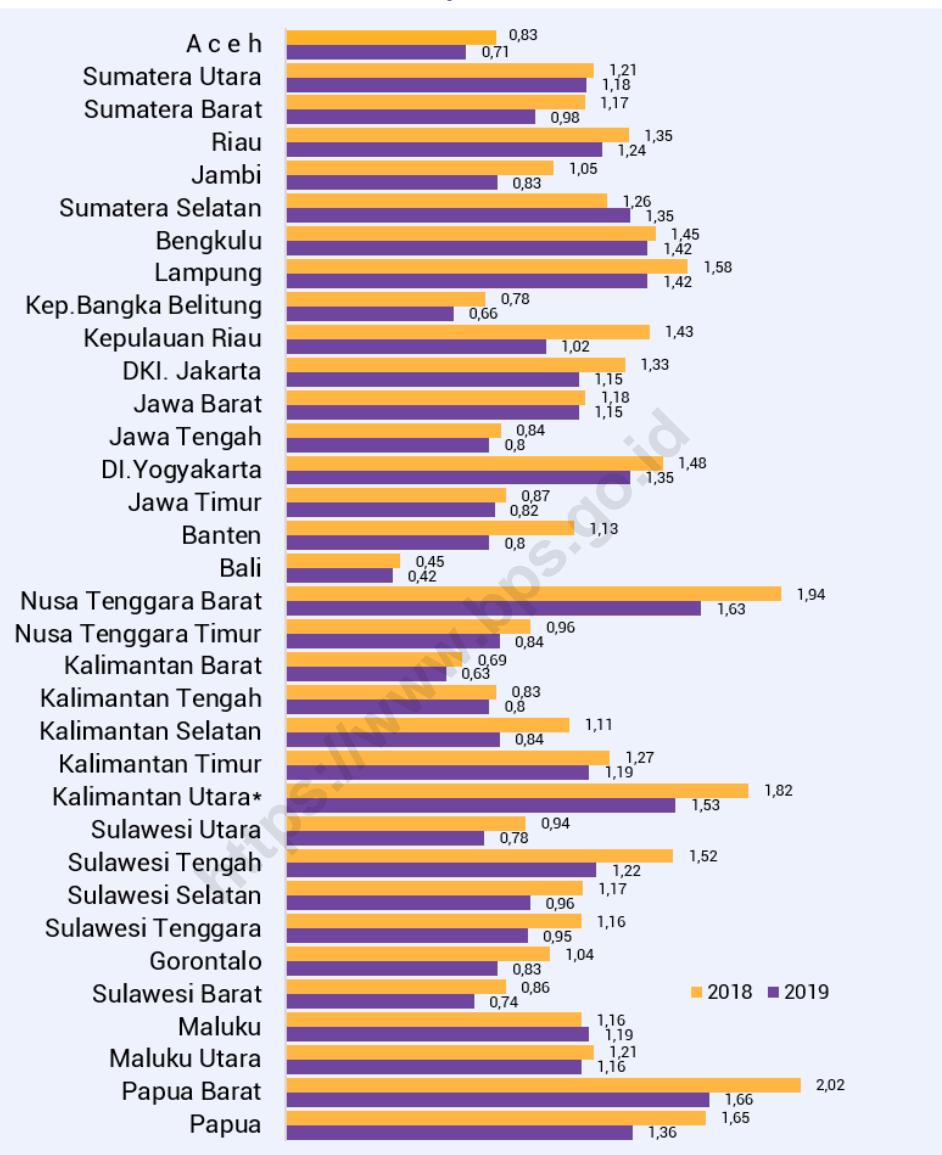
During the 2018-2019 period, most of the population who became victims of crime were adults. Figure 3.3 shows that the percentage of the population of crime victims from the adult age group tends to be stable. In 2019, the population of the adult age group who were victims of crime was 93.14 percent, lower than in 2018 (93.43 percent).

Figure 3.3 The Characteristics of the Population of Crime Victims by Age Group, 2018–2019



Source: National Socio-Economic Survey Core 2019-2020

Figure 3.4 The Percentage of Population of Crime Victims by Province, 2018–2019



Source: National Socio-Economic Survey Core 2019-2020

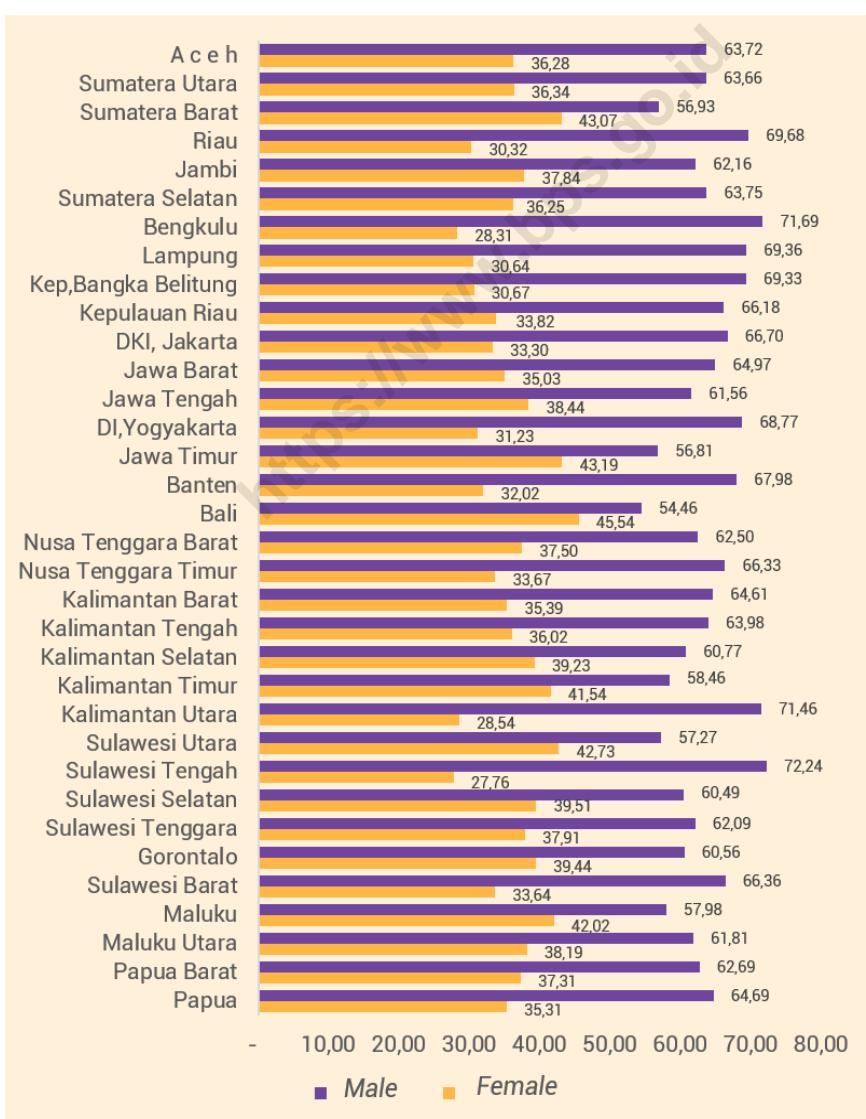
When viewed by region, the percentage of the population who became victims of crime in 2018 and 2019 decreased in 32 provinces, namely Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,



Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua (see figure 3.4). Of all provinces that experienced a decline in 2019, the largest decline occurred in Kepulauan Riau province.

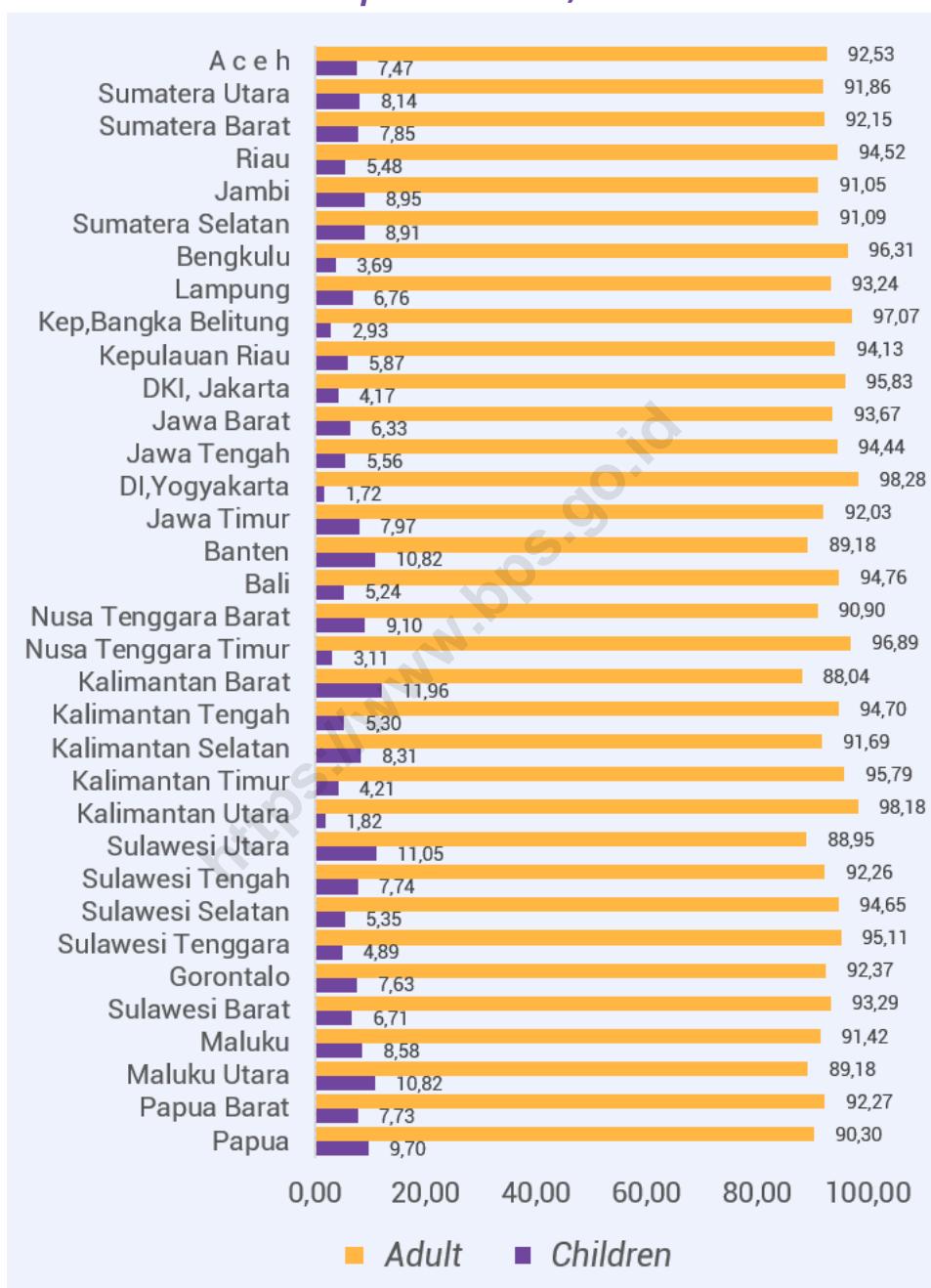
The composition of the population of crime victims during the 2019 period in each province is generally similar to the national composition. Based on gender, the percentage of the population who are victims of crime in most provinces is more male than female. In 2019, the largest percentage of the population of crime victims who were female were Bali (45.54 percent), Jawa Barat (43.19 percent), and Sumatera Barat (43.07 percent).

Figure 3.5 The Number of the Population of Crime Victims by Sex and Province, 2019



Source: National Socio-Economic Survey 2019-2020

Figure 3.6 The Number of the Population of Crime Victims by Age Group and Province, 2019



Source: National Socio-Economic Survey 2019-2020

Meanwhile, the composition of the population of crime victims by age group as a whole for all provinces shows that the percentage of children who are victims of crime is smaller than the adult population (see Figure 3.6). In 2019, the provinces with the largest percentage of the



population of crime victims in the age group of children were Kalimantan Barat (11.96), Sulawesi Utara (11.05), and Banten (10.82), respectively.

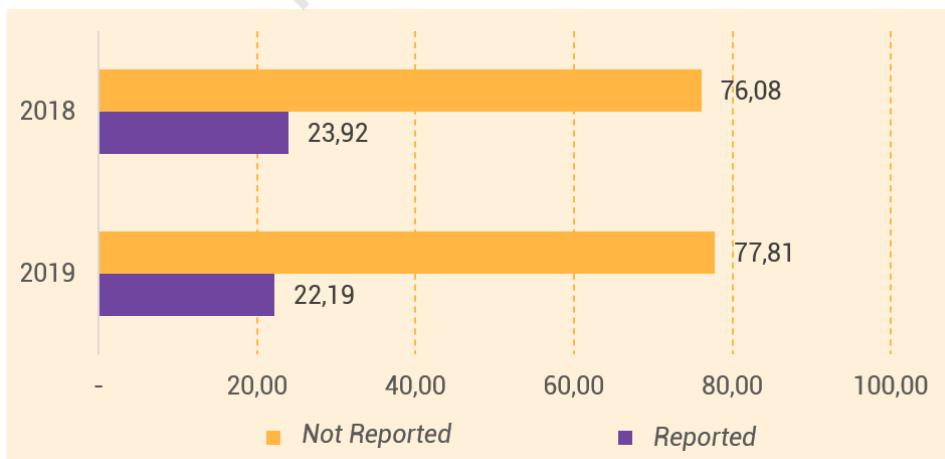
Police Reporting Rate

Susenas data shows that the annual percentage rate for reporting to the Police (police report rate) is still relatively low. In 2018 and 2019, in total, the percentage of the Indonesian population who had experienced crimes then reported to the police the incidents they experienced were no more than 25 percent (Figure 3.7). In 2019 the percentage was 22.19 percent, a decrease compared to 2018 (23.92 percent). This number shows that the number of people who reported when they experienced a crime was still low. In other words, police registration data still does not describe the entire crime scene experienced by the community. These data indicate that the dark number is still relatively high.

The provision of legal aid to citizens in Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid is an effort to fulfill and simultaneously implement a rule of law that recognizes and protects and guarantees the human rights of citizens regarding the need for access to justice and equality before the law.

As presented in Table 3.1.11 (attachment) nationally in 2019, 21.46 percent of people have reported and received/accompanied by legal aid. When viewed by province, Sulawesi Barat (56.56 percent) and Gorontalo (54.74 percent) were the provinces with the highest numbers.

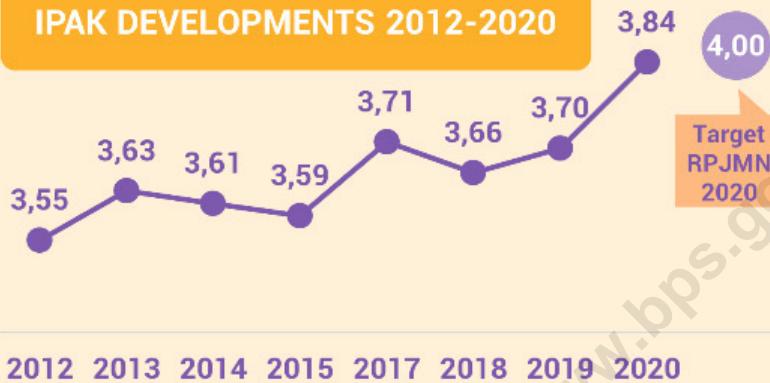
Figure 3.7 The Percentage of Population of Crime Victims Reporting to the Police, 2018-2019



Source: National Socio-Economic Survey 2019-2020

04 INDICATOR OF SDGS RELATED TO SECURITY

IPAK DEVELOPMENTS 2012-2020



Target
RPJMN
2020

NUMBER OF HOMICIDE INCIDENTS

IPAK Indonesia 2020 is 3,84 from scale 0-5. This figure is 0,14 points higher than IPAK 2019

964 incidents in 2019



PROPORTION OF BUSINESS ACTORS WHO PAID/
WERE ASKED FOR BRIBE FROM PUBLIC
OFFICIALS



19,97%
in 2020

9,65%
accessing personally

10,32%
through intermediaries

PROPORTION OF VIOLENT CRIMES VICTIMS



0,06%
in 2019



https://www.bps.go.id



CHAPTER IV. INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) RELATED TO SECURITY

The Sustainable Development Goals (SDGs) or 2030 Agenda had been declared on September 25, 2015, in conjunction with the United Nations General Assembly (UNGA) at the United Nations office, New York, United States. SDGs, in which scopes and substances are in line with Nawacita, consist of 17 Goals and 169 Targets.

These goals and targets describe the vision and scope of an inclusive and multidimensional global development agenda which will serve as a guide for the global community for the next 15 years the welfare of the global community. Of the 169 existing targets, there are several indicators related to security, the following:

Indicator	Data Source	Data Collection Time Frequency
16.1.1 (a). Number of homicide incidents in the past year	National Police	Annual
16.1.3. Proportion of population victims of violent crime in the last 12 months	National Socio-Economic Survey (Susenas)	Annual
16.1.4. Proportion of people who feel safe walking alone in the area where they live	Social Resilience Module	Every Three Years
16.3.1. Proportion of victims of violence in the last 12 months who reported to the police	National Socio-Economic Survey (Susenas)	Annual
16.5.1. Anti-Corruption Behavior Index (IPAK)	Anti-Corruption Behavior Survey (SPAK)	Annual
16.5.2. Proportion of business actors that had at least one contact with a public official and that paid a bribe to a public official, or were asked for a bribe by those public officials during the previous 12 months	Anti-Corruption Behavior Survey (SPAK)	Annual



Goal 16.1.1. (A). The number of homicide incidents in the past year

Homicide are cases that occur as a result of the crime of murder, which refers to the Criminal Code (KUHP), Book Two-Crimes, Chapter XIX concerning crimes against life that result in death. The number of murder crime cases measured is in the last one year or the last 12 months. In 2015 there were 1,491 incidents (the highest in the last five years). This figure decreased in 2016 to 1,292 incidents, 2017 to 1,150 incidents, 2018 to 1,024 incidents, and in 2019 it decreased again to 964 incidents.

At the national and international levels, this indicator is used to measure the most extreme violent crimes and indicates the weakness and lack of security in society. Security from violence is one of the prerequisites for individuals to experience a safe and active life. This data shows the risk that society faces to death from homicide.

Goal 16.1.3. Proportion of population who were victims of violent crimes in the previous months

A victim of a violent crime is a person whose personal or property during the past year has experienced or been exposed to a violent crime. In this context, the coverage of victims of violent crime is related to abuse, theft with violence, and sexual harassment. Violent crimes referred to are all acts of violent crimes that can be punished with penalties based on the Criminal Code concerning a person, namely violent theft (including mugging, robbery), assault, sexual harassment (including rape, sexual immorality, and so on).

Assault is an act of deliberately damaging the physical health of another person, either causing illness (injury / disability / illness) or an obstacle to carrying out daily work (serious injury) or not. Beatings, slapping, beatings up, are included in the category of persecution.

Violent theft taking goods or livestock, totally or partially belonging to another person with the intention of acquiring that item against the right, preceded, accompanied, or followed by violence or threats of violence against people, with the intention of preparing or facilitating the theft, or if caught red-handed (caught) so that he and his friends who were involved in the crime can escape or so that the stolen item remains in his hands. Robbery, mugging, mugging, mugging are included in the category of violent theft.

Sexual harassment is an act that attacks the honor of decency (pinching, poking, clapping, touching certain body parts or movement) or obscene acts committed unilaterally and not expected by the victim.

These acts can be carried out by means of physical violence, threats of violence, or not. Rape (acts committed with violence or threats of violence, forcing the victim to have intercourse with them) is categorized as sexual harassment..

As shown in Figure 4.1, in 2019 the proportion of the population who became victims of violent crime decreased to 0.06 percent, down from 0.08 percent in 2018. The calculation method is the number of people who have became victims of violent crimes in the past 12 months divided by the total population for that year is multiplied by 100 percent.

Figure 4.1 The Proportion of Population who Became Victims of Violent crime in the Last 12 Months, 2015-2019



Source: National Socio-Economic Survey

Goal 16.1.4. The proportion of people who feel safe walking alone in the area where they live

Security is basic need and basic right, just as important as clothing, food, housing, health, and education. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28G paragraph 1 states that every person has the right to protection of himself, family, honor, dignity and property under his control, as well as the right to a sense of security and protection from the threat of fear to do or not do something which is rights. In fact, the Universal Declaration of Human Rights states that everyone has the right to life, liberty, and security of person.

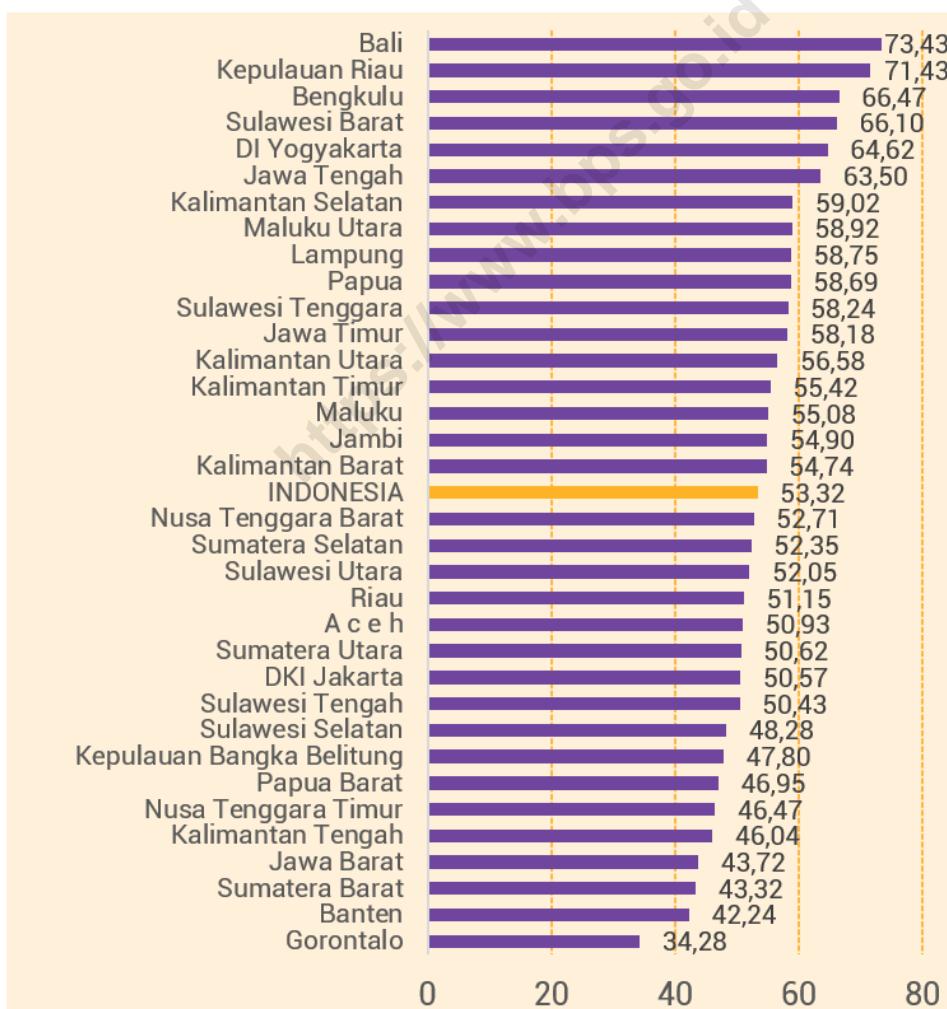
In the Sustainable Development Goals (SDGs), the goal related to this sense of security is outlined in goal 16.1.4, namely the proportion of households who feel safe walking alone around the area where they live. Its purpose is to serve as the basis for the formulation of sectoral



development plans in the field of public order and security as well as national development planning in the context of improving the overall welfare of the community. The sense of security is measured in the National Socio-Economic Survey (Susenas) Social Resilience Module organized by the Statistics Indonesia (BPS) every three years.

Figure 4.2 shows that in 2017, the percentage of households who felt safe walking alone in the area where they lived nationally was 53.32 percent. In other words, almost half of the people still feel worried walking alone in the area where they live.

Figure 4.2. The Percentage of Households that Feel Safe Walk Alone in Their Neighborhood by Province, 2017



Source: National Socio-Economic Survey Core

Looking further, we can see the variation in the percentage of households that felt safe walking alone in the area where they live. During the 2017 period, Bali Province was the province with the largest percentage of its people who felt safe walking alone in the area where they lived. Meanwhile, the province with the smallest percentage was Gorontalo Province.

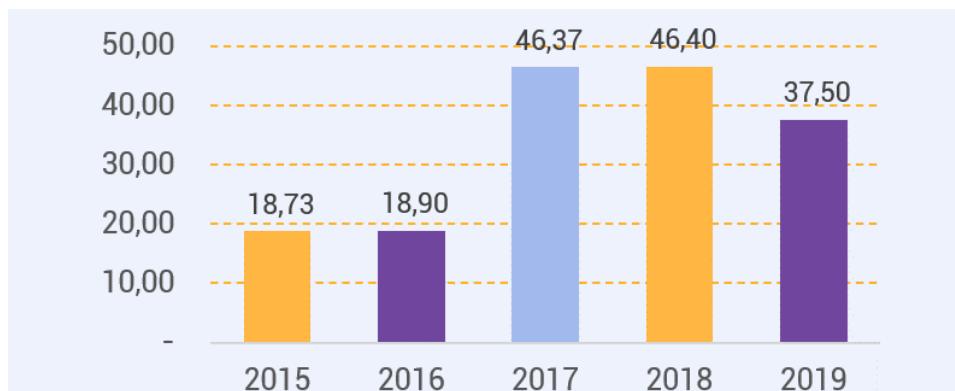
Goal 16.3.1. Proportion of Victims of Violence in the Last 12 Months who Reported to the Police

The purpose of this indicator is to see the access to justice that victims seek and do to the authorities. If the authorities do not receive a report or are warned of a victim, they will not be able to take appropriate action to carry out investigations and court action. In addition, it is also used to determine the level of public trust in the authorities as well as the police and other law enforcement agencies to help resolving legal problems.

The increasing number of reporters and reports shows that violence is unacceptable and must be reported. Besides, it shows that there are increases in reporting systems and reporting awareness, as well as the level of trust in the authorities.

As shown in Figure 4.3, in 2019 the proportion of the population who were victims of violent crimes and reported to the police is 37.50 percent. The method of calculation is the number of victims of violence in the last 12 months who reported to the police divided by the number of victims of violence in the last 12 months multiplied by 100% (For the record, the 2015 and 2016 proportion represents the crime reports for all types of crimes).

Figure 4.3 The Proportion of Victims of Violence in the Last 12 Months Who Reported to the Police, 2015-2019



Source: National Socio-Economic Survey



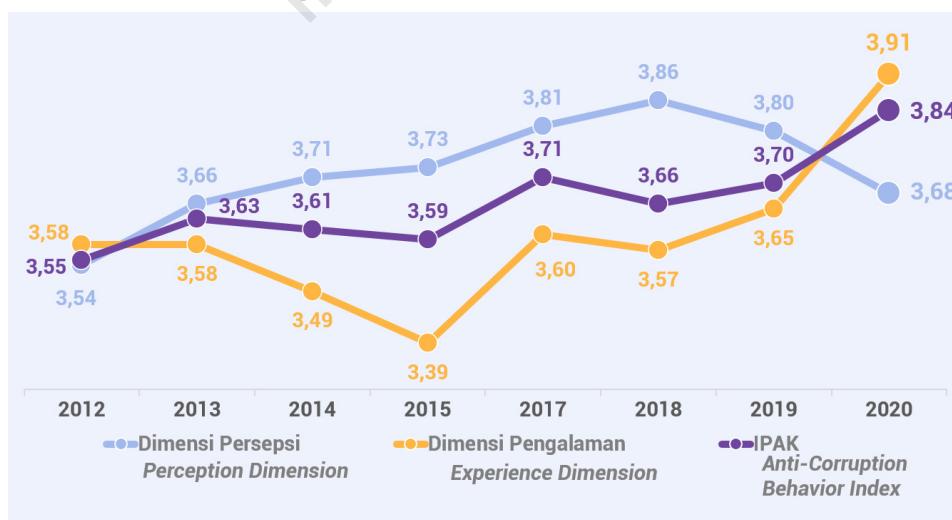
Goal 16.5.1. Anti-Corruption Behavior Index (IPAK)

In connection with the stipulation of Presidential Regulation Number 54 of 2018 concerning the National Strategy for Prevention of Corruption (Stranas PK), the BPS-Statistics Indonesia measures the Anti-Corruption Behavior Index through the Anti-Corruption Behavior Survey. This survey has been conducted every year from 2012 to 2020, except in 2016. For 2020, SPAK was implemented in 34 provinces with a sample size of 10.040 respondents. Therefore, analysis of anti-corruption behavior can only be carried out at the national level.

The Anti-Corruption Behavior Survey aims to measure the level of public permissiveness towards anti-corruption behavior by using the Anti-Corruption Behavior Index (IPAK). This survey only measures people's behavior in small-scale corruption (petty corruption) and does not include large-scale corruption (grand corruption). The data collected includes opinions on habits in society and experiences related to public services in terms of bribery, extortion, and nepotism.

IPAK is prepared based on two dimensions, namely the Perception Dimension and the Experience Dimension. The Perception Dimension refers to assessments/opinions of the anti-corruption behavior habits in society. Meanwhile, the Experience Dimension refers to anti-corruption experiences that occur in society.

Figure 4.4. IPAK in 2012 - 2020



Source: Anti Corruption Behavior Survey 2020



CHAPTER IV Indicators of Sustainable Development Goals (SDGs) Related to Security

Seen from its development, IPAK tends to fluctuate from 2012 to 2020 (Figure 4.4). In 2012, the IPAK was 3.55 and increased in 2013 to 3.63. However, IPAK continued to fall until 2015 and reached 3.59. The IPAK increased again in 2017 to 3.71. Even though in 2018 the IPAK had decreased (3.66), but in 2019 (3.70) it began to increase until 2020, the IPAK became 3.84. The index value getting closer to 5 indicates that people behave increasingly anti-corruption. On the other hand, the IPAK value getting closer to 0 indicates that people behave increasingly permissive to corruption.

The proportion of people who spent money/goods/facilities exceeded the provisions when dealing with public services, during the last 12 months.

In 2020 there are still 16.79 percent of the society who had ever spent money/goods/facilities exceeding provisions when dealing with public services. The society spent money/goods/facilities both when accessing public services themselves (8.84 percent) or through intermediaries (7.95 percent). Meanwhile, there are 83.21 percent of society who had never spent money/goods/facilities exceeding provisions when dealing with public services in the last 12 months.

Figure 4.5. The Percentage of People Who Have Dealt with Public Services and Spent Money/Goods/Facilities Exceeding Provisions



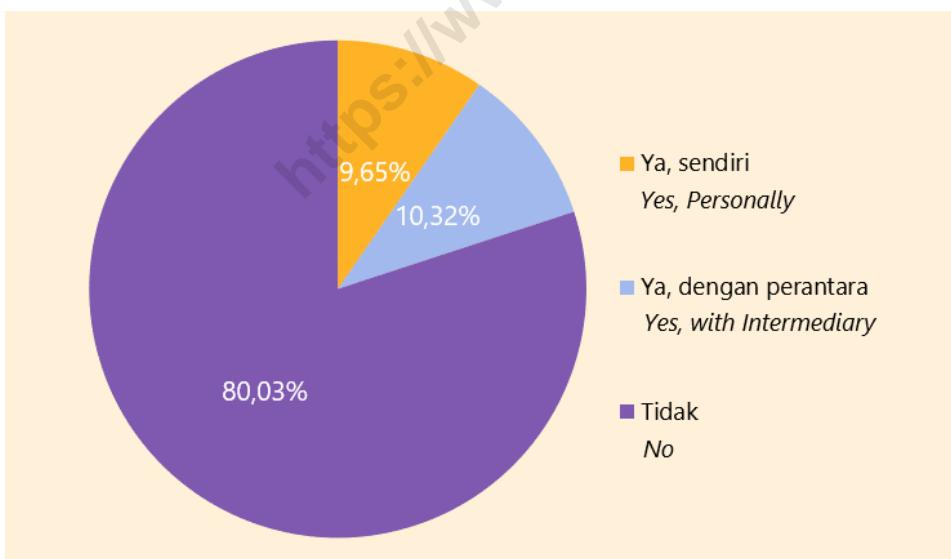
Source: Anti Corruption Behavior Survey 2020



Goal 16.5.2. Proportion of Business Actors that had at least One Contact with a Public Official and that Paid a Bribe to a Public Official, or were Asked for a Bribe by those Public Officials during the previous 12 months

One of the SDGs indicators related to corruption in goal 16 is indicator 16.5.2. The focus is on how business actors have experience when dealing with public services. SPAK 2020 results show that 19.97 of business actors had spent money/goods/facilities exceeding provisions when dealing with public services. These business actors spent money/goods/facilities both when accessing public services themselves (9.65 percent) or through intermediaries (10.32 percent) (Figure 4.6). Meanwhile, there are 80.03 percent of business actors who had never spent money/goods/facilities exceeding provisions when dealing with public services in the last 12 months.

Figure 4.6. The Percentage of Business Actors Who Have Dealt with Public Services and Spent Money/Goods/Facilities Exceeding Provisions



Source: Anti Corruption Behavior Survey 2020

DAFTAR PUSTAKA

REFERENCES





https://www.bps.go.id

Daftar Pustaka

References

- Alwi, Hasan dkk. (2003). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Badan Pusat Statistik. (2011). Statistik Potensi Desa Indonesia 2011. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2014). Statistik Potensi Desa Indonesia 2014. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik Potensi Desa Indonesia 2018. Jakarta : BPS.
- Hafidhuddin, Didin. et.al. (2001). Berbangsa dan Bernegara Menurut Islam. Jakarta: Pustaka Zaman.
- Hagan, Frank E. (1989). *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*. Chicago: Nelson-Hall.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2013). Bandung: Citra Umbara.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2016). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2015. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2017). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2016. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2018). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2017. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2019). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2018. Jakarta: Mabes POLRI.



- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2020). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2019. Jakarta: Mabes POLRI.
- Maslow, A.H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. New York: Psychological Review.
- Mustofa, Muhammad. (2011). Kriminologi Edisi 2 (Kajian Sosiologis Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum). Bekasi: Sari Ilmu Pratama.
- Sianturi, L.M. (1985). Indikator Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Kumpulan Bahan-Bahan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: BPS.
- Soetopo, H. (2001). Manajemen Konflik. Malang : Universitas Negeri Malang.
- UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28 Tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC). (2015). *International Classification Of Crimes For Statistical Purposes*. Version 1.0.

CATATAN TEKNIS

TECHNICAL NOTES





https://www.bps.go.id


CATATAN TEKNIS
TECHNICAL NOTES

Jenis dan Sumber Data

Publikasi ini menggunakan tiga sumber data yang berbeda, yaitu:

1. Data karakteristik kejadian dan pelaku kejahatan yang bersumber dari Laporan dan Evaluasi Situasi Kamtibmas yang diterbitkan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) Tahun 2017, 2018, dan 2019.
2. Data korban kejahatan yang bersumber dari Susenas Tahun 2019 dan 2020
3. Data jumlah desa menurut kejadian kejahatan, kejadian konflik massal dan karakteristiknya, serta upaya dalam menjaga keamanan, bersumber dari Pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, Podes 2014, dan Podes 2018.

Laporan Evaluasi Data Kriminalitas Polri

Laporan Evaluasi Data Kriminalitas Polri merupakan laporan tahunan Mabes Polri yang menyajikan gambaran mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pada level nasional dan provinsi. Laporan yang disajikan meliputi aspek kejahatan/kriminalitas dan bukan kejahatan. Data kriminalitas yang disajikan meliputi karakteristik kejadian kejahatan, pelaku, dan jumlah kerugian.

Data kriminalitas ini hanya mencakup seluruh peristiwa atau kejadian kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat, atau aksi kriminalitas yang pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Mengingat masih

Types and Data Sources

This publication uses three different data sources, namely:

1. *Data on characteristics of incidents and perpetrators of crime originating from the Kamtibmas Situation Report and Evaluation published by the Indonesian Police Headquarters (Police Headquarters) in 2017, 2018 and 2019.*
2. *Data on victims of crime sourced from Susenas 2018 and 2019.*
3. *Data on the number of villages according to crime, mass conflict events and their characteristics, as well as efforts to maintain security, are sourced from Village Potential Data Collection (Podes) 2011, Podes 2014, and Podes 2018.*

Laporan Evaluasi Data Kriminalitas Polri

The Police Criminal Data Evaluation Report is an annual report from the Indonesian Police Headquarters which presents an overview of the security and order situation at the national and provincial levels. The report presented covers aspects of crime and not crime. Crime data presented includes the characteristics of crime events, perpetrators, and the amount of loss.

This crime data only covers all criminal events or incidents that are reported by the public, or criminal acts where the perpetrators are caught red-handed by the police. Given the high reluctance of the public to report, it is



tingginya keengganan masyarakat untuk melapor, diduga data yang dihasilkan cenderung "under-estimate".

Artinya, kejadian kriminalitas yang sesungguhnya diduga lebih besar dari yang dilaporkan. Dengan kata lain, angka gelap (*dark number*) kejahatan masih relatif besar.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2019 dan 2020

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan survei yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala setiap tahun. Data Susenas mencakup dua kelompok data, yaitu Kor dan Modul. Data Kor mencakup data pokok dari beberapa aspek kesejahteraan rakyat, termasuk kriminalitas. Data kriminalitas yang dikumpulkan adalah data jumlah dan karakteristik rumah tangga/individu yang menjadi korban kejahatan. Jumlah sampel Kor Susenas adalah sebanyak 300.000 rumah tangga, sehingga bisa dilakukan estimasi hingga level kabupaten/kota.

Data yang dikumpulkan dalam Modul Susenas hanya terfokus pada salah satu aspek kesejahteraan rakyat. Namun demikian, cakupannya lebih lengkap dan lebih rinci dibandingkan dengan data serupa yang dicakup dalam Kor. Modul Susenas umumnya diberi nama sesuai dengan aspek yang menjadi fokusnya, misalnya Modul Kesehatan, Modul Pendidikan, dan Modul Ketahanan Sosial. Data Modul Susenas dikumpulkan setiap tahun dan untuk modul yang sama akan berulang setiap tiga tahun sekali. Jumlah sampel Modul Susenas adalah sebanyak 75.000 rumah tangga, sehingga hanya dimungkinkan untuk menghasilkan estimasi hingga wilayah provinsi.

suspected that the data produced tends to be under-estimated.

That is, the actual crime incidence is allegedly greater than reported. In other words, the dark number of crimes is still relatively large.

National Socio-Economic Survey (Susenas), 2019 and 2020

The National Socio-Economic Survey (Susenas) is a survey conducted by the BPS-Statistics Indonesia regularly every year. Susenas data includes two data groups, namely Core and Module. Core data includes basic data from several aspects of people's welfare, including crime. Crime data collected is data on the number and characteristics of households/individuals who are victims of crime. The number of Susenas Core samples is as many as 300,000 households, so that estimates can be made up to the district/city level.

Data collected in the Susenas Module only focuses on one aspect of people's welfare. However, its scope is more complete and more detailed than similar data covered in Core. The Susenas Module is generally named according to the aspects that are its focus, for example the Health Module, the Education Module, and the Social Security Module. Susenas Module data is collected annually and the same module will be repeated every three years. The number of Susenas Module samples is 75,000 households, so that it is only possible to produce estimates up to the province.

Since the first Susenas activity was held in 1963, Susenas has had a crime module. This module includes complete and detailed criminal data

Sejak pertama kali kegiatan Susenas diselenggarakan tahun 1963, Susenas telah memiliki modul kriminalitas. Modul ini mencakup data-data kriminal secara lengkap dan rinci dengan pendekatan korban rumah tangga/individu.

Data yang dikumpulkan antara lain, meliputi data jenis dan frekuensi kejahatan, pelaku kejahatan, akibat yang ditimbulkan secara fisik maupun psikis, serta kerugian yang diderita. Namun, karena beberapa hal, modul kriminalitas sejak tahun 1995 tidak dilakukan lagi.

Pada 2015, demipenyempurnaan alat ukur dan agar survei korban bisa semakin akurat dalam menangkap pengalaman individu, dilakukan perubahan instrumen dalam instrumen kor Susenas. Sebelumnya hanya terdapat empat jenis kejahatan yang terdapat di Susenas kor yakni pencurian, pencurian dengan kekerasan, penipuan, dan lainnya. Sementara pada 2015, BPS melakukan perluasan cakupan instrumen menjadi lima jenis kejahatan yakni pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, dan lainnya.

Perubahan ini menjadikan data Susenas bisa menangkap lebih banyak pengalaman korban kejahatan. Namun, implikasinya pengguna data tidak bisa serta merta melakukan perbandingan antara data hasil Susenas 2015 dengan data tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada jumlah kejahatan berdasarkan jenisnya.

Data Susenas 2019 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari – 31 Desember 2018. Sedangkan Data Susenas 2020 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari – 31 Desember 2019.

with a household/individual victim approach.

The data collected includes data on the types and frequency of crimes, the perpetrators of the crimes, the physical and psychological consequences, and losses suffered. However, due to several reasons, the crime module since 1995 was not carried out anymore.

In 2015, for the sake of refinement of measuring instruments and for victim surveys to be more accurate in capturing individual experiences, changes were made in the Susenas core instruments. Previously there were only four types of crimes found in Susenas kor, namely theft, theft by violence, fraud, and others. While in 2015, BPS expanded the scope of instruments to five types of crime namely theft, persecution, theft with violence, sexual harassment, and others.

This change makes Susenas data can capture more experience of victims of crime. However, the implication is that data users cannot immediately make comparisons between the 2015 Susenas data with data from previous years, especially on the number of crimes by type.

Susenas 2019 data describes the experiences of respondents in the period of January 1 - December 31, 2018. While Susenas 2020 data describes the experiences of respondents in the period January 1 - December 31, 2019.



Statistik Podes (Potensi Desa) 2011, 2014, dan 2018

Data Statistik Potensi Desa (Podes) merupakan satu-satunya data kewilayahan yang dikumpulkan BPS. Pendataan Podes dilakukan di seluruh desa/kelurahan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk desa persiapan, desa definitif, Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT), Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Pemukiman Masyarakat Terasing (SPMT). Responden untuk pendataan Podes adalah Kepala Desa/Lurah atau aparat desa/kelurahan lainnya dan narasumber lainnya, seperti petugas kesehatan yang bertugas di desa/kelurahan (dokter puskesmas/bidan desa), guru/kepala sekolah, petugas penyuluhan pertanian (PPL), dan petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Salah satu fungsi pendataan Podes adalah menyajikan data atau informasi tentang desa/kelurahan untuk memenuhi keperluan perencanaan kegiatan sensus. Data atau informasi tersebut antara lain adalah tentang luas wilayah, jumlah RW, jumlah RT, dan satuan lingkungan setempat (SLS) yang merupakan bagian wilayah desa/kelurahan beserta batas-batas wilayahnya, keadaan geografis, keadaan topografis, jumlah dan struktur penduduk, dan struktur perekonomian. Sejalan dengan fungsinya tersebut, pelaksanaan pendataan Podes biasanya dilakukan menjelang penyelenggaraan suatu sensus.

Data yang dikumpulkan dalam Podes juga mencakup data tentang jenis dan jumlah fasilitas umum yang ada di desa/kelurahan, baik fasilitas sosial seperti posyandu, puskesmas, sekolah, mesjid, gereja, dan tempat ibadat lainnya, maupun fasilitas ekonomi seperti pasar, pertokoan,

The Village Potential Statistics (Podes) 2011, 2014, and 2018

Village Potential Statistics (Podes) are the only regional data collected by BPS-Statistics Indonesia. Podes data collection is carried out in all villages/kelurahan in the territory of the Republic of Indonesia, including preparatory villages, definitive villages, Transmigration Settlement Units (SPT), Transmigration Settlement Units (UPT), and Remote Community Settlement Unit (SPMT). Respondents for data collection of Podes are Village/Kelurahan Heads or other village/kelurahan officials and other resource persons, such as health workers serving in the village/kelurahan (Public Health Center doctors (Puskesmas doctors)/village midwives), teachers/school principals, agricultural extension officers (PPL), and Family Planning Field Officer (PLKB).

One of the Podes data collection functions is to present data or information about villages to meet the needs of census planning activities. The data or information includes the area, number of Citizens Associations (RW), number of Neighborhood Associations (RT), and local environmental units (SLS) that are part of the village area along with its territorial boundaries, geographical conditions, topographical conditions, population numbers and structures, and economic structures. In line with these functions, the implementation of Podes data collection is usually conducted prior to the holding of a census.

Data collected in Podes also includes data on the types and number of public facilities in the village/kelurahan, both social facilities such as posyandu, puskesmas, schools, mosques, churches, and other places of worship, as well as economic facilities such as markets, shops, supermarkets,

supermarket, KUD, sarana transportasi, Bank, dan lembaga keuangan/perkreditan lainnya.

Pendataan Podes juga mencakup pengumpulan data tentang jenis dan jumlah kejadian-kejadian penting yang sedang atau pernah terjadi di desa, seperti jenis dan jumlah bencana alam, wabah penyakit, kejadian kejahatan, dan konflik massal, baik antarwarga desa maupun antardesa.

Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, penjelasan mengenai konsep dan definisi pada bagian ini akan diuraikan sesuai dengan urutan sumber data.

Konsep-Konsep Kriminalitas dalam Data Polri

A. Peristiwa Kejahatan (Kriminalitas)/Pelanggaran

1. Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
2. Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindak-lanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

KUD, transportation facilities, banks, and other financial/credit institutions.

Podes data collection also includes data collection on the types and number of important events that are or have occurred in the village, such as the types and amounts of natural disasters, epidemics, crime events, and mass conflicts, both between villagers and between villages.

Concept and Definition

The concepts and definitions of various variables or characteristics used in this publication refer to the concepts, definitions, and terminology used by the relevant data source. Accordingly, an explanation of the concepts and definitions in this section will be described in accordance with the order of the data source.

Criminal Concepts in the Police Data

A. Crime Incidents/Violations

1. *Crimes/crimes or violations are acts of someone who can be threatened with punishment based on the Criminal Code (KUHP) or other applicable laws and regulations in Indonesia.*
2. *Reported events are any events reported by the public to the National Police, or events where the perpetrators are caught red-handed by the police. These community reports will be recorded and followed up by the National Police if they are categorized as having sufficient evidence.*



3. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah :
- Peristiwa yang berkas perkaryanya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas Plichmatigheid (setiap tindakan polisi sudah dianggap sah berdasarkan atau bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum)
 - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian
 - Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
 - Peristiwa yang telah kadaluwarsa

B. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan
- Orang yang turut melakukan kejahatan
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan

C. Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan

3. *The events resolved by the police, are:*
- *The event that the case file is ready or has been submitted to the prosecutor*
 - *In case of complaint offense, the complaint is revoked within the grace period prescribed by law*
 - *Events that have been resolved by the police based on the Plichmatigheid principle (every police action has been deemed legitimate based on or sourced from public power or authority)*
 - *Events that do not include the competence of the Police*
 - *The suspect whose events died*
 - *Events that have expired*

B. Perpetrator

Perpetrators are:

- *People who commit crimes*
- *People who participate in crime*
- *The person who orders the crime*
- *People who persuade others to commit crimes*
- *People who help to commit crimes*

C. Detainees

Detainees are suspects of perpetrators of crimes/violations detained by the police before being forwarded to the Prosecutor's Office

atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.

D. Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak, atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/ pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

E. Korban

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha /percobaan tindak kejahatan.

Konsep-Konsep Kejahatan dalam Susenas dan Podes

A. Kejahatan

Konsep dan definisi kejahatan yang digunakan dalam Susenas dan Podes pada dasarnya merujuk pada konsep kejahatan yang digunakan oleh Polri maupun KUHP.

Namun, karena konsep ini ditanyakan pada responden yang umumnya awam tentang hukum, pengertian tentang konsep kejahatan ini lebih didasarkan pada pengakuan, pemahaman, dan persepsi responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya. Sejalan dengan itu, jenis-jenis tindak kejahatan yang dicakup Susenas atau Podes lebih fokus pada jenis kejahatan yang dikenal masyarakat, misalnya perampokan untuk menggantikan konsep pencurian dengan kekerasan yang biasa digunakan Polri.

or are still in the process of further investigation. The duration of detention is less than 20 days.

D. Loss

Loss is the loss, destruction, or destruction of property resulting from a crime/infringement event and excluding any casualties.

E. Victim

A crime victim is a person or property that has experienced or been exposed to a crime/attempted a crime.

Concepts of crime in Susenas and Podes

A. Crime

Concept and definition of crime used in Susenas and Podes basically refers to the concept of crime used by the National Police and the Criminal Code.

However, because this concept is asked to respondents who are generally unfamiliar with the law, the notion of the concept of crime is based more on the recognition, understanding, and perceptions of respondents without looking at the legal aspects again. Correspondingly, the types of crimes covered by Susenas or Podes are more focused on the types of crime known to the public, for example robbery to replace the concept of theft with violence that is commonly used by the National Police.



B. Korban Kejahatan

Konsep korban kejahatan dalam Susenas adalah korban/sasaran dari tindak kejahatan yang terjadi dalam rentang waktu selama setahun yang lalu. Korban kejahatan dalam Susenas dikelompokkan menjadi dua klasifikasi, yaitu rumah tangga dan individu. Penentuan kriteria korban kejahatan ini hanya berdasarkan pada pengakuan responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya.

Klasifikasi korban kejahatan menurut umur:

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 18 tahun
- Dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun dan lebih

C. Konflik Massal

Konsep konflik massal yang digunakan dalam Podes merujuk pada konflik fisik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi:

- Perkelahian antarkelompok warga adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari
- Perkelahian warga antar desa/kelurahan adalah perkelahian antara warga desa /kelurahan/ nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya
- Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan
- Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga

B. Crime Victim

The concept of crime victims in Susenas is victims/targets of crime that occurred in the span of the past year. Crime victims in Susenas are grouped into two classifications, namely households and individuals. Determination of criteria for victims of crime is only based on the recognition of respondents without looking at the legal aspects again.

Classification of crime victims by age:

- *Children are people who are less than 18 years old*
- *Adults are people aged 18 years and over*

C. Mass Conflict

The concept of mass conflict used in Podes refers to physical conflict in the form of mass fights that occur in one villages/kelurahan area which includes:

- *Fighting between groups of residents is a fight between groups of residents with other groups of residents in one village*
- *Inter-village fights are fights between village residents and other village residents*
- *Fight between residents and security forces is a fight between villagers with security forces*
- *Fights between citizens and government officials are fights between village residents and government officials*
- *Fighting between students is a fight between students of a school with other school*

- desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah
- Perkelahian antar pelajar/mahasiswa adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain
 - Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/ kelurahan/nagari
 - Lainnya: perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan, dan sebagainya
- students
Inter-ethnic fights are ethnic fights that occur in villages
Other: fights between residents and students, inter-religious fights, fights between security forces, and so on*

Penjelasan Teknis/Technical Explanation

1. Angka Indeks Kejahatan/Crime Index (I.)

Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun t/

$$I_t = \frac{\text{Number of crime in the year } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0 / \text{Number of crime in the year } t_0} \times 100$$

Dimana/where:

t_0 = tahun dasar/ based year

t = tahun t/year t

2. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk/Crime Rate

Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun t/

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{Number of crime in the year } t}{\text{Jumlah penduduk/Population}} \times 100.000$$

3. Skala Waktu Kejahatan Tahun t/Crime Clock

$365 \times 24 \times 60 \times 60$

$$\text{Crime Clock} = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan tahun } t / \text{Number of crime in the year } t}{x \text{ (detik)}}$$

4. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan/Crime Clearance

Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan/

$$\text{Crime Clearance} = \frac{\text{Number of cleared crime incidents}}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan/Number of reported crime incidents}} \times 100 ()$$



https://www.bps.go.id

LAMPIRAN

APPENDIX





https://www.bps.go.id

DATA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

INDONESIAN POLICE

DATA

<https://www.bps.go.id>





Tabel 2.1.1 Indikator Kriminalitas Nasional, Tahun 2017-2019
Table 2.1.1 National Crime Indicator, 2017-2019

Jenis Indikator Type of Indicator	Tahun Year		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>)	336 652	294 281	269 324
Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>)	212 058	191 112	183 605
Persentase Penyelesaian Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>)	62,99	64,94	68,17
Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (<i>Crime Clock</i>)	0.01'33"	0.01'47"	0.01'57"
Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>)	129	113	103

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ *Operations Control Bureau, National Police*

Catatan :

1. Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3
2. Polda Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2018

Note :

1. *Polda Metro Jaya covers South Jakarta Police, East Jakarta, Central Jakarta, North Jakarta, West Jakarta, Kepulauan Seribu, Bekasi District, Bekasi City, Tangerang Regency, Tangerang City, Depok City, Soekarno-Hatta Airport, and KP3*
2. *The North Kalimantan Regional Police was only formed in 2018*

**Tabel
2.1.2 Peringkat Polda Menurut Jumlah Kejahatan dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan, 2019**

**Table
Regional Police Rank by Crime Total and Crime Rate, 2019**

No	Polda <i>Regional Police</i>	Jumlah Kejahatan <i>Number of Crimes</i>	No	Polda <i>Regional Police</i>	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan <i>Resident risk of Crime</i>
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	Metro Jaya	31 934	1	Papua Barat	325
2	Sumatera Utara	30 831	2	Sulawesi Utara	302
3	Jawa Timur	26 985	3	Sumatera Utara	216
4	Sulawesi Selatan	16 008	4	Papua	214
5	Jawa Barat	13 145	5	Sulawesi Tengah	211
6	Sumatera Selatan	12 861	6	Sumatera Barat	208
7	Sumatera Barat	11 064	7	Gorontalo	203
8	Jawa Tengah	10 317	8	Maluku	200
9	Lampung	8 534	9	Jambi	195
10	Nusa Tenggara Barat	8 185	10	Sulawesi Selatan	190
11	A c e h	7 483	11	Bengkulu	179
12	Sulawesi Utara	7 425	12	DI Yogyakarta	177
13	Papua	6 994	13	Nusa Tenggara Barat	165
14	Jambi	6 848	14	Sumatera Selatan	156
15	DI Yogyakarta	6 650	15	Kepulauan Riau	152
16	Riau	6 570	16	Sulawesi Barat	148
17	Sulawesi Tengah	6 265	17	A c e h	144
18	Nusa Tenggara Timur	5 865	18	Kep. Bangka Belitung	136
19	Kalimantan Selatan	5 375	19	Kalimantan Selatan	130
20	Kalimantan Barat	4 721	20	Kalimantan Utara	127
21	Kalimantan Timur	4 417	21	Metro Jaya	127
22	Maluku	3 495	22	Kalimantan Timur	124
23	Bengkulu	3 453	23	Nusa Tenggara Timur	111
24	Banten	3 287	24	Lampung	103
25	Kepulauan Riau	3 159	25	Riau	99
26	Bali	3 047	26	Kalimantan Barat	96
27	Papua Barat	2 972	27	Kalimantan Tengah	94
28	Kalimantan Tengah	2 444	28	Bali	72
29	Gorontalo	2 367	29	Jawa Timur	69
30	Kep. Bangka Belitung	1 953	30	Maluku Utara	59
31	Sulawesi Barat	1 863	31	Banten	49
32	Sulawesi Tenggara	1 213	32	Sulawesi Tenggara	47
33	Kalimantan Utara	876	33	Jawa Barat	34
34	Maluku Utara	718	34	Jawa Tengah	30
INDONESIA		269 324	INDONESIA		103

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ *Operations Control Bureau, National Police*



Tabel 2.1.3 Jumlah Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2017-2019
Table 2.1.3 Crime Total by Regional Police, 2017-2019

Kepolisian Daerah Regional Police	Tahun Year		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	8 885	8 758	7 483
Sumatera Utara	39 867	32 922	30 831
Sumatera Barat	13 205	12 953	11 064
Riau	6 869	7 246	6 570
Jambi	9 531	6 313	6 848
Sumatera Selatan	15 728	13 558	12 861
Bengkulu	4 867	3 389	3 453
Lampung	11 089	8 963	8 534
Kep. Bangka Belitung	1 931	2 048	1 953
Kepulauan Riau	3 673	3 409	3 159
Metro Jaya	34 767	34 655	31 934
Jawa Barat	25 183	16 209	13 145
Jawa Tengah	12 033	9 127	10 317
DI Yogyakarta	7 251	6 731	6 650
Jawa Timur	34 598	26 295	26 985
Banten	3 692	3 623	3 287
Bali	3 589	3 212	3 047
Nusa Tenggara Barat	8 132	6 451	8 185
Nusa Tenggara Timur	6 729	6 257	5 865
Kalimantan Barat	6 020	5 814	4 721
Kalimantan Tengah	2 699	5 699	2 444
Kalimantan Selatan	6 578	2 667	5 375
Kalimantan Timur	9 149	6 287	4 417
Kalimantan Utara	-	396	876
Sulawesi Utara	7 981	10 247	7 425
Sulawesi Tengah	10 240	9 379	6 265
Sulawesi Selatan	21 616	21 498	16 008
Sulawesi Tenggara	2 866	1 263	1 213
Gorontalo	3 099	2 836	2 367
Sulawesi Barat	1 841	1 817	1 863
Maluku	3 086	2 751	3 495
Maluku Utara	789	722	718
Papua Barat	2 284	3 475	2 972
Papua	6 785	7 311	6 994
INDONESIA	336 652	294 281	269 324

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ Operations Control Bureau, National Police

Tabel

2.1.4

Table

Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan Menurut Kepolisian Daerah, 2017-2019

Crime Cleared by Regional Police, 2017-2019

Kepolisian Daerah Regional Police	Tahun Year		
	2017 (1)	2018 (2)	2019 (3)
A c e h	2 416	3 352	2 648
Sumatera Utara	26 829	22 443	23 094
Sumatera Barat	5 662	5 864	5 996
Riau	3 732	3 743	2 938
Jambi	6 214	4 347	4 711
Sumatera Selatan	10 514	10 144	8 902
Bengkulu	2 420	2 833	2 332
Lampung	7 638	6 439	6 438
Kep. Bangka Belitung	1 252	1 137	1 066
Kepulauan Riau	2 068	2 037	2 000
Metro Jaya	28 075	30 577	31 836
Jawa Barat	14 375	12 150	10 995
Jawa Tengah	11 291	6 980	6 668
DI Yogyakarta	2 873	2 486	4 506
Jawa Timur	18 915	15 446	12 057
Banten	2 264	2 223	2 071
Bali	2 850	2 407	2 537
Nusa Tenggara Barat	4 257	3 811	4 011
Nusa Tenggara Timur	4 776	4 400	3 209
Kalimantan Barat	4 345	4 478	4 216
Kalimantan Tengah	2 306	4 114	2 131
Kalimantan Selatan	5 005	2 025	4 371
Kalimantan Timur	6 387	4 763	3 724
Kalimantan Utara	-	277	739
Sulawesi Utara	5 621	5 507	4 717
Sulawesi Tengah	4 787	5 289	4 095
Sulawesi Selatan	13 416	11 521	11 451
Sulawesi Tenggara	1 993	879	418
Gorontalo	2 830	1 829	1 718
Sulawesi Barat	1 029	1 021	1 137
Maluku	686	667	1 538
Maluku Utara	352	405	437
Papua Barat	231	955	1 314
Papua	4 649	4 563	3 584
INDONESIA	212 058	191 112	183 605

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ Operations Control Bureau, National Police



Tabel

2.1.5

Percentase Penyelesaian Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2017-2019

Table

Clearance Rate by Regional Police, 2017-2019

Kepolisian Daerah Regional Police	Tahun Year		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	27,19	38,27	35,39
Sumatera Utara	67,3	68,17	74,91
Sumatera Barat	42,88	45,27	54,19
Riau	54,33	51,66	44,72
Jambi	65,2	68,86	68,79
Sumatera Selatan	66,85	74,82	69,22
Bengkulu	49,72	83,59	67,54
Lampung	68,88	71,84	75,44
Kep. Bangka Belitung	64,84	55,52	54,58
Kepulauan Riau	56,3	59,75	63,31
Metro Jaya	80,75	88,23	99,69
Jawa Barat	57,08	74,96	83,64
Jawa Tengah	93,83	76,48	64,63
DI Yogyakarta	39,62	36,93	67,76
Jawa Timur	54,67	58,74	44,68
Banten	61,32	61,36	63,01
Bali	79,41	74,93	83,26
Nusa Tenggara Barat	52,35	59,08	49,00
Nusa Tenggara Timur	70,98	70,32	54,71
Kalimantan Barat	72,18	77,02	89,30
Kalimantan Tengah	85,44	72,19	87,19
Kalimantan Selatan	76,09	75,93	81,32
Kalimantan Timur	69,81	75,76	84,31
Kalimantan Utara	-	69,95	84,36
Sulawesi Utara	70,43	53,74	63,53
Sulawesi Tengah	46,75	56,39	65,36
Sulawesi Selatan	62,07	53,59	71,53
Sulawesi Tenggara	69,54	69,60	34,46
Gorontalo	91,32	64,49	72,58
Sulawesi Barat	55,89	56,19	61,03
Maluku	22,23	24,25	44,01
Maluku Utara	44,61	56,09	60,86
Papua Barat	10,11	27,48	44,21
Papua	68,52	62,41	51,24
INDONESIA	62,99	64,94	68,17

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ Operations Control Bureau, National Police

**Tabel
2.1.6**

**Selang Waktu Terjadinya Kejadian Menurut Kepolisian Daerah,
2017-2019**

**Table
Crime Clock by Regional Police, 2017-2019**

Kepolisian Daerah Regional Police	Tahun Year		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	00.59'09"	01.00'00"	01.10'14"
Sumatera Utara	00.13'11"	00.15'57"	00.17'02"
Sumatera Barat	00.39'48"	00.40'34"	00.47'30"
Riau	01.16'31"	01.12'32"	01.20'00"
Jambi	00.55'08"	01.23'15"	01.16'45"
Sumatera Selatan	00.33'25"	00.38'46"	00.40'52"
Bengkulu	01.47'59"	02.35'05"	02.32'12"
Lampung	00.47'23"	00.58'38"	01.01'35"
Kep. Bangka Belitung	04.32'11"	04.16'38"	04.29'07"
Kepulauan Riau	02.23'05"	02.34'10"	02.46'22"
Metro Jaya	00.15'07"	00.15'09"	00.16'27"
Jawa Barat	00.20'52"	00.32'25"	00.39'59"
Jawa Tengah	00.43'40"	00.57'35"	00.50'56"
DI Yogyakarta	01.12'29"	01.18'05"	01.19'02"
Jawa Timur	00.15'11"	00.19'59"	00.19'28"
Banten	02.22'21"	02.25'04"	02.39'54"
Bali	02.26'26"	02.43'37"	02.52'29"
Nusa Tenggara Barat	01.04'38"	01.21'28"	01.04'12"
Nusa Tenggara Timur	01.18'06"	01.24'00"	01.29'36"
Kalimantan Barat	01.27'18"	01.30'24"	01.51'19"
Kalimantan Tengah	03.14'44"	01.32'13"	03.35'03"
Kalimantan Selatan	01.19'54"	03.17'04"	01.37'47"
Kalimantan Timur	00.57'26"	01.23'36"	01.58'59"
Kalimantan Utara	-	22.17'16"	10.00'00"
Sulawesi Utara	01.05'51"	00.51'17"	01.10'47"
Sulawesi Tengah	00.51'19"	00.56'02"	01.23'53"
Sulawesi Selatan	00.24'18"	00.24'26"	00.32'50"
Sulawesi Tenggara	03.03'23"	06.56'09"	07.13'18"
Gorontalo	02.49'36"	03.05'19"	03.42'03"
Sulawesi Barat	04.45'29"	04.49'16"	04.42'07"
Maluku	02.50'19"	03.11'03"	02.30'23"
Maluku Utara	11.06'09"	12.07'58"	12.12'02"
Papua Barat	03.50'07"	02.31'15"	02.56'51"
Papua	01.17'27"	01.11'53"	01.15'09"
INDONESIA	00.01'33"	00.01'47"	00.01'57

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ Operations Control Bureau, National Police



Tabel 2.1.7 Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Daerah, 2017-2019
Table 2.1.7 Crime Rate Per 100.000 Population by Regional Police, 2017-2019

Kepolisian Daerah Regional Police	Tahun Year		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	171	169	144
Sumatera Utara	280	231	216
Sumatera Barat	248	243	208
Riau	103	109	99
Jambi	271	180	195
Sumatera Selatan	190	164	156
Bengkulu	252	175	179
Lampung	134	108	103
Kep. Bangka Belitung	135	143	136
Kepulauan Riau	176	164	152
Metro Jaya	138	137	127
Jawa Barat	65	42	34
Jawa Tengah	35	27	30
DI Yogyakarta	193	179	177
Jawa Timur	88	67	69
Banten	55	54	49
Bali	85	76	72
Nusa Tenggara Barat	164	130	165
Nusa Tenggara Timur	127	118	111
Kalimantan Barat	122	118	96
Kalimantan Tengah	104	138	94
Kalimantan Selatan	160	102	130
Kalimantan Timur	214	176	124
Kalimantan Utara	-	57	127
Sulawesi Utara	324	416	302
Sulawesi Tengah	345	316	211
Sulawesi Selatan	256	255	190
Sulawesi Tenggara	110	49	47
Gorontalo	265	243	203
Sulawesi Barat	146	144	148
Maluku	177	158	200
Maluku Utara	65	60	59
Papua Barat	146	380	325
Papua	208	224	214
INDONESIA	129	113	103

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ Operations Control Bureau, National Police

**Tabel
Table 2.1.8 Jumlah Kejadian Menurut Kelompok Jenis Kejadian, 2017-2019
Crime Total by Type of Crime, 2017-2019**

Kelompok/Jenis Kejadian Crime Group / Type	Tahun/Year		
	2017 (1)	2018 (2)	2019 (3)
Kejadian terhadap Nyawa /Crimes against Life			
Pembunuhan/Homicide	1 150	1 024	964
Kejadian terhadap Fisik/Badan/Crimes against Physical / Body			
Penganiayaan Berat/Severe Assault	12 405	11 191	10 323
Penganiayaan Ringan/Light Assault	21 329	20 309	20 431
Kekerasan dalam Rumah Tangga/Domestic Violence	8 949	8 067	8 229
Kejadian terhadap Keseksualan/Crime Related to Sexual Violence			
Perkosaan/Rape	1 394	1 288	1 172
Pencabulan/Sexual abuse	4 119	3 970	4 061
Kejadian terhadap Kemerdekaan Orang/Crime Related to People Freedom			
Penculikan/Kidnapping	241	222	189
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur/ Child Employment	2 395	2 323	2 114
Kejadian terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan/Crime Against Rights/Property with Violence			
Pencurian dengan Kekerasan/Robbery	9 459	7 410	6 421
Pencurian dengan Kekerasan			
Menggunakan Senjata Api/Robbery using firearms	211	151	143
Pencurian dengan Kekerasan			
Menggunakan Senjata Tajam/Robbery using sharp object	1 022	862	757
Kejadian terhadap Hak Milik /Barang Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan/Crime Against Rights/Property without Violence			
Pencurian/Theft	28 313	25 269	22 271
Pencurian dengan Pemberatan/Burglary	36 467	31 571	26 931
Pencurian Kendaraan Bermotor/Motor Vehicle Theft	35 226	27 731	23 476
Pengrusakan/Penghancuran Barang/Vandalism	5 954	4 910	4 342
Pembakaran dengan Sengaja/Arson	468	521	715
Penadahan/Receive Stolen Goods	614	755	595
Kejadian Terkait Narkotika/Crime Related to Narcotics			
Narkotika dan Psikotropika/Narcotics and Psychotropics	35 412	39 588	36 478
Kejadian terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi/Crime Related to Fraud, Embezzlement, and Corruption			
Penipuan/Perbuatan Curang/Fraud	27 418	25 543	22 220
Penggelapan/Embezzlement	19 671	17 813	16 612
Korupsi/Corruption	505	496	488
Kejadian terhadap Ketertiban Umum/Crime Against Public Order			
Terhadap Ketertiban Umum/Crime Against Public Order	4 084	3 600	2 964

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ Operations Control Bureau, National Police



Tabel 2.1.9 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan, 2019
Table Crime Total by Type of Crime and Month, 2019

Kelompok/Jenis Kejahatan Crime Group / Type	Bulan/Month		
	Januari/ January	Februari/ February	Maret/ March
(1)	(2)	(3)	(4)
Kejahatan terhadap Nyawa /Crimes Against Life			
Pembunuhan/Homicide	87	87	78
Kejahatan terhadap Fisik/Badan/Crimes Against Physical/Body			
Penganiayaan Berat/Severe Assault	940	850	1 000
Penganiayaan Ringan/Light Assault	1 597	1 874	1 533
Kekerasan dalam Rumah Tangga/Domestic Violence	610	787	838
Kejahatan terhadap Keseksualaan/Crime Related to Sexual Violence			
Perkosaan/Rape	109	118	120
Pencabulan/Sexual abuse	426	331	394
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang/Crime Related to People Freedom			
Penculikan/Kidnapping	18	17	25
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur/Child Employment	162	150	148
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan/Crime Against Rights/Property with Violence			
Pencurian dengan Kekerasan/Robbery	628	546	523
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api/Robbery using firearms	7	15	22
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam/Robbery using sharp object	82	53	73
Kejahatan terhadap Hak Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan/Barang/Crime Against Rights/Property without Violence			
Pencurian/Theft	2 249	2 422	2 249
Pencurian dengan Pemberatan/Burglary	2 907	2 923	2 888
Pencurian Kendaraan Bermotor/Motor Vehicle Theft	2 361	1 992	1 913
Pengrusakan/Penghancuran Barang/Vandalism	441	360	341
Pembakaran dengan Sengaja/Arson	28	43	48
Penadahan/Receive Stolen Goods	76	57	48
Kejahatan Terkait Narkotika/Crime Related to Narcotics			
Narkotika dan Psikotropika/Narcotics and Psychotropics	3.304	3.094	2.840
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi/Crime Related to Fraud, Embezzlement, and Corruption			
Penipuan/Perbuatan Curang/Fraud	2 000	1 779	1 987
Penggelapan/Embezzlement	1 615	1 448	1 476
Korupsi/Corruption	43	36	32
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum/Crime Against Public Order			
Terhadap Ketertiban Umum/Crime Against Public Order	272	229	202

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ Operations Control Bureau, National Police

Tabel

2.1.9 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan, 2019 (lanjutan)
Crime Total by Type of Crime and Month, 2019 (continuation)

Kelompok/Jenis Kejahatan Crime Group / Type	Bulan/Month		
	April/ April	Mei/ May	Juni/ June
(1)	(2)	(3)	(4)
Kejahatan terhadap Nyawa /Crimes Against Life			
Pembunuhan/Homicide	111	93	88
Kejahatan terhadap Fisik/Badan/Crimes Against Physical/Body			
Penganiayaan Berat/Severe Assault	708	742	745
Penganiayaan Ringan/Light Assault	1 643	1 581	1 669
Kekerasan dalam Rumah Tangga/Domestic Violence	694	-	819
Kejahatan terhadap Keseksualan/Crime Related to Sexual Violence			
Perkosaan/Rape	85	77	81
Pencabulan/Sexual abuse	335	273	301
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang/Crime Related to People Freedom			
Penculikan/Kidnapping	22	19	18
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur/ Child Employment	157	124	148
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan/Crime Against Rights/Property with Violence			
Pencurian dengan Kekerasan/Robbery	490	548	501
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api/Robbery using firearms	17	13	15
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam/Robbery using sharp object	43	89	51
Kejahatan terhadap Hak Milik /Barang Tanpa Penggunaan Kekerasan/Crime Against Rights/Property without Violence			
Pencurian/Theft	2 042	1 939	1 951
Pencurian dengan Pemberatan/Burglary	2 925	2 521	2 263
Pencurian Kendaraan Bermotor/Motor Vehicle Theft	1 891	2 036	1 853
Pengrusakan/Penghancuran Barang/Vandalism	271	317	321
Pembakaran dengan Sengaja/Arson	27	31	43
Penadahan/Receive Stolen Goods	41	25	32
Kejahatan Terkait Narkotika/Crime Related to Narcotics			
Narkotika dan Psikotropika/Narcotics and Psychotropics	2 124	2 726	2 610
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi/Crime Related to Fraud, Embezzlement, and Corruption			
Penipuan/Perbuatan Curang/Fraud	1 756	1 939	1 517
Penggelapan/Embezzlement	1 247	1 320	1 152
Korupsi/Corruption	22	34	47
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum/Crime Against Public Order			
Terhadap Ketertiban Umum/Crime Against Public Order	230	239	244

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ Operations Control Bureau, National Police



Tabel 2.1.9 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan, 2019 (lanjutan)
Table 2.1.9 Crime Total by Type of Crime and Month, 2019 (continuation)

Kelompok/Jenis Kejahatan Crime Group / Type	Bulan/Month		
	Juli/ July	Agustus/ August	September/ September
(1)	(2)	(3)	(4)
Kejahatan terhadap Nyawa /Crimes Against Life			
Pembunuhan/Homicide	76	91	62
Kejahatan terhadap Fisik/Badan/Crimes Against Physical/Body			
Penganiayaan Berat/Severe Assault	933	975	956
Penganiayaan Ringan/Light Assault	1 710	1 689	1 784
Kekerasan dalam Rumah Tangga/Domestic Violence	711	755	870
Kejahatan terhadap Keseksualaan/Crime Related to Sexual Violence			
Perkosaan/Rape	101	88	100
Pencabulan/Sexual abuse	310	344	337
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang/Crime Related to People Freedom			
Penculikan/Kidnapping	11	15	9
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur/Child Employment	242	227	230
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan/Crime Against Rights/Property with Violence			
Pencurian dengan Kekerasan/Robbery	571	525	598
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api/Robbery using firearms	10	10	6
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam/Robbery using sharp object	42	42	61
Kejahatan terhadap Hak Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan /Barang/Crime Against Rights/Property without Violence			
Pencurian/Theft	1 999	1 918	2 189
Pencurian dengan Pemberatan/Burglary	2 655	2 681	2 747
Pencurian Kendaraan Bermotor/Motor Vehicle Theft	1 757	1 959	2 106
Pengrusakan/Penghancuran Barang/Vandalism	325	367	459
Pembakaran dengan Sengaja/Arson	45	83	184
Penadahan/Receive Stolen Goods	69	49	51
Kejahatan Terkait Narkotika/Crime Related to Narcotics			
Narkotika dan Psikotropika/Narcotics and Psychotropics	3 067	3 682	4 091
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi/Crime Related to Fraud, Embezzlement, and Corruption			
Penipuan/Perbuatan Curang/Fraud	1 730	1 970	2 053
Penggelapan/Embezzlement	1 321	1 446	1 545
Korupsi/Corruption	60	59	47
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum/Crime Against Public Order			
Terhadap Ketertiban Umum/Crime Against Public Order	272	283	336

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ Operations Control Bureau, National Police

Tabel
Table

2.1.9 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan, 2019 (lanjutan)
Crime Total by Type of Crime and Month, 2019 (continuation)

Kelompok/Jenis Kejahatan <i>Crime Group / Type</i>	Bulan/Month		
	Okttober/ October	November/ November	Desember/ December
(1)	(2)	(3)	(4)
Kejahatan terhadap Nyawa /Crimes Against Life			
Pembunuhan/Homicide	80	53	58
Kejahatan terhadap Fisik/Badan/Crimes Against Physical/Body			
Penganiayaan Berat/Severe Assault	903	778	793
Penganiayaan Ringan/Light Assault	2 002	1 979	1 370
Kekerasan dalam Rumah Tangga/Domestic Violence	708	738	699
Kejahatan terhadap Keseksualan/Crime Related to Sexual Violence			
Perkosaan/Rape	123	93	77
Pencabulan/Sexual abuse	348	341	321
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang/Crime Related to People Freedom			
Penculikan/Kidnapping	10	15	10
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur/ Child Employment	188	232	106
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan/Crime Against Rights/Property with Violence			
Pencurian dengan Kekerasan/Robbery	547	487	457
Pencurian dengan Kekerasan			
Menggunakan Senjata Api/Robbery using firearms	15	9	4
Pencurian dengan Kekerasan			
Menggunakan Senjata Tajam/Robbery using sharp object	90	52	79
Kejahatan terhadap Hak Milik /Barang Tanpa Penggunaan Kekerasan/Crime Against Rights/Property without Violence			
Pencurian/Theft	1 845	1 934	1 654
Pencurian dengan Pemberatan/Burglary	2 532	2 391	2 138
Pencurian Kendaraan Bermotor/Motor Vehicle Theft	2 049	1 912	1 647
Pengrusakan/Penghancuran Barang/Vandalism	449	384	307
Pembakaran dengan Sengaja/Arson	95	49	39
Penadahan/Receive Stolen Goods	41	55	51
Kejahatan Terkait Narkotika/Crime Related to Narcotics			
Narkotika dan Psikotropika/Narcotics and Psychotropics	3 823	2 944	2 173
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi/Crime Related to Fraud, Embezzlement, and Corruption			
Penipuan/Perbuatan Curang/Fraud	2 091	1 908	1 490
Penggelapan/Embezzlement	1 493	1 399	1 150
Korupsi/Corruption	40	46	22
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum/Crime Against Public Order			
Terhadap Ketertiban Umum/Crime Against Public Order	181	248	228

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ Operations Control Bureau, National Police



Tabel 2.1.10 Jumlah Kejadian Menurut Jenis Kejadian dan Kepolisian Daerah, 2017
Table 2.1.10 Crime Total by Type of Crime and Regional Police, 2017

Kepolisian Daerah Regional Police	Kejadian terhadap Nyawa/ Crime Against Life		Kejadian terhadap Fisik Crime Against Physical/Body	
	Pembunuhan/ Homicide	Penganiayaan Berat/Severe Assault	Penganiayaan Ringen/Light Assault	KDRT/ Domestic Violence
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	27	226	1 208	330
Sumatera Utara	92	2 791	2 842	-
Sumatera Barat	14	329	1 744	298
Riau	28	185	405	201
Jambi	24	293	467	255
Sumatera Selatan	147	1 239	282	522
Bengkulu	37	186	63	146
Lampung	50	152	124	125
Kep. Bangka Belitung	9	50	3	42
Kepulauan Riau	6	154	345	142
Metro Jaya	76	990	251	754
Jawa Barat	89	862	1 009	676
Jawa Tengah	30	187	369	174
DI Yogyakarta	1	93	144	124
Jawa Timur	60	1 026	693	723
Banten	31	106	208	37
Bali	11	6	418	158
Nusa Tenggara Barat	7	50	99	335
Nusa Tenggara Timur	34	484	1 533	474
Kalimantan Barat	13	79	-	175
Kalimantan Tengah	30	50	133	39
Kalimantan Selatan	30	221	112	54
Kalimantan Timur	22	454	245	198
Sulawesi Utara	103	585	-	359
Sulawesi Tengah	15	32	1 487	439
Sulawesi Selatan	65	228	3 964	1 348
Sulawesi Tenggara	17	9	744	171
Gorontalo	10	34	1 250	161
Sulawesi Barat	15	15	451	98
Maluku	7	576	121	124
Maluku Utara	7	107	38	39
Papua Barat	6	233	164	53
Papua	37	373	413	175
INDONESIA	1 150	12 405	21 329	8 949

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ *Operations Control Bureau, National Police*

Tabel
2.1.10
Table

Jumlah Kejadian Menurut Jenis Kejadian dan Kepolisian Daerah, 2017 (lanjutan)
Crime Total by Type of Crime and Regional Police, 2017 (continuation)

Kepolisian Daerah Regional Police	Kejadian terhadap Kesusilaan/ Crime Related to Sexual Violence		Kejadian terhadap Kemerdekaan Orang Kejadian/Crime Related to People Freedom	
	Perkosaan/ Rape	Pencabulan/ Sexual Abuse	Penculikan/ Kidnapping	Memekerjakan Anak di Bawah Umur/Child Employment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	51	260	19	19
Sumatera Utara	216	8	19	-
Sumatera Barat	56	287	-	158
Riau	87	10	3	8
Jambi	107	6	3	222
Sumatera Selatan	90	130	12	104
Bengkulu	13	81	-	5
Lampung	91	72	2	6
Kep Bangka Belitung	10	33	-	38
Kepulauan Riau	12	119	5	-
Metro Jaya	42	134	41	3
Jawa Barat	63	286	28	124
Jawa Tengah	21	249	3	219
DI Yogyakarta	7	31	6	18
Jawa Timur	38	220	7	203
Banten	3	89	2	109
Bali	6	71	1	21
Nusa Tenggara Barat	36	28	2	74
Nusa Tenggara Timur	47	168	7	33
Kalimantan Barat	35	191	1	103
Kalimantan Tengah	8	86	-	2
Kalimantan Selatan	18	50	-	-
Kalimantan Timur	23	125	3	-
Sulawesi Utara	56	328	24	1
Sulawesi Tengah	38	207	24	-
Sulawesi Selatan	70	252	7	398
Sulawesi Tenggara	28	114	2	27
Gorontalo	23	143	-	46
Sulawesi Barat	18	44	6	27
Maluku	26	97	8	134
Maluku Utara	3	152	1	13
Papua Barat	19	15	3	99
Papua	33	33	2	181
INDONESIA	1 394	4 119	241	2 395

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ Operations Control Bureau, National Police



Tabel

2.1.10

Table

Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2017 (lanjutan)

*Crime Total by Type of Crime and Regional Police, 2017
(continuation)*

Kepolisian Daerah <i>Regional Police</i>	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan/ <i>Crime Against Rights/Property with Violence</i>		
	Pencurian dengan Kekerasan / <i>Robbery</i>	Pencurian dengan Kekerasan (Senpi) / <i>Robbery using firearms</i>	Pencurian dengan Kekerasan (Sajam) / <i>Robbery using sharp object</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	208	3	8
Sumatera Utara	900	8	-
Sumatera Barat	446	2	15
Riau	222	24	17
Jambi	265	9	-
Sumatera Selatan	989	31	44
Bengkulu	198	4	1
Lampung	718	31	25
Kep. Bangka Belitung	25	-	-
Kepulauan Riau	163	-	12
Metro Jaya	483	28	124
Jawa Barat	947	30	26
Jawa Tengah	198	15	43
DI Yogyakarta	117	-	-
Jawa Timur	611	3	13
Banten	124	4	-
Bali	63	2	20
Nusa Tenggara Barat	400	3	-
Nusa Tenggara Timur	124	1	-
Kalimantan Barat	180	-	-
Kalimantan Tengah	20	-	112
Kalimantan Selatan	109	1	365
Kalimantan Timur	121	5	106
Sulawesi Utara	133	-	7
Sulawesi Tengah	210	4	-
Sulawesi Selatan	1 094	2	41
Sulawesi Tenggara	27	-	2
Gorontalo	8	-	-
Sulawesi Barat	11	-	25
Maluku	7	-	-
Maluku Utara	3	-	13
Papua Barat	89	-	3
Papua	246	1	-
INDONESIA	9 459	211	1 022

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ *Operations Control Bureau, National Police*

Tabel

2.1.10

Table

Jumlah Kejadian Menurut Jenis Kejadian dan Kepolisian Daerah, 2017 (lanjutan)

*Crime Total by Type of Crime and Regional Police, 2017
(continuation)*

Kepolisian Daerah <i>Regional Police</i>	Kejadian terhadap Hak Milik/Barang Tanpa Penggunaan Kekerasan/Crime Against Rights/Property without Violence			
	Pencurian/ <i>Theft</i>	Pencurian dengan Pemberatan/ <i>Burglary</i>	Pencurian Kendaraan Bermotor/ <i>Motor Vehicle Theft</i>	Penadahan/ <i>Receive Stolen Goods</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	1 351	664	968	34
Sumatera Utara	2 282	5 066	4 030	22
Sumatera Barat	1 604	2 521	2 910	2
Riau	541	1 078	676	20
Jambi	995	1 683	1 048	-
Sumatera Selatan	508	2 771	1 050	5
Bengkulu	466	810	665	28
Lampung	455	1 504	271	11
Kep Bangka Belitung	128	479	126	3
Kepulauan Riau	715	271	416	9
Metro Jaya	1 324	2 180	1 796	151
Jawa Barat	960	3 727	5 414	40
Jawa Tengah	821	2 035	1 665	25
DI Yogyakarta	521	604	573	1
Jawa Timur	1 366	2 822	2 072	59
Banten	153	580	810	9
Bali	447	405	328	10
Nusa Tenggara Barat	649	930	281	5
Nusa Tenggara Timur	1 069	276	349	24
Kalimantan Barat	970	684	560	16
Kalimantan Tengah	136	288	170	12
Kalimantan Selatan	393	594	494	26
Kalimantan Timur	584	767	1 059	7
Sulawesi Utara	809	70	250	20
Sulawesi Tengah	2 378	778	2 357	4
Sulawesi Selatan	3 440	1 633	2 192	46
Sulawesi Tenggara	440	167	279	2
Gorontalo	711	15	134	-
Sulawesi Barat	359	106	133	-
Maluku	413	99	145	4
Maluku Utara	76	8	11	-
Papua Barat	568	224	74	-
Papua	681	628	1 920	19
INDONESIA	28 313	36 467	35 226	614

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ *Operations Control Bureau, National Police*



Tabel

2.1.10

Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2017 (lanjutan)

Table

*Crime Total by Type of Crime and Regional Police, 2017
(continuation)*

Kepolisian Daerah <i>Regional Police</i>	Kejahatan terhadap Hak Milik/ Barang Tanpa Penggunaan Kekerasan/Crime Against Rights/ Property without Violence		Kejahatan terkait Narkotika/ Crime Related to Narcotics
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang/ Vandalism	Pembakaran dengan Sengaja/ Arson	
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	186	35	1 544
Sumatera Utara	876	85	5 907
Sumatera Barat	451	23	592
Riau	61	13	1 173
Jambi	163	24	712
Sumatera Selatan	192	31	1 768
Bengkulu	80	1	192
Lampung	145	1	1 744
Kep Bangka Belitung	20	3	224
Kepulauan Riau	54	-	400
Metro Jaya	173	-	7 214
Jawa Barat	251	10	1 090
Jawa Tengah	63	12	1 243
DI Yogyakarta	61	-	290
Jawa Timur	216	29	3 405
Banten	33	-	389
Bali	53	2	665
Nusa Tenggara Barat	210	7	227
Nusa Tenggara Timur	359	40	2
Kalimantan Barat	48	3	490
Kalimantan Tengah	12	23	474
Kalimantan Selatan	27	6	1 211
Kalimantan Timur	73	2	2 928
Sulawesi Utara	402	6	111
Sulawesi Tengah	234	5	259
Sulawesi Selatan	765	17	717
Sulawesi Tenggara	86	9	65
Gorontalo	138	18	38
Sulawesi Barat	48	4	120
Maluku	92	19	73
Maluku Utara	23	-	63
Papua Barat	79	-	41
Papua	280	40	41
INDONESIA	5 954	468	35 412

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ Operations Control Bureau, National Police

Tabel

2.1.10
Table

Jumlah Kejadian Menurut Jenis Kejadian dan Kepolisian Daerah, 2017 (lanjutan)

*Crime Total by Type of Crime and Regional Police, 2017
(continuation)*

Kepolisian Daerah <i>Regional Police</i>	Kejadian terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi/Crime Related to Fraud, Embezzlement, and Corruption			Kejadian terhadap Ketertiban Umum/Crime Against Public Order
	Penipuan/ Perbuatan Curang/ Fraud	Penggelapan/ Embezzlement	Korupsi/ Corruption	
	(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	674	643	21	9
Sumatera Utara	2 434	2 831	32	-
Sumatera Barat	967	910	4	360
Riau	323	624	19	2
Jambi	942	905	18	312
Sumatera Selatan	1 127	1 237	12	282
Bengkulu	365	342	21	35
Lampung	710	707	27	1
Kep Bangka Belitung	108	80	2	-
Kepulauan Riau	404	288	11	-
Metro Jaya	4 236	1 921	12	227
Jawa Barat	3 345	1 429	19	398
Jawa Tengah	785	726	29	293
DI Yogyakarta	510	296	2	76
Jawa Timur	2 602	981	56	133
Banten	421	193	11	-
Bali	203	235	13	1
Nusa Tenggara Barat	385	316	19	2
Nusa Tenggara Timur	486	274	6	892
Kalimantan Barat	223	446	16	1
Kalimantan Tengah	73	160	21	-
Kalimantan Selatan	261	275	18	-
Kalimantan Timur	357	491	28	178
Sulawesi Utara	691	576	8	8
Sulawesi Tengah	667	662	10	4
Sulawesi Selatan	2 831	1 241	26	3
Sulawesi Tenggara	149	70	12	1
Gorontalo	302	239	4	15
Sulawesi Barat	173	134	3	-
Maluku	219	98	6	298
Maluku Utara	18	22	7	4
Papua Barat	154	103	3	143
Papua	273	216	9	406
INDONESIA	27 418	19 671	505	4 084

Sumber/Souce : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ *Operations Control Bureau, National Police*



Tabel 2.1.11 Jumlah Kejadian Menurut Jenis Kejadian dan Kepolisian Daerah, 2018
Table Crime Total by Type of Crime and Regional Police, 2018

Kepolisian Daerah Regional Police	Kejadian terhadap Nyawa/ Crime Against Life		Kejadian terhadap Fisik Crime Against Physical/Body		
	Pembunuhan/ Homicide	Penganiayaan Berat/Severe Assault	Penganiayaan Ringan/Light Assault	KDRT/ Domestic Violence	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Aceh	22	310	881	284	
Sumatera Utara	107	2 524	2 716	0	
Sumatera Barat	14	291	1 558	304	
Riau	30	234	439	179	
Jambi	23	169	219	183	
Sumatera Selatan	111	1 006	279	468	
Bengkulu	26	222	65	137	
Lampung	11	113	54	142	
Kep Bangka Belitung	9	62	0	34	
Kepulauan Riau	6	165	304	117	
Metro Jaya	75	830	139	1 037	
Jawa Barat	35	617	656	373	
Jawa Tengah	34	212	303	116	
DI Yogyakarta	2	50	164	120	
Jawa Timur	72	921	739	685	
Banten	5	152	187	40	
Bali	10	5	383	159	
Nusa Tenggara Barat	3	72	0	308	
Nusa Tenggara Timur	45	15	1 970	382	
Kalimantan Barat	26	112	0	139	
Kalimantan Tengah	14	41	154	36	
Kalimantan Selatan	43	187	135	50	
Kalimantan Timur	16	288	163	101	
Kalimantan Utara	4	22	9	8	
Sulawesi Utara	68	959	1 139	277	
Sulawesi Tengah	13	54	1 190	329	
Sulawesi Selatan	72	203	3 378	1 119	
Sulawesi Tenggara	7	3	378	106	
Gorontalo	15	8	1 175	223	
Sulawesi Barat	12	6	457	74	
Maluku	15	355	138	173	
Maluku Utara	23	79	72	59	
Papua Barat	13	441	169	94	
Papua	43	463	696	211	
INDONESIA	1 024	11 191	20 309	8 067	

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ Operations Control Bureau, National Police

Tabel
Table 2.1.11

Jumlah Kejadian Menurut Jenis Kejadian dan Kepolisian Daerah, 2018 (lanjutan)
Crime Total by Type of Crime and Regional Police, 2018 (continuation)

Kepolisian Daerah Regional Police	Kejadian terhadap Kesusilaan/Crime Related to Sexual Violence		Kejadian terhadap Kemerdekaan Orang Kejadian/Crime Related to People Freedom	
	Perkosaan/ Rape	Pencabulan/ Sexual Abuse	Penculikan/ Kidnapping	Mempekerjakan Anak di Bawah Umur/Child Employment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	39	223	29	12
Sumatera Utara	264	57	15	73
Sumatera Barat	31	361	1	131
Riau	95	3	1	15
Jambi	33	57	4	49
Sumatera Selatan	82	93	3	129
Bengkulu	14	63	2	4
Lampung	39	26	5	2
Kep Bangka Belitung	6	46	0	33
Kepulauan Riau	11	114	2	0
Metro Jaya	33	103	34	4
Jawa Barat	46	466	12	21
Jawa Tengah	18	208	7	192
DI Yogyakarta	9	40	1	13
Jawa Timur	68	224	12	149
Banten	6	82	0	136
Bali	16	83	3	26
Nusa Tenggara Barat	36	0	2	52
Nusa Tenggara Timur	65	150	6	72
Kalimantan Barat	20	100	1	128
Kalimantan Tengah	12	75	0	3
Kalimantan Selatan	15	44	0	2
Kalimantan Timur	14	85	0	0
Kalimantan Utara	3	23	0	1
Sulawesi Utara	50	271	51	0
Sulawesi Tengah	35	170	0	15
Sulawesi Selatan	66	250	6	434
Sulawesi Tenggara	11	79	1	11
Gorontalo	24	196	6	32
Sulawesi Barat	10	36	0	10
Maluku	22	97	12	193
Maluku Utara	18	80	2	18
Papua Barat	28	11	0	129
Papua	49	54	4	234
INDONESIA	1 288	3 970	222	2 323

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ Operations Control Bureau, National Police



Tabel

2.1.11

Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2018 (lanjutan)

Table

Crime Total by Type of Crime and Regional Police, 2018
(continuation)

Kepolisian Daerah Regional Police	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan/Crime Against Rights/Property with Violence		
	Pencurian dengan Kekerasan/ <i>Robbery</i>	Pencurian dengan Kekerasan (Senpi)/ <i>Robbery</i> using firearms	Pencurian dengan Kekerasan (Sajam)/ <i>Robbery</i> using sharp object
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	150	1	5
Sumatera Utara	696	6	0
Sumatera Barat	379	1	7
Riau	282	11	8
Jambi	106	10	3
Sumatera Selatan	628	30	36
Bengkulu	114	0	2
Lampung	460	26	13
Kep Bangka Belitung	35	1	2
Kepulauan Riau	103	1	5
Metro Jaya	335	17	53
Jawa Barat	327	12	26
Jawa Tengah	152	8	43
DI Yogyakarta	132	2	4
Jawa Timur	663	2	3
Banten	119	4	5
Bali	50	4	9
Nusa Tenggara Barat	256	3	2
Nusa Tenggara Timur	66	0	0
Kalimantan Barat	97	1	0
Kalimantan Tengah	47	1	63
Kalimantan Selatan	79	4	417
Kalimantan Timur	78	1	83
Kalimantan Utara	4	0	0
Sulawesi Utara	87	0	12
Sulawesi Tengah	243	2	2
Sulawesi Selatan	1 173	2	26
Sulawesi Tenggara	18	0	19
Gorontalo	11	0	0
Sulawesi Barat	17	0	7
Maluku	25	0	0
Maluku Utara	1	0	1
Papua Barat	170	0	1
Papua	307	1	5
INDONESIA	7 410	151	862

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ Operations Control Bureau, National Police

Tabel 2.1.11 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2018 (lanjutan)
Table 2.1.11 Crime Total by Type of Crime and Regional Police, 2018 (continuation)

Kepolisian Daerah Regional Police	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang Tanpa Penggunaan Kekerasan/Crime Against Rights/Property without Violence				
	Pencurian/ Theft	Pencurian dengan Pemberatan/ Burglary	Pencurian Kendaraan Bermotor/ Motor Vehicle Theft	Penadahan/ Receive Stolen Goods	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A c e h	1 259	620	892	116	
Sumatera Utara	2 692	4 683	2 956	323	
Sumatera Barat	1 951	2 471	2 379	408	
Riau	501	1 047	606	99	
Jambi	676	972	490	122	
Sumatera Selatan	450	2 264	928	148	
Bengkulu	220	575	282	33	
Lampung	414	1 247	127	84	
Kep Bangka Belitung	145	369	128	18	
Kepulauan Riau	575	268	557	56	
Metro Jaya	987	1 668	1 269	209	
Jawa Barat	675	1 429	2 588	131	
Jawa Tengah	663	1 667	1 305	59	
DI Yogyakarta	646	520	393	81	
Jawa Timur	1 612	2 677	2 384	306	
Banten	139	527	876	13	
Bali	503	372	306	47	
Nusa Tenggara Barat	442	841	0	163	
Nusa Tenggara Timur	1 117	364	264	323	
Kalimantan Barat	771	948	509	55	
Kalimantan Tengah	122	360	324	16	
Kalimantan Selatan	418	553	395	37	
Kalimantan Timur	379	582	516	50	
Kalimantan Utara	33	104	18	1	
Sulawesi Utara	1 117	458	478	331	
Sulawesi Tengah	2 180	904	1 730	225	
Sulawesi Selatan	4 151	1 794	2 047	697	
Sulawesi Tenggara	208	53	105	31	
Gorontalo	602	10	125	130	
Sulawesi Barat	446	144	137	80	
Maluku	437	89	124	85	
Maluku Utara	86	11	9	18	
Papua Barat	466	397	377	121	
Papua	886	583	2 107	294	
INDONESIA	27 969	31 571	27 731	4 910	

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ Operations Control Bureau, National Police



Tabel 2.1.11 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2018
Table 2.1.11 Crime Total by Type of Crime and Regional Police, 2018

Kepolisian Daerah Regional Police	Kejahatan terhadap Hak Milik/ Barang Tanpa Penggunaan Kekerasan/Crime Against Rights/ Property without Violence		Kejahatan terkait Narkotika/ Crime Related to Narcotics
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang/ Vandalism	Pembakaran dengan Sengaja/ Arson	
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	37	35	1 625
Sumatera Utara	110	54	6 262
Sumatera Barat	21	0	806
Riau	26	54	1 717
Jambi	20	3	439
Sumatera Selatan	18	4	2 001
Bengkulu	1	14	165
Lampung	3	7	2 511
Kep Bangka Belitung	3	3	377
Kepulauan Riau	0	6	410
Metro Jaya	0	216	8 715
Jawa Barat	5	13	1 604
Jawa Tengah	4	29	991
DI Yogyakarta	1	2	250
Jawa Timur	28	83	2 712
Banten	0	11	339
Bali	1	4	746
Nusa Tenggara Barat	6	7	193
Nusa Tenggara Timur	28	8	6
Kalimantan Barat	5	17	720
Kalimantan Tengah	50	36	640
Kalimantan Selatan	5	29	1 650
Kalimantan Timur	3	2	2 108
Kalimantan Utara	2	0	77
Sulawesi Utara	20	70	888
Sulawesi Tengah	19	1	311
Sulawesi Selatan	20	19	707
Sulawesi Tenggara	6	4	83
Gorontalo	9	0	43
Sulawesi Barat	14	0	185
Maluku	15	1	113
Maluku Utara	0	1	84
Papua Barat	1	3	81
Papua	40	19	29
INDONESIA	521	755	39 588

Sumber/Souce : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ Operations Control Bureau, National Police

Tabel

2.1.11
Table

Jumlah Kejadian Menurut Jenis Kejadian dan Kepolisian Daerah, 2018 (lanjutan)

*Crime Total by Type of Crime and Regional Police, 2018
(continuation)*

Kepolisian Daerah <i>Regional Police</i>	Kejadian terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi/Crime Related to Fraud, Embezzlement, and Corruption			Kejadian terhadap Ketertiban Umum/Crime Against Public Order	
	Penipuan/ Perbuatan Curang/ Fraud	Penggelapan/ Embezzlement	Korupsi/ Corruption		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	867	589	15	6	
Sumatera Utara	2 067	2 584	29	0	
Sumatera Barat	974	861	12	101	
Riau	454	585	21	0	
Jambi	424	516	19	126	
Sumatera Selatan	1 064	1 022	22	214	
Bengkulu	196	175	24	15	
Lampung	612	519	4	0	
Kep Bangka Belitung	70	69	4	1	
Kepulauan Riau	391	251	7	1	
Metro Jaya	3 546	1 971	9	223	
Jawa Barat	2 808	1 234	28	65	
Jawa Tengah	623	648	29	207	
DI Yogyakarta	758	350	3	44	
Jawa Timur	2 906	1 271	35	125	
Banten	371	138	5	0	
Bali	268	197	21	5	
Nusa Tenggara Barat	344	240	5	0	
Nusa Tenggara Timur	499	301	18	962	
Kalimantan Barat	202	397	29	17	
Kalimantan Tengah	70	143	38	3	
Kalimantan Selatan	141	228	23	0	
Kalimantan Timur	290	344	35	468	
Kalimantan Utara	19	30	1	0	
Sulawesi Utara	862	672	5	19	
Sulawesi Tengah	704	593	8	1	
Sulawesi Selatan	2 615	1 118	14	1	
Sulawesi Tenggara	64	38	3	0	
Gorontalo	269	219	5	14	
Sulawesi Barat	188	96	1	2	
Maluku	219	76	4	212	
Maluku Utara	29	16	0	1	
Papua Barat	274	151	6	277	
Papua	355	171	14	490	
INDONESIA	25 543	17 813	496	3 600	

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ Operations Control Bureau, National Police



Tabel 2.1.12 Jumlah Kejadian Menurut Jenis Kejadian dan Kepolisian Daerah, 2019
Table Crime Total by Type of Crime and Regional Police, 2019

Kepolisian Daerah Regional Police	Kejadian terhadap Nyawa/ Crime Against Life		Kejadian terhadap Fisik Crime Against Physical/Body	
	Pembunuhan/ Homicide	Penganiayaan Berat/Severe Assault	Penganiayaan Ringan/Light Assault	KDRT/ Domestic Violence
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	26	235	764	257
Sumatera Utara	104	2 251	2 561	5
Sumatera Barat	16	288	1 480	220
Riau	19	232	387	299
Jambi	15	298	299	142
Sumatera Selatan	136	932	281	495
Bengkulu	24	207	45	147
Lampung	20	134	331	162
Kep Bangka Belitung	8	122	2	41
Kepulauan Riau	9	124	280	171
Metro Jaya	36	613	143	575
Jawa Barat	32	878	446	490
Jawa Tengah	34	210	293	120
DI Yogyakarta	7	66	266	124
Jawa Timur	65	673	702	928
Banten	12	78	169	35
Bali	5	41	403	163
Nusa Tenggara Barat	5	55	0	397
Nusa Tenggara Timur	62	164	1 872	372
Kalimantan Barat	20	82	0	81
Kalimantan Tengah	28	35	145	41
Kalimantan Selatan	33	178	159	61
Kalimantan Timur	13	176	118	230
Kalimantan Utara	1	53	19	36
Sulawesi Utara	50	639	1 275	445
Sulawesi Tengah	17	39	1 099	346
Sulawesi Selatan	50	166	3 516	984
Sulawesi Tenggara	13	74	499	90
Gorontalo	17	17	1 034	152
Sulawesi Barat	12	2	506	71
Maluku	10	677	0	214
Maluku Utara	3	124	14	36
Papua Barat	10	210	372	87
Papua	52	250	951	212
INDONESIA	964	10 323	20 431	8 229

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ Operations Control Bureau, National Police

Tabel
Table 2.1.12

Jumlah Kejadian Menurut Jenis Kejadian dan Kepolisian Daerah, 2019 (lanjutan)
*Crime Total by Type of Crime and Regional Police, 2019
(continuation)*

Kepolisian Daerah Regional Police	Kejadian terhadap Kesusilaan/Crime Related to Sexual Violence		Kejadian terhadap Kemerdekaan Orang Kejahanan/Crime Related to People Freedom	
	Perkosaan/ Rape	Pencabulan/ Sexual Abuse	Penculikan/ Kidnapping	Mempekerjakan Anak di Bawah Umur/Child Employment
	(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	34	233	17	11
Sumatera Utara	216	0	25	80
Sumatera Barat	29	304	0	104
Riau	114	4	1	7
Jambi	23	46	2	29
Sumatera Selatan	69	100	11	141
Bengkulu	9	89	0	6
Lampung	44	263	5	37
Kep. Bangka Belitung	1	37	0	50
Kepulauan Riau	11	118	1	0
Metro Jaya	35	85	18	0
Jawa Barat	41	424	5	8
Jawa Tengah	36	191	3	230
DI Yogyakarta	6	42	2	15
Jawa Timur	51	176	15	196
Banten	7	65	4	110
Bali	6	76	0	11
Nusa Tenggara Barat	41	0	1	50
Nusa Tenggara Timur	52	177	4	7
Kalimantan Barat	16	128	2	97
Kalimantan Tengah	5	52	0	2
Kalimantan Selatan	10	35	0	0
Kalimantan Timur	18	87	0	0
Kalimantan Utara	5	30	0	9
Sulawesi Utara	17	246	45	1
Sulawesi Tengah	37	174	1	37
Sulawesi Selatan	63	308	7	392
Sulawesi Tenggara	25	70	3	3
Gorontalo	17	128	1	52
Sulawesi Barat	11	48	1	9
Maluku	31	151	12	85
Maluku Utara	9	105	0	9
Papua Barat	21	12	3	108
Papua	62	57	0	218
INDONESIA	1 172	4 061	189	2 114

Sumber/Souce : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ *Operations Control Bureau, National Police*



Tabel

2.1.12

Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2019 (lanjutan)

Table

*Crime Total by Type of Crime and Regional Police, 2019
(continuation)*

Kepolisian Daerah <i>Regional Police</i>	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan/Crime Against Rights/Property <i>with Violence</i>		
	Pencurian dengan Kekerasan/ <i>Robbery</i>	Pencurian dengan Kekerasan (Senpi)/ <i>Robbery</i> <i>using firearms</i>	Pencurian dengan Kekerasan (Sajam)/ <i>Robbery</i> <i>using sharp object</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	135	1	4
Sumatera Utara	680	5	0
Sumatera Barat	267	1	9
Riau	242	12	0
Jambi	152	7	1
Sumatera Selatan	670	27	26
Bengkulu	89	0	0
Lampung	444	41	83
Kep Bangka Belitung	37	3	1
Kepulauan Riau	98	0	9
Metro Jaya	236	9	50
Jawa Barat	203	10	1
Jawa Tengah	160	5	28
DI Yogyakarta	107	1	3
Jawa Timur	535	3	5
Banten	78	4	0
Bali	63	5	0
Nusa Tenggara Barat	319	0	0
Nusa Tenggara Timur	83	0	0
Kalimantan Barat	72	2	0
Kalimantan Tengah	37	2	75
Kalimantan Selatan	64	1	255
Kalimantan Timur	57	1	112
Kalimantan Utara	13	0	11
Sulawesi Utara	50	0	16
Sulawesi Tengah	110	1	1
Sulawesi Selatan	546	1	30
Sulawesi Tenggara	16	0	0
Gorontalo	52	0	1
Sulawesi Barat	17	0	12
Maluku	18	0	0
Maluku Utara	4	0	2
Papua Barat	207	0	5
Papua	560	1	17
INDONESIA	6 421	143	757

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ *Operations Control Bureau, National Police*

Tabel
Table 2.1.12

Jumlah Kejadian Menurut Jenis Kejadian dan Kepolisian Daerah, 2019 (lanjutan)
*Crime Total by Type of Crime and Regional Police, 2019
(continuation)*

Kepolisian Daerah Regional Police	Kejadian terhadap Hak Milik/Barang Tanpa Penggunaan Kekerasan/Crime Against Rights/Property without Violence			
	Pencurian/ Theft	Pencurian dengan Pemberatan/ Burglary	Pencurian Kendaraan Bermotor/ Motor Vehicle Theft	Penadahan/ Receive Stolen Goods
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	1 094	526	729	97
Sumatera Utara	1 610	3 903	2 632	448
Sumatera Barat	1 770	2 041	2 181	264
Riau	427	972	471	70
Jambi	790	1 252	753	71
Sumatera Selatan	476	1 995	771	261
Bengkulu	203	520	358	28
Lampung	382	1 303	1 021	109
Kep. Bangka Belitung	230	352	119	9
Kepulauan Riau	606	267	391	49
Metro Jaya	794	1 215	1 041	120
Jawa Barat	668	1 012	1 613	106
Jawa Tengah	760	1 829	1 531	75
DI Yogyakarta	563	553	520	76
Jawa Timur	1 584	2 686	2 356	195
Banten	127	455	758	22
Bali	470	335	349	35
Nusa Tenggara Barat	533	1 009	0	194
Nusa Tenggara Timur	1 083	217	196	294
Kalimantan Barat	597	657	419	38
Kalimantan Tengah	142	263	172	7
Kalimantan Selatan	347	493	372	22
Kalimantan Timur	239	401	419	25
Kalimantan Utara	63	222	54	4
Sulawesi Utara	804	125	123	283
Sulawesi Tengah	1 527	320	591	153
Sulawesi Selatan	3 036	1 026	986	528
Sulawesi Tenggara	235	35	81	36
Gorontalo	440	26	124	100
Sulawesi Barat	600	63	125	68
Maluku	686	56	135	109
Maluku Utara	75	8	6	9
Papua Barat	319	311	407	106
Papua	1 111	483	1 672	331
INDONESIA	24 391	26 931	23 476	4 342

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ Operations Control Bureau, National Police



Tabel

2.1.12

Table

Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2019 (lanjutan)

*Crime Total by Type of Crime and Regional Police, 2019
(continuation)*

Kepolisian Daerah Regional Police	Kejahatan terhadap Hak Milik/ Barang Tanpa Penggunaan Kekerasan/Crime Against Right/ Property without Violence		Kejahatan terkait Narkotika/ Crime Related to Narcotics
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang/ Vandalism	Pembakaran dengan Sengaja/ Arson	
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	28	30	1 582
Sumatera Utara	78	22	6 201
Sumatera Barat	21	1	806
Riau	26	2	1 671
Jambi	4	0	407
Sumatera Selatan	35	10	1 621
Bengkulu	6	7	206
Lampung	12	8	1 771
Kep Bangka Belitung	5	2	328
Kepulauan Riau	11	13	360
Metro Jaya	9	128	6 338
Jawa Barat	5	17	1 013
Jawa Tengah	37	33	1 415
DI Yogyakarta	0	3	283
Jawa Timur	26	82	3 640
Banten	0	4	584
Bali	4	2	777
Nusa Tenggara Barat	7	20	288
Nusa Tenggara Timur	46	13	2
Kalimantan Barat	5	11	721
Kalimantan Tengah	97	34	646
Kalimantan Selatan	16	36	1 726
Kalimantan Timur	22	8	1 677
Kalimantan Utara	3	0	200
Sulawesi Utara	8	44	145
Sulawesi Tengah	9	8	319
Sulawesi Selatan	24	5	1 208
Sulawesi Tenggara	8	0	45
Gorontalo	8	0	93
Sulawesi Barat	8	0	121
Maluku	9	2	124
Maluku Utara	3	0	89
Papua Barat	11	2	45
Papua	124	48	26
INDONESIA	715	595	36 478

Sumber/Souce : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ Operations Control Bureau, National Police

Tabel

2.1.12

Jumlah Kejadian Menurut Jenis Kejadian dan Kepolisian Daerah, 2019 (lanjutan)

*Crime Total by Type of Crime and Regional Police, 2019
(continuation)*

Kepolisian Daerah Regional Police	Kejadian terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi/Crime Related to Fraud, Embezzlement, and Corruption			Kejadian terhadap Ketertiban Umum/Crime Against Public Order
	Penipuan/ Perbuatan Curang/ Fraud	Penggelapan/ Embezzlement	Korupsi/ Corruption	Terhadap Ketertiban Umum/Crime Against Public Order
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	628	475	17	3
Sumatera Utara	2 333	2 545	26	0
Sumatera Barat	576	740	36	1
Riau	315	658	14	1
Jambi	457	733	16	206
Sumatera Selatan	1 022	945	22	293
Bengkulu	214	253	19	9
Lampung	836	450	11	0
Kep Bangka Belitung	71	83	4	0
Kepulauan Riau	322	238	4	0
Metro Jaya	3 303	1 801	11	204
Jawa Barat	1 980	1 214	20	83
Jawa Tengah	772	695	21	36
DI Yogyakarta	558	293	2	58
Jawa Timur	2 801	1 254	47	105
Banten	356	153	1	0
Bali	172	196	14	1
Nusa Tenggara Barat	353	311	13	0
Nusa Tenggara Timur	420	310	9	827
Kalimantan Barat	132	263	22	0
Kalimantan Tengah	68	160	34	0
Kalimantan Selatan	131	251	21	0
Kalimantan Timur	135	224	12	62
Kalimantan Utara	19	42	0	0
Sulawesi Utara	672	400	3	12
Sulawesi Tengah	497	394	10	1
Sulawesi Selatan	1 658	781	20	1
Sulawesi Tenggara	110	28	9	2
Gorontalo	192	187	7	3
Sulawesi Barat	158	123	1	0
Maluku	254	66	7	322
Maluku Utara	27	22	0	0
Papua Barat	273	113	7	305
Papua	405	211	28	429
INDONESIA	22 220	16 612	488	2 964

Sumber/Source : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri/ Operations Control Bureau, National Police



https://www.bps.go.id

DATA POTENSI DESA KEJADIAN KEJAHATAN

POTENTIAL VILLAGES DATA CRIME INCIDENTS



<https://www.bps.go.id>



Tabel 2.2.1 Jumlah Desa/Kelurahan, 2011, 2014, dan 2018
Table 2.2.1 Number Of Villages/Kelurahan, 2011, 2014, and 2018

Provinsi/ Province	Tahun Year		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	6 483	6 512	6 508
Sumatera Utara	5 797	6 104	6 132
Sumatera Barat	1 033	1 145	1 275
Riau	1 655	1 835	1 875
Jambi	1 372	1 551	1 562
Sumatera Selatan	3 186	3 237	3 262
Bengkulu	1 509	1 532	1 514
Lampung	2 464	2 632	2 654
Kep. Bangka Belitung	361	381	391
Kepulauan Riau	353	415	416
DKI Jakarta	267	267	267
Jawa Barat	5 905	5 962	5 957
Jawa Tengah	8 577	8 578	8 559
DI Yogyakarta	438	438	438
Jawa Timur	8 502	8 502	8 496
Banten	1 535	1 551	1 552
Bali	716	716	716
Nusa Tenggara Barat	1 084	1 141	1 143
Nusa Tenggara Timur	2 966	327	3 353
Kalimantan Barat	1 967	2 109	2 137
Kalimantan Tengah	1 528	1 569	1 576
Kalimantan Selatan	2	2 008	2 008
Kalimantan Timur	1 465	1 026	1 038
Kalimantan Utara*	-	479	482
Sulawesi Utara	1 693	1 836	1 838
Sulawesi Tengah	1 815	1 986	2 020
Sulawesi Selatan	2 982	303	3 049
Sulawesi Tenggara	2 121	2 272	2 354
Gorontalo	731	736	734
Sulawesi Barat	638	648	650
Maluku	1 024	1 088	1 240
Maluku Utara	1 079	1 196	1 196
Papua Barat	1 439	1 567	1 987
Papua	3 924	4 871	5 552
INDONESIA	78 609	82 190	83 931

Catatan>Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014,
and 2018

Tabel

Table

Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, Tahun 2011, 2014, dan 2018
The Number of Villages/Kelurahan that have Experienced Incidents of Crime During the Last Year by Type of Crime, 2011, 2014, and 2018

Jenis Kejahatan Kind of Crime	Jumlah Number			Percentase Percentage		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (3)	2011 (4)	2014 (5)	2018 (6)
Pembunuhan/ <i>Homicide</i>	1 585	1 739	1 799	2,02	2,12	2,14
Penganiayaan/ <i>Assault</i>	4 171	4 047	5 092	5,31	4,92	6,07
Perkosaan/ <i>Rape</i>	2 122	2 050	2 851	2,70	2,49	3,40
Pencurian dengan Kekerasan/ <i>Robbery</i>	233	2 963	2 821	2,96	3,61	3,36
Pencurian/ <i>Theft</i>	28 912	33 739	37 778	36,78	41,05	45,01
Penipuan/Penggelapan/ <i>Fraud/Embezzlement</i>	5 603	7 244	8 620	7,13	8,81	10,27
Pembakaran/ <i>Arson</i>	518	874	1 050	0,66	1,06	1,25
Perdagangan Orang/ <i>Trafficking</i>	119	22	124	0,15	0,15	0,15
Penyalahgunaan/ Pengedaran Narkoba/ <i>drug abuse/trafficking</i>	4 103	5 931	12 579	5,22	7,22	14,99
Perjudian/ <i>Gambling</i>	7 984	1 079	12 842	10,16	13,48	15,30

Sumber/Souce : Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/*Potential Village Statistics 2011, 2014, and 2018*



Tabel

2.2.3

Table

Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018
The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Homicide During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018

Provinsi/ Province	Tahun Year		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (3)
A c e h	30	26	33
Sumatera Utara	118	130	122
Sumatera Barat	29	39	43
Riau	57	56	72
Jambi	26	30	33
Sumatera Selatan	98	140	114
Bengkulu	24	27	21
Lampung	59	50	66
Kep. Bangka Belitung	19	14	8
Kepulauan Riau	14	14	5
DKI Jakarta	17	29	14
Jawa Barat	124	142	130
Jawa Tengah	103	86	93
DI Yogyakarta	7	16	13
Jawa Timur	138	163	150
Banten	31	32	38
Bali	11	17	9
Nusa Tenggara Barat	32	37	37
Nusa Tenggara Timur	93	80	82
Kalimantan Barat	39	41	29
Kalimantan Tengah	27	51	41
Kalimantan Selatan	57	64	58
Kalimantan Timur	32	31	32
Kalimantan Utara*	-	8	4
Sulawesi Utara	47	61	57
Sulawesi Tengah	34	41	41
Sulawesi Selatan	87	99	95
Sulawesi Tenggara	31	26	39
Gorontalo	16	17	25
Sulawesi Barat	13	8	8
Maluku	25	17	15
Maluku Utara	11	13	21
Papua Barat	18	22	27
Papua	118	112	224
INDONESIA	1 585	1 739	1 799

Catatan/Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014, and 2018

Tabel

2.2.4

Table

Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Assault During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018

Provinsi/ Province	Tahun Year		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (3)
Aceh	97	99	141
Sumatera Utara	267	264	295
Sumatera Barat	79	107	112
Riau	58	74	139
Jambi	49	50	81
Sumatera Selatan	169	168	173
Bengkulu	59	46	57
Lampung	116	110	157
Kep. Bangka Belitung	54	50	47
Kepulauan Riau	16	20	30
DKI Jakarta	22	66	30
Jawa Barat	452	425	598
Jawa Tengah	321	274	328
DI Yogyakarta	57	54	61
Jawa Timur	439	429	519
Banten	100	84	123
Bali	47	54	64
Nusa Tenggara Barat	131	107	134
Nusa Tenggara Timur	239	166	209
Kalimantan Barat	56	85	78
Kalimantan Tengah	59	68	66
Kalimantan Selatan	95	110	105
Kalimantan Timur	52	52	71
Kalimantan Utara*	-	11	18
Sulawesi Utara	201	161	181
Sulawesi Tengah	100	102	138
Sulawesi Selatan	261	261	263
Sulawesi Tenggara	118	158	140
Gorontalo	73	64	105
Sulawesi Barat	22	17	22
Maluku	64	50	60
Maluku Utara	26	48	46
Papua Barat	41	21	62
Papua	231	192	439
INDONESIA	4 171	4 047	5 092

Catatan>Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014, and 2018



Tabel

2.2.5

Table

Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Rape During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018

Provinsi/ Province	Tahun Year		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (3)
A c e h	57	91	93
Sumatera Utara	131	115	178
Sumatera Barat	60	66	106
Riau	44	59	95
Jambi	27	35	54
Sumatera Selatan	66	78	72
Bengkulu	47	57	39
Lampung	63	57	96
Kep. Bangka Belitung	25	16	19
Kepulauan Riau	15	19	13
DKI Jakarta	4	25	9
Jawa Barat	208	175	206
Jawa Tengah	187	148	159
DI Yogyakarta	22	11	15
Jawa Timur	257	215	210
Banten	30	39	52
Bali	12	9	9
Nusa Tenggara Barat	39	39	54
Nusa Tenggara Timur	113	104	111
Kalimantan Barat	48	63	65
Kalimantan Tengah	29	32	30
Kalimantan Selatan	25	25	44
Kalimantan Timur	40	23	45
Kalimantan Utara*	-	9	14
Sulawesi Utara	73	54	95
Sulawesi Tengah	47	56	67
Sulawesi Selatan	42	47	90
Sulawesi Tenggara	26	40	51
Gorontalo	29	36	58
Sulawesi Barat	9	5	15
Maluku	37	27	40
Maluku Utara	38	26	35
Papua Barat	19	23	41
Papua	253	226	571
INDONESIA	2 122	2 050	2 851

Catatan/Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014,
and 2018

Tabel 2.2.6 **Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014 , dan 2018**
Table 2.2.6 **The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Violent Theft During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018**

Provinsi/ Province	Tahun Year		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	63	47	59
Sumatera Utara	93	141	182
Sumatera Barat	55	71	53
Riau	79	101	103
Jambi	57	76	85
Sumatera Selatan	221	430	323
Bengkulu	33	40	52
Lampung	186	255	233
Kep. Bangka Belitung	16	15	8
Kepulauan Riau	13	17	20
DKI Jakarta	35	73	38
Jawa Barat	287	344	342
Jawa Tengah	146	176	155
DI Yogyakarta	28	20	17
Jawa Timur	290	419	295
Banten	54	49	76
Bali	13	23	22
Nusa Tenggara Barat	107	146	76
Nusa Tenggara Timur	54	67	68
Kalimantan Barat	33	37	34
Kalimantan Tengah	41	27	20
Kalimantan Selatan	85	73	48
Kalimantan Timur	25	37	32
Kalimantan Utara*	-	9	8
Sulawesi Utara	27	21	30
Sulawesi Tengah	24	23	24
Sulawesi Selatan	54	47	73
Sulawesi Tenggara	23	16	18
Gorontalo	4	3	9
Sulawesi Barat	7	7	4
Maluku	9	20	12
Maluku Utara	2	7	9
Papua Barat	13	13	34
Papua	153	113	259
INDONESIA	233	2 963	2 821

Catatan>Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014, and 2018



Tabel

2.2.7

Table

Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Theft During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018

Provinsi/ Province	Tahun Year		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (3)
A c e h	1 101	1 744	2 225
Sumatera Utara	1 713	2 116	2 776
Sumatera Barat	420	574	779
Riau	726	942	1 169
Jambi	534	661	915
Sumatera Selatan	1 473	1 939	2 016
Bengkulu	599	635	743
Lampung	1 402	1 621	1 875
Kep. Bangka Belitung	174	203	206
Kepulauan Riau	115	133	159
DKI Jakarta	199	229	184
Jawa Barat	4 157	439	4 394
Jawa Tengah	3 628	4 064	4 068
DI Yogyakarta	275	283	294
Jawa Timur	3 767	4 122	3 919
Banten	978	1 079	1 104
Bali	200	202	254
Nusa Tenggara Barat	641	782	730
Nusa Tenggara Timur	612	724	863
Kalimantan Barat	517	648	808
Kalimantan Tengah	374	409	562
Kalimantan Selatan	820	889	926
Kalimantan Timur	348	354	456
Kalimantan Utara*	-	62	134
Sulawesi Utara	554	676	705
Sulawesi Tengah	407	578	777
Sulawesi Selatan	111	1 206	1 309
Sulawesi Tenggara	361	489	733
Gorontalo	114	179	253
Sulawesi Barat	150	171	195
Maluku	148	225	266
Maluku Utara	176	297	352
Papua Barat	113	149	227
Papua	1 006	964	1 402
INDONESIA	28 912	33 739	37 778

Catatan/Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014,
and 2018

Tabel 2.2.8 *Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018*
Table 2.2.8 *The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Fraud/Embezzlement During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018*

Provinsi/ Province	Tahun Year		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	147	229	356
Sumatera Utara	227	378	512
Sumatera Barat	84	138	204
Riau	123	204	235
Jambi	72	109	180
Sumatera Selatan	150	334	287
Bengkulu	74	77	106
Lampung	216	284	422
Kep. Bangka Belitung	77	62	55
Kepulauan Riau	25	39	45
DKI Jakarta	30	100	62
Jawa Barat	925	1 111	1 187
Jawa Tengah	817	952	986
DI Yogyakarta	112	96	121
Jawa Timur	766	1 001	1 100
Banten	228	227	292
Bali	37	42	54
Nusa Tenggara Barat	134	136	178
Nusa Tenggara Timur	86	163	154
Kalimantan Barat	84	141	153
Kalimantan Tengah	41	95	72
Kalimantan Selatan	126	150	172
Kalimantan Timur	58	84	91
Kalimantan Utara*	-	10	28
Sulawesi Utara	92	89	138
Sulawesi Tengah	95	107	143
Sulawesi Selatan	219	305	458
Sulawesi Tenggara	43	87	157
Gorontalo	31	35	56
Sulawesi Barat	27	27	62
Maluku	41	52	49
Maluku Utara	22	49	52
Papua Barat	26	37	55
Papua	368	294	398
INDONESIA	5 603	7 244	8 620

Catatan/Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014, and 2018



Tabel

2.2.9

Table

Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018
The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Arson During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018

Provinsi/ Province	Tahun Year		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
A c e h	16	48	32
Sumatera Utara	53	53	61
Sumatera Barat	24	18	27
Riau	17	78	60
Jambi	9	26	28
Sumatera Selatan	22	30	54
Bengkulu	12	15	8
Lampung	9	11	20
Kep. Bangka Belitung	8	6	2
Kepulauan Riau	4	10	13
DKI Jakarta	6	10	3
Jawa Barat	26	54	57
Jawa Tengah	20	39	37
DI Yogyakarta	-	5	5
Jawa Timur	27	68	65
Banten	5	13	6
Bali	2	7	9
Nusa Tenggara Barat	12	14	13
Nusa Tenggara Timur	56	98	100
Kalimantan Barat	14	23	38
Kalimantan Tengah	3	34	34
Kalimantan Selatan	13	18	32
Kalimantan Timur	8	11	12
Kalimantan Utara*	-	10	10
Sulawesi Utara	11	17	11
Sulawesi Tengah	15	21	16
Sulawesi Selatan	20	32	28
Sulawesi Tenggara	2	9	15
Gorontalo	3	5	9
Sulawesi Barat	2	6	5
Maluku	7	9	19
Maluku Utara	5	7	22
Papua Barat	5	8	17
Papua	82	61	182
INDONESIA	518	874	1 050

Catatan/Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014, and 2018

Tabel 2.2.10 **Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018**
Table 2.2.10 **The Number of Villages/Sub-Districts where there have been Incidents of Human Trafficking During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018**

Provinsi/ Province	Tahun Year		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	1	2	3
Sumatera Utara	7	11	5
Sumatera Barat	-	-	1
Riau	6	2	6
Jambi	-	-	3
Sumatera Selatan	1	5	6
Bengkulu	1	2	1
Lampung	2	1	6
Kep. Bangka Belitung	2	2	4
Kepulauan Riau	4	2	2
DKI Jakarta	-	2	-
Jawa Barat	33	25	17
Jawa Tengah	12	11	3
DI Yogyakarta	1	-	-
Jawa Timur	16	11	14
Banten	1	2	6
Bali	-	1	-
Nusa Tenggara Barat	2	2	3
Nusa Tenggara Timur	7	14	27
Kalimantan Barat	3	7	-
Kalimantan Tengah	-	3	1
Kalimantan Selatan	1	-	1
Kalimantan Timur	3	-	1
Kalimantan Utara*	-	1	-
Sulawesi Utara	8	6	6
Sulawesi Tengah	-	1	-
Sulawesi Selatan	1	4	2
Sulawesi Tenggara	-	1	-
Gorontalo	-	1	-
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	1	1	1
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	-	-	-
Papua	6	2	5
INDONESIA	119	122	124

Catatan/Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014, and 2018



Tabel

2.2.11

Table

Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Drug Abuse/Trafficking During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018

Provinsi/ Province	Tahun Year		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (3)
A c e h	465	508	1 212
Sumatera Utara	543	1 033	1 795
Sumatera Barat	172	168	481
Riau	170	315	683
Jambi	67	167	387
Sumatera Selatan	220	409	783
Bengkulu	39	74	115
Lampung	124	186	466
Kep. Bangka Belitung	40	58	112
Kepulauan Riau	24	27	63
DKI Jakarta	74	126	92
Jawa Barat	507	558	952
Jawa Tengah	246	263	495
DI Yogyakarta	59	37	73
Jawa Timur	545	639	1 480
Banten	126	155	259
Bali	19	34	65
Nusa Tenggara Barat	50	93	216
Nusa Tenggara Timur	13	18	9
Kalimantan Barat	60	61	241
Kalimantan Tengah	38	81	229
Kalimantan Selatan	191	312	675
Kalimantan Timur	88	148	301
Kalimantan Utara*	-	32	94
Sulawesi Utara	9	25	56
Sulawesi Tengah	54	144	316
Sulawesi Selatan	84	128	506
Sulawesi Tenggara	8	25	84
Gorontalo	11	21	43
Sulawesi Barat	8	20	60
Maluku	16	15	28
Maluku Utara	12	21	28
Papua Barat	2	8	34
Papua	19	22	146
INDONESIA	4 103	5 931	12 579

Catatan/Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014,
and 2018

Tabel

Table

Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

2.2.12 *The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Gambling During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018*

Provinsi/ Province	Tahun Year		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (3)
A c e h	242	401	598
Sumatera Utara	1 423	1 665	1 947
Sumatera Barat	239	267	458
Riau	236	329	510
Jambi	122	157	297
Sumatera Selatan	325	683	662
Bengkulu	52	67	107
Lampung	229	393	546
Kep. Bangka Belitung	57	71	60
Kepulauan Riau	21	31	48
DKI Jakarta	34	83	35
Jawa Barat	498	692	776
Jawa Tengah	644	770	1 153
DI Yogyakarta	70	59	74
Jawa Timur	1 227	1 502	1 295
Banten	169	180	231
Bali	154	81	67
Nusa Tenggara Barat	135	198	205
Nusa Tenggara Timur	176	293	389
Kalimantan Barat	210	303	416
Kalimantan Tengah	114	250	217
Kalimantan Selatan	209	283	230
Kalimantan Timur	112	129	145
Kalimantan Utara*	-	39	44
Sulawesi Utara	171	377	300
Sulawesi Tengah	240	337	297
Sulawesi Selatan	260	377	458
Sulawesi Tenggara	109	126	235
Gorontalo	60	116	115
Sulawesi Barat	36	95	60
Maluku	105	165	125
Maluku Utara	70	147	93
Papua Barat	32	57	61
Papua	203	356	588
INDONESIA	7 984	11 079	12 842

Catatan/Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014, and 2018



Tabel

2.2.13

Table

Percentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Homicide During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018

Provinsi/ Province	Tahun Year		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (3)
A c e h	0,46	0,40	0,51
Sumatera Utara	2,04	2,13	1,99
Sumatera Barat	2,81	3,41	3,37
Riau	3,44	3,05	3,84
Jambi	1,90	1,93	2,11
Sumatera Selatan	3,08	4,32	3,49
Bengkulu	1,59	1,76	1,39
Lampung	2,39	1,90	2,49
Kep. Bangka Belitung	5,26	3,67	2,05
Kepulauan Riau	3,97	3,37	1,20
DKI Jakarta	6,37	10,86	5,24
Jawa Barat	2,10	2,38	2,18
Jawa Tengah	1,20	1,00	1,09
DI Yogyakarta	1,60	3,65	2,97
Jawa Timur	1,62	1,92	1,77
Banten	2,02	2,06	2,45
Bali	1,54	2,37	1,26
Nusa Tenggara Barat	2,95	3,24	3,24
Nusa Tenggara Timur	3,14	2,45	2,45
Kalimantan Barat	1,98	1,94	1,36
Kalimantan Tengah	1,77	3,25	2,60
Kalimantan Selatan	2,85	3,19	2,89
Kalimantan Timur	2,18	3,02	3,08
Kalimantan Utara*	-	1,67	0,83
Sulawesi Utara	2,78	3,32	3,10
Sulawesi Tengah	1,87	2,06	2,03
Sulawesi Selatan	2,92	3,27	3,12
Sulawesi Tenggara	1,46	1,14	1,66
Gorontalo	2,19	2,31	3,41
Sulawesi Barat	2,04	1,23	1,23
Maluku	2,44	1,56	1,21
Maluku Utara	1,02	1,09	1,76
Papua Barat	1,25	1,40	1,36
Papua	3,01	2,30	4,03
INDONESIA	2,02	2,12	2,14

Catatan/Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014, and 2018

Tabel 2.2.14 **Percentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018**
Table 2.2.14 **The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Assault During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018**

Provinsi/ Province	Tahun Year		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	1,50	1,52	2,17
Sumatera Utara	4,61	4,33	4,81
Sumatera Barat	7,65	9,34	8,78
Riau	3,50	4,03	7,41
Jambi	3,57	3,22	5,19
Sumatera Selatan	5,30	5,19	5,30
Bengkulu	3,91	3,00	3,76
Lampung	4,71	4,18	5,92
Kep. Bangka Belitung	14,96	13,12	12,02
Kepulauan Riau	4,53	4,82	7,21
DKI Jakarta	8,24	24,72	11,24
Jawa Barat	7,65	7,13	10,04
Jawa Tengah	3,74	3,19	3,83
DI Yogyakarta	13,01	12,33	13,93
Jawa Timur	5,16	5,05	6,11
Banten	6,51	5,42	7,93
Bali	6,56	7,54	8,94
Nusa Tenggara Barat	12,08	9,38	11,72
Nusa Tenggara Timur	8,06	5,08	6,23
Kalimantan Barat	2,85	4,03	3,65
Kalimantan Tengah	3,86	4,33	4,19
Kalimantan Selatan	4,75	5,48	5,23
Kalimantan Timur	3,55	5,07	6,84
Kalimantan Utara*	-	2,30	3,73
Sulawesi Utara	11,87	8,77	9,85
Sulawesi Tengah	5,51	5,14	6,83
Sulawesi Selatan	8,75	8,61	8,63
Sulawesi Tenggara	5,56	6,95	5,95
Gorontalo	9,99	8,70	14,31
Sulawesi Barat	3,45	2,62	3,38
Maluku	6,25	4,60	4,84
Maluku Utara	2,41	4,01	3,85
Papua Barat	2,85	1,34	3,12
Papua	5,89	3,94	7,91
INDONESIA	5,31	4,92	6,07

Catatan/Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014, and 2018



Tabel

2.2.15

Table

Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Rape During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018

Provinsi/ Province	Tahun Year		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
A c e h	0,88	1,40	1,43
Sumatera Utara	2,26	1,88	2,90
Sumatera Barat	5,81	5,76	8,31
Riau	2,66	3,22	5,07
Jambi	1,97	2,26	3,46
Sumatera Selatan	2,07	2,41	2,21
Bengkulu	3,11	3,72	2,58
Lampung	2,56	2,17	3,62
Kep. Bangka Belitung	6,93	4,20	4,86
Kepulauan Riau	4,25	4,58	3,13
DKI Jakarta	1,50	9,36	3,37
Jawa Barat	3,52	2,94	3,46
Jawa Tengah	2,18	1,73	1,86
DI Yogyakarta	5,02	2,51	3,42
Jawa Timur	3,02	2,53	2,47
Banten	1,95	2,51	3,35
Bali	1,68	1,26	1,26
Nusa Tenggara Barat	3,60	3,42	4,72
Nusa Tenggara Timur	3,81	3,18	3,31
Kalimantan Barat	2,44	2,99	3,04
Kalimantan Tengah	1,90	2,04	1,90
Kalimantan Selatan	1,25	1,25	2,19
Kalimantan Timur	2,73	2,24	4,34
Kalimantan Utara*	-	1,88	2,90
Sulawesi Utara	4,31	2,94	5,17
Sulawesi Tengah	2,59	2,82	3,32
Sulawesi Selatan	1,41	1,55	2,95
Sulawesi Tenggara	1,23	1,76	2,17
Gorontalo	3,97	4,89	7,90
Sulawesi Barat	1,41	0,77	2,31
Maluku	3,61	2,48	3,23
Maluku Utara	3,52	2,17	2,93
Papua Barat	1,32	1,47	2,06
Papua	6,45	4,64	10,28
INDONESIA	2,70	2,49	3,40

Catatan/Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014,
and 2018

Tabel 2.2.16 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018
Table 2.2.16 The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Violent Theft During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018

<i>Provinsi/ Province</i>	<i>Tahun Year</i>		
	<i>2011</i>	<i>2014</i>	<i>2018</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Aceh	0,97	0,72	0,91
Sumatera Utara	1,60	2,31	2,97
Sumatera Barat	5,32	6,20	4,16
Riau	4,77	5,50	5,49
Jambi	4,15	4,90	5,44
Sumatera Selatan	6,94	13,28	9,90
Bengkulu	2,19	2,61	3,43
Lampung	7,55	9,69	8,78
Kep. Bangka Belitung	4,43	3,94	2,05
Kepulauan Riau	3,68	4,10	4,81
DKI Jakarta	13,11	27,34	14,23
Jawa Barat	4,86	5,77	5,74
Jawa Tengah	1,70	2,05	1,81
DI Yogyakarta	6,39	4,57	3,88
Jawa Timur	3,41	4,93	3,47
Banten	3,52	3,16	4,90
Bali	1,82	3,21	3,07
Nusa Tenggara Barat	9,87	12,80	6,65
Nusa Tenggara Timur	1,82	2,05	2,03
Kalimantan Barat	1,68	1,75	1,59
Kalimantan Tengah	2,68	1,72	1,27
Kalimantan Selatan	4,25	3,64	2,39
Kalimantan Timur	1,71	3,61	3,08
Kalimantan Utara*	-	1,88	1,66
Sulawesi Utara	1,59	1,14	1,63
Sulawesi Tengah	1,32	1,16	1,19
Sulawesi Selatan	1,81	1,55	2,39
Sulawesi Tenggara	1,08	0,70	0,76
Gorontalo	0,55	0,41	1,23
Sulawesi Barat	1,10	1,08	0,62
Maluku	0,88	1,84	0,97
Maluku Utara	0,19	0,59	0,75
Papua Barat	0,90	0,83	1,71
Papua	3,90	2,32	4,66
INDONESIA	2,96	3,61	3,36

Catatan/Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014, and 2018



Tabel

2.2.17

Table

Percentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Theft During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018

Provinsi/ Province	Tahun Year		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (3)
A c e h	16,98	26,78	34,19
Sumatera Utara	29,55	34,67	45,27
Sumatera Barat	40,66	50,13	61,10
Riau	43,87	51,34	62,35
Jambi	38,92	42,62	58,58
Sumatera Selatan	46,23	59,90	61,80
Bengkulu	39,70	41,45	49,08
Lampung	56,90	61,59	70,65
Kep. Bangka Belitung	48,20	53,28	52,69
Kepulauan Riau	32,58	32,05	38,22
DKI Jakarta	74,53	85,77	68,91
Jawa Barat	70,40	73,63	73,76
Jawa Tengah	42,30	47,38	47,53
DI Yogyakarta	62,79	64,61	67,12
Jawa Timur	44,31	48,48	46,13
Banten	63,71	69,57	71,13
Bali	27,93	28,21	35,47
Nusa Tenggara Barat	59,13	68,54	63,87
Nusa Tenggara Timur	20,63	22,14	25,74
Kalimantan Barat	26,28	30,73	37,81
Kalimantan Tengah	24,48	26,07	35,66
Kalimantan Selatan	41,00	44,27	46,12
Kalimantan Timur	23,75	34,50	43,93
Kalimantan Utara*	-	12,94	27,80
Sulawesi Utara	32,72	36,82	38,36
Sulawesi Tengah	22,42	29,10	38,47
Sulawesi Selatan	37,22	39,80	42,93
Sulawesi Tenggara	17,02	21,52	31,14
Gorontalo	15,60	24,32	34,47
Sulawesi Barat	23,51	26,39	30,00
Maluku	14,45	20,68	21,45
Maluku Utara	16,31	24,83	29,43
Papua Barat	7,85	9,51	11,42
Papua	25,64	19,79	25,25
INDONESIA	36,78	41,05	45,01

Catatan/Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014, and 2018

Tabel

2.2.18

Table

Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/ Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Fraud/Embezzlement During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018

Provinsi/ Province	Tahun Year		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	2,27	3,52	5,47
Sumatera Utara	3,92	6,19	8,35
Sumatera Barat	8,13	12,05	16,00
Riau	7,43	11,12	12,53
Jambi	5,25	7,03	11,52
Sumatera Selatan	4,71	10,32	8,80
Bengkulu	4,90	5,03	7,00
Lampung	8,77	10,79	15,90
Kep. Bangka Belitung	21,33	16,27	14,07
Kepulauan Riau	7,08	9,40	10,82
DKI Jakarta	11,24	37,45	23,22
Jawa Barat	15,66	18,63	19,93
Jawa Tengah	9,53	11,10	11,52
DI Yogyakarta	25,57	21,92	27,63
Jawa Timur	9,01	11,77	12,95
Banten	14,85	14,64	18,81
Bali	5,17	5,87	7,54
Nusa Tenggara Barat	12,36	11,92	15,57
Nusa Tenggara Timur	2,90	4,98	4,59
Kalimantan Barat	4,27	6,69	7,16
Kalimantan Tengah	2,68	6,05	4,57
Kalimantan Selatan	6,30	7,47	8,57
Kalimantan Timur	3,96	8,19	8,77
Kalimantan Utara*	-	2,09	5,81
Sulawesi Utara	5,43	4,85	7,51
Sulawesi Tengah	5,23	5,39	7,08
Sulawesi Selatan	7,34	10,07	15,02
Sulawesi Tenggara	2,03	3,83	6,67
Gorontalo	4,24	4,76	7,63
Sulawesi Barat	4,23	4,17	9,54
Maluku	4,00	4,78	3,95
Maluku Utara	2,04	4,10	4,35
Papua Barat	1,81	2,36	2,77
Papua	9,38	6,04	7,17
INDONESIA	7,13	8,81	10,27

Catatan>Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014, and 2018



Tabel

2.2.19

Table

Percentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Arson During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018

Provinsi/ Province	Tahun Year		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
A c e h	0,25	0,74	0,49
Sumatera Utara	0,91	0,87	0,99
Sumatera Barat	2,32	1,57	2,12
Riau	1,03	4,25	3,20
Jambi	0,66	1,68	1,79
Sumatera Selatan	0,69	0,93	1,66
Bengkulu	0,80	0,98	0,53
Lampung	0,37	0,42	0,75
Kep. Bangka Belitung	2,22	1,57	0,51
Kepulauan Riau	1,13	2,41	3,13
DKI Jakarta	2,25	3,75	1,12
Jawa Barat	0,44	0,91	0,96
Jawa Tengah	0,23	0,45	0,43
DI Yogyakarta	-	1,14	1,14
Jawa Timur	0,32	0,80	0,77
Banten	0,33	0,84	0,39
Bali	0,28	0,98	1,26
Nusa Tenggara Barat	1,11	1,23	1,14
Nusa Tenggara Timur	1,89	3,00	2,98
Kalimantan Barat	0,71	1,09	1,78
Kalimantan Tengah	0,20	2,17	2,16
Kalimantan Selatan	0,65	0,90	1,59
Kalimantan Timur	0,55	1,07	1,16
Kalimantan Utara*	-	2,09	2,07
Sulawesi Utara	0,65	0,93	0,60
Sulawesi Tengah	0,83	1,06	0,79
Sulawesi Selatan	0,67	1,06	0,92
Sulawesi Tenggara	0,09	0,40	0,64
Gorontalo	0,41	0,68	1,23
Sulawesi Barat	0,31	0,93	0,77
Maluku	0,68	0,83	1,53
Maluku Utara	0,46	0,59	1,84
Papua Barat	0,35	0,51	0,86
Papua	2,09	1,25	3,28
INDONESIA	0,66	1,06	1,25

Catatan/Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014, and 2018

Tabel 2.2.20 **Percentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018**
Table 2.2.20 **The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Human Trafficking During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018**

Provinsi/ Province	Tahun Year		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	0,02	0,03	0,05
Sumatera Utara	0,12	0,18	0,08
Sumatera Barat	-	-	0,08
Riau	0,36	0,11	0,32
Jambi	-	-	0,19
Sumatera Selatan	0,03	0,15	0,18
Bengkulu	0,07	0,13	0,07
Lampung	0,08	0,04	0,23
Kep. Bangka Belitung	0,55	0,52	1,02
Kepulauan Riau	1,13	0,48	0,48
DKI Jakarta	-	0,75	0,00
Jawa Barat	0,56	0,42	0,29
Jawa Tengah	0,14	0,13	0,04
DI Yogyakarta	0,23	-	0,00
Jawa Timur	0,19	0,13	0,16
Banten	0,07	0,13	0,39
Bali	-	0,14	0,00
Nusa Tenggara Barat	0,18	0,18	0,26
Nusa Tenggara Timur	0,24	0,43	0,81
Kalimantan Barat	0,15	0,33	0,00
Kalimantan Tengah	-	0,19	0,06
Kalimantan Selatan	0,05	-	0,05
Kalimantan Timur	0,20	-	0,10
Kalimantan Utara*	-	0,21	0,00
Sulawesi Utara	0,47	0,33	0,33
Sulawesi Tengah	-	0,05	0,00
Sulawesi Selatan	0,03	0,13	0,07
Sulawesi Tenggara	-	0,04	0,00
Gorontalo	-	0,14	0,00
Sulawesi Barat	-	-	0,00
Maluku	0,10	0,09	0,08
Maluku Utara	-	-	0,00
Papua Barat	-	-	0,00
Papua	0,15	0,04	0,09
INDONESIA	0,15	0,15	0,15

Catatan/Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014, and 2018



Tabel

2.2.21

Table

Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018
The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Drug Abuse/Trafficking During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018

Provinsi/ Province	Tahun Year		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
A c e h	7,17	7,80	18,62
Sumatera Utara	9,37	16,92	29,27
Sumatera Barat	16,65	14,67	37,73
Riau	10,27	17,17	36,43
Jambi	4,88	10,77	24,78
Sumatera Selatan	6,91	12,64	24,00
Bengkulu	2,58	4,83	7,60
Lampung	5,03	7,07	17,56
Kep. Bangka Belitung	11,08	15,22	28,64
Kepulauan Riau	6,80	6,51	15,14
DKI Jakarta	27,72	47,19	34,46
Jawa Barat	8,59	9,36	15,98
Jawa Tengah	2,87	3,07	5,78
DI Yogyakarta	13,47	8,45	16,67
Jawa Timur	6,41	7,52	17,42
Banten	8,21	9,99	16,69
Bali	2,65	4,75	9,08
Nusa Tenggara Barat	4,61	8,15	18,90
Nusa Tenggara Timur	0,44	0,55	0,27
Kalimantan Barat	3,05	2,89	11,28
Kalimantan Tengah	2,49	5,16	14,53
Kalimantan Selatan	9,55	15,54	33,62
Kalimantan Timur	6,01	14,42	29,00
Kalimantan Utara*	-	6,68	19,50
Sulawesi Utara	0,53	1,36	3,05
Sulawesi Tengah	2,98	7,25	15,64
Sulawesi Selatan	2,82	4,22	16,60
Sulawesi Tenggara	0,38	1,10	3,57
Gorontalo	1,50	2,85	5,86
Sulawesi Barat	1,25	3,09	9,23
Maluku	1,56	1,38	2,26
Maluku Utara	1,11	1,76	2,34
Papua Barat	0,14	0,51	1,71
Papua	0,48	0,45	2,63
INDONESIA	5,22	7,22	14,99

Catatan/Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014,
and 2018

Tabel

Table

Percentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

2.2.22 The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Gambling During the Last Year by Province, 2011, 2014 and 2018

Provinsi/ Province	Tahun Year		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (3)
A c e h	3,73	6,16	9,19
Sumatera Utara	24,55	27,28	31,75
Sumatera Barat	23,14	23,32	35,92
Riau	14,26	17,93	27,20
Jambi	8,89	10,12	19,01
Sumatera Selatan	10,20	21,10	20,29
Bengkulu	3,45	4,37	7,07
Lampung	9,29	14,93	20,57
Kep. Bangka Belitung	15,79	18,64	15,35
Kepulauan Riau	5,95	7,47	11,54
DKI Jakarta	12,73	31,09	13,11
Jawa Barat	8,43	11,61	13,03
Jawa Tengah	7,51	8,98	13,47
DI Yogyakarta	15,98	13,47	16,89
Jawa Timur	14,43	17,67	15,24
Banten	11,01	11,61	14,88
Bali	21,51	11,31	9,36
Nusa Tenggara Barat	12,45	17,35	17,94
Nusa Tenggara Timur	5,93	8,96	11,60
Kalimantan Barat	10,68	14,37	19,47
Kalimantan Tengah	7,46	15,93	13,77
Kalimantan Selatan	10,45	14,09	11,45
Kalimantan Timur	7,65	12,57	13,97
Kalimantan Utara*	-	8,14	9,13
Sulawesi Utara	10,10	20,53	16,32
Sulawesi Tengah	13,22	16,97	14,70
Sulawesi Selatan	8,72	12,44	15,02
Sulawesi Tenggara	5,14	5,55	9,98
Gorontalo	8,21	15,76	15,67
Sulawesi Barat	5,64	14,66	9,23
Maluku	10,25	15,17	10,08
Maluku Utara	6,49	12,29	7,78
Papua Barat	2,22	3,64	3,07
Papua	5,17	7,31	10,59
INDONESIA	10,16	13,48	15,30

Catatan/Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014, and 2018



https://www.bps.go.id

DATA POTENSI DESA KONFLIK MASSAL

POTENTIAL VILLAGES DATA MASS CONFLICTS





Tabel 2.3.1 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia Menurut Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal yang Terjadi, 2011, 2014, dan 2018
Table 2.3.1 The Number and Percentage of Villages/Kelurahan by Some Characteristics of Massive Fighting Incident Within Last Year, 2011, 2014, and 2018

Beberapa Karakteristik Perkelahian Massa/ Some Characteristics of Mass Fighting	2011		2014		2018	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Keberadaan Kejadian Perkelahian Massal/Incident of the Massive Fighting						
1. Ada kejadian/Yes	2 562	3,26	2 779	3,38	3 147	3,75
2. Tidak ada kejadian/No Incident	76 047	96,74	79 411	96,47	80 784	96,25
Total desa/kelurahan/ Total village/kelurahan	78 609	100,00	82 190	100,00	83 931	100,00
B. Jenis Perkelahian Massal/Types of Massive Fighting						
1. Antar Kelompok Warga/ Among Community Group	1 348	1,71	1 404	1,71	1 674	1,99
2. Warga Antar Desa/ Kelurahan/Between Community	1 054	1,34	1 128	1,37	1 078	1,28
3. Warga dengan Aparat Keamanan/Community vs Security Forces	120	0,15	108	0,13	91	0,11
4. Warga dengan Aparat Pemerintah/Community vs Government Officials	102	0,13	99	0,12	132	0,16
5. Antar Pelajar/ Mahasiswa/Among Students	210	0,27	327	0,40	548	0,65
6. Antar Suku/Among Ethnic Group	102	0,13	70	0,09	112	0,13
7. Lainnya/Others	149	0,19	160	0,19	171	0,20
C. Penyelesaian Perkelahian Massal/Settlement of Massive Fighting						
1. Diselesaikan secara damai/Settle with Peace	2 314	90,32	2 564	92,26	2 961	94,09
2. Tidak dapat diselesaikan/ Could not be Settled	248	9,68	215	7,74	186	5,91
Total desa/kelurahan yang ada kejadian perkelahian massal /Total villages/ kelurahan with massive fighting incident	2 562	100,00	2 779	100,00	3 147	100,00

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014, and 2018

Tabel

2.3.2

Table

Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

The Number and Percentage of Villages/Kelurahan with Massive Fighting Incident Within Last Year by province, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi/ Province	Tahun Year					
	2011		2014		2018	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	69	1,06	61	0,94	90	1,38
Sumatera Utara	119	2,05	118	1,93	176	2,87
Sumatera Barat	50	4,84	45	3,93	80	6,27
Riau	47	2,84	38	2,07	51	2,72
Jambi	47	3,43	40	2,58	41	2,62
Sumatera Selatan	51	1,60	67	2,07	37	1,13
Bengkulu	24	1,59	27	1,76	28	1,85
Lampung	40	1,62	34	1,29	44	1,66
Kep. Bangka Belitung	28	7,76	24	6,30	3	0,77
Kepulauan Riau	7	1,98	3	0,72	4	0,96
DKI Jakarta	61	22,85	72	26,97	55	20,60
Jawa Barat	195	3,30	259	4,34	291	4,89
Jawa Tengah	194	2,26	252	2,94	233	2,72
DI Yogyakarta	13	2,97	12	2,74	14	3,20
Jawa Timur	162	1,91	132	1,55	185	2,18
Banten	80	5,21	40	2,58	58	3,74
Bali	12	1,68	6	0,84	5	0,70
Nusa Tenggara Barat	68	6,27	76	6,66	81	7,09
Nusa Tenggara Timur	183	6,17	174	5,32	205	6,11
Kalimantan Barat	27	1,37	39	1,85	30	1,40
Kalimantan Tengah	25	1,64	36	2,29	13	0,83
Kalimantan Selatan	13	0,65	26	1,29	21	1,05
Kalimantan Timur	43	2,94	20	1,95	17	1,64
Kalimantan Utara*	-	-	6	1,25	5	1,04
Sulawesi Utara	101	5,97	165	8,99	111	6,04
Sulawesi Tengah	65	3,58	149	7,50	98	4,85
Sulawesi Selatan	113	3,79	145	4,79	130	4,26
Sulawesi Tenggara	54	2,55	73	3,21	84	3,57
Gorontalo	21	2,87	24	3,26	18	2,45
Sulawesi Barat	9	1,41	14	2,16	15	2,31
Maluku	146	14,26	160	14,71	199	16,05
Maluku Utara	110	10,19	186	15,55	164	13,71
Papua Barat	79	5,49	59	3,77	114	5,74
Papua	306	7,80	197	4,04	447	8,05
INDONESIA	2 562	3,26	2 779	3,38	3 147	3,75

Catatan/*Note*: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/*Source*: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014,
and 2018



Tabel

2.3.3

Table

Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2011

The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Mass Fights During the Last Year by Province and Type of Mass Fights, 2011

Provinsi/ Province	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi/ Type of the Massive Fighting			
	Antar Kelompok Warga/ Among Community Group	Warga Antar Desa/ Between Community	Warga dengan Aparat Keamanan/ Community vs Security Forces	Warga dengan Aparat Pemerintah/ Community vs Government Officials
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	34	29	4	2
Sumatera Utara	69	39	10	3
Sumatera Barat	21	24	-	1
Riau	23	15	5	4
Jambi	14	29	3	1
Sumatera Selatan	25	25	5	7
Bengkulu	9	11	4	1
Lampung	12	19	5	1
Kep. Bangka Belitung	11	14	2	-
Kepulauan Riau	2	3	1	2
DKI Jakarta	27	16	2	1
Jawa Barat	102	56	5	6
Jawa Tengah	97	99	2	3
DI Yogyakarta	4	-	-	-
Jawa Timur	88	66	4	4
Banten	42	21	2	-
Bali	9	3	-	-
Nusa Tenggara Barat	40	31	2	4
Nusa Tenggara Timur	79	93	7	3
Kalimantan Barat	13	6	3	1
Kalimantan Tengah	18	4	-	-
Kalimantan Selatan	1	8	-	1
Kalimantan Timur	22	11	1	4
Sulawesi Utara	47	65	3	2
Sulawesi Tengah	22	40	6	1
Sulawesi Selatan	53	58	4	3
Sulawesi Tenggara	25	25	1	2
Gorontalo	7	5	4	3
Sulawesi Barat	6	-	1	1
Maluku	94	55	5	10
Maluku Utara	52	64	5	7
Papua Barat	56	27	3	5
Papua	224	93	21	19
INDONESIA	1 348	1 054	120	102

Sumber/Source: Statistik Podes 2011/Potential Village Statistics 2011

Tabel 2.3.3 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2011 (lanjutan)

Table 2.3.3 The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Mass Fights During the Last Year by Province and Type of Mass Fights, 2011 (continuation)

Provinsi/ Province	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi/ Type of the Massive Fighting		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa/ Among Students	Antar Suku/ Among Ethnic Group	Lainnya/Others
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	4	1	3
Sumatera Utara	4	2	13
Sumatera Barat	9	-	2
Riau	1	3	3
Jambi	6	2	2
Sumatera Selatan	5	2	3
Bengkulu	4	1	1
Lampung	2	1	1
Kep. Bangka Belitung	1	-	1
Kepulauan Riau	-	-	1
DKI Jakarta	23	-	5
Jawa Barat	44	3	22
Jawa Tengah	4	1	8
DI Yogyakarta	8	1	-
Jawa Timur	8	-	10
Banten	12	1	13
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	2	3	4
Nusa Tenggara Timur	10	6	11
Kalimantan Barat	1	3	6
Kalimantan Tengah	-	-	3
Kalimantan Selatan	-	1	2
Kalimantan Timur	2	3	4
Sulawesi Utara	2	-	-
Sulawesi Tengah	3	2	2
Sulawesi Selatan	16	3	3
Sulawesi Tenggara	1	1	2
Gorontalo	2	1	6
Sulawesi Barat	1	-	3
Maluku	11	2	-
Maluku Utara	4	1	4
Papua Barat	2	1	2
Papua	18	57	9
INDONESIA	210	102	149

Sumber/Souce: Statistik Podes 2011/Potential Village Statistics 2011



Tabel

Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014

Table

2.3.4 *The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Mass Fights During the Last Year by Province and Type of Mass Fights, 2014*

Provinsi/ Province	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi/ Type of the Massive Fighting			
	Antar Kelompok Warga/ Among Community Group	Warga Antar Desa/ Between Community	Warga dengan Aparat Keamanan/ Community vs Security Forces	Warga dengan Aparat Pemerintah/ Community vs Government Officials
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	26	24	1	2
Sumatera Utara	58	43	10	7
Sumatera Barat	29	10	5	-
Riau	14	13	3	1
Jambi	8	22	-	1
Sumatera Selatan	34	23	9	4
Bengkulu	7	8	-	-
Lampung	11	20	1	1
Kep. Bangka Belitung	12	11	-	1
Kepulauan Riau	2	-	-	-
DKI Jakarta	34	7	-	-
Jawa Barat	103	91	4	4
Jawa Tengah	120	120	4	5
DI Yogyakarta	5	4	-	-
Jawa Timur	62	51	3	2
Banten	14	12	1	-
Bali	3	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	33	42	4	2
Nusa Tenggara Timur	90	64	1	12
Kalimantan Barat	29	8	3	-
Kalimantan Tengah	27	1	1	-
Kalimantan Selatan	9	11	-	1
Kalimantan Timur	12	1	1	2
Kalimantan Utara	3	3	-	-
Sulawesi Utara	83	99	8	4
Sulawesi Tengah	54	102	2	1
Sulawesi Selatan	71	68	5	-
Sulawesi Tenggara	34	44	5	3
Gorontalo	14	7	2	4
Sulawesi Barat	6	8	-	-
Maluku	99	68	5	7
Maluku Utara	125	76	5	5
Papua Barat	36	23	6	2
Papua	137	44	19	28
INDONESIA	1 404	1 128	108	99

Sumber/Souce: Statistik Podes 2014/Potential Village Statistics 2014

Tabel 2.3.4 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014 (lanjutan)
Table 2.3.4 The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Mass Fights During the Last Year by Province and Type of Mass Fights, 2014 (continuation)

Provinsi/ Province	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi/ Type of the Massive Fighting		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa/ Among Students	Antar Suku/ Among Ethnic Group	Lainnya/Others
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	7	2	4
Sumatera Utara	8	2	11
Sumatera Barat	7	1	2
Riau	1	2	8
Jambi	10	1	2
Sumatera Selatan	7	-	4
Bengkulu	11	1	2
Lampung	1	2	3
Kep. Bangka Belitung	2	1	1
Kepulauan Riau	1	1	-
DKI Jakarta	47	-	2
Jawa Barat	89	3	19
Jawa Tengah	11	-	10
DI Yogyakarta	2	1	5
Jawa Timur	12	-	9
Banten	12	-	2
Bali	-	-	3
Nusa Tenggara Barat	9	3	3
Nusa Tenggara Timur	10	6	8
Kalimantan Barat	4	-	2
Kalimantan Tengah	6	-	4
Kalimantan Selatan	2	-	4
Kalimantan Timur	6	-	2
Kalimantan Utara	-	-	1
Sulawesi Utara	10	1	4
Sulawesi Tengah	3	2	8
Sulawesi Selatan	18	1	5
Sulawesi Tenggara	3	-	1
Gorontalo	3	-	1
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	8	2	1
Maluku Utara	7	2	13
Papua Barat	1	4	3
Papua	9	32	13
INDONESIA	327	70	160

Sumber/Source: Statistik Podes 2014/Potential Village Statistics 2014



Tabel

Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018

Table

2.3.5 *The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Mass Fights During the Last Year by Province and Type of Mass Fights, 2018*

Provinsi/ Province	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi/ Type of the Massive Fighting			
	Antar Kelompok Warga/ Among Community Group	Warga Antar Desa/ Between Community	Warga dengan Aparat Keamanan/ Community vs Security Forces	Warga dengan Aparat Pemerintah/ Community vs Government Officials
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	43	39	4	8
Sumatera Utara	95	64	3	9
Sumatera Barat	27	14	1	-
Riau	17	18	3	3
Jambi	7	22	-	2
Sumatera Selatan	16	11	2	-
Bengkulu	8	8	-	1
Lampung	21	16	1	1
Kep. Bangka Belitung	1	-	-	-
Kepulauan Riau	1	1	1	-
DKI Jakarta	32	18	-	-
Jawa Barat	122	60	4	8
Jawa Tengah	107	99	1	2
DI Yogyakarta	5	1	-	-
Jawa Timur	82	58	7	3
Banten	25	20	1	2
Bali	5	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	36	48	3	2
Nusa Tenggara Timur	123	78	3	4
Kalimantan Barat	16	9	-	1
Kalimantan Tengah	8	4	-	-
Kalimantan Selatan	9	12	3	2
Kalimantan Timur	7	3	-	-
Kalimantan Utara	2	1	-	-
Sulawesi Utara	65	50	4	6
Sulawesi Tengah	46	50	-	-
Sulawesi Selatan	71	39	2	1
Sulawesi Tenggara	34	46	1	-
Gorontalo	4	11	1	1
Sulawesi Barat	13	2	1	-
Maluku	117	80	10	13
Maluku Utara	71	85	6	11
Papua Barat	85	28	8	8
Papua	353	83	21	44
INDONESIA	1 674	1 078	91	132

Sumber/Source : Statistik Podes 2018/Potential Village Statistics 2018

Tabel 2.3.5 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018 (lanjutan)
Table 2.3.5 *The Number of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Mass Fights During the Last Year by Province and Type of Mass Fights, 2018 (continuation)*

Provinsi/ Province	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi/ Type of the Massive Fighting		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa/ Among Students	Antar Suku/ Among Ethnic Group	Lainnya/Others
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	10	2	6
Sumatera Utara	25	-	12
Sumatera Barat	41	1	5
Riau	18	-	2
Jambi	11	1	4
Sumatera Selatan	9	-	4
Bengkulu	10	-	2
Lampung	6	-	4
Kep. Bangka Belitung	1	1	-
Kepulauan Riau	1	-	-
DKI Jakarta	18	-	-
Jawa Barat	118	5	21
Jawa Tengah	36	-	15
DI Yogyakarta	5	1	2
Jawa Timur	18	3	28
Banten	14	1	4
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	12	-	-
Nusa Tenggara Timur	37	5	10
Kalimantan Barat	3	-	3
Kalimantan Tengah	1	-	-
Kalimantan Selatan	1	-	1
Kalimantan Timur	6	-	2
Kalimantan Utara	-	-	2
Sulawesi Utara	9	-	5
Sulawesi Tengah	13	-	2
Sulawesi Selatan	33	2	4
Sulawesi Tenggara	15	-	4
Gorontalo	3	-	-
Sulawesi Barat	2	-	-
Maluku	29	1	3
Maluku Utara	26	1	2
Papua Barat	8	12	4
Papua	9	76	20
INDONESIA	548	112	171

Sumber/Source: Statistik Podes 2018/Potential Village Statistics 2018

**Tabel**

Percentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2011

Table
2.3.6

The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Mass Fighting During the Last Year by Province and Type of Mass Fighting, 2011

Provinsi/ Province	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi/ Type of the Massive Fighting			
	Antar Kelompok Warga/ Among Community Group	Warga Antar Desa/ Between Community	Warga dengan Aparat Keamanan/ Community vs Security Forces	Warga dengan Aparat Pemerintah/ Community vs Government Officials
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,52	0,45	0,06	0,03
Sumatera Utara	1,19	0,67	0,17	0,05
Sumatera Barat	2,03	2,32	-	0,10
Riau	1,39	0,91	0,30	0,24
Jambi	1,02	2,11	0,22	0,07
Sumatera Selatan	0,78	0,78	0,16	0,22
Bengkulu	0,60	0,73	0,27	0,07
Lampung	0,49	0,77	0,20	0,04
Kep. Bangka Belitung	3,05	3,88	0,55	-
Kepulauan Riau	0,57	0,85	0,28	0,57
DKI Jakarta	10,11	5,99	0,75	0,37
Jawa Barat	1,73	0,95	0,08	0,10
Jawa Tengah	1,13	1,15	0,02	0,03
DI Yogyakarta	0,91	-	-	-
Jawa Timur	1,04	0,78	0,05	0,05
Banten	2,74	1,37	0,13	-
Bali	1,26	0,42	-	-
Nusa Tenggara Barat	3,69	2,86	0,18	0,37
Nusa Tenggara Timur	2,66	3,14	0,24	0,10
Kalimantan Barat	0,66	0,31	0,15	0,05
Kalimantan Tengah	1,18	0,26	-	-
Kalimantan Selatan	0,05	0,40	-	0,05
Kalimantan Timur	1,50	0,75	0,07	0,27
Sulawesi Utara	2,78	3,84	0,18	0,12
Sulawesi Tengah	1,21	2,20	0,33	0,06
Sulawesi Selatan	1,78	1,95	0,13	0,10
Sulawesi Tenggara	1,18	1,18	0,05	0,09
Gorontalo	0,96	0,68	0,55	0,41
Sulawesi Barat	0,94	-	0,16	0,16
Maluku	9,18	5,37	0,49	0,98
Maluku Utara	4,82	5,93	0,46	0,65
Papua Barat	3,89	1,88	0,21	0,35
Papua	5,71	2,37	0,54	0,48
INDONESIA	1,71	1,34	0,15	0,13

Sumber/Source : Statistik Podes 2011/Potential Village Statistics 2011

Tabel 2.3.6 **Percentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2011 (lanjutan)**
Table 2.3.6 **The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Mass Fights During the Last Year by Province and Type of Mass Fights, 2011 (continuation)**

Provinsi/ Province	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi/ Type of the Massive Fighting		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa/ Among Students	Antar Suku/ Among Ethnic Group	Lainnya/Others
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	0,06	0,02	0,05
Sumatera Utara	0,07	0,03	0,22
Sumatera Barat	0,87	-	0,19
Riau	0,06	0,18	0,18
Jambi	0,44	0,15	0,15
Sumatera Selatan	0,16	0,06	0,09
Bengkulu	0,27	0,07	0,07
Lampung	0,08	0,04	0,04
Kep. Bangka Belitung	0,28	-	0,28
Kepulauan Riau	-	-	0,28
DKI Jakarta	8,61	-	1,87
Jawa Barat	0,75	0,05	0,37
Jawa Tengah	0,05	0,01	0,09
DI Yogyakarta	1,83	0,23	-
Jawa Timur	0,09	-	0,12
Banten	0,78	0,07	0,85
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	0,18	0,28	0,37
Nusa Tenggara Timur	0,34	0,20	0,37
Kalimantan Barat	0,05	0,15	0,31
Kalimantan Tengah	-	-	0,20
Kalimantan Selatan	-	0,05	0,10
Kalimantan Timur	0,14	0,20	0,27
Sulawesi Utara	0,12	-	-
Sulawesi Tengah	0,17	0,11	0,11
Sulawesi Selatan	0,54	0,10	0,10
Sulawesi Tenggara	0,05	0,05	0,09
Gorontalo	0,27	0,14	0,82
Sulawesi Barat	0,16	-	0,47
Maluku	1,07	0,20	-
Maluku Utara	0,37	0,09	0,37
Papua Barat	0,14	0,07	0,14
Papua	0,46	1,45	0,23
INDONESIA	0,27	0,13	0,19

Sumber/Souce: Statistik Podes 2011/Potential Village Statistics 2011

**Tabel**

Percentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014

Table
2.3.7

The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Mass Fights During the Last Year by Province and Type of Mass Fights, 2014

Provinsi/ Province	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi/ Type of the Massive Fighting			
	Antar Kelompok Warga/ Among Community Group	Warga Antar Desa/ Between Community	Warga dengan Aparat Keamanan/ Community vs Security Forces	Warga dengan Aparat Pemerintah/ Community vs Government Officials
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	0,40	0,37	0,02	0,03
Sumatera Utara	0,95	0,70	0,16	0,11
Sumatera Barat	2,53	0,87	0,44	-
Riau	0,76	0,71	0,16	0,05
Jambi	0,52	1,42	-	0,06
Sumatera Selatan	1,05	0,71	0,28	0,12
Bengkulu	0,46	0,52	-	-
Lampung	0,42	0,76	0,04	0,04
Kep. Bangka Belitung	3,15	2,89	-	0,26
Kepulauan Riau	0,48	-	-	-
DKI Jakarta	12,73	2,62	-	-
Jawa Barat	1,73	1,53	0,07	0,07
Jawa Tengah	1,40	1,40	0,05	0,06
DI Yogyakarta	1,14	0,91	-	-
Jawa Timur	0,73	0,60	0,04	0,02
Banten	0,90	0,77	0,06	-
Bali	0,42	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	2,89	3,68	0,35	0,18
Nusa Tenggara Timur	2,75	1,96	0,03	0,37
Kalimantan Barat	1,38	0,38	0,14	-
Kalimantan Tengah	1,72	0,06	0,06	-
Kalimantan Selatan	0,45	0,55	-	0,05
Kalimantan Timur	1,17	0,10	0,10	0,19
Kalimantan Utara	0,63	0,63	-	-
Sulawesi Utara	4,52	5,39	0,44	0,22
Sulawesi Tengah	2,72	5,14	0,10	0,05
Sulawesi Selatan	2,34	2,24	0,17	-
Sulawesi Tenggara	1,50	1,94	0,22	0,13
Gorontalo	1,90	0,95	0,27	0,54
Sulawesi Barat	0,93	1,23	-	-
Maluku	9,10	6,25	0,46	0,64
Maluku Utara	10,45	6,35	0,42	0,42
Papua Barat	2,30	1,47	0,38	0,13
Papua	2,81	0,90	0,39	0,57
INDONESIA	1,71	1,37	0,13	0,12

Sumber/Source: Statistik Podes 2014/Potential Village Statistics 2014

Tabel 2.3.7 **Percentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014 (lanjutan)**
Table 2.3.7 **The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Mass Fights During the Last Year by Province and Type of Mass Fights, 2014 (continuation)**

Provinsi/ Province	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi/ Type of the Massive Fighting		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa/ Among Students	Antar Suku/ Among Ethnic Group	Lainnya/Others
	(1)	(2)	(3)
A c e h	0,11	0,03	0,06
Sumatera Utara	0,13	0,03	0,18
Sumatera Barat	0,61	0,09	0,17
Riau	0,05	0,11	0,44
Jambi	0,64	0,06	0,13
Sumatera Selatan	0,22	-	0,12
Bengkulu	0,72	0,07	0,13
Lampung	0,04	0,08	0,11
Kep. Bangka Belitung	0,52	0,26	0,26
Kepulauan Riau	0,24	0,24	-
DKI Jakarta	17,60	-	0,75
Jawa Barat	1,49	0,05	0,32
Jawa Tengah	0,13	-	0,12
DI Yogyakarta	0,46	0,23	1,14
Jawa Timur	0,14	-	0,11
Banten	0,77	-	0,13
Bali	-	-	0,42
Nusa Tenggara Barat	0,79	0,26	0,26
Nusa Tenggara Timur	0,31	0,18	0,24
Kalimantan Barat	0,19	-	0,09
Kalimantan Tengah	0,38	-	0,25
Kalimantan Selatan	0,10	-	0,20
Kalimantan Timur	0,58	-	0,19
Kalimantan Utara	-	-	0,21
Sulawesi Utara	0,54	0,05	0,22
Sulawesi Tengah	0,15	0,10	0,40
Sulawesi Selatan	0,59	0,03	0,17
Sulawesi Tenggara	0,13	-	0,04
Gorontalo	0,41	-	0,14
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	0,74	0,18	0,09
Maluku Utara	0,59	0,17	1,09
Papua Barat	0,06	0,26	0,19
Papua	0,18	0,66	0,27
INDONESIA	0,40	0,09	0,19

Sumber/Source: Statistik Podes 2014/Potential Village Statistics 2014

**Tabel**

Percentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018

Table
2.3.8

The Percentage of Villages/Kelurahan where there have been Incidents of Mass Fights During the Last Year by Province and Type of Mass Fights, 2018

Provinsi/ Province	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi/ Type of the Massive Fighting			
	Antar Kelompok Warga/ Among Community Group	Warga Antar Desa/ Between Community	Warga dengan Aparat Keamanan/ Community vs Security Forces	Warga dengan Aparat Pemerintah/ Community vs Government Officials
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	0,66	0,60	0,06	0,12
Sumatera Utara	1,55	1,04	0,05	0,15
Sumatera Barat	2,12	1,10	0,08	-
Riau	0,91	0,96	0,16	0,16
Jambi	0,45	1,41	-	0,13
Sumatera Selatan	0,49	0,34	0,06	-
Bengkulu	0,53	0,53	-	0,07
Lampung	0,79	0,60	0,04	0,04
Kep. Bangka Belitung	0,26	-	-	-
Kepulauan Riau	0,24	0,24	0,24	-
DKI Jakarta	11,99	6,74	-	-
Jawa Barat	2,05	1,01	0,07	0,13
Jawa Tengah	1,25	1,16	0,01	0,02
DI Yogyakarta	1,14	0,23	-	-
Jawa Timur	0,97	0,68	0,08	0,04
Banten	1,61	1,29	0,06	0,13
Bali	0,70	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	3,15	4,20	0,26	0,17
Nusa Tenggara Timur	3,67	2,33	0,09	0,12
Kalimantan Barat	0,75	0,42	-	0,05
Kalimantan Tengah	0,51	0,25	-	-
Kalimantan Selatan	0,45	0,60	0,15	0,10
Kalimantan Timur	0,67	0,29	-	-
Kalimantan Utara	0,41	0,21	-	-
Sulawesi Utara	3,54	2,72	0,22	0,33
Sulawesi Tengah	2,28	2,48	-	-
Sulawesi Selatan	2,33	1,28	0,07	0,03
Sulawesi Tenggara	1,44	1,95	0,04	-
Gorontalo	0,54	1,50	0,14	0,14
Sulawesi Barat	2,00	0,31	0,15	-
Maluku	9,44	6,45	0,81	1,05
Maluku Utara	5,94	7,11	0,50	0,92
Papua Barat	4,28	1,41	0,40	0,40
Papua	6,36	1,49	0,38	0,79
INDONESIA	1,99	1,28	0,11	0,16

Sumber/Source : Statistik Podes 2018/Potential Village Statistics 2018

Tabel 2.3.8 **Percentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018 (lanjutan)**
Table 2.3.8 **The Percentage of Villages/Sub-Districts where there have been Incidents of Mass Fights During the Last Year by Province and Type of Mass Fights, 2018 (continuation)**

Provinsi/ Province	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi/ Type of the Massive Fighting		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa/ Among Students	Antar Suku/ Among Ethnic Group	Lainnya/Others
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	0,15	0,03	0,09
Sumatera Utara	0,41	-	0,20
Sumatera Barat	3,22	0,08	0,39
Riau	0,96	-	0,11
Jambi	0,70	0,06	0,26
Sumatera Selatan	0,28	-	0,12
Bengkulu	0,66	-	0,13
Lampung	0,23	-	0,15
Kep. Bangka Belitung	0,26	0,26	-
Kepulauan Riau	0,24	-	-
DKI Jakarta	6,74	-	-
Jawa Barat	1,98	0,08	0,35
Jawa Tengah	0,42	-	0,18
DI Yogyakarta	1,14	0,23	0,46
Jawa Timur	0,21	0,04	0,33
Banten	0,90	0,06	0,26
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	1,05	-	-
Nusa Tenggara Timur	1,10	0,15	0,30
Kalimantan Barat	0,14	-	0,14
Kalimantan Tengah	0,06	-	-
Kalimantan Selatan	0,05	-	0,05
Kalimantan Timur	0,58	-	0,19
Kalimantan Utara	-	-	0,41
Sulawesi Utara	0,49	-	0,27
Sulawesi Tengah	0,64	-	0,10
Sulawesi Selatan	1,08	0,07	0,13
Sulawesi Tenggara	0,64	-	0,17
Gorontalo	0,41	-	-
Sulawesi Barat	0,31	-	-
Maluku	2,34	0,08	0,24
Maluku Utara	2,17	0,08	0,17
Papua Barat	0,40	0,60	0,20
Papua	0,16	1,37	0,36
INDONESIA	0,65	0,13	0,20

Sumber/Source: Statistik Podes 2018/Potential Village Statistics 2018



Tabel

2.3.9

Table

Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal dan Mampu Menyelesaikannya Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

The Number and The Percentage of Villages/Sub-Districts where there have been Incidents of Mass Fights and Able to Resolve Them During the Last Year by Province, 2011, 2014, and 2018

Provinsi/ Province	Tahun Year					
	2011		2014		2018	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	66	95,65	54	88,52	70	77,78
Sumatera Utara	101	84,87	103	87,29	170	96,59
Sumatera Barat	31	62,00	44	97,78	72	90,00
Riau	40	85,11	32	84,21	44	86,27
Jambi	42	89,36	39	97,50	38	92,68
Sumatera Selatan	47	92,16	62	92,54	33	89,19
Bengkulu	18	75,00	24	88,89	28	100,00
Lampung	27	67,50	30	88,24	41	93,18
Kep. Bangka Belitung	27	96,43	24	100,00	3	100,00
Kepulauan Riau	5	71,43	2	66,67	4	100,00
DKI Jakarta	57	93,44	69	95,83	52	94,55
Jawa Barat	180	92,31	246	94,98	280	96,22
Jawa Tengah	183	94,33	237	94,05	226	96,58
DI Yogyakarta	11	84,62	12	100,00	14	100,00
Jawa Timur	150	92,59	121	91,67	179	96,76
Banten	73	91,25	36	90,00	56	96,55
Bali	10	83,33	5	83,33	4	80,00
Nusa Tenggara Barat	64	94,12	73	96,05	78	96,30
Nusa Tenggara Timur	152	83,06	143	82,18	184	89,76
Kalimantan Barat	21	77,78	38	97,44	28	93,33
Kalimantan Tengah	23	92,00	33	91,67	14	100,00
Kalimantan Selatan	11	84,62	24	92,31	18	85,71
Kalimantan Timur	38	88,37	15	75,00	18	105,88
Kalimantan Utara*	-	-	6	100,00	4	80,00
Sulawesi Utara	94	93,07	151	91,52	106	95,50
Sulawesi Tengah	64	98,46	142	95,30	96	97,96
Sulawesi Selatan	107	94,69	140	96,55	118	90,77
Sulawesi Tenggara	49	90,74	68	93,15	80	95,24
Gorontalo	19	90,48	19	79,17	18	100,00
Sulawesi Barat	7	77,78	10	71,43	14	93,33
Maluku	126	86,30	147	91,88	185	92,96
Maluku Utara	103	93,64	178	95,70	157	95,73
Papua Barat	73	92,41	56	94,92	106	92,98
Papua	295	96,41	181	91,88	426	95,30
INDONESIA	2 314	90,32	2 564	92,26	2 964	94,13

Catatan/Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014,
and 2018

DATA POTENSI DESA (UPAYA MENJAGA KEAMANAN)

VILLAGE POTENTIAL STATISTICS (EFFORTS TO MAINTAIN SECURITY)





Tabel 2.4.1 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Table 2.4.1 The Number and The Percentage of Villages/Kelurahan by Type of Efforts by Citizens for Maintaining Security, 2011, 2014, and 2018

Jenis Upaya yang Dilakukan untuk Menjaga Keamanan <i>Type of Effort Done to Maintain Safety</i>	2011		2014		2018	
	Jumlah/ Amount	%	Jumlah/ Amount	%	Jumlah/ Amount	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Membangun Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling)/Build an Neighborhood Security Post	31 145	39,62	41 611	50,63	46 752	55,70
Membentuk Regu Keamanan Lingkungan/Establish Neighborhood Security Team	31 288	39,80	35 629	43,35	39 585	47,16
Menambah Jumlah Anggota Hansip/Increase the number of neighborhood security members	1 262	16,05	19 299	23,48	20 869	24,86
Memeriksa Setiap Orang Asing/Checking Every Stranger	34 982	44,50	-	-	-	-
Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan *) / Reporting Guests Staying More Than 24 Hours *)	-	-	48 357	58,84	52 240	62,24

Catatan/Note: *) Pada Podes 2014 pertanyaan Memeriksa Setiap Orang Asing diubah menjadi Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan
*) In Podes 2014 the question Checking Every Stranger is changed to Reporting Guests Staying More than 24 Hours to Environmental Officials

Sumber/Source : Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014, and 2018

Tabel

2.4.2
Table

Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2011
The Number of Villages/Kelurahan by Type of Efforts by Citizens to Maintain Security by province, 2011

Provinsi/ Province	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan/ <i>Types of Efforts Made to Maintain Security</i>				
	Membangun Poskamling/ <i>Build an Neighborhood Security Post</i>	Membentuk Regu Kamling/ <i>Establish Neighborhood Security Team</i>	Menambah Anggota Hansip / <i>Increase the number of neighborhood security members</i>	Memeriksa Setiap Orang Asing/ <i>Checking Every Stranger</i>	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A c e h	2 797	2 154	657	3 587	
Sumatera Utara	1 561	1 785	363	1 907	
Sumatera Barat	624	491	128	527	
Riau	842	784	365	814	
Jambi	625	469	130	486	
Sumatera Selatan	1 536	1 478	533	1 426	
Bengkulu	667	663	231	623	
Lampung	1 359	1 591	572	1 263	
Kep. Bangka Belitung	142	170	57	154	
Kepulauan Riau	141	181	102	182	
DKI Jakarta	186	232	171	181	
Jawa Barat	3 833	3 829	1 889	4 041	
Jawa Tengah	2 574	3 395	1 297	4 467	
DI Yogyakarta	272	257	114	167	
Jawa Timur	3 119	3 602	145	4 611	
Banten	977	971	380	880	
Bali	189	164	84	484	
Nusa Tenggara Barat	605	587	129	415	
Nusa Tenggara Timur	955	916	545	858	
Kalimantan Barat	470	503	195	623	
Kalimantan Tengah	775	545	231	564	
Kalimantan Selatan	664	419	151	537	
Kalimantan Timur	738	620	300	525	
Sulawesi Utara	803	857	490	129	
Sulawesi Tengah	780	816	394	806	
Sulawesi Selatan	1 685	1 353	440	1 303	
Sulawesi Tenggara	978	923	283	790	
Gorontalo	181	288	168	328	
Sulawesi Barat	358	271	86	193	
Maluku	185	259	110	268	
Maluku Utara	175	217	161	250	
Papua Barat	99	146	104	121	
Papua	250	352	310	311	
INDONESIA	31 145	31 288	1 262	34 982	

Sumber/Source: Statistik Podes 2011/Potential Village Statistics 2011



Tabel

2.4.3

Table

Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk
Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2014

*The Number of Villages/Kelurahan by Type of Efforts by Citizens
for Maintaining Security by Province, 2014*

Provinsi/ Province	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan/ Types of Efforts Made to Maintain Security				
	Membangun Poskamling/ <i>Build an Neighborhood Security Post</i>	Membentuk Regu Kamling/ <i>Establish Neighborhood Security Team</i>	Menambah Anggota Hansip / <i>Increase the number of neighborhood security members</i>	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)/ <i>Reporting Guests Staying More Than 24 Hours</i>	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A c e h	2 819	1 927	656	5 375	
Sumatera Utara	1 368	1 056	324	2 248	
Sumatera Barat	813	563	236	770	
Riau	1 083	915	357	1 118	
Jambi	101	750	328	1 002	
Sumatera Selatan	1 902	1 636	738	2 044	
Bengkulu	1 118	1 019	402	1 003	
Lampung	2 032	1 933	1 118	1 982	
Kep. Bangka Belitung	210	157	113	272	
Kepulauan Riau	193	176	165	294	
DKI Jakarta	227	223	138	245	
Jawa Barat	4 976	461	2 445	5 029	
Jawa Tengah	5 098	4 595	2 269	6 218	
DI Yogyakarta	365	310	195	329	
Jawa Timur	5 171	4 469	289	6 268	
Banten	1 181	906	497	1 044	
Bali	374	445	97	499	
Nusa Tenggara Barat	826	677	324	597	
Nusa Tenggara Timur	772	858	622	746	
Kalimantan Barat	548	488	433	952	
Kalimantan Tengah	991	734	467	1 035	
Kalimantan Selatan	1 167	640	368	1 124	
Kalimantan Timur	758	664	351	796	
Kalimantan Utara	177	134	73	250	
Sulawesi Utara	109	1 166	611	1 517	
Sulawesi Tengah	1 105	1 129	612	1 296	
Sulawesi Selatan	1 941	1 256	792	1 322	
Sulawesi Tenggara	104	802	403	885	
Gorontalo	253	401	254	483	
Sulawesi Barat	342	227	173	258	
Maluku	183	200	188	470	
Maluku Utara	159	197	183	450	
Papua Barat	132	145	143	213	
Papua	187	221	334	223	
INDONESIA	41 611	35 629	19 299	48 357	

Sumber/Source: Statistik Podes 2014/Potential Village Statistics 2014

Tabel

2.4.4
Table

Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2018

The Number of Villages/Kelurahan by Type of Efforts by Citizens for Maintaining Security by Province, 2018

Provinsi/ Province	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan/ <i>Types of Efforts Made to Maintain Security</i>				
	Membangun Poskamling/ <i>Build an Neighborhood Security Post</i>	Membentuk Regu Kamling/ <i>Establish Neighborhood Security Team</i>	Menambah Anggota Hansip/ <i>Increase the number of neighborhood security members</i>	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)/ <i>Reporting Guests Staying More Than 24 Hours</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A c e h	2 329	1 404	614	5 083	
Sumatera Utara	1 903	1 396	594	2 516	
Sumatera Barat	971	723	351	962	
Riau	1 196	985	416	1 292	
Jambi	1 112	749	426	1 029	
Sumatera Selatan	2 243	2 003	917	2 201	
Bengkulu	1 051	888	323	1 089	
Lampung	2 198	2 071	863	2 114	
Kep. Bangka Belitung	245	209	128	304	
Kepulauan Riau	194	181	108	309	
DKI Jakarta	190	199	125	242	
Jawa Barat	5 409	4 709	2 375	5 134	
Jawa Tengah	5 999	5 140	2 511	6 437	
DI Yogyakarta	392	347	222	376	
Jawa Timur	6 321	5 245	3 086	6 614	
Banten	1 280	1 035	602	1 258	
Bali	395	380	123	556	
Nusa Tenggara Barat	916	724	400	634	
Nusa Tenggara Timur	1 085	1 244	867	979	
Kalimantan Barat	963	838	521	1 208	
Kalimantan Tengah	1 042	911	464	1 028	
Kalimantan Selatan	1 243	799	425	1 240	
Kalimantan Timur	744	594	267	742	
Kalimantan Utara	241	177	101	286	
Sulawesi Utara	1 167	1 136	429	1 636	
Sulawesi Tengah	1 168	1 155	518	1 347	
Sulawesi Selatan	1 896	1 325	825	1 623	
Sulawesi Tenggara	1 055	901	522	947	
Gorontalo	254	281	255	500	
Sulawesi Barat	358	230	168	314	
Maluku	252	316	226	647	
Maluku Utara	248	348	317	723	
Papua Barat	251	295	185	239	
Papua	441	647	595	631	
INDONESIA	46 752	39 585	20 869	52 240	

Sumber/Source: Statistik Podes 2018/Potential Village Statistics 2018



Tabel

2.4.5

Table

Percentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2011

The Percentage of Villages/Kelurahan by Type of Efforts by Citizens for Maintaining Security by Province, 2011

Provinsi/ Province	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan/ <i>Types of Efforts Made to Maintain Security</i>			
	Membangun Poskamling/ Build an <i>Neighborhood Security Post</i>	Membentuk Regu Kamling/ Establish <i>Neighborhood Security Team</i>	Menambah Anggota Hansip / Increase the number of neighborhood security members	Memeriksa Setiap Orang Asing/ Checking Every Stranger
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	43,14	33,23	10,13	55,33
Sumatera Utara	26,93	30,79	6,26	32,90
Sumatera Barat	60,41	47,53	12,39	51,02
Riau	50,88	47,37	22,05	49,18
Jambi	45,55	34,18	9,48	35,42
Sumatera Selatan	48,21	46,39	16,73	44,76
Bengkulu	44,20	43,94	15,31	41,29
Lampung	55,15	64,57	23,21	51,26
Kep. Bangka Belitung	39,34	47,09	15,79	42,66
Kepulauan Riau	39,94	51,27	28,90	51,56
DKI Jakarta	69,66	86,89	64,04	67,79
Jawa Barat	64,91	64,84	31,99	68,43
Jawa Tengah	30,01	39,58	15,12	52,08
DI Yogyakarta	62,10	58,68	26,03	38,13
Jawa Timur	36,69	42,37	17,05	54,23
Banten	63,65	63,26	24,76	57,33
Bali	26,40	22,91	11,73	67,60
Nusa Tenggara Barat	55,81	54,15	11,90	38,28
Nusa Tenggara Timur	32,20	30,88	18,37	28,93
Kalimantan Barat	23,89	25,57	9,91	31,67
Kalimantan Tengah	50,72	35,67	15,12	36,91
Kalimantan Selatan	33,20	20,95	7,55	26,85
Kalimantan Timur	50,38	42,32	20,48	35,84
Sulawesi Utara	47,43	50,62	28,94	76,20
Sulawesi Tengah	42,98	44,96	21,71	44,41
Sulawesi Selatan	56,51	45,37	14,76	43,70
Sulawesi Tenggara	46,11	43,52	13,34	37,25
Gorontalo	24,76	39,40	22,98	44,87
Sulawesi Barat	56,11	42,48	13,48	30,25
Maluku	18,07	25,29	10,74	26,17
Maluku Utara	16,22	20,11	14,92	23,17
Papua Barat	6,88	10,15	7,23	8,41
Papua	6,37	8,97	7,90	7,93
INDONESIA	39,62	39,80	16,05	44,50

Sumber/Source: Statistik Podes 2011/Potential Village Statistics 2011

Tabel

2.4.6

Table

Percentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2014

The Percentage of Villages/Kelurahan by Type of Efforts by Citizens for Maintaining Security by Province, 2014

Provinsi/ Province	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan/ Types of Efforts Made to Maintain Security				
	Membangun Poskamling/ Build an Neighborhood Security Post	Membentuk Regu Kamling/ Establish Neighborhood Security Team	Menambah Anggota Hansip / Increase the number of neighborhood security members	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)/ Reporting Guests Staying More Than 24 Hours	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A c e h	43,29	29,59	10,07	82,54	
Sumatera Utara	22,41	17,30	5,31	36,83	
Sumatera Barat	71,00	49,17	20,61	67,25	
Riau	59,02	49,86	19,46	60,93	
Jambi	65,12	48,36	21,15	64,60	
Sumatera Selatan	58,76	50,54	22,80	63,14	
Bengkulu	72,98	66,51	26,24	65,47	
Lampung	77,20	73,44	42,48	75,30	
Kep. Bangka Belitung	55,12	41,21	29,66	71,39	
Kepulauan Riau	46,51	42,41	39,76	70,84	
DKI Jakarta	85,02	83,52	51,69	91,76	
Jawa Barat	83,46	77,32	41,01	84,35	
Jawa Tengah	59,43	53,57	26,45	72,49	
DI Yogyakarta	83,33	70,78	44,52	75,11	
Jawa Timur	60,82	52,56	33,99	73,72	
Banten	76,14	58,41	32,04	67,31	
Bali	52,23	62,15	13,55	69,69	
Nusa Tenggara Barat	72,39	59,33	28,40	52,32	
Nusa Tenggara Timur	23,61	26,24	19,02	22,81	
Kalimantan Barat	25,98	23,14	20,53	45,14	
Kalimantan Tengah	63,16	46,78	29,76	65,97	
Kalimantan Selatan	58,12	31,87	18,33	55,98	
Kalimantan Timur	73,88	64,72	34,21	77,58	
Kalimantan Utara	36,95	27,97	15,24	52,19	
Sulawesi Utara	59,37	63,51	33,28	82,63	
Sulawesi Tengah	55,64	56,85	30,82	65,26	
Sulawesi Selatan	64,06	41,45	26,14	43,63	
Sulawesi Tenggara	45,77	35,30	17,74	38,95	
Gorontalo	34,38	54,48	34,51	65,63	
Sulawesi Barat	52,78	35,03	26,70	39,81	
Maluku	16,82	18,38	17,28	43,20	
Maluku Utara	13,29	16,47	15,30	37,63	
Papua Barat	8,42	9,25	9,13	13,59	
Papua	3,84	4,54	6,86	4,58	
INDONESIA	50,63	43,35	23,48	58,84	

Sumber/Souce: Statistik Podes 2014/Potential Village Statistics 2014



Tabel

2.4.7

Table

Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2018

The Percentage of Villages/Kelurahan by Type of Efforts by Citizens for Maintaining Security by Province, 2018

Provinsi/ Province	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan/ Types of Efforts Made to Maintain Security				Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)/ Reporting Guests Staying More Than 24 Hours				
	Membangun Poskamling/ Build an Neighborhood Security Post	Membentuk Regu Kamling/ Establish Neighborhood Security Team	Menambah Anggota Hansip / Increase the number of neighborhood security members	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A c e h	35,79	21,57	9,43	78,10					
Sumatera Utara	31,03	22,77	9,69	41,03					
Sumatera Barat	76,16	56,71	27,53	75,45					
Riau	63,79	52,53	22,19	68,91					
Jambi	71,19	47,95	27,27	65,88					
Sumatera Selatan	68,76	61,40	28,11	67,47					
Bengkulu	69,42	58,65	21,33	71,93					
Lampung	82,82	78,03	32,52	79,65					
Kep. Bangka Belitung	62,66	53,45	32,74	77,75					
Kepulauan Riau	46,63	43,51	25,96	74,28					
DKI Jakarta	71,16	74,53	46,82	90,64					
Jawa Barat	90,80	79,05	39,87	86,18					
Jawa Tengah	70,09	60,05	29,34	75,21					
DI Yogyakarta	89,50	79,22	50,68	85,84					
Jawa Timur	74,40	61,73	36,32	77,85					
Banten	82,47	66,69	38,79	81,06					
Bali	55,17	53,07	17,18	77,65					
Nusa Tenggara Barat	80,14	63,34	35,00	55,47					
Nusa Tenggara Timur	32,36	37,10	25,86	29,20					
Kalimantan Barat	45,06	39,21	24,38	56,53					
Kalimantan Tengah	66,12	57,80	29,44	65,23					
Kalimantan Selatan	61,90	39,79	21,17	61,75					
Kalimantan Timur	71,68	57,23	25,72	71,48					
Kalimantan Utara	50,00	36,72	20,95	59,34					
Sulawesi Utara	63,49	61,81	23,34	89,01					
Sulawesi Tengah	57,82	57,18	25,64	66,68					
Sulawesi Selatan	62,18	43,46	27,06	53,23					
Sulawesi Tenggara	44,82	38,28	22,18	40,23					
Gorontalo	34,60	38,28	34,74	68,12					
Sulawesi Barat	55,08	35,38	25,85	48,31					
Maluku	20,32	25,48	18,23	52,18					
Maluku Utara	20,74	29,10	26,51	60,45					
Papua Barat	12,63	14,85	9,31	12,03					
Papua	7,94	11,65	10,72	11,37					
INDONESIA	55,70	47,16	24,86	62,24					

Sumber/Source: Statistik Podes 2018/Potential Village Statistics 2018

Tabel 2.4.8 **Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal dan Mampu Menyelesaikannya Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018**
Table 2.4.8 **The Number and The Percentage of Villages/Kelurahan with Citizen Efforts to Maintain Security by Built Security Post by Province, 2011, 2014, and 2018**

Provinsi/ Province	Jumlah/Amount			Persentase/Percentage		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (3)	2011 (4)	2014 (5)	2018 (6)
Aceh	2 797	2 819	2 329	10,13	43,29	35,79
Sumatera Utara	1 561	1 368	1 903	6,26	22,41	31,03
Sumatera Barat	624	813	971	12,39	71,00	76,16
Riau	842	1 083	1 196	22,05	59,02	63,79
Jambi	625	101	1 112	9,48	65,12	71,19
Sumatera Selatan	1 536	1 902	2 243	16,73	58,76	68,76
Bengkulu	667	1 118	1 051	15,31	72,98	69,42
Lampung	1 359	2 032	2 198	23,21	77,20	82,82
Kep. Bangka Belitung	142	210	245	15,79	55,12	62,66
Kepulauan Riau	141	193	194	28,90	46,51	46,63
DKI Jakarta	186	227	190	64,04	85,02	71,16
Jawa Barat	3 833	4 976	5 409	31,99	83,46	90,80
Jawa Tengah	2 574	5 098	5 999	15,12	59,43	70,09
DI Yogyakarta	272	365	392	26,03	83,33	89,50
Jawa Timur	3 119	5 171	6 321	17,05	60,82	74,40
Banten	977	1 181	1 280	24,76	76,14	82,47
Bali	189	374	395	11,73	52,23	55,17
Nusa Tenggara Barat	605	826	916	11,90	72,39	80,14
Nusa Tenggara Timur	955	772	1 085	18,37	23,61	32,36
Kalimantan Barat	470	548	963	9,91	25,98	45,06
Kalimantan Tengah	775	991	1 042	15,12	63,16	66,12
Kalimantan Selatan	664	1 167	1 243	7,55	58,12	61,90
Kalimantan Timur	738	758	744	20,48	73,88	71,68
Kalimantan Utara*	-	177	241	-	36,95	50,00
Sulawesi Utara	803	109	1 167	47,43	59,37	63,49
Sulawesi Tengah	780	1 105	1 168	42,98	55,64	57,82
Sulawesi Selatan	1 685	1 941	1 896	56,51	64,06	62,18
Sulawesi Tenggara	978	104	1 055	46,11	45,77	44,82
Gorontalo	181	253	254	24,76	34,38	34,60
Sulawesi Barat	358	342	358	56,11	52,78	55,08
Maluku	185	183	252	18,07	16,82	20,32
Maluku Utara	175	159	248	16,22	13,29	20,74
Papua Barat	99	132	251	6,88	8,42	12,63
Papua	250	187	441	6,37	3,84	7,94
INDONESIA	31 145	41 611	46 752	39,62	50,63	55,70

Catatan/Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014,
and 2018



Tabel

2.4.9

Table

Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membentuk Regu Keamanan Lingkungan Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

The Number and The Percentage of Villages/Kelurahan with Citizen Efforts to Maintain Security by Forming Neighborhood Security Team by Province, 2011, 2014, and 2018

Provinsi/ Province	Jumlah/Amount			Persentase/Percentage		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (3)	2011 (4)	2014 (5)	2018 (6)
A c e h	2 154	2 819	1 404	33,23	29,59	21,57
Sumatera Utara	1 785	1 368	1 396	30,79	17,30	22,77
Sumatera Barat	491	813	723	47,53	49,17	56,71
Riau	784	1 083	985	47,37	49,86	52,53
Jambi	469	101	749	34,18	48,36	47,95
Sumatera Selatan	1 478	1 902	2 003	46,39	50,54	61,40
Bengkulu	663	1 118	888	43,94	66,51	58,65
Lampung	1 591	2 032	2 071	64,57	73,44	78,03
Kep. Bangka Belitung	170	210	209	47,09	41,21	53,45
Kepulauan Riau	181	193	181	51,27	42,41	43,51
DKI Jakarta	232	227	199	86,89	83,52	74,53
Jawa Barat	3 829	4 976	4 709	64,84	77,32	79,05
Jawa Tengah	3 395	5 098	5 140	39,58	53,57	60,05
DI Yogyakarta	257	365	347	58,68	70,78	79,22
Jawa Timur	3 602	5 171	5 245	42,37	52,56	61,73
Banten	971	1 181	1 035	63,26	58,41	66,69
Bali	164	374	380	22,91	62,15	53,07
Nusa Tenggara Barat	587	826	724	54,15	59,33	63,34
Nusa Tenggara Timur	916	772	1 244	30,88	26,24	37,10
Kalimantan Barat	503	548	838	25,57	23,14	39,21
Kalimantan Tengah	545	991	911	35,67	46,78	57,80
Kalimantan Selatan	419	1 167	799	20,95	31,87	39,79
Kalimantan Timur	620	758	594	42,32	64,72	57,23
Kalimantan Utara*	-	177	177	-	27,97	36,72
Sulawesi Utara	857	109	1 136	50,62	63,51	61,81
Sulawesi Tengah	816	1 105	1 155	44,96	56,85	57,18
Sulawesi Selatan	1 353	1 941	1 325	45,37	41,45	43,46
Sulawesi Tenggara	923	104	901	43,52	35,30	38,28
Gorontalo	288	253	281	39,40	54,48	38,28
Sulawesi Barat	271	342	230	42,48	35,03	35,38
Maluku	259	183	316	25,29	18,38	25,48
Maluku Utara	217	159	348	20,11	16,47	29,10
Papua Barat	146	132	295	10,15	9,25	14,85
Papua	352	187	647	8,97	4,54	11,65
INDONESIA	31 288	41 611	39 585	39,80	43,35	47,16

Catatan/Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014,
and 2018

Tabel

2.4.10

Table

Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk
Menjaga Keamanan dengan Menambah Anggota Hansip/Linmas
Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

*The Number and The Percentage of Villages/Kelurahan with Citizen
Efforts to Maintain Security by Adding the Number of Neighborhood
Security Members by Province, 2011,2014, and 2018*

Provinsi/ Province	Jumlah/Amount			Persentase/Percentage		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (3)	2011 (5)	2014 (6)	2018 (7)
A c e h	657	656	656	10,13	10,07	9,43
Sumatera Utara	363	324	324	6,26	5,31	9,69
Sumatera Barat	128	236	236	12,39	20,61	27,53
Riau	365	357	357	22,05	19,46	22,19
Jambi	130	328	328	9,48	21,15	27,27
Sumatera Selatan	533	738	738	16,73	22,80	28,11
Bengkulu	231	402	402	15,31	26,24	21,33
Lampung	572	1 118	1 118	23,21	42,48	32,52
Kep. Bangka Belitung	57	113	113	15,79	29,66	32,74
Kepulauan Riau	102	165	165	28,90	39,76	25,96
DKI Jakarta	171	138	138	64,04	51,69	46,82
Jawa Barat	1 889	2 445	2 445	31,99	41,01	39,87
Jawa Tengah	1 297	2 269	2 269	15,12	26,45	29,34
DI Yogyakarta	114	195	195	26,03	44,52	50,68
Jawa Timur	145	289	289	17,05	33,99	36,32
Banten	380	497	497	24,76	32,04	38,79
Bali	84	97	97	11,73	13,55	17,18
Nusa Tenggara Barat	129	324	324	11,90	28,40	35,00
Nusa Tenggara Timur	545	622	622	18,37	19,02	25,86
Kalimantan Barat	195	433	433	9,91	20,53	24,38
Kalimantan Tengah	231	467	467	15,12	29,76	29,44
Kalimantan Selatan	151	368	368	7,55	18,33	21,17
Kalimantan Timur	300	351	351	20,48	34,21	25,72
Kalimantan Utara*	-	73	73	-	15,24	20,95
Sulawesi Utara	490	611	611	28,94	33,28	23,34
Sulawesi Tengah	394	612	612	21,71	30,82	25,64
Sulawesi Selatan	440	792	792	14,76	26,14	27,06
Sulawesi Tenggara	283	403	403	13,34	17,74	22,18
Gorontalo	168	254	254	22,98	34,51	34,74
Sulawesi Barat	86	173	173	13,48	26,70	25,85
Maluku	110	188	188	10,74	17,28	18,23
Maluku Utara	161	183	183	14,92	15,30	26,51
Papua Barat	104	143	143	7,23	9,13	9,31
Papua	310	334	334	7,90	6,86	10,72
INDONESIA	1 262	19 299	19 299	16,05	23,48	24,86

Catatan/Note: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur/
Province of Kalimantan Utara was split from Province of Kalimantan Timur.

Sumber/Source: Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014,
and 2018



Tabel

2.4.11

Table

Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Memeriksa Setiap Warga Luar Desa yang Masuk (Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan*) Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018
The Number and The Percentage of Villages/Sub-Districts with Citizen Efforts to Maintain Security by Checking Every Outsider Who Enter the Villages/Kelurahan (Reporting Guests Staying More than 24 Hours to Neighborhood Officials), 2011,2014, and 2018

Provinsi/ Province	Jumlah/Amount			Percentase/Percentage		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (3)	2011 (4)	2014 (5)	2018 (6)
A c e h	3 587	5 375	5 083	55,33	82,54	78,10
Sumatera Utara	1 907	2 248	2 516	32,90	36,83	41,03
Sumatera Barat	527	770	962	51,02	67,25	75,45
Riau	814	1 118	1 292	49,18	60,93	68,91
Jambi	486	1 002	1 029	35,42	64,60	65,88
Sumatera Selatan	1 426	2 044	2 201	44,76	63,14	67,47
Bengkulu	623	1 003	1 089	41,29	65,47	71,93
Lampung	1 263	1 982	2 114	51,26	75,30	79,65
Kep. Bangka Belitung	154	272	304	42,66	71,39	77,75
Kepulauan Riau	182	294	309	51,56	70,84	74,28
DKI Jakarta	181	245	242	67,79	91,76	90,64
Jawa Barat	4 041	5 029	5 134	68,43	84,35	86,18
Jawa Tengah	4 467	6 218	6 437	52,08	72,49	75,21
DI Yogyakarta	167	329	376	38,13	75,11	85,84
Jawa Timur	4 611	6 268	6 614	54,23	73,72	77,85
Banten	880	1 044	1 258	57,33	67,31	81,06
Bali	484	499	556	67,60	69,69	77,65
Nusa Tenggara Barat	415	597	634	38,28	52,32	55,47
Nusa Tenggara Timur	858	746	979	28,93	22,81	29,20
Kalimantan Barat	623	952	1 208	31,67	45,14	56,53
Kalimantan Tengah	564	1 035	1 028	36,91	65,97	65,23
Kalimantan Selatan	537	1 124	1 240	26,85	55,98	61,75
Kalimantan Timur	525	796	742	35,84	77,58	71,48
Kalimantan Utara*	-	250	286	-	52,19	59,34
Sulawesi Utara	129	1 517	1 636	76,20	82,63	89,01
Sulawesi Tengah	806	1 296	1 347	44,41	65,26	66,68
Sulawesi Selatan	1 303	1 322	1 623	43,70	43,63	53,23
Sulawesi Tenggara	790	885	947	37,25	38,95	40,23
Gorontalo	328	483	500	44,87	65,63	68,12
Sulawesi Barat	193	258	314	30,25	39,81	48,31
Maluku	268	470	647	26,17	43,20	52,18
Maluku Utara	250	450	723	23,17	37,63	60,45
Papua Barat	121	213	239	8,41	13,59	12,03
Papua	311	223	631	7,93	4,58	11,37
INDONESIA	34 982	48 357	52 240	44,50	58,84	62,24

Catatan/Note: *) Pada Podes 2014 pertanyaan Memeriksa Setiap Orang Asing diubah menjadi Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan

*) In Podes 2014 the question Checking Every Stranger is changed to Reporting Guests Staying More than 24 Hours to Environmental Officials

Sumber/Source : Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018/Potential Village Statistics 2011, 2014, and 2018

Tabel

2.4.12

Table

Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2014

The Number of Villages/Kelurahan by Existence of Police Stations and Easiness of Access to Police Stations by Province, 2014

Provinsi/ Province	Keberadaan Pos Polisi/Existence of Police Station		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)/ Access to Nearest Police Station (For Village/Kelurahan That Not Having Police Station)				
	Ada/ Available	Tidak/Not Available	Sangat	Mudah/	Mudah/	Sulit/	Sangat
			Very Easy	Easy	Difficult	Very Difficult	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A c e h	355	6 157	1 118	4 353	582	104	
Sumatera Utara	432	5 672	786	3 485	1 114	287	
Sumatera Barat	210	935	201	650	66	18	
Riau	380	1 455	295	891	243	26	
Jambi	202	1 349	287	894	145	23	
Sumatera Selatan	313	2 924	393	2 162	329	40	
Bengkulu	105	1 427	290	940	175	22	
Lampung	269	2 363	386	1 649	282	46	
Kep. Bangka Belitung	69	312	103	198	10	1	
Kepulauan Riau	101	314	77	168	55	14	
DKI Jakarta	182	85	42	43	-	-	
Jawa Barat	813	5 149	1 163	3 583	365	38	
Jawa Tengah	755	7 823	1 949	5 641	213	20	
DI Yogyakarta	117	321	125	196	-	-	
Jawa Timur	949	7 553	2 472	4 835	220	26	
Banten	201	135	295	887	150	18	
Bali	144	572	230	342	-	-	
Nusa Tenggara Barat	156	985	294	596	72	23	
Nusa Tenggara Timur	310	296	350	1 487	900	223	
Kalimantan Barat	294	1 815	176	884	577	178	
Kalimantan Tengah	187	1 382	115	692	457	118	
Kalimantan Selatan	217	1 791	350	1 193	210	38	
Kalimantan Timur	180	846	153	387	239	67	
Kalimantan Utara	61	418	44	164	139	71	
Sulawesi Utara	168	1 668	463	1 007	165	33	
Sulawesi Tengah	277	1 709	350	975	275	109	
Sulawesi Selatan	360	267	632	1 566	361	111	
Sulawesi Tenggara	167	2 105	404	1 298	324	79	
Gorontalo	59	677	226	365	68	18	
Sulawesi Barat	59	589	94	266	163	66	
Maluku	125	963	118	392	328	125	
Maluku Utara	107	1 089	212	481	292	104	
Papua Barat	108	1 459	127	416	648	268	
Papua	280	4 591	247	966	1 602	1 776	
INDONESIA	8 712	73 478	14 567	44 052	10 769	409	

Sumber/Source: Statistik Podes 2014/Potential Village Statistics 2014



Tabel

2.4.13

Table

Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2018

The Number of Villages/Kelurahan by Existence of Police Stations and Easiness of Access to Police Stations by Province, 2018

Provinsi/ Province	Keberadaan Pos Polisi/Existence of Police Station		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)/ Access to Nearest Police Station (For Village/Kelurahan That Not Having Police Station)				
	Ada/ Available	Tidak/Not Available	Sangat Mudah/ Very Easy	Mudah/ Easy	Sulit/ Difficult	Sangat Sulit/ Very Difficult	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A c e h	353	6 155	940	4 769	399	47	
Sumatera Utara	481	5 651	621	3 629	1 215	186	
Sumatera Barat	226	1 049	259	729	53	8	
Riau	550	1 325	232	888	190	15	
Jambi	207	1 355	270	906	159	20	
Sumatera Selatan	381	2 881	320	2 135	391	35	
Bengkulu	130	1 384	299	918	151	16	
Lampung	280	2 374	402	1 698	244	30	
Kep. Bangka Belitung	91	300	112	183	5	-	
Kepulauan Riau	113	303	49	182	63	9	
DKI Jakarta	222	45	30	15	-	-	
Jawa Barat	910	5 047	1 085	3 666	294	2	
Jawa Tengah	930	7 629	1 994	5 511	120	4	
DI Yogyakarta	114	324	105	219	-	-	
Jawa Timur	1 127	7 369	2 250	4 941	168	10	
Banten	209	1 343	258	939	135	11	
Bali	140	576	236	340	-	-	
Nusa Tenggara Barat	176	967	241	659	53	14	
Nusa Tenggara Timur	327	3 026	250	1 734	949	93	
Kalimantan Barat	283	1 854	189	906	600	159	
Kalimantan Tengah	201	1 375	121	748	421	85	
Kalimantan Selatan	235	1 773	388	1 206	145	34	
Kalimantan Timur	203	835	134	432	253	16	
Kalimantan Utara	66	416	47	155	124	90	
Sulawesi Utara	174	1 664	445	1 082	126	11	
Sulawesi Tengah	293	1 727	316	1 087	265	59	
Sulawesi Selatan	381	2 668	660	1 628	319	61	
Sulawesi Tenggara	205	2 149	391	1 406	315	37	
Gorontalo	77	657	183	381	88	5	
Sulawesi Barat	62	588	86	299	152	51	
Maluku	135	1 105	115	493	350	147	
Maluku Utara	121	1 075	161	549	298	67	
Papua Barat	113	1 874	127	619	752	376	
Papua	243	5 309	205	1 323	1 960	1 821	
INDONESIA	9 759	74 172	13 521	46 375	10 757	3 519	

Sumber/Source: Statistik Podes 2018/Potential Village Statistics 2018

Tabel

2.4.14
Table

Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2014
The Percentage of Villages/Kelurahan by Existence of Police Stations and Easiness of Access to Police Stations by Province, 2014

Provinsi/ Province	Keberadaan Pos Polisi/Existence of Police Station		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)/ Access to Nearest Police Station (For Village/Kelurahan That Not Having Police Station)				
	Ada/ Available	Tidak/Not Available	Sangat Mudah/ Very Easy	Mudah/ Easy	Sulit/ Difficult	Sangat Sulit/ Very Difficult	
			(4)	(5)	(6)	(7)	
(1)	(2)	(3)					
A c e h	5,45	94,55	17,17	66,85	8,94	1,60	
Sumatera Utara	7,08	92,92	12,88	57,09	18,25	4,70	
Sumatera Barat	18,34	81,66	17,55	56,77	5,76	1,57	
Riau	20,71	79,29	16,08	48,56	13,24	1,42	
Jambi	13,02	86,98	18,50	57,64	9,35	1,48	
Sumatera Selatan	9,67	90,33	12,14	66,79	10,16	1,24	
Bengkulu	6,85	93,15	18,93	61,36	11,42	1,44	
Lampung	10,22	89,78	14,67	62,65	10,71	1,75	
Kep. Bangka Belitung	18,11	81,89	27,03	51,97	2,62	0,26	
Kepulauan Riau	24,34	75,66	18,55	40,48	13,25	3,37	
DKI Jakarta	68,16	31,84	15,73	16,10	-	-	
Jawa Barat	13,64	86,36	19,51	60,10	6,12	0,64	
Jawa Tengah	8,80	91,20	22,72	65,76	2,48	0,23	
DI Yogyakarta	26,71	73,29	28,54	44,75	-	-	
Jawa Timur	11,16	88,84	29,08	56,87	2,59	0,31	
Banten	12,96	87,04	19,02	57,19	9,67	1,16	
Bali	20,11	79,89	32,12	47,77	-	-	
Nusa Tenggara Barat	13,67	86,33	25,77	52,23	6,31	2,02	
Nusa Tenggara Timur	9,48	90,52	10,70	45,47	27,52	6,82	
Kalimantan Barat	13,94	86,06	8,35	41,92	27,36	8,44	
Kalimantan Tengah	11,92	88,08	7,33	44,10	29,13	7,52	
Kalimantan Selatan	10,81	89,19	17,43	59,41	10,46	1,89	
Kalimantan Timur	17,54	82,46	14,91	37,72	23,29	6,53	
Kalimantan Utara	12,73	87,27	9,19	34,24	29,02	14,82	
Sulawesi Utara	9,15	90,85	25,22	54,85	8,99	1,80	
Sulawesi Tengah	13,95	86,05	17,62	49,09	13,85	5,49	
Sulawesi Selatan	11,88	88,12	20,86	51,68	11,91	3,66	
Sulawesi Tenggara	7,35	92,65	17,78	57,13	14,26	3,48	
Gorontalo	8,02	91,98	30,71	49,59	9,24	2,45	
Sulawesi Barat	9,10	90,90	14,51	41,05	25,15	10,19	
Maluku	11,49	88,51	10,85	36,03	30,15	11,49	
Maluku Utara	8,95	91,05	17,73	40,22	24,41	8,70	
Papua Barat	6,89	93,11	8,10	26,55	41,35	17,10	
Papua	5,75	94,25	5,07	19,83	32,89	36,46	
INDONESIA	10,60	89,40	17,72	53,60	13,10	4,98	

Sumber/Source: Statistik Podes 2014/Potential Village Statistics 2014



Tabel

2.4.15

Table

Percentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2018
The Percentage of Villages/Kelurahan by Existence of Police Stations and Easiness of Access to Police Stations by Province, 2018

Provinsi/ Province	Keberadaan Pos Polisi/Existence of Police Station		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)/ Access to Nearest Police Station (For Village/Kelurahan That Not Having Police Station)				
	Ada/ Available	Tidak/Not Available	Sangat Mudah/ Very Easy	Mudah/ Easy	Sulit/ Difficult	Sangat Sulit/ Very Difficult	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A c e h	5,42	94,58	15,27	77,48	6,48	0,76	
Sumatera Utara	7,84	92,16	10,99	64,22	21,50	3,29	
Sumatera Barat	17,73	82,27	24,69	69,49	5,05	0,76	
Riau	29,33	70,67	17,51	67,02	14,34	1,13	
Jambi	13,25	86,75	19,93	66,86	11,73	1,48	
Sumatera Selatan	11,68	88,32	11,11	74,11	13,57	1,21	
Bengkulu	8,59	91,41	21,60	66,33	10,91	1,16	
Lampung	10,55	89,45	16,93	71,52	10,28	1,26	
Kep. Bangka Belitung	23,27	76,73	37,33	61,00	1,67	0,00	
Kepulauan Riau	27,16	72,84	16,17	60,07	20,79	2,97	
DKI Jakarta	83,15	16,85	66,67	33,33	0,00	0,00	
Jawa Barat	15,28	84,72	21,50	72,64	5,83	0,04	
Jawa Tengah	10,87	89,13	26,14	72,24	1,57	0,05	
DI Yogyakarta	26,03	73,97	32,41	67,59	0,00	0,00	
Jawa Timur	13,27	86,73	30,53	67,05	2,28	0,14	
Banten	13,47	86,53	19,21	69,92	10,05	0,82	
Bali	19,55	80,45	40,97	59,03	0,00	0,00	
Nusa Tenggara Barat	15,40	84,60	24,92	68,15	5,48	1,45	
Nusa Tenggara Timur	9,75	90,25	8,26	57,30	31,36	3,07	
Kalimantan Barat	13,24	86,76	10,19	48,87	32,36	8,58	
Kalimantan Tengah	12,75	87,25	8,80	54,40	30,62	6,18	
Kalimantan Selatan	11,70	88,30	21,88	68,02	8,18	1,92	
Kalimantan Timur	19,56	80,44	16,05	51,74	30,30	1,92	
Kalimantan Utara	13,69	86,31	11,30	37,26	29,81	21,63	
Sulawesi Utara	9,47	90,53	26,74	65,02	7,57	0,66	
Sulawesi Tengah	14,50	85,50	18,30	62,94	15,34	3,42	
Sulawesi Selatan	12,50	87,50	24,74	61,02	11,96	2,29	
Sulawesi Tenggara	8,71	91,29	18,19	65,43	14,66	1,72	
Gorontalo	10,49	89,51	27,85	57,99	13,39	0,76	
Sulawesi Barat	9,54	90,46	14,63	50,85	25,85	8,67	
Maluku	10,89	89,11	10,41	44,62	31,67	13,30	
Maluku Utara	10,12	89,88	14,98	51,07	27,72	6,23	
Papua Barat	5,69	94,31	6,78	33,03	40,13	20,06	
Papua	4,38	95,62	3,86	24,92	36,92	34,30	
INDONESIA	11,63	88,37	18,23	62,52	14,50	4,74	

Sumber/Source: Statistik Podes 2018/Potential Village Statistics 2018



DATA SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL **NATIONAL SOCIO-ECONOMIC SURVEY DATA**



https://www.bps.go.id





Tabel 3.1.1 **Percentase Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang di Alami, 2018-2019**
Table 3.1.1 **The Percentage of Crime Victims by Type of Crime Experienced, 2018-2019**

Jenis Kejahatan/Type of Crime	2018	2019
(1)	(2)	(3)
1. Pencurian/Theft	84,48	85,35
2. Penganiayaan/Assault	4,05	3,08
3. Pencurian dengan kekerasan/Robbery	3,30	2,21
4. Pelecehan Seksual/Sexual Violence	2,03	1,25
5. Lainnya/Others	14,09	12,28
6. Mengalami lebih dari 1 jenis kejahatan/ <i>Experienced more than 1 type of crime</i>	7,95	4,17

Sumber/Source: Diolah dari Susenas 2019 dan 2020/Processed from Susenas 2019 and 2020

Tabel 3.1.2 **Percentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2018-2019**
Table **The Percentage of Crime Victims by Province, 2018-2019**

Provinsi/Province	2018	2019
(1)	(2)	(3)
A c e h	0,83	0,71
Sumatera Utara	1,21	1,18
Sumatera Barat	1,17	0,98
Riau	1,35	1,24
Jambi	1,05	0,83
Sumatera Selatan	1,26	1,35
Bengkulu	1,45	1,42
Lampung	1,58	1,42
Kep. Bangka Belitung	0,78	0,66
Kepulauan Riau	1,43	1,02
DKI Jakarta	1,33	1,15
Jawa Barat	1,18	1,15
Jawa Tengah	0,84	0,80
DI Yogyakarta	1,48	1,35
Jawa Timur	0,87	0,82
Banten	1,13	0,80
Bali	0,45	0,42
Nusa Tenggara Barat	1,94	1,63
Nusa Tenggara Timur	0,96	0,84
Kalimantan Barat	0,69	0,63
Kalimantan Tengah	0,83	0,80
Kalimantan Selatan	1,11	0,84
Kalimantan Timur	1,27	1,19
Kalimantan Utara	1,82	1,53
Sulawesi Utara	0,94	0,78
Sulawesi Tengah	1,52	1,22
Sulawesi Selatan	1,17	0,96
Sulawesi Tenggara	1,16	0,95
Gorontalo	1,04	0,83
Sulawesi Barat	0,86	0,74
Maluku	1,16	1,19
Maluku Utara	1,21	1,16
Papua Barat	2,02	1,66
Papua	1,65	1,36
INDONESIA	1,11	1,01

Sumber/Source: Diolah dari Susenas 2019 dan 2020/Processed from Susenas 2019 and 2020



Tabel 3.1.3 Karakteristik Penduduk Korban Kejahanan Menurut Jenis Kelamin, 2018-2019
Table 3.1.3 The Characteristics of Crime Victims by Sex, 2018-2019

Provinsi/Province	2018		2019	
	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	65,01	34,99	63,72	36,28
Sumatera Utara	66,11	33,89	63,66	36,34
Sumatera Barat	55,73	44,27	56,93	43,07
Riau	68,88	31,12	69,68	30,32
Jambi	66,08	33,92	62,16	37,84
Sumatera Selatan	70,19	29,81	63,75	36,25
Bengkulu	71,19	28,81	71,69	28,31
Lampung	73,37	26,63	69,36	30,64
Kep. Bangka Belitung	77,45	22,55	69,33	30,67
Kepulauan Riau	63,28	36,72	66,18	33,82
DKI Jakarta	61,84	38,16	66,70	33,30
Jawa Barat	62,01	37,99	64,97	35,03
Jawa Tengah	57,86	42,14	61,56	38,44
DI Yogyakarta	58,10	41,90	68,77	31,23
Jawa Timur	59,98	40,02	56,81	43,19
Banten	66,03	33,97	67,98	32,02
Bali	60,34	39,66	54,46	45,54
Nusa Tenggara Barat	65,77	34,23	62,50	37,50
Nusa Tenggara Timur	72,60	27,40	66,33	33,67
Kalimantan Barat	65,30	34,70	64,61	35,39
Kalimantan Tengah	66,50	33,50	63,98	36,02
Kalimantan Selatan	61,93	38,07	60,77	39,23
Kalimantan Timur	52,92	47,08	58,46	41,54
Kalimantan Utara	74,63	25,37	71,46	28,54
Sulawesi Utara	64,92	35,08	57,27	42,73
Sulawesi Tengah	66,93	33,07	72,24	27,76
Sulawesi Selatan	51,06	48,94	60,49	39,51
Sulawesi Tenggara	61,73	38,27	62,09	37,91
Gorontalo	60,33	39,67	60,56	39,44
Sulawesi Barat	67,03	32,97	66,36	33,64
Maluku	63,69	36,31	57,98	42,02
Maluku Utara	72,85	27,15	61,81	38,19
Papua Barat	64,74	35,26	62,69	37,31
Papua	67,62	32,38	64,69	35,31
INDONESIA	63,07	36,93	63,52	36,48

Sumber/Source: Diolah dari Susenas 2019 dan 2020/Processed from Susenas 2019 and 2020

Tabel 3.1.4 Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur, 2018-2019
Table 3.1.4 The Characteristics of Crime Victims by Age Group, 2018-2019

Provinsi/Province	2018		2019	
	Anak/Child	Dewasa/Adult	Anak/Child	Dewasa/Adult
	(1)	(2)	(4)	(5)
A c e h	8,01	91,99	7,47	92,53
Sumatera Utara	6,84	93,16	8,14	91,86
Sumatera Barat	8,21	91,79	7,85	92,15
Riau	7,15	92,85	5,48	94,52
Jambi	5,04	94,96	8,95	91,05
Sumatera Selatan	6,61	93,39	8,91	91,09
Bengkulu	7,62	92,38	3,69	96,31
Lampung	7,16	92,84	6,76	93,24
Kep. Bangka Belitung	1,75	98,25	2,93	97,07
Kepulauan Riau	9,74	90,26	5,87	94,13
DKI Jakarta	3,64	96,36	4,17	95,83
Jawa Barat	5,87	94,13	6,33	93,67
Jawa Tengah	6,18	93,82	5,56	94,44
DI Yogyakarta	5,41	94,59	1,72	98,28
Jawa Timur	5,56	94,44	7,97	92,03
Banten	9,50	90,50	10,82	89,18
Bali	1,50	98,50	5,24	94,76
Nusa Tenggara Barat	7,54	92,46	9,10	90,90
Nusa Tenggara Timur	3,46	96,54	3,11	96,89
Kalimantan Barat	7,13	92,87	11,96	88,04
Kalimantan Tengah	7,37	92,63	5,30	94,70
Kalimantan Selatan	8,95	91,05	8,31	91,69
Kalimantan Timur	3,89	96,11	4,21	95,79
Kalimantan Utara	3,79	96,21	1,82	98,18
Sulawesi Utara	5,60	94,40	11,05	88,95
Sulawesi Tengah	6,49	93,51	7,74	92,26
Sulawesi Selatan	9,27	90,73	5,35	94,65
Sulawesi Tenggara	4,25	95,75	4,89	95,11
Gorontalo	3,00	97,00	7,63	92,37
Sulawesi Barat	12,00	88,00	6,71	93,29
Maluku	10,06	89,94	8,58	91,42
Maluku Utara	8,25	91,75	10,82	89,18
Papua Barat	10,45	89,55	7,73	92,27
Papua	12,96	87,04	9,70	90,30
INDONESIA	6,57	93,43	6,86	93,14

Sumber/Source: Diolah dari Susenas 2019 dan 2020/Processed from Susenas 2019 and 2020



Tabel 3.1.5 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2018-2019
Table 3.1.5 The Percentage of Theft Victims by Province, 2018-2019

Provinsi/Province	2018	2019
(1)	(2)	(3)
A c e h	87,90	89,48
Sumatera Utara	86,78	91,05
Sumatera Barat	85,20	90,27
Riau	89,23	86,43
Jambi	88,44	88,14
Sumatera Selatan	90,26	89,08
Bengkulu	93,49	91,11
Lampung	89,95	89,92
Kep. Bangka Belitung	92,84	92,07
Kepulauan Riau	94,60	93,93
DKI Jakarta	88,95	79,88
Jawa Barat	87,25	86,64
Jawa Tengah	76,64	80,01
DI Yogyakarta	62,14	69,03
Jawa Timur	76,48	76,81
Banten	88,13	87,20
Bali	76,29	90,98
Nusa Tenggara Barat	87,91	91,81
Nusa Tenggara Timur	81,36	84,66
Kalimantan Barat	83,84	81,80
Kalimantan Tengah	86,28	86,38
Kalimantan Selatan	79,50	86,35
Kalimantan Timur	79,06	84,46
Kalimantan Utara	94,11	94,50
Sulawesi Utara	84,93	87,83
Sulawesi Tengah	87,49	89,79
Sulawesi Selatan	89,08	91,40
Sulawesi Tenggara	91,13	92,26
Gorontalo	89,23	95,44
Sulawesi Barat	82,95	91,62
Maluku	82,14	90,80
Maluku Utara	92,32	87,80
Papua Barat	83,40	78,96
Papua	79,97	87,79
INDONESIA	84,48	85,35

Sumber/Source: Diolah dari Susenas 2019 dan 2020/Processed from Susenas 2019 and 2020

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

*) Percentage of population victims of crime, not to the total population

Tabel 3.1.6 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Penganiayaan Menurut Provinsi, 2018-2019
Table 3.1.6 The Percentage of Assault Victims by Province, 2018-2019

Provinsi/Province	2018	2019
(1)	(2)	(3)
A c e h	4,25	3,59
Sumatera Utara	3,75	0,72
Sumatera Barat	7,29	5,08
Riau	6,23	1,24
Jambi	2,80	1,39
Sumatera Selatan	5,16	3,63
Bengkulu	2,96	5,48
Lampung	1,45	2,55
Kep. Bangka Belitung	7,28	1,50
Kepulauan Riau	3,95	2,04
DKI Jakarta	5,32	3,72
Jawa Barat	2,58	2,83
Jawa Tengah	3,20	2,61
DI Yogyakarta	8,45	2,81
Jawa Timur	3,75	3,73
Banten	3,82	2,90
Bali	11,38	2,19
Nusa Tenggara Barat	2,59	2,90
Nusa Tenggara Timur	11,20	6,05
Kalimantan Barat	2,02	1,37
Kalimantan Tengah	3,21	3,83
Kalimantan Selatan	3,09	2,52
Kalimantan Timur	3,46	3,12
Kalimantan Utara	0,67	0,44
Sulawesi Utara	8,69	6,72
Sulawesi Tengah	5,89	4,80
Sulawesi Selatan	4,20	2,59
Sulawesi Tenggara	3,39	3,70
Gorontalo	4,32	3,94
Sulawesi Barat	4,48	0,66
Maluku	11,24	4,04
Maluku Utara	2,56	7,40
Papua Barat	6,45	9,03
Papua	7,00	7,17
INDONESIA	4,05	3,08

Sumber/Source: Diolah dari Susenas 2019 dan 2020/Processed from Susenas 2019 and 2020

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

*) Percentage of population victims of crime, not to the total population



Tabel

3.1.7

Percentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Menurut Provinsi, 2018-2019
The Percentage of Robbery Victims by Province, 2018-2019

Provinsi/Province	2018 (1)	2019 (2)	2019 (3)
Aceh	1,08	1,98	
Sumatera Utara	5,88	1,90	
Sumatera Barat	2,10	2,55	
Riau	2,86	0,90	
Jambi	6,79	5,66	
Sumatera Selatan	6,96	4,27	
Bengkulu	3,64	2,41	
Lampung	4,57	4,17	
Kep. Bangka Belitung	0,86	0,36	
Kepulauan Riau	2,09	2,17	
DKI Jakarta	5,10	4,25	
Jawa Barat	3,04	2,47	
Jawa Tengah	1,61	1,53	
DI Yogyakarta	0,88	0,94	
Jawa Timur	2,84	1,84	
Banten	4,12	1,48	
Bali	-	0,32	
Nusa Tenggara Barat	1,56	1,74	
Nusa Tenggara Timur	2,14	0,87	
Kalimantan Barat	3,73	2,85	
Kalimantan Tengah	0,39	3,18	
Kalimantan Selatan	6,17	0,80	
Kalimantan Timur	2,19	1,95	
Kalimantan Utara	-	0,67	
Sulawesi Utara	1,02	0,85	
Sulawesi Tengah	2,14	0,83	
Sulawesi Selatan	4,47	1,35	
Sulawesi Tenggara	1,34	0,25	
Gorontalo	0,64	-	
Sulawesi Barat	1,79	-	
Maluku	1,92	2,37	
Maluku Utara	0,59	-	
Papua Barat	4,86	7,03	
Papua	5,75	2,56	
INDONESIA	3,30	2,21	

Sumber/Source: Diolah dari Susenas 2019 dan 2020/Processed from Susenas 2019 and 2020

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

*) Percentage of population victims of crime, not to the total population

Tabel

3.1.8
Table

Percentase Penduduk Korban Kejahatan Pelecehan Seksual dengan Kekerasan Menurut Provinsi, 2018-2019

The Percentage of Sexual Harassment with Violence Victims by Province, 2018-2019

Provinsi/Province	2018	2019
(1)	(2)	(3)
A c e h	0,67	0,99
Sumatera Utara	3,09	0,43
Sumatera Barat	2,32	0,59
Riau	1,47	0,61
Jambi	2,19	1,45
Sumatera Selatan	2,28	0,57
Bengkulu	1,90	1,87
Lampung	0,61	0,54
Kep. Bangka Belitung	0,43	2,23
Kepulauan Riau	2,46	-
DKI Jakarta	4,73	1,64
Jawa Barat	2,00	0,91
Jawa Tengah	1,30	0,81
DI Yogyakarta	2,95	3,10
Jawa Timur	3,17	3,84
Banten	2,83	1,08
Bali	1,71	2,65
Nusa Tenggara Barat	0,14	0,57
Nusa Tenggara Timur	1,85	1,82
Kalimantan Barat	0,81	0,35
Kalimantan Tengah	-	3,47
Kalimantan Selatan	0,44	1,03
Kalimantan Timur	0,81	0,70
Kalimantan Utara	0,05	-
Sulawesi Utara	3,73	0,84
Sulawesi Tengah	1,94	0,61
Sulawesi Selatan	0,92	0,52
Sulawesi Tenggara	1,38	0,27
Gorontalo	1,31	0,66
Sulawesi Barat	-	-
Maluku	2,25	0,04
Maluku Utara	1,42	1,44
Papua Barat	1,69	1,22
Papua	1,34	0,45
INDONESIA	2,03	1,25

Sumber/Source: Diolah dari Susenas 2019 dan 2020/*Processed from Susenas 2019 and 2020*

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

*) *Percentage of population victims of crime, not to the total population*



Tabel 3.1.9 **Percentase Penduduk Korban Kejahatan Lainnya Menurut Provinsi, 2018-2019**
Table **The Percentage of Victims of Other Crimes by Province, 2018-2019**

Provinsi/Province	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Aceh	8,09	7,07
Sumatera Utara	10,83	7,39
Sumatera Barat	11,13	6,50
Riau	9,69	12,38
Jambi	9,60	7,30
Sumatera Selatan	8,26	4,30
Bengkulu	8,24	11,18
Lampung	7,08	7,13
Kep. Bangka Belitung	3,34	6,58
Kepulauan Riau	13,26	10,24
DKI Jakarta	17,75	14,95
Jawa Barat	12,53	12,93
Jawa Tengah	22,22	16,74
DI Yogyakarta	31,10	27,20
Jawa Timur	22,64	19,13
Banten	13,90	10,27
Bali	19,48	7,93
Nusa Tenggara Barat	10,27	8,35
Nusa Tenggara Timur	10,06	8,19
Kalimantan Barat	15,68	16,78
Kalimantan Tengah	13,33	11,42
Kalimantan Selatan	13,10	15,87
Kalimantan Timur	17,34	16,19
Kalimantan Utara	6,14	5,44
Sulawesi Utara	9,05	12,95
Sulawesi Tengah	8,63	5,38
Sulawesi Selatan	5,62	8,31
Sulawesi Tenggara	5,47	6,18
Gorontalo	7,07	5,71
Sulawesi Barat	12,68	11,58
Maluku	5,90	3,88
Maluku Utara	8,49	10,02
Papua Barat	8,62	6,65
Papua	14,69	7,88
INDONESIA	14,09	12,28

Sumber/Source: Diolah dari Susenas 2019 dan 2020/Processed from Susenas 2019 and 2020

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

*) Percentage of population victims of crime, not to the total population

Tabel 3.1.10 **Percentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2018-2019**
Table 3.1.10 **The Percentage of Population of Crime Victims Reporting to the Police by Province, 2018-2019**

Provinsi/Province	2018	2019
(1)	(2)	(3)
A c e h	19,39	17,27
Sumatera Utara	27,87	19,56
Sumatera Barat	24,79	23,15
Riau	22,74	15,15
Jambi	21,44	24,38
Sumatera Selatan	25,59	25,41
Bengkulu	16,70	20,39
Lampung	21,07	24,49
Kep. Bangka Belitung	30,96	18,99
Kepulauan Riau	27,23	26,30
DKI Jakarta	35,93	31,00
Jawa Barat	24,94	28,41
Jawa Tengah	19,84	16,76
DI Yogyakarta	14,53	16,85
Jawa Timur	23,46	20,53
Banten	28,66	22,07
Bali	25,46	10,06
Nusa Tenggara Barat	19,39	10,98
Nusa Tenggara Timur	20,07	15,63
Kalimantan Barat	29,57	22,94
Kalimantan Tengah	16,55	20,01
Kalimantan Selatan	20,01	13,57
Kalimantan Timur	28,13	18,10
Kalimantan Utara	22,36	10,38
Sulawesi Utara	26,41	27,36
Sulawesi Tengah	18,07	22,93
Sulawesi Selatan	26,00	24,94
Sulawesi Tenggara	19,89	25,15
Gorontalo	13,26	12,41
Sulawesi Barat	10,95	22,17
Maluku	20,93	19,09
Maluku Utara	13,78	15,70
Papua Barat	32,77	37,43
Papua	21,15	19,71
INDONESIA	23,92	22,19

Sumber/Source: Diolah dari Susenas 2019 dan 2020/Processed from Susenas 2019 and 2020

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

*) Percentage of population victims of crime, not to the total population



Tabel

3.1.11

Table

**Percentase Penduduk yang Pernah Melapor dan Mendapatkan/
Ditemani Bantuan Hukum Menurut Provinsi, 2019**
**Percentage of Population Who Had Reported and Received/
Accompanied by Legal Aid by Province, 2019**

Provinsi/Province	2019	
	(1)	(2)
A c e h		42,99
Sumatera Utara		26,49
Sumatera Barat		24,17
Riau		27,92
Jambi		25,49
Sumatera Selatan		14,89
Bengkulu		13,84
Lampung		24,26
Kep. Bangka Belitung		44,43
Kepulauan Riau		1,85
DKI Jakarta		11,93
Jawa Barat		18,56
Jawa Tengah		16,03
DI Yogyakarta		13,44
Jawa Timur		20,54
Banten		27,96
Bali		29,46
Nusa Tenggara Barat		24,82
Nusa Tenggara Timur		28,26
Kalimantan Barat		28,35
Kalimantan Tengah		22,71
Kalimantan Selatan		31,42
Kalimantan Timur		25,37
Kalimantan Utara		31,52
Sulawesi Utara		24,29
Sulawesi Tengah		31,78
Sulawesi Selatan		36,69
Sulawesi Tenggara		16,98
Gorontalo		54,74
Sulawesi Barat		56,56
Maluku		26,46
Maluku Utara		35,51
Papua Barat		14,84
Papua		27,42
INDONESIA		21,46

Sumber/Source: Diolah dari Susenas 2020/Processed from Susenas 2020

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

*) Percentage of population victims of crime, not to the total population

Tabel

3.1.12
Table

Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melapor ke Polisi Menurut Jenis Kejahatan dan Provinsi, 2019

The Percentage of the Population Victims of Crime Reporting to the Police by Type of Crime and Province, 2019

Provinsi/ Province	Pencurian/ Theft	Penganiayaan /Assault	Pencurian dengan Kekerasan /Robbery	Pelecehan Seksual / Sexual Violence	Lainnya /Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A c e h	12,30	2,93	0,35	-	1,82
Sumatera Utara	16,92	0,55	0,54	0,25	1,78
Sumatera Barat	20,57	0,85	0,92	0,52	1,39
Riau	13,56	-	0,38	-	1,22
Jambi	18,09	0,44	1,88	-	4,24
Sumatera Selatan	21,34	1,72	1,85	0,22	1,04
Bengkulu	17,38	2,42	2,41	1,87	6,12
Lampung	19,10	1,31	2,91	0,54	2,63
Kep. Bangka Belitung	16,87	0,95	-	0,69	0,48
Kepulauan Riau	24,72	2,04	2,17	-	3,36
DKI Jakarta	28,30	0,02	1,40	0,01	2,77
Jawa Barat	24,44	0,81	2,01	0,37	3,42
Jawa Tengah	13,26	0,55	0,62	0,07	2,60
DI Yogyakarta	8,05	1,06	-	-	8,30
Jawa Timur	15,64	1,20	0,90	0,63	4,67
Banten	18,04	2,36	0,41	1,08	2,05
Bali	8,54	-	0,32	2,65	1,20
Nusa Tenggara Barat	8,29	1,07	0,40	-	1,22
Nusa Tenggara Timur	8,16	2,91	0,53	0,78	3,99
Kalimantan Barat	13,92	0,73	1,89	0,35	6,46
Kalimantan Tengah	17,06	2,45	1,86	2,98	1,99
Kalimantan Selatan	10,32	0,52	0,80	1,03	2,75
Kalimantan Timur	15,70	0,42	-	0,13	3,58
Kalimantan Utara	9,25	0,21	0,67	-	0,86
Sulawesi Utara	15,81	4,56	0,85	0,51	6,73
Sulawesi Tengah	18,30	2,87	0,28	0,34	1,33
Sulawesi Selatan	19,68	1,00	-	0,07	4,49
Sulawesi Tenggara	22,28	1,94	0,20	0,22	0,85
Gorontalo	8,79	0,61	-	0,66	3,21
Sulawesi Barat	19,78	-	-	-	4,92
Maluku	13,49	3,10	0,39	0,04	2,29
Maluku Utara	10,21	3,59	-	1,14	1,39
Papua Barat	24,03	6,53	3,52	0,07	3,78
Papua	14,64	2,63	0,50	0,09	2,77
INDONESIA	18,05	1,14	1,13	0,38	3,06

Sumber/Source: Diolah dari Susenas 2020/Processed from Susenas 2020

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

*) Percentage of population victims of crime, not to the total population



https://www.bps.go.id

DATA MODUL KETAHANAN SOSIAL

SOCIAL RESILIENCE MODULE DATA

https://www.bps.go.id



**Tabel****4.1.1****Table**

Percentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2017
The Percentage of Households that Feel Safe Walk Alone in Their Neighborhood by Province, 2017

Provinsi/Province	2017
(1)	(2)
Aceh	50,93
Sumatera Utara	50,62
Sumatera Barat	43,32
Riau	51,15
Jambi	54,90
Sumatera Selatan	52,35
Bengkulu	66,47
Lampung	58,75
Kep. Bangka Belitung	47,80
Kepulauan Riau	71,43
DKI Jakarta	50,57
Jawa Barat	43,72
Jawa Tengah	63,50
DI Yogyakarta	64,62
Jawa Timur	58,18
Banten	42,24
Bali	73,43
Nusa Tenggara Barat	52,71
Nusa Tenggara Timur	46,47
Kalimantan Barat	54,74
Kalimantan Tengah	46,04
Kalimantan Selatan	59,02
Kalimantan Timur	55,42
Kalimantan Utara	56,58
Sulawesi Utara	52,05
Sulawesi Tengah	50,43
Sulawesi Selatan	48,28
Sulawesi Tenggara	58,24
Gorontalo	34,28
Sulawesi Barat	66,10
Maluku	55,08
Maluku Utara	58,92
Papua Barat	46,95
Papua	58,69
INDONESIA	53,32

Sumber/Souce: Diolah dari Modul Ketahanan Sosial, 2017/Processed from Social Resilience Module, 2017

Tabel 4.1.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kekhawatiran Ketika Melakukan Perjalanan dari dan Menuju Tempat Kerja/Aktivitas Menurut Provinsi, 2017
Table 4.1.2 *The Percentage of Households by Concern When Travelling to and from Workplace/Place of Activity by Province, 2017*

Provinsi/Province	Khawatir/Worry	Tidak Khawatir/Not Worry
(1)	(2)	(3)
Ac e h	19,12	80,88
Sumatera Utara	23,66	76,34
Sumatera Barat	22,37	77,63
Riau	18,25	81,75
Jambi	24,43	75,57
Sumatera Selatan	25,23	74,77
Bengkulu	13,89	86,11
Lampung	24,14	75,86
Kep. Bangka Belitung	31,57	68,43
Kepulauan Riau	19,95	80,05
DKI Jakarta	34,36	65,64
Jawa Barat	29,88	70,12
Jawa Tengah	16,16	83,84
DI Yogyakarta	16,58	83,42
Jawa Timur	18,66	81,34
Banten	37,64	62,36
Bali	10,24	89,76
Nusa Tenggara Barat	18,96	81,04
Nusa Tenggara Timur	23,64	76,36
Kalimantan Barat	19,16	80,84
Kalimantan Tengah	26,13	73,87
Kalimantan Selatan	10,69	89,31
Kalimantan Timur	23,15	76,85
Kalimantan Utara	17,84	82,16
Sulawesi Utara	28,68	71,32
Sulawesi Tengah	28,88	71,12
Sulawesi Selatan	30,30	69,70
Sulawesi Tenggara	25,02	74,98
Gorontalo	36,61	63,39
Sulawesi Barat	16,24	83,76
Maluku	25,29	74,71
Maluku Utara	22,72	77,28
Papua Barat	31,89	68,11
Papua	15,51	84,49
INDONESIA	23,45	76,55

Sumber/Source: Diolah dari Modul Ketahanan Sosial, 2017/Processed from Social Resilience Module, 2017



Tabel

4.1.3

Table

Percentase Rumah Tangga Menurut Kekhawatiran Ketika Meninggalkan Rumah dalam Keadaan Tidak Berpenghuni Menurut Provinsi, 2017
The Percentage of Households by Concerns When Leaving Their Homes Uninhabited by Province, 2017

Provinsi/Province (1)	Khawatir/ Worry (2)	Tidak Khawatir/ Not Worry (3)
A c e h	64,21	35,79
Sumatera Utara	63,12	36,88
Sumatera Barat	56,52	43,48
Riau	59,33	40,67
Jambi	67,79	32,21
Sumatera Selatan	64,94	35,06
Bengkulu	53,44	46,56
Lampung	65,83	34,17
Kep. Bangka Belitung	61,39	38,61
Kepulauan Riau	43,04	56,96
DKI Jakarta	69,89	30,11
Jawa Barat	65,41	34,59
Jawa Tengah	50,89	49,11
DI Yogyakarta	39,88	60,12
Jawa Timur	54,06	45,94
Banten	65,82	34,18
Bali	33,74	66,26
Nusa Tenggara Barat	49,94	50,06
Nusa Tenggara Timur	64,21	35,79
Kalimantan Barat	61,03	38,97
Kalimantan Tengah	64,31	35,69
Kalimantan Selatan	48,81	51,19
Kalimantan Timur	59,59	40,41
Kalimantan Utara	48,28	51,72
Sulawesi Utara	61,47	38,53
Sulawesi Tengah	64,26	35,74
Sulawesi Selatan	61,77	38,23
Sulawesi Tenggara	61,91	38,09
Gorontalo	79,47	20,53
Sulawesi Barat	53,42	46,58
Maluku	50,73	49,27
Maluku Utara	54,14	45,86
Papua Barat	58,76	41,24
Papua	47,18	52,82
INDONESIA	58,85	41,15

Sumber/Source: Ditolah dari Modul Ketahanan Sosial, 2017/Processed from Social Resilience Module, 2017

Tabel

4.1.4
Table

Percentase Rumah Tangga Menurut Jenis Pengamanan yang Digunakan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal, 2017

The Percentage of Households by Type of Security Used in the Neighborhood, 2017

Provinsi/Province	Portal/Portal	Penerangan Jalan/Street Lightning	Hansip/Satpam/Security Officer
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	1,76	69,98	2,47
Sumatera Utara	6,97	63,32	5,54
Sumatera Barat	2,85	48,62	1,84
Riau	10,28	58,00	6,08
Jambi	4,86	48,60	3,81
Sumatera Selatan	5,79	55,18	14,56
Bengkulu	3,84	31,38	14,76
Lampung	3,90	62,21	19,10
Kep. Bangka Belitung	1,73	39,69	5,33
Kepulauan Riau	28,01	60,49	28,72
DKI Jakarta	42,64	86,42	61,16
Jawa Barat	12,70	66,67	30,81
Jawa Tengah	4,84	83,69	8,57
DI Yogyakarta	10,93	93,84	3,76
Jawa Timur	7,47	81,83	9,77
Banten	11,30	68,59	20,38
Bali	1,01	69,44	5,32
Nusa Tenggara Barat	2,13	50,12	2,49
Nusa Tenggara Timur	0,22	11,84	3,78
Kalimantan Barat	3,46	41,28	1,00
Kalimantan Tengah	5,75	43,60	8,52
Kalimantan Selatan	3,33	61,80	4,59
Kalimantan Timur	8,41	62,10	11,17
Kalimantan Utara	1,73	47,55	1,47
Sulawesi Utara	6,85	66,13	20,97
Sulawesi Tengah	0,70	42,12	11,26
Sulawesi Selatan	6,50	53,16	5,98
Sulawesi Tenggara	0,40	22,28	1,51
Gorontalo	0,72	47,81	0,39
Sulawesi Barat	0,34	27,77	2,94
Maluku	1,20	40,77	3,19
Maluku Utara	0,57	46,72	4,62
Papua Barat	0,69	34,10	5,00
Papua	0,70	21,66	5,77
INDONESIA	8,67	66,62	15,26

Sumber/Source: Diolah dari Modul Ketahanan Sosial, 2017/Processed from Social Resilience Module, 2017



Tabel

4.1.4
Table

Percentase Rumah Tangga Menurut Jenis Pengamanan yang Digunakan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal, 2017

The Percentage of Households by Type of Security Used in the Neighborhood, 2017 (continuation)

Provinsi/ Province	Penerapan Wajib Lapor Bagi Pendatang/ Implementation of Mandatory Reporting for Newcomers	Siskamling/ Ronda/ Neighborhood Patrol	Sarana/Tata Cara Lainnya/ Others
	(1)	(2)	(3)
A c e h	64,11	7,99	0,26
Sumatera Utara	38,15	18,44	0,30
Sumatera Barat	35,90	16,57	0,08
Riau	61,79	24,43	0,06
Jambi	61,43	33,37	0,00
Sumatera Selatan	54,34	34,70	0,49
Bengkulu	59,37	21,82	0,00
Lampung	73,62	67,80	0,05
Kep. Bangka Belitung	73,05	15,58	0,12
Kepulauan Riau	81,59	18,73	0,11
DKI Jakarta	90,79	52,99	0,33
Jawa Barat	75,58	61,99	0,78
Jawa Tengah	74,37	36,95	0,27
DI Yogyakarta	83,04	79,14	3,04
Jawa Timur	67,01	23,67	0,38
Banten	66,12	54,21	0,81
Bali	55,24	7,75	0,09
Nusa Tenggara Barat	21,95	18,63	0,05
Nusa Tenggara Timur	23,11	1,55	0,99
Kalimantan Barat	42,04	8,77	0,65
Kalimantan Tengah	59,87	12,22	0,47
Kalimantan Selatan	64,65	17,63	0,22
Kalimantan Timur	85,93	34,73	0,22
Kalimantan Utara	82,44	10,56	0,00
Sulawesi Utara	76,97	27,28	2,48
Sulawesi Tengah	32,22	11,54	0,08
Sulawesi Selatan	20,04	11,31	0,33
Sulawesi Tenggara	21,78	4,83	0,57
Gorontalo	36,13	0,42	0,01
Sulawesi Barat	13,24	14,99	0,00
Maluku	17,03	2,78	0,12
Maluku Utara	25,70	2,95	0,08
Papua Barat	16,75	6,88	0,00
Papua	7,72	10,34	1,16
INDONESIA	62,67	35,16	0,48

Sumber/Source: Dolah dari Modul Ketahanan Sosial, 2017/Processed from Social Resilience Module, 2017

Tabel

4.1.5
Table

Percentase Rumah Tangga Menurut Jenis Pengamanan yang Digunakan di Tempat Tinggal/Rumah, 2017

The Percentage of Households by Type of Security Used in Residence/ House, 2017

Provinsi/ Province	Gembok/ Kunci/ Palang intu yang Berlapis/ Padlocks/ Locks/ Latches	Teralis Pintu/ Jendela/ Door / Window Trellis	Pagar yang Tinggi (minimal 2 Meter) / High fence (minimum 2 meters)	Kawat berduri/Paku/ Pecahan Kaca di Atas Pagar/ Barbed wire / nails / broken glass over the fence
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	51,96	20,33	3,81	1,29
Sumatera Utara	72,93	44,85	4,86	1,21
Sumatera Barat	61,30	25,35	4,97	0,89
Riau	80,87	36,18	6,32	1,32
Jambi	81,99	29,40	5,40	1,08
Sumatera Selatan	80,52	35,50	6,83	1,14
Bengkulu	69,47	30,81	4,78	1,98
Lampung	74,04	28,50	7,39	0,77
Kep. Bangka Belitung	65,38	29,18	6,11	1,53
Kepulauan Riau	77,50	40,07	9,53	0,61
DKI Jakarta	63,82	29,03	14,16	1,97
Jawa Barat	62,60	17,33	8,76	0,48
Jawa Tengah	56,13	12,19	4,51	0,40
DI Yogyakarta	58,20	21,32	7,01	0,43
Jawa Timur	59,54	15,65	8,01	0,82
Banten	57,63	22,77	6,03	0,54
Bali	12,06	12,07	20,29	0,64
Nusa Tenggara Barat	47,03	21,99	6,30	1,79
Nusa Tenggara Timur	38,33	10,39	3,74	0,41
Kalimantan Barat	56,54	14,38	2,96	0,21
Kalimantan Tengah	85,85	18,87	3,86	0,53
Kalimantan Selatan	61,34	14,25	2,90	0,46
Kalimantan Timur	81,65	32,36	8,44	0,99
Kalimantan Utara	71,46	20,99	3,39	0,00
Sulawesi Utara	55,89	19,10	9,60	0,56
Sulawesi Tengah	59,43	22,50	8,57	0,96
Sulawesi Selatan	60,23	27,35	12,10	2,15
Sulawesi Tenggara	46,35	17,38	3,87	0,94
Gorontalo	38,61	22,26	6,53	1,86
Sulawesi Barat	68,43	15,95	3,13	0,54
Maluku	37,85	10,52	0,88	0,26
Maluku Utara	48,37	13,99	4,06	0,66
Papua Barat	52,31	14,26	6,99	2,23
Papua	53,94	17,00	10,96	1,27
INDONESIA	61,21	20,92	7,32	0,83

Sumber/Source: Diolah dari Modul Ketahanan Sosial, 2017/Processed from Social Resilience Module, 2017



Tabel

4.1.5

Table

Percentase Rumah Tangga Menurut Jenis Pengamanan yang

Digunakan di Tempat Tinggal/Rumah, 2017 (lanjutan)

The Percentage of Households by Type of Security Used in Residence/House, 2017 (continuation)

Provinsi/ Province	Alarm/Alarm	Kamera CCTV/ CCTV Camera	Hewan Penjaga (Anjing/ Angsa)/Guard Animals (Dogs / Geese)	Petugas Keamanan/ Security Officer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,02	0,27	1,08	0,06
Sumatera Utara	0,46	1,29	5,79	1,27
Sumatera Barat	0,11	0,16	6,89	0,29
Riau	0,29	0,93	3,11	0,55
Jambi	0,05	0,57	2,76	0,42
Sumatera Selatan	0,15	0,88	4,58	1,02
Bengkulu	1,26	0,46	5,20	1,98
Lampung	0,07	0,32	1,20	1,25
Kep. Bangka Belitung	0,15	0,59	4,60	0,32
Kepulauan Riau	1,61	4,03	2,32	14,83
DKI Jakarta	1,54	3,27	2,41	3,96
Jawa Barat	0,52	0,61	0,57	0,16
Jawa Tengah	0,09	0,45	0,59	0,64
DI Yogyakarta	0,00	0,96	2,01	0,58
Jawa Timur	0,26	0,39	0,75	0,58
Banten	0,34	0,86	0,53	5,57
Bali	0,21	0,68	31,79	0,53
Nusa Tenggara Barat	0,09	0,04	3,32	0,89
Nusa Tenggara Timur	0,03	0,43	29,23	0,12
Kalimantan Barat	0,22	0,80	7,27	0,18
Kalimantan Tengah	0,04	0,23	4,56	0,00
Kalimantan Selatan	0,20	0,88	1,40	0,87
Kalimantan Timur	0,14	2,10	2,25	2,20
Kalimantan Utara	0,00	0,40	6,02	0,22
Sulawesi Utara	0,04	0,39	21,33	0,69
Sulawesi Tengah	0,00	0,33	10,15	0,63
Sulawesi Selatan	1,26	1,96	9,89	1,81
Sulawesi Tenggara	0,07	0,35	2,85	0,14
Gorontalo	0,00	0,30	6,34	0,21
Sulawesi Barat	0,00	0,18	7,05	1,60
Maluku	0,02	0,02	7,98	0,09
Maluku Utara	0,08	0,16	4,98	0,00
Papua Barat	0,18	0,71	17,09	0,12
Papua	0,12	0,38	23,97	0,65
INDONESIA	0,35	0,76	3,67	1,09

Sumber/Source: Diolah dari Modul Ketahanan Sosial, 2017/Processed from Social Resilience Module, 2017

RELATIVE STANDARD ERROR





https://www.bps.go.id

Penghitungan Sampling Error

Calculation of Sampling Error

Nilai-nilai indikator yang diestimasi dari hasil Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 dipengaruhi oleh dua jenis kesalahan (*error*), yaitu *non-sampling error* dan *sampling error*. Non-sampling error adalah kesalahan yang terjadi ketika proses pengumpulan maupun pengolahan data. Misalnya, kesalahan dalam menginterpretasikan pertanyaan-pertanyaan di kuesioner maupun kesalahan dalam melakukan input data.

Sampling error adalah kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknik sampling tertentu dalam suatu survei. Secara statistik, besarnya *sampling error* hasil Susenas 2020 ditunjukkan oleh nilai galat baku (*standard error*) dari suatu ukuran statistik (rata-rata, persentase, atau jumlah). Untuk mengukur presisi suatu indikator digunakan nilai *Relative Standard Error* (RSE). RSE adalah perbandingan nilai *standard error* terhadap estimasi indikatornya yang dinyatakan dalam persen. *Standard error* juga digunakan untuk menghitung besaran selang kepercayaan (*confident interval*), yaitu interval nilai yang dapat menggambarkan populasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan dengan batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua *standard error* dan batas atas sebesar nilai estimasi ditambah dua *standard error*. Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan menunjukkan nilai indikator yang semakin baik.

The indicator values estimated from the results of the National Socio-Economic Survey (Susenas) 2020 are influenced by two types of errors: non-sampling error and sampling error. Non-sampling error is an error that occurs during the process of collecting and processing data, for example, errors in interpreting the questions in the questionnaire and errors in inputting data.

Sampling errors are errors that occur as a result of using certain sampling techniques in a survey. Statistically, the magnitude of the sampling error of the 2020 Susenas results is indicated by the standard error value of a statistical measure (average, percentage, or amount). To measure the precision of an indicator, the Relative Standard Error (RSE) value is used. RSE is a comparison of the standard error value against the indicator estimate expressed in percent. The standard error is also used to calculate the confidence interval, which is an interval of values that can describe the population. With a confidence level of 95 percent, a confidence interval can be presented with a lower limit calculated as the estimated value minus two standard errors and an upper limit calculated as the estimated value plus two standard errors. The lower the RSE value or the shorter the confidence interval, the better the indicator value.



Menurut Aryago Mulia, dkk (2008), kualitas hasil estimasi suatu survei bisa diamati dari RSE yang dihasilkan. Kesalahan *sampling* dari beberapa estimasi harus digunakan secara hati-hati. Estimasi yang didasarkan pada jumlah kasus yang kecil memiliki kesalahan relatif yang sangat besar. Secara umum, besaran SE meningkat seiring dengan meningkatnya besaran estimasi. Sebaliknya, RSE menurun jika ukuran estimasi tersebut meningkat. Estimasi yang sangat kecil dengan demikian akan menghasilkan RSE yang tinggi sehingga nilainya menjadi tidak akurat.

Nilai estimasi dengan $RSE \leq 25$ persen dianggap akurat, sedangkan nilai estimasi dengan $RSE > 25$ persen tetapi ≤ 50 persen perlu hati-hati jika ingin digunakan. Estimasi dengan $RSE > 50$ persen dianggap sangat tidak akurat dan seharusnya digabungkan dengan estimasi yang lain untuk memberikan estimasi dengan $RSE \leq 25$ persen.

Penghitungan tingkat sampling error untuk indikator-indikator yang disajikan dalam publikasi Statistik Kriminal 2020 menggunakan *software* SPSS 23. Tidak semua variabel hasil pendataan dihitung RSE-nya. Hanya beberapa variabel penting saja yang dihitung.

According to Aryago Mulia, et al (2008), the quality of the estimation of a survey can be observed from the RSE. The sampling error of several estimations should be used with caution. Estimations based on a small number of cases have very large relative errors. In general, the SE magnitude increases as the estimated size increases. On the contrary, the RSE decreases as the size of the estimation increases. Thus, a very small estimation will result in a high RSE so that the value is inaccurate.

The estimated value with RSE ≤ 25 percent is considered accurate, while the estimated value with $RSE > 25$ percent but ≤ 50 percent needs caution for its use. Estimation with an $RSE > 50$ percent is considered highly inaccurate and should be combined with other estimation to provide estimation with $RSE \leq 25$ percent.

The calculation of the sampling error for the indicators presented in the 2020 Crime Statistics publication uses the SPSS 23 software. Not all variables have the RSE calculated. Only a few important variables are estimated.

Tabel

5.1.

Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2019

Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Crime by Province, 2019

Laki-Laki/Male

Provinsi/ Province	Nilai Estimasi/ Estimated Value	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
			(1)
A c e h	0,91	0,08	8,33
Sumatera Utara	1,50	0,09	6,27
Sumatera Barat	1,12	0,10	9,12
Riau	1,68	0,13	7,62
Jambi	1,02	0,10	9,88
Sumatera Selatan	1,70	0,12	6,95
Bengkulu	1,99	0,17	8,45
Lampung	1,92	0,13	7,02
Kep. Bangka Belitung	0,88	0,12	13,92
Kepulauan Riau	1,33	0,25	19,00
DKI Jakarta	1,54	0,16	10,09
Jawa Barat	1,48	0,08	5,18
Jawa Tengah	1,00	0,05	5,40
DI Yogyakarta	1,87	0,23	12,17
Jawa Timur	0,94	0,05	5,80
Banten	1,07	0,11	10,17
Bali	0,45	0,08	17,00
Nusa Tenggara Barat	2,10	0,16	7,63
Nusa Tenggara Timur	1,13	0,09	7,66
Kalimantan Barat	0,80	0,09	11,61
Kalimantan Tengah	0,98	0,12	12,00
Kalimantan Selatan	1,01	0,11	10,85
Kalimantan Timur	1,33	0,15	11,36
Kalimantan Utara	2,06	0,29	13,91
Sulawesi Utara	0,87	0,10	11,97
Sulawesi Tengah	1,72	0,15	8,46
Sulawesi Selatan	1,18	0,09	7,87
Sulawesi Tenggara	1,17	0,13	10,86
Gorontalo	1,00	0,15	15,42
Sulawesi Barat	0,98	0,16	16,11
Maluku	1,37	0,19	14,17
Maluku Utara	1,41	0,15	10,44
Papua Barat	1,98	0,20	10,21
Papua	1,67	0,12	7,32
INDONESIA	1,27	0,02	1,79

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020



Tabel 5.1 Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2019 (lanjutan)
Table 5.1 Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Crime by Province, 2019 (continuation)

Laki-laki/Male

Provinsi/ Province	Selang Kepercayaan/ Confidence Interval		Efek Rancangan Sampel/ Effect of Sampling Design	Jumlah Sampel/ Number of Samples
	Batas Bawah/ Lower Limit	Batas Atas/ Upper Limit		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	0,76	1,05	0,81	2 715 983
Sumatera Utara	1,32	1,69	2,05	7 319 610
Sumatera Barat	0,92	1,32	1,20	2 732 512
Riau	1,43	1,93	1,69	3 633 430
Jambi	0,82	1,21	0,87	1 867 164
Sumatera Selatan	1,46	1,93	1,68	4 337 624
Bengkulu	1,66	2,32	0,70	1 028 476
Lampung	1,66	2,19	1,96	4 350 664
Kep Bangka Belitung	0,64	1,12	0,63	785 059
Kepulauan Riau	0,84	1,83	2,58	1 135 978
DKI Jakarta	1,23	1,84	3,95	5 317 773
Jawa Barat	1,33	1,63	4,75	25 253 639
Jawa Tengah	0,89	1,10	2,37	17 298 576
DI Yogyakarta	1,42	2,32	2,53	1 919 901
Jawa Timur	0,83	1,04	2,92	19 670 575
Banten	0,85	1,28	3,48	6 676 204
Bali	0,30	0,60	1,34	2 207 587
Nusa Tenggara Barat	1,78	2,41	1,44	2 481 828
Nusa Tenggara Timur	0,96	1,30	0,86	2 734 816
Kalimantan Barat	0,62	0,98	1,32	2 602 501
Kalimantan Tengah	0,75	1,21	0,96	1 438 070
Kalimantan Selatan	0,79	1,22	1,21	2 173 987
Kalimantan Timur	1,04	1,63	1,61	1 979 146
Kalimantan Utara	1,50	2,63	0,77	403 486
Sulawesi Utara	0,67	1,08	0,76	1 289 717
Sulawesi Tengah	1,44	2,01	0,92	1 577 946
Sulawesi Selatan	1,00	1,37	1,51	4 351 167
Sulawesi Tenggara	0,92	1,42	0,90	1 381 302
Gorontalo	0,70	1,31	0,68	608 798
Sulawesi Barat	0,67	1,30	0,85	702 145
Maluku	0,99	1,75	1,20	923 443
Maluku Utara	1,12	1,70	0,47	648 568
Papua Barat	1,59	2,38	0,50	512 827
Papua	1,43	1,91	0,76	1 797 293
INDONESIA	1,23	1,32	2,62	135 857 796

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020

Tabel 5.2 *Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2019*
Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Crime by Province, 2019

Perempuan/Female

Provinsi/ Province	Nilai Estimasi/ Estimated Value	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
			(1) (2) (3) (4)
A c e h	0,52	0,06	11,65
Sumatera Utara	0,85	0,07	8,00
Sumatera Barat	0,84	0,09	10,43
Riau	0,77	0,09	11,20
Jambi	0,64	0,08	13,20
Sumatera Selatan	0,99	0,11	11,04
Bengkulu	0,82	0,12	14,13
Lampung	0,89	0,09	10,21
Kep. Bangka Belitung	0,42	0,10	22,64
Kepulauan Riau	0,71	0,17	23,82
DKI Jakarta	0,77	0,10	13,37
Jawa Barat	0,82	0,06	6,88
Jawa Tengah	0,61	0,04	6,62
DI Yogyakarta	0,83	0,14	16,85
Jawa Timur	0,70	0,04	6,38
Banten	0,52	0,08	15,69
Bali	0,38	0,07	18,92
Nusa Tenggara Barat	1,19	0,13	11,02
Nusa Tenggara Timur	0,56	0,07	11,70
Kalimantan Barat	0,45	0,07	14,45
Kalimantan Tengah	0,60	0,09	15,51
Kalimantan Selatan	0,67	0,10	15,47
Kalimantan Timur	1,04	0,17	15,99
Kalimantan Utara	0,93	0,18	19,45
Sulawesi Utara	0,68	0,10	14,89
Sulawesi Tengah	0,69	0,10	14,51
Sulawesi Selatan	0,74	0,08	10,18
Sulawesi Tenggara	0,73	0,10	13,67
Gorontalo	0,66	0,12	17,85
Sulawesi Barat	0,50	0,12	23,95
Maluku	1,01	0,14	14,11
Maluku Utara	0,90	0,12	13,35
Papua Barat	1,31	0,20	15,38
Papua	1,01	0,09	8,95
INDONESIA	0,74	0,02	2,32

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020



Tabel 5.2 Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2019 (lanjutan)
Table 5.2 Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Crime by Province, 2019 (continuation)

Perempuan/Female

Provinsi/ Province	Selang Kepercayaan/ Confidence Interval		Efek Rancangan Samping/ Effect of Sampling Design	Jumlah Sampel/ Number of Samples
	Batas Bawah/ Lower Limit	Batas Atas/ Upper Limit		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	0,40	0,63	0,90	2 721 695
Sumatera Utara	0,72	0,99	1,90	7 348 583
Sumatera Barat	0,67	1,02	1,19	2 751 806
Riau	0,60	0,94	1,58	3 455 424
Jambi	0,48	0,81	0,95	1 797 336
Sumatera Selatan	0,78	1,21	2,41	4 205 904
Bengkulu	0,59	1,05	0,76	984 337
Lampung	0,71	1,07	1,82	4 152 140
Kep Bangka Belitung	0,24	0,61	0,74	725 283
Kepulauan Riau	0,38	1,04	2,07	1 092 972
DKI Jakarta	0,57	0,97	3,45	5 305 375
Jawa Barat	0,71	0,93	4,49	24 526 817
Jawa Tengah	0,53	0,69	2,23	17 585 978
DI Yogyakarta	0,56	1,11	2,19	1 952 519
Jawa Timur	0,61	0,78	2,70	20 168 819
Banten	0,36	0,68	3,89	6 425 635
Bali	0,24	0,52	1,39	2 162 230
Nusa Tenggara Barat	0,93	1,44	1,80	2 629 942
Nusa Tenggara Timur	0,43	0,69	1,01	2 785 168
Kalimantan Barat	0,32	0,58	1,12	2 515 783
Kalimantan Tengah	0,42	0,79	0,90	1 317 417
Kalimantan Selatan	0,47	0,87	1,60	2 114 951
Kalimantan Timur	0,72	1,37	2,27	1 795 967
Kalimantan Utara	0,57	1,28	0,60	358 362
Sulawesi Utara	0,48	0,88	0,88	1 233 614
Sulawesi Tengah	0,50	0,89	1,04	1 508 301
Sulawesi Selatan	0,59	0,89	1,65	4 557 607
Sulawesi Tenggara	0,53	0,92	0,87	1 361 491
Gorontalo	0,43	0,89	0,60	606 522
Sulawesi Barat	0,27	0,74	0,95	696 640
Maluku	0,73	1,30	0,86	901 180
Maluku Utara	0,67	1,14	0,48	624 412
Papua Barat	0,91	1,70	0,68	463 399
Papua	0,83	1,19	0,62	1 624 026
INDONESIA	0,71	0,77	2,53	134 457 633

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020

Tabel 5.3 *Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2019*
Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Crime by Province, 2019

Perkotaan/Urban

<i>Provinsi/ Province</i>	<i>Nilai Estimasi/ Estimated Value</i>	<i>Standard Error</i>	<i>Relative Standard Error (RSE)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	1,13	0,12	10,69
Sumatera Utara	1,33	0,09	6,94
Sumatera Barat	1,14	0,12	10,60
Riau	1,73	0,16	9,02
Jambi	1,03	0,16	15,34
Sumatera Selatan	1,77	0,18	10,15
Bengkulu	1,88	0,23	12,24
Lampung	1,69	0,20	11,54
Kep. Bangka Belitung	0,65	0,11	16,82
Kepulauan Riau	1,13	0,17	14,96
DKI Jakarta	1,15	0,10	8,26
Jawa Barat	1,26	0,06	4,95
Jawa Tengah	0,94	0,05	5,64
DI Yogyakarta	1,69	0,18	10,75
Jawa Timur	0,91	0,06	6,24
Banten	0,82	0,09	10,83
Bali	0,47	0,07	15,89
Nusa Tenggara Barat	1,69	0,16	9,48
Nusa Tenggara Timur	1,11	0,17	15,02
Kalimantan Barat	1,00	0,14	13,60
Kalimantan Tengah	0,98	0,15	15,65
Kalimantan Selatan	0,88	0,14	15,77
Kalimantan Timur	1,44	0,17	11,57
Kalimantan Utara	2,10	0,28	13,55
Sulawesi Utara	0,85	0,13	14,69
Sulawesi Tengah	1,96	0,25	12,55
Sulawesi Selatan	1,46	0,13	8,83
Sulawesi Tenggara	1,39	0,19	13,52
Gorontalo	1,01	0,19	18,93
Sulawesi Barat	1,29	0,33	25,57
Maluku	1,89	0,26	13,96
Maluku Utara	1,82	0,26	14,11
Papua Barat	2,20	0,31	14,33
Papua	1,57	0,18	11,36
INDONESIA	1,17	0,02	2,02

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020

Keterangan: warna kuning menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Note: the yellow color indicates the need for caution in using the estimation results



Tabel 5.3 *Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2019 (lanjutan)*
Table 5.3 *Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Crime by Province, 2019 (continuation)*

Perkotaan/Urban

Provinsi/ Province	Selang Kepercayaan/ Confidence Interval		Efek Rancangan Sampel/ Effect of Sampling Design	Jumlah Sampel/ Number of Samples
	Batas Bawah/ Lower Limit	Batas Atas/ Upper Limit		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	0,89	1,37	0,79	1 767 106
Sumatera Utara	1,15	1,52	1,77	7 970 454
Sumatera Barat	0,90	1,38	1,14	2 577 061
Riau	1,42	2,03	1,39	2 860 128
Jambi	0,72	1,34	0,99	1 188 143
Sumatera Selatan	1,42	2,12	2,02	3 190 102
Bengkulu	1,43	2,33	0,65	667 343
Lampung	1,31	2,07	2,05	2 628 869
Kep Bangka Belitung	0,43	0,86	0,52	833 463
Kepulauan Riau	0,80	1,46	1,75	2 007 462
DKI Jakarta	0,97	1,34	2,89	10 623 148
Jawa Barat	1,13	1,38	4,04	38 154 607
Jawa Tengah	0,83	1,04	1,83	17 892 201
DI Yogyakarta	1,33	2,04	1,91	2 827 403
Jawa Timur	0,80	1,02	2,60	21 314 810
Banten	0,65	0,99	3,10	9 393 930
Bali	0,32	0,62	1,22	3 013 347
Nusa Tenggara Barat	1,38	2,01	1,30	2 473 070
Nusa Tenggara Timur	0,78	1,44	1,13	1 312 592
Kalimantan Barat	0,73	1,26	1,14	1 797 363
Kalimantan Tengah	0,68	1,28	0,92	1 109 696
Kalimantan Selatan	0,61	1,16	1,53	2 027 381
Kalimantan Timur	1,11	1,76	1,69	2 544 753
Kalimantan Utara	1,54	2,66	0,62	461 379
Sulawesi Utara	0,61	1,10	0,83	1 317 362
Sulawesi Tengah	1,48	2,45	0,99	921 916
Sulawesi Selatan	1,21	1,72	1,53	3 870 665
Sulawesi Tenggara	1,02	1,75	0,94	1 077 186
Gorontalo	0,64	1,39	0,64	513 093
Sulawesi Barat	0,64	1,94	0,96	330 214
Maluku	1,37	2,41	1,02	801 124
Maluku Utara	1,32	2,33	0,46	366 004
Papua Barat	1,58	2,81	0,65	412 124
Papua	1,22	1,92	0,68	977 051
INDONESIA	1,12	1,21	2,48	151 222 551

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020

**Tabel 5.4 Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2019
Table 5.4 Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Crime by Province, 2019**

Perdesaan/Rural

Provinsi/ Province	Nilai Estimasi/ Estimated Value	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	0,51	0,05	10,18
Sumatera Utara	0,99	0,07	7,21
Sumatera Barat	0,84	0,08	8,93
Riau	0,91	0,08	9,07
Jambi	0,74	0,07	9,84
Sumatera Selatan	1,10	0,08	7,49
Bengkulu	1,20	0,11	9,27
Lampung	1,30	0,09	6,87
Kep. Bangka Belitung	0,68	0,11	16,84
Kepulauan Riau	0,07	0,03	51,21
Metro Jaya	-	-	-
Jawa Barat	0,82	0,07	8,14
Jawa Tengah	0,66	0,04	6,50
DI Yogyakarta	0,43	0,10	24,35
Jawa Timur	0,71	0,05	6,44
Banten	0,75	0,11	14,06
Bali	0,29	0,07	23,21
Nusa Tenggara Barat	1,57	0,15	9,38
Nusa Tenggara Timur	0,76	0,05	6,96
Kalimantan Barat	0,43	0,06	13,25
Kalimantan Tengah	0,68	0,09	13,91
Kalimantan Selatan	0,80	0,08	10,11
Kalimantan Timur	0,69	0,13	19,15
Kalimantan Utara	0,65	0,18	27,55
Sulawesi Utara	0,70	0,08	11,94
Sulawesi Tengah	0,90	0,08	9,18
Sulawesi Selatan	0,57	0,05	7,98
Sulawesi Tenggara	0,67	0,06	9,55
Gorontalo	0,70	0,11	15,16
Sulawesi Barat	0,58	0,09	16,04
Maluku	0,65	0,09	14,32
Maluku Utara	0,89	0,10	10,95
Papua Barat	1,27	0,16	12,87
Papua	1,27	0,09	6,90
INDONESIA	0,80	0,02	1,96

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020

Keterangan: warna kuning menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi,
warna merah menunjukkan hasil estimasi kurang akuratNote: the yellow color indicates the need for caution in using the estimation results, the red color
indicates the estimation result is less accurate



Tabel 5.4 Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2019 (lanjutan)
Table 5.4 Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Crime by Province, 2019 (continuation)

Perdesaan/Rural

Provinsi/ Province	Selang Kepercayaan/ Confidence Interval		Efek Rancangan Sampel/ Effect of Sampling Design	Jumlah Sampel/ Number of Samples
	Batas Bawah/ Lower Limit	Batas Atas/ Upper Limit		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	0,41	0,61	1,22	3 670 572
Sumatera Utara	0,85	1,13	2,20	6 697 740
Sumatera Barat	0,70	0,99	1,24	2 907 257
Riau	0,74	1,07	2,00	4 228 726
Jambi	0,59	0,88	1,12	2 476 357
Sumatera Selatan	0,94	1,26	2,10	5 353 426
Bengkulu	0,98	1,41	0,88	1 345 470
Lampung	1,12	1,47	2,29	5 873 936
Kep Bangka Belitung	0,45	0,90	0,83	676 879
Kepulauan Riau	0,00	0,13	0,25	221 488
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	0,69	0,95	4,00	11 625 848
Jawa Tengah	0,58	0,75	3,01	16 992 353
DI Yogyakarta	0,22	0,63	1,68	1 045 017
Jawa Timur	0,62	0,80	3,45	18 524 584
Banten	0,54	0,96	3,49	3 707 909
Bali	0,16	0,43	1,35	1 356 470
Nusa Tenggara Barat	1,28	1,86	2,33	2 638 700
Nusa Tenggara Timur	0,66	0,86	0,98	4 207 392
Kalimantan Barat	0,32	0,54	1,59	3 320 921
Kalimantan Tengah	0,50	0,87	1,37	1 645 791
Kalimantan Selatan	0,64	0,96	1,17	2 261 557
Kalimantan Timur	0,43	0,95	1,99	1 230 361
Kalimantan Utara	0,30	1,00	0,94	300 469
Sulawesi Utara	0,54	0,87	0,76	1 205 968
Sulawesi Tengah	0,74	1,07	1,05	2 164 331
Sulawesi Selatan	0,48	0,66	1,15	5 038 109
Sulawesi Tenggara	0,54	0,80	0,65	1 665 607
Gorontalo	0,49	0,90	0,71	702 227
Sulawesi Barat	0,40	0,76	1,00	1 068 571
Maluku	0,47	0,83	0,86	1 023 499
Maluku Utara	0,70	1,09	0,62	906 976
Papua Barat	0,95	1,59	0,76	564 101
Papua	1,10	1,45	0,95	2 444 268
INDONESIA	0,77	0,83	2,32	119 092 879

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020

Tabel 5.5 *Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2019*
Table 5.5 *Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Crime by Province, 2019*

Total/Total

Provinsi/ Province	Nilai Estimasi/ Estimated Value	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	0,71	0,05	7,39
Sumatera Utara	1,18	0,06	5,09
Sumatera Barat	0,98	0,07	7,06
Riau	1,24	0,08	6,45
Jambi	0,83	0,07	8,52
Sumatera Selatan	1,35	0,08	6,28
Bengkulu	1,42	0,11	7,48
Lampung	1,42	0,09	6,08
Kep. Bangka Belitung	0,66	0,08	11,94
Kepulauan Riau	1,02	0,15	14,86
DKI Jakarta	1,15	0,10	8,26
Jawa Barat	1,15	0,05	4,34
Jawa Tengah	0,80	0,03	4,26
DI Yogyakarta	1,35	0,14	10,05
Jawa Timur	0,82	0,04	4,54
Banten	0,80	0,07	8,78
Bali	0,42	0,06	13,41
Nusa Tenggara Barat	1,63	0,11	6,67
Nusa Tenggara Timur	0,84	0,06	6,70
Kalimantan Barat	0,63	0,06	9,58
Kalimantan Tengah	0,80	0,08	10,44
Kalimantan Selatan	0,84	0,08	9,35
Kalimantan Timur	1,19	0,12	10,07
Kalimantan Utara	1,53	0,19	12,27
Sulawesi Utara	0,78	0,08	9,83
Sulawesi Tengah	1,22	0,09	7,66
Sulawesi Selatan	0,96	0,06	6,46
Sulawesi Tenggara	0,95	0,08	8,74
Gorontalo	0,83	0,10	12,21
Sulawesi Barat	0,74	0,11	14,18
Maluku	1,19	0,13	10,60
Maluku Utara	1,16	0,10	8,74
Papua Barat	1,66	0,16	9,83
Papua	1,36	0,08	5,94
INDONESIA	1,01	0,01	1,48

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020



Tabel

5.5

Table

Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2019 (lanjutan)

Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Crime by Province, 2019 (continuation)

Total/Total

Provinsi/ Province	Selang Kepercayaan/ Confidence Interval		Efek Rancangan Sampel/ Effect of Sampling Design	Jumlah Sampel/ Number of Samples
	Batas Bawah/ Lower Limit	Batas Atas/ Upper Limit		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	0,61	0,81	0,99	5 437 678
Sumatera Utara	1,06	1,30	2,12	14 668 194
Sumatera Barat	0,85	1,12	1,27	5 484 318
Riau	1,08	1,39	1,73	7 088 854
Jambi	0,69	0,97	1,04	3 664 500
Sumatera Selatan	1,18	1,52	2,16	8 543 528
Bengkulu	1,21	1,63	0,76	2 012 813
Lampung	1,25	1,59	2,11	8 502 805
Kep Bangka Belitung	0,51	0,82	0,67	1 510 342
Kepulauan Riau	0,73	1,32	2,38	2 228 950
DKI Jakarta	0,97	1,34	3,96	10 623 148
Jawa Barat	1,06	1,25	5,11	49 780 455
Jawa Tengah	0,74	0,87	2,40	34 884 554
DI Yogyakarta	1,08	1,61	2,50	3 872 420
Jawa Timur	0,74	0,89	3,16	39 839 394
Banten	0,66	0,94	3,81	13 101 839
Bali	0,31	0,52	1,53	4 369 817
Nusa Tenggara Barat	1,42	1,84	1,76	5 111 770
Nusa Tenggara Timur	0,73	0,96	0,99	5 519 984
Kalimantan Barat	0,51	0,75	1,39	5 118 284
Kalimantan Tengah	0,64	0,96	1,13	2 755 487
Kalimantan Selatan	0,69	0,99	1,48	4 288 938
Kalimantan Timur	0,96	1,43	2,16	3 775 114
Kalimantan Utara	1,16	1,90	0,83	761 848
Sulawesi Utara	0,63	0,93	0,90	2 523 330
Sulawesi Tengah	1,04	1,40	1,05	3 086 247
Sulawesi Selatan	0,84	1,08	1,68	8 908 774
Sulawesi Tenggara	0,79	1,11	0,94	2 742 793
Gorontalo	0,63	1,03	0,71	1 215 320
Sulawesi Barat	0,54	0,95	0,99	1 398 785
Maluku	0,95	1,44	1,16	1 824 623
Maluku Utara	0,96	1,36	0,54	1 272 980
Papua Barat	1,34	1,98	0,74	976 225
Papua	1,20	1,52	0,78	3 421 319
INDONESIA	0,98	1,04	2,82	270 315 430

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020

Tabel 5.6 *Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2019*
Table 5.6 *Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Theft Crime by Province, 2019*

Laki-laki/Male

Provinsi/ Province	Nilai Estimasi/ Estimated Value	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	92,03	2,22	2,41
Sumatera Utara	91,87	1,98	2,15
Sumatera Barat	90,63	2,48	2,74
Riau	90,14	2,71	3,00
Jambi	92,59	2,72	2,94
Sumatera Selatan	91,46	2,09	2,28
Bengkulu	95,19	1,72	1,81
Lampung	91,68	1,95	2,13
Kep. Bangka Belitung	93,41	2,74	2,93
Kepulauan Riau	91,79	5,15	5,61
DKI Jakarta	81,42	3,95	4,86
Jawa Barat	87,67	1,66	1,89
Jawa Tengah	79,12	2,30	2,90
DI Yogyakarta	72,72	5,01	6,88
Jawa Timur	77,89	2,26	2,90
Banten	89,55	3,57	3,99
Bali	89,18	5,70	6,39
Nusa Tenggara Barat	93,56	1,99	2,13
Nusa Tenggara Timur	87,06	2,67	3,06
Kalimantan Barat	83,20	3,81	4,58
Kalimantan Tengah	88,09	3,72	4,23
Kalimantan Selatan	86,63	3,83	4,42
Kalimantan Timur	88,69	4,00	4,51
Kalimantan Utara	93,81	3,28	3,50
Sulawesi Utara	84,49	4,58	5,42
Sulawesi Tengah	90,28	2,68	2,97
Sulawesi Selatan	90,46	3,03	3,35
Sulawesi Tenggara	91,97	2,03	2,21
Gorontalo	98,47	1,53	1,55
Sulawesi Barat	93,34	3,07	3,28
Maluku	87,30	4,51	5,17
Maluku Utara	87,47	4,05	4,63
Papua Barat	75,72	4,33	5,72
Papua	85,91	2,46	2,86
INDONESIA	86,53	0,62	0,72

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020



Tabel

5.6

Table

Laki-laki/Male

Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2019 (lanjutan)
Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Theft Crime by Province, 2019 (continuation)

Provinsi/ Province	Selang Kepercayaan/ Confidence Interval		Efek Rancangan Sampel/ Effect of Sampling Design	Jumlah Sampel/ Number of Samples
	Batas Bawah/ Lower Limit	Batas Atas/ Upper Limit		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	87,68	96,38	0,70	24 631
Sumatera Utara	87,99	95,75	2,44	110 044
Sumatera Barat	85,76	95,50	0,94	30 654
Riau	84,83	95,44	2,13	61 125
Jambi	87,26	97,93	0,87	18 960
Sumatera Selatan	87,37	95,56	1,74	73 535
Bengkulu	91,82	98,55	0,56	20 512
Lampung	87,86	95,50	1,76	83 587
Kep Bangka Belitung	88,04	98,78	0,36	6 928
Kepulauan Riau	81,70	101,89	2,26	15 118
DKI Jakarta	73,67	89,17	3,58	81 808
Jawa Barat	84,42	90,93	4,03	373 138
Jawa Tengah	74,62	83,62	2,33	172 306
DI Yogyakarta	62,91	82,54	1,92	35 895
Jawa Timur	73,46	82,32	2,32	184 574
Banten	82,55	96,56	4,12	71 244
Bali	78,01	100,35	1,41	9 879
Nusa Tenggara Barat	89,65	97,47	1,45	52 045
Nusa Tenggara Timur	81,83	92,29	0,83	30 912
Kalimantan Barat	75,74	90,66	0,91	20 821
Kalimantan Tengah	80,79	95,39	0,79	14 115
Kalimantan Selatan	79,12	94,15	1,18	21 895
Kalimantan Timur	80,85	96,52	1,78	26 372
Kalimantan Utara	87,37	100,25	0,66	8 325
Sulawesi Utara	75,51	93,47	0,76	11 266
Sulawesi Tengah	85,02	95,54	0,95	27 203
Sulawesi Selatan	84,51	96,41	2,33	51 554
Sulawesi Tenggara	87,98	95,96	0,38	16 197
Gorontalo	95,46	101,47	0,40	6 109
Sulawesi Barat	87,33	99,35	0,44	6 914
Maluku	78,45	96,14	0,98	12 620
Maluku Utara	79,53	95,42	0,58	9 144
Papua Barat	67,24	84,21	0,44	10 163
Papua	81,09	90,73	0,63	30 060
INDONESIA	85,31	87,75	2,43	1 729 651

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020

Tabel 5.7 Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2019
Table 5.7 Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Theft Crime by Province, 2019

Perempuan/Female

Provinsi/ Province	Nilai Estimasi/ Estimated Value	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	85,00	5,04	5,93
Sumatera Utara	89,62	2,41	2,69
Sumatera Barat	89,79	2,89	3,21
Riau	77,90	5,02	6,45
Jambi	80,83	5,33	6,60
Sumatera Selatan	84,88	3,88	4,57
Bengkulu	80,80	5,04	6,23
Lampung	85,92	3,51	4,09
Kep. Bangka Belitung	89,04	4,67	5,25
Kepulauan Riau	98,11	1,41	1,43
DKI Jakarta	76,80	6,35	8,26
Jawa Barat	84,71	2,53	2,98
Jawa Tengah	81,44	2,53	3,11
DI Yogyakarta	60,90	8,42	13,83
Jawa Timur	75,38	2,67	3,54
Banten	82,20	6,42	7,80
Bali	93,13	3,40	3,65
Nusa Tenggara Barat	88,89	3,19	3,59
Nusa Tenggara Timur	79,94	4,50	5,63
Kalimantan Barat	79,25	5,25	6,63
Kalimantan Tengah	83,34	5,25	6,30
Kalimantan Selatan	85,92	5,25	6,11
Kalimantan Timur	78,52	5,40	6,87
Kalimantan Utara	96,22	2,43	2,53
Sulawesi Utara	92,31	2,77	3,00
Sulawesi Tengah	88,53	3,39	3,82
Sulawesi Selatan	92,83	2,42	2,61
Sulawesi Tenggara	92,74	2,55	2,75
Gorontalo	90,81	4,50	4,96
Sulawesi Barat	88,21	8,51	9,65
Maluku	95,63	1,66	1,73
Maluku Utara	88,33	4,02	4,56
Papua Barat	84,40	4,86	5,76
Papua	91,24	2,28	2,50
INDONESIA	83,30	0,88	1,05

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020



Tabel

5.7

Table

Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2019 (lanjutan)

Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Theft Crime by Province, 2019 (continuation)

Perempuan/Female

Provinsi/ Province	Selang Kepercayaan/ Confidence Interval		Efek Rancangan Sampel/ Effect of Sampling Design	Jumlah Sampel/ Number of Samples
	Batas Bawah/ Lower Limit	Batas Atas/ Upper Limit		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	75,12	94,87	1,21	14 024
Sumatera Utara	84,90	94,33	1,70	62 823
Sumatera Barat	84,13	95,45	0,92	23 190
Riau	68,05	87,75	1,69	26 598
Jambi	70,37	91,28	0,92	11 541
Sumatera Selatan	77,28	92,49	2,13	41 821
Bengkulu	70,93	90,68	0,58	8 099
Lampung	79,03	92,80	1,64	36 930
Kep. Bangka Belitung	79,87	98,21	0,30	3 065
Kepulauan Riau	95,35	100,87	0,36	7 724
DKI Jakarta	64,36	89,25	4,02	40 846
Jawa Barat	79,76	89,67	4,31	201 145
Jawa Tengah	76,48	86,40	1,98	107 609
DI Yogyakarta	44,38	77,42	2,11	16 299
Jawa Timur	70,14	80,61	2,35	140 329
Banten	69,62	94,78	4,11	33 556
Bali	86,45	99,80	0,65	8 261
Nusa Tenggara Barat	82,63	95,14	1,40	31 228
Nusa Tenggara Timur	71,11	88,77	0,86	15 693
Kalimantan Barat	68,95	89,54	0,83	11 407
Kalimantan Tengah	73,04	93,64	0,69	7 948
Kalimantan Selatan	75,62	96,22	1,40	14 136
Kalimantan Timur	67,94	89,11	1,41	18 740
Kalimantan Utara	91,46	100,99	0,24	3 325
Sulawesi Utara	86,87	97,75	0,40	8 407
Sulawesi Tengah	81,89	95,17	0,51	10 455
Sulawesi Selatan	88,09	97,57	1,29	33 673
Sulawesi Tenggara	87,75	97,73	0,41	9 891
Gorontalo	81,98	99,63	0,42	3 978
Sulawesi Barat	71,53	104,90	1,06	3 505
Maluku	92,38	98,87	0,26	9 146
Maluku Utara	80,44	96,22	0,39	5 650
Papua Barat	74,87	93,93	0,47	6 048
Papua	86,77	95,71	0,46	16 405
INDONESIA	81,58	85,01	2,38	993 494

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020

Tabel 5.8 *Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2019*
Table 5.8 *Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Theft Crime by Province, 2019*

Perkotaan/Urban

Provinsi/ Province	Nilai Estimasi/ Estimated Value	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	83,48	4,54	5,44
Sumatera Utara	89,13	2,35	2,63
Sumatera Barat	90,99	2,61	2,87
Riau	79,74	4,30	5,40
Jambi	83,94	5,38	6,41
Sumatera Selatan	90,26	2,91	3,22
Bengkulu	89,53	3,66	4,09
Lampung	90,19	2,99	3,31
Kep. Bangka Belitung	94,54	2,99	3,16
Kepulauan Riau	93,89	3,47	3,69
DKI Jakarta	79,88	3,69	4,62
Jawa Barat	85,93	1,73	2,02
Jawa Tengah	78,03	2,53	3,24
DI Yogyakarta	70,14	4,66	6,64
Jawa Timur	75,59	2,53	3,35
Banten	84,18	4,75	5,65
Bali	92,74	3,83	4,13
Nusa Tenggara Barat	87,67	3,11	3,55
Nusa Tenggara Timur	76,23	6,07	7,96
Kalimantan Barat	77,42	5,24	6,77
Kalimantan Tengah	91,59	3,19	3,49
Kalimantan Selatan	82,50	5,43	6,58
Kalimantan Timur	85,92	3,60	4,19
Kalimantan Utara	94,32	3,05	3,23
Sulawesi Utara	89,40	3,96	4,43
Sulawesi Tengah	89,42	3,28	3,67
Sulawesi Selatan	91,16	3,40	3,73
Sulawesi Tenggara	96,63	1,54	1,59
Gorontalo	95,30	3,24	3,40
Sulawesi Barat	86,74	7,43	8,56
Maluku	92,84	3,23	3,47
Maluku Utara	90,98	4,17	4,58
Papua Barat	78,51	5,43	6,91
Papua	89,64	3,24	3,61
INDONESIA	83,98	0,76	0,90

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020



Tabel

5.8

Table

Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2019 (lanjutan)

Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Theft Crime by Province, 2019 (continuation)

Perkotaan/Urban

Provinsi/ Province	Selang Kepercayaan/ Confidence Interval		Efek Rancangan Sampel/ Effect of Sampling Design	Jumlah Sampel/ Number of Samples
	Batas Bawah/ Lower Limit	Batas Atas/ Upper Limit		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	74,58	92,38	0,98	20 005
Sumatera Utara	84,54	93,73	1,97	106 372
Sumatera Barat	85,87	96,12	0,80	29 345
Riau	71,30	88,17	1,85	49 437
Jambi	73,39	94,48	0,86	12 279
Sumatera Selatan	84,57	95,96	1,77	56 486
Bengkulu	82,36	96,71	0,58	12 515
Lampung	84,34	96,05	1,46	44 441
Kep Bangka Belitung	88,69	100,40	0,30	5 399
Kepulauan Riau	87,09	100,68	1,55	22 693
DKI Jakarta	72,65	87,12	3,39	122 653
Jawa Barat	82,53	89,33	3,88	479 129
Jawa Tengah	73,08	82,99	2,03	167 427
DI Yogyakarta	61,02	79,27	1,61	47 712
Jawa Timur	70,62	80,56	2,20	193 983
Banten	74,86	93,49	4,26	76 935
Bali	85,23	100,26	1,01	14 161
Nusa Tenggara Barat	81,57	93,77	1,22	41 840
Nusa Tenggara Timur	64,33	88,13	0,97	14 595
Kalimantan Barat	67,15	87,70	0,92	17 898
Kalimantan Tengah	85,33	97,85	0,47	10 858
Kalimantan Selatan	71,85	93,14	1,19	17 926
Kalimantan Timur	78,87	92,97	1,28	36 574
Kalimantan Utara	88,34	100,29	0,55	9 691
Sulawesi Utara	81,63	97,16	0,61	11 216
Sulawesi Tengah	82,98	95,85	0,67	18 101
Sulawesi Selatan	84,50	97,83	2,65	56 680
Sulawesi Tenggara	93,61	99,64	0,35	14 925
Gorontalo	88,95	101,64	0,40	5 204
Sulawesi Barat	72,18	101,30	0,67	4 262
Maluku	86,52	99,17	0,77	15 149
Maluku Utara	82,81	99,15	0,46	6 679
Papua Barat	67,88	89,15	0,52	9 057
Papua	83,29	95,99	0,56	15 311
INDONESIA	82,49	85,47	2,47	1 766 942

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020

Tabel 5.9 *Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2019*
Table 5.9 *Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Theft Crime by Province, 2019*

Perdesaan/Rural

Provinsi/ Province	Nilai Estimasi/ Estimated Value	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	95,92	1,61	1,67
Sumatera Utara	94,12	1,43	1,52
Sumatera Barat	89,40	2,76	3,09
Riau	95,07	1,84	1,94
Jambi	90,98	2,96	3,25
Sumatera Selatan	87,94	3,09	3,52
Bengkulu	92,34	2,82	3,05
Lampung	89,76	2,27	2,53
Kep. Bangka Belitung	89,16	4,08	4,58
Kepulauan Riau	100,00	0,00	0,00
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	90,18	2,32	2,57
Jawa Tengah	82,96	2,40	2,90
DI Yogyakarta	57,20	12,75	22,29
Jawa Timur	78,61	2,39	3,04
Banten	95,55	2,09	2,19
Bali	84,70	7,51	8,86
Nusa Tenggara Barat	95,98	1,33	1,39
Nusa Tenggara Timur	88,50	2,33	2,63
Kalimantan Barat	87,27	3,88	4,45
Kalimantan Tengah	81,32	5,23	6,43
Kalimantan Selatan	90,17	3,02	3,35
Kalimantan Timur	78,25	7,13	9,11
Kalimantan Utara	95,41	2,90	3,04
Sulawesi Utara	85,76	4,63	5,40
Sulawesi Tengah	90,14	3,14	3,48
Sulawesi Selatan	91,86	2,18	2,37
Sulawesi Tenggara	86,43	3,07	3,55
Gorontalo	95,60	2,53	2,64
Sulawesi Barat	94,99	3,13	3,30
Maluku	86,12	5,15	5,98
Maluku Utara	85,18	4,04	4,74
Papua Barat	79,53	5,01	6,30
Papua	86,88	2,37	2,73
INDONESIA	87,88	0,63	0,71

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020



Tabel 5.9 Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2019 (lanjutan)
Table 5.9 Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Theft Crime by Province, 2019 (continuation)

Perdesaan/Rural

Provinsi/ Province	Selang Kepercayaan/ Confidence Interval		Efek Rancangan Sampel/ Effect of Sampling Design	Jumlah Sampel/ Number of Samples
	Batas Bawah/ Lower Limit	Batas Atas/ Upper Limit		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	92,77	99,06	0,76	18 650
Sumatera Utara	91,31	96,92	1,51	66 495
Sumatera Barat	83,99	94,81	1,21	24 500
Riau	91,46	98,68	1,71	38 286
Jambi	85,17	96,78	1,20	18 221
Sumatera Selatan	81,88	94,01	3,27	58 870
Bengkulu	86,82	97,87	1,12	16 096
Lampung	85,30	94,21	2,63	76 075
Kep. Bangka Belitung	81,16	97,16	0,49	4 595
Kepulauan Riau	100,00	100,00	0,04	149
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	85,64	94,73	3,55	95 154
Jawa Tengah	78,24	87,67	2,83	112 488
DI Yogyakarta	32,21	82,20	1,83	4 481
Jawa Timur	73,93	83,29	2,74	130 920
Banten	91,44	99,65	1,77	27 864
Bali	69,98	99,41	1,07	3 979
Nusa Tenggara Barat	93,37	98,60	1,18	41 433
Nusa Tenggara Timur	83,94	93,06	1,05	32 009
Kalimantan Barat	79,65	94,88	1,20	14 330
Kalimantan Tengah	71,07	91,57	1,24	11 204
Kalimantan Selatan	84,25	96,09	1,15	18 105
Kalimantan Timur	64,27	92,22	1,57	8 538
Kalimantan Utara	89,73	101,09	0,23	1 959
Sulawesi Utara	76,68	94,84	0,91	8 456
Sulawesi Tengah	83,98	96,30	1,34	19 557
Sulawesi Selatan	87,59	96,13	1,12	28 546
Sulawesi Tenggara	80,41	92,45	0,55	11 163
Gorontalo	90,65	100,56	0,46	4 883
Sulawesi Barat	88,85	101,13	0,78	6 157
Maluku	76,02	96,21	0,90	6 616
Maluku Utara	77,26	93,11	0,65	8 114
Papua Barat	69,70	89,35	0,68	7 154
Papua	82,23	91,54	0,95	31 154
INDONESIA	86,65	89,11	2,18	956 203

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020

Tabel 5.10 *Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2019*
Table 5.10 *Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Theft Crime by Province, 2019*

Total/Total

Provinsi/ Province	Nilai Estimasi/ Estimated Value	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	89,48	2,56	2,86
Sumatera Utara	91,05	1,55	1,70
Sumatera Barat	90,27	1,90	2,11
Riau	86,43	2,61	3,02
Jambi	88,14	2,81	3,19
Sumatera Selatan	89,08	2,13	2,40
Bengkulu	91,11	2,24	2,46
Lampung	89,92	1,81	2,01
Kep. Bangka Belitung	92,07	2,47	2,68
Kepulauan Riau	93,93	3,44	3,67
DKI Jakarta	79,88	3,69	4,62
Jawa Barat	86,64	1,50	1,73
Jawa Tengah	80,01	1,80	2,25
DI Yogyakarta	69,03	4,42	6,40
Jawa Timur	76,81	1,79	2,33
Banten	87,20	3,57	4,10
Bali	90,98	3,41	3,74
Nusa Tenggara Barat	91,81	1,70	1,85
Nusa Tenggara Timur	84,66	2,42	2,86
Kalimantan Barat	81,80	3,37	4,12
Kalimantan Tengah	86,38	3,10	3,59
Kalimantan Selatan	86,35	3,06	3,54
Kalimantan Timur	84,46	3,23	3,82
Kalimantan Utara	94,50	2,58	2,73
Sulawesi Utara	87,83	3,02	3,43
Sulawesi Tengah	89,79	2,27	2,53
Sulawesi Selatan	91,40	2,38	2,60
Sulawesi Tenggara	92,26	1,57	1,71
Gorontalo	95,44	2,07	2,17
Sulawesi Barat	91,62	3,45	3,77
Maluku	90,80	2,77	3,05
Maluku Utara	87,80	2,92	3,33
Papua Barat	78,96	3,75	4,75
Papua	87,79	1,92	2,19
INDONESIA	85,35	0,54	0,63

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020



Tabel

5.10

Table

Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2019 (lanjutan)
Sampling Error Percentage of Population Who Have Been Victims of Theft Crime by Province, 2019 (continuation)

Total/Total

Provinsi/ Province	Selang Kepercayaan/ Confidence Interval		Efek Rancangan Sampel/ Effect of Sampling Design	Jumlah Sampel/ Number of Samples
	Batas Bawah/ Lower Limit	Batas Atas/ Upper Limit		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	84,47	94,49	1,15	38 654
Sumatera Utara	88,01	94,09	2,18	172 867
Sumatera Barat	86,54	94,00	0,95	53 844
Riau	81,31	91,55	2,18	87 723
Jambi	82,64	93,65	0,98	30 501
Sumatera Selatan	84,89	93,26	2,31	115 356
Bengkulu	86,72	95,51	0,76	28 611
Lampung	86,37	93,46	1,86	120 516
Kep Bangka Belitung	87,22	96,91	0,36	9 993
Kepulauan Riau	87,18	100,68	2,03	22 842
DKI Jakarta	72,65	87,12	4,45	122 653
Jawa Barat	83,70	89,57	4,75	574 283
Jawa Tengah	76,48	83,54	2,43	279 914
DI Yogyakarta	60,37	77,69	2,04	52 194
Jawa Timur	73,30	80,32	2,50	324 903
Banten	80,20	94,20	5,13	104 800
Bali	84,30	97,65	1,10	18 140
Nusa Tenggara Barat	88,48	95,14	1,37	83 273
Nusa Tenggara Timur	79,91	89,41	0,90	46 605
Kalimantan Barat	75,20	88,41	1,05	32 228
Kalimantan Tengah	80,30	92,45	0,77	22 063
Kalimantan Selatan	80,36	92,34	1,22	36 031
Kalimantan Timur	78,13	90,80	1,53	45 112
Kalimantan Utara	89,44	99,56	0,64	11 651
Sulawesi Utara	81,92	93,75	0,72	19 673
Sulawesi Tengah	85,35	94,24	0,90	37 658
Sulawesi Selatan	86,74	96,06	2,62	85 227
Sulawesi Tenggara	89,17	95,35	0,39	26 088
Gorontalo	91,39	99,50	0,42	10 087
Sulawesi Barat	84,85	98,38	0,69	10 419
Maluku	85,37	96,22	0,85	21 766
Maluku Utara	82,08	93,52	0,50	14 794
Papua Barat	71,61	86,31	0,59	16 211
Papua	84,02	91,56	0,68	46 465
INDONESIA	84,29	86,41	2,71	2 723 145

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020

Tabel
Table 5.11
Laki-laki/Male

Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Pernah Melaporkan Kejadian Kejahatan Menurut Provinsi, 2019
Sampling Error Percentage of Population Who Have Reported Incidents of Crime by Province, 2019

Provinsi/ Province	Nilai Estimasi/ Estimated Value	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	19,94	3,26	16,35
Sumatera Utara	19,58	2,69	13,72
Sumatera Barat	25,33	3,58	14,15
Riau	13,89	2,61	18,77
Jambi	26,47	4,58	17,31
Sumatera Selatan	23,34	3,06	13,11
Bengkulu	18,04	3,06	16,94
Lampung	22,80	3,54	15,55
Kep. Bangka Belitung	19,66	5,76	29,27
Kepulauan Riau	22,92	7,87	34,35
DKI Jakarta	32,56	4,72	14,51
Jawa Barat	29,42	2,44	8,29
Jawa Tengah	17,12	1,95	11,41
DI Yogyakarta	16,65	4,27	25,66
Jawa Timur	24,30	2,43	9,98
Banten	20,53	3,95	19,26
Bali	11,36	3,89	34,27
Nusa Tenggara Barat	12,05	2,39	19,80
Nusa Tenggara Timur	12,32	2,44	19,81
Kalimantan Barat	21,82	4,11	18,82
Kalimantan Tengah	22,82	4,93	21,59
Kalimantan Selatan	14,55	3,63	24,97
Kalimantan Timur	24,78	5,00	20,18
Kalimantan Utara	10,98	4,05	36,85
Sulawesi Utara	25,70	5,44	21,17
Sulawesi Tengah	22,52	3,45	15,31
Sulawesi Selatan	26,85	3,80	14,14
Sulawesi Tenggara	22,11	4,43	20,05
Gorontalo	7,82	3,85	49,24
Sulawesi Barat	22,88	8,34	36,43
Maluku	18,70	5,34	28,58
Maluku Utara	17,55	4,63	26,37
Papua Barat	41,26	5,06	12,26
Papua	21,21	2,46	11,61
INDONESIA	22,92	0,78	3,42

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020

Keterangan: warna kuning menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Note: the yellow color indicates the need for caution in using the estimation results



Tabel

5.11

Table

Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Pernah Melaporkan Kejadian Kejahatan Menurut Provinsi, 2019 (lanjutan)
Sampling Error Percentage of Population Who Have Reported Incidents of Crime by Province, 2019 (continuation)

Laki-laki/Male

Provinsi/ Province	Selang Kepercayaan/ Confidence Interval		Efek Rancangan Sampling/ Effect of Sampling Design	Jumlah Sampel/ Number of Samples
	Batas Bawah/ Lower Limit	Batas Atas/ Upper Limit		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	13,55	26,33	0,69	24 631
Sumatera Utara	14,31	24,84	2,13	110 044
Sumatera Barat	18,30	32,35	0,88	30 654
Riau	8,78	19,00	1,47	61 125
Jambi	17,48	35,45	0,87	18 960
Sumatera Selatan	17,34	29,34	1,63	73 535
Bengkulu	12,05	24,03	0,55	20 512
Lampung	15,85	29,74	2,53	83 587
Kep. Bangka Belitung	8,38	30,95	0,62	6 928
Kepulauan Riau	7,49	38,35	2,25	15 118
DKI Jakarta	23,30	41,82	3,52	81 808
Jawa Barat	24,64	34,20	4,52	373 138
Jawa Tengah	13,29	20,95	1,96	172 306
DI Yogyakarta	8,28	25,03	2,00	35 895
Jawa Timur	19,55	29,06	2,50	184 574
Banten	12,78	28,27	2,89	71 244
Bali	3,73	19,00	0,63	9 879
Nusa Tenggara Barat	7,38	16,73	1,18	52 045
Nusa Tenggara Timur	7,54	17,11	0,72	30 912
Kalimantan Barat	13,77	29,87	0,87	20 821
Kalimantan Tengah	13,16	32,48	0,82	14 115
Kalimantan Selatan	7,43	21,67	0,98	21 895
Kalimantan Timur	14,98	34,57	1,50	26 372
Kalimantan Utara	3,05	18,91	0,59	8 325
Sulawesi Utara	15,03	36,36	0,74	11 266
Sulawesi Tengah	15,76	29,28	0,79	27 203
Sulawesi Selatan	19,41	34,30	1,60	51 554
Sulawesi Tenggara	13,42	30,80	0,78	16 197
Gorontalo	0,27	15,36	0,53	6 109
Sulawesi Barat	6,54	39,23	1,15	6 914
Maluku	8,22	29,18	1,00	12 620
Maluku Utara	8,48	26,62	0,57	9 144
Papua Barat	31,34	51,17	0,45	10 163
Papua	16,38	26,04	0,46	30 060
INDONESIA	21,39	24,46	2,54	1 729 651

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020

Tabel 5.12
Table *Sampling Error Percentage of Population Who Have Reported Incidents of Crime by Province, 2019*

Perempuan/Female

Provinsi/ Province	Nilai Estimasi/ Estimated Value	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	12,58	4,89	38,85
Sumatera Utara	19,52	3,40	17,39
Sumatera Barat	20,27	4,59	22,65
Riau	18,03	4,24	23,53
Jambi	20,95	5,50	26,23
Sumatera Selatan	29,04	5,39	18,55
Bengkulu	26,35	6,43	24,41
Lampung	28,34	4,62	16,30
Kep. Bangka Belitung	17,48	5,77	33,02
Kepulauan Riau	32,92	11,38	34,57
DKI Jakarta	27,88	5,61	20,13
Jawa Barat	26,54	3,08	11,63
Jawa Tengah	16,20	2,34	14,44
DI Yogyakarta	17,28	5,41	31,30
Jawa Timur	15,56	2,22	14,24
Banten	25,36	7,16	28,24
Bali	8,49	2,71	31,93
Nusa Tenggara Barat	9,19	2,39	26,00
Nusa Tenggara Timur	22,15	4,50	20,32
Kalimantan Barat	24,99	6,66	26,63
Kalimantan Tengah	15,01	6,45	42,95
Kalimantan Selatan	12,04	4,06	33,73
Kalimantan Timur	8,70	3,34	38,42
Kalimantan Utara	8,89	4,25	47,83
Sulawesi Utara	29,58	6,48	21,91
Sulawesi Tengah	24,02	6,05	25,20
Sulawesi Selatan	22,02	4,00	18,16
Sulawesi Tenggara	30,12	6,88	22,85
Gorontalo	19,47	6,48	33,30
Sulawesi Barat	20,75	8,55	41,21
Maluku	19,64	5,44	27,69
Maluku Utara	12,70	3,67	28,89
Papua Barat	30,99	7,74	24,97
Papua	16,98	2,95	17,39
INDONESIA	20,93	0,96	4,57

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020

Keterangan: warna kuning menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Note: the yellow color indicates the need for caution in using the estimation results



Tabel

5.12

Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Pernah Melaporkan Kejadian Kejahatan Menurut Provinsi, 2019 (lanjutan)
Sampling Error Percentage of Population Who Have Reported Incidents of Crime by Province, 2019 (continuation)

Perempuan/Female

Provinsi/ Province	Selang Kepercayaan/ Confidence Interval		Efek Rancangan Sampel/ Effect of Sampling Design	Jumlah Sampel/ Number of Samples
	Batas Bawah/ Lower Limit	Batas Atas/ Upper Limit		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	3,00	22,16	1,32	14 024
Sumatera Utara	12,87	26,18	2,01	62 823
Sumatera Barat	11,27	29,27	1,32	23 190
Riau	9,71	26,35	1,41	26 598
Jambi	10,18	31,73	0,92	11 541
Sumatera Selatan	18,48	39,60	2,56	41 821
Bengkulu	13,74	38,97	0,75	8 099
Lampung	19,28	37,39	1,69	36 930
Kep Bangka Belitung	6,16	28,79	0,31	3 065
Kepulauan Riau	10,60	55,23	1,97	7 724
DKI Jakarta	16,88	38,89	2,78	40 846
Jawa Barat	20,49	32,58	4,27	201 145
Jawa Tengah	11,61	20,79	1,89	107 609
DI Yogyakarta	6,68	27,88	1,45	16 299
Jawa Timur	11,22	19,90	2,28	140 329
Banten	11,32	39,40	3,96	33 556
Bali	3,18	13,81	0,34	8 261
Nusa Tenggara Barat	4,50	13,87	0,93	31 228
Nusa Tenggara Timur	13,33	30,98	0,80	15 693
Kalimantan Barat	11,94	38,04	1,17	11 407
Kalimantan Tengah	2,37	27,65	1,13	7 948
Kalimantan Selatan	4,08	20,00	0,96	14 136
Kalimantan Timur	2,15	15,25	1,15	18 740
Kalimantan Utara	0,55	17,22	0,32	3 325
Sulawesi Utara	16,87	42,30	0,74	8 407
Sulawesi Tengah	12,15	35,88	0,91	10 455
Sulawesi Selatan	14,18	29,86	1,36	33 673
Sulawesi Tenggara	16,63	43,61	0,97	9 891
Gorontalo	6,76	32,18	0,46	3 978
Sulawesi Barat	3,98	37,53	0,68	3 505
Maluku	8,97	30,30	0,75	9 146
Maluku Utara	5,50	19,89	0,30	5 650
Papua Barat	15,82	46,17	0,74	6 048
Papua	11,19	22,76	0,44	16 405
INDONESIA	19,05	22,80	2,39	993 494

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020

Tabel 5.13 Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Pernah Melaporkan Kejadian Kejahatan Menurut Provinsi, 2019
Table 5.13 Sampling Error Percentage of Population Who Have Reported Incidents of Crime by Province, 2019

Perkotaan/Urban

Provinsi/ Province	Nilai Estimasi/ Estimated Value	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	21,56	4,27	19,80
Sumatera Utara	22,77	2,98	13,07
Sumatera Barat	31,83	5,01	15,73
Riau	15,95	3,22	20,18
Jambi	29,25	7,55	25,80
Sumatera Selatan	33,65	5,13	15,25
Bengkulu	23,63	5,67	24,00
Lampung	35,89	6,10	17,00
Kep. Bangka Belitung	17,64	6,35	35,98
Kepulauan Riau	26,34	6,51	24,70
DKI Jakarta	31,00	3,73	12,04
Jawa Barat	29,72	2,36	7,93
Jawa Tengah	19,53	2,15	11,02
DI Yogyakarta	14,58	3,55	24,34
Jawa Timur	23,96	2,52	10,53
Banten	22,52	4,54	20,18
Bali	7,65	4,06	53,04
Nusa Tenggara Barat	12,08	2,49	20,64
Nusa Tenggara Timur	26,47	6,24	23,57
Kalimantan Barat	24,52	5,39	21,98
Kalimantan Tengah	22,56	6,90	30,57
Kalimantan Selatan	14,02	4,46	31,78
Kalimantan Timur	14,59	3,61	24,75
Kalimantan Utara	11,55	3,80	32,90
Sulawesi Utara	37,14	6,50	17,50
Sulawesi Tengah	26,98	5,22	19,33
Sulawesi Selatan	23,26	4,05	17,41
Sulawesi Tenggara	28,26	6,20	21,94
Gorontalo	14,45	5,58	38,66
Sulawesi Barat	37,65	13,70	36,40
Maluku	18,13	4,88	26,91
Maluku Utara	14,59	5,27	36,16
Papua Barat	40,55	7,48	18,45
Papua	37,68	5,50	14,59
INDONESIA	25,23	0,90	3,58

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020

Keterangan: warna kuning menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi,
warna merah menunjukkan hasil estimasi kurang akuratNote: the yellow color indicates the need for caution in using the estimation results, the red color
indicates the estimation result is less accurate



Tabel

5.13

Table

Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Pernah Melaporkan Kejadian Kejahatan Menurut Provinsi, 2019 (lanjutan)
Sampling Error Percentage of Population Who Have Reported Incidents of Crime by Province, 2019 (continuation)

Perkotaan/Urban

Provinsi/ Province	Selang Kepercayaan/ Confidence Interval		Efek Rancangan Sampel/ Effect of Sampling Design	Jumlah Sampel/ Number of Samples
	Batas Bawah/ Lower Limit	Batas Atas/ Upper Limit		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	13,19	29,92	0,70	20 005
Sumatera Utara	16,94	28,60	1,75	106 372
Sumatera Barat	22,02	41,65	1,11	29 345
Riau	9,64	22,26	1,25	49 437
Jambi	14,46	44,05	1,10	12 279
Sumatera Selatan	23,59	43,71	2,17	56 486
Bengkulu	12,51	34,74	0,73	12 515
Lampung	23,93	47,85	2,34	44 441
Kep Bangka Belitung	5,20	30,09	0,49	5 399
Kepulauan Riau	13,58	39,09	1,61	22 693
DKI Jakarta	23,69	38,32	2,61	122 653
Jawa Barat	25,10	34,33	4,15	479 129
Jawa Tengah	15,31	23,75	1,61	167 427
DI Yogyakarta	7,63	21,54	1,57	47 712
Jawa Timur	19,02	28,91	2,21	193 983
Banten	13,61	31,43	2,97	76 935
Bali	-0,30	15,60	1,08	14 161
Nusa Tenggara Barat	7,19	16,97	0,80	41 840
Nusa Tenggara Timur	14,24	38,70	0,95	14 595
Kalimantan Barat	13,95	35,08	0,92	17 898
Kalimantan Tengah	9,04	36,08	0,96	10 858
Kalimantan Selatan	5,29	22,76	0,96	17 926
Kalimantan Timur	7,51	21,67	1,25	36 574
Kalimantan Utara	4,10	19,00	0,45	9 691
Sulawesi Utara	24,40	49,89	0,66	11 216
Sulawesi Tengah	16,75	37,21	0,82	18 101
Sulawesi Selatan	15,32	31,20	1,70	56 680
Sulawesi Tenggara	16,10	40,41	0,92	14 925
Gorontalo	3,50	25,40	0,43	5 204
Sulawesi Barat	10,78	64,51	1,11	4 262
Maluku	8,56	27,69	0,79	15 149
Maluku Utara	4,25	24,93	0,49	6 679
Papua Barat	25,88	55,22	0,69	9 057
Papua	26,91	48,46	0,64	15 311
INDONESIA	23,46	27,01	2,50	1 766 942

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020

Tabel 5.14
Table
**Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Pernah
 Melaporkan Kejadian Kejahatan Menurut Provinsi, 2019**
**Sampling Error Percentage of Population Who Have Reported
 Incidents of Crime by Province, 2019**
Perdesaan/Rural

Provinsi/ Province	Nilai Estimasi/ Estimated Value	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	12,68	3,61	28,52
Sumatera Utara	14,42	2,67	18,55
Sumatera Barat	12,75	3,53	27,70
Riau	14,11	2,92	20,71
Jambi	21,10	3,65	17,29
Sumatera Selatan	17,49	3,23	18,45
Bengkulu	17,87	3,24	18,12
Lampung	17,84	2,83	15,89
Kep. Bangka Belitung	20,58	6,58	31,96
Kepulauan Riau	20,58	23,69	115,14
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	21,84	3,35	15,34
Jawa Tengah	12,64	1,98	15,70
DI Yogyakarta	40,96	12,79	31,22
Jawa Timur	15,43	2,25	14,59
Banten	20,84	5,11	24,54
Bali	18,63	7,04	37,78
Nusa Tenggara Barat	9,86	2,49	25,26
Nusa Tenggara Timur	10,69	2,04	19,05
Kalimantan Barat	20,98	4,79	22,84
Kalimantan Tengah	17,54	6,28	35,79
Kalimantan Selatan	13,11	3,27	24,91
Kalimantan Timur	33,11	9,43	28,48
Kalimantan Utara	4,59	2,45	53,45
Sulawesi Utara	14,38	4,11	28,60
Sulawesi Tengah	19,19	3,41	17,79
Sulawesi Selatan	28,28	3,80	13,44
Sulawesi Tenggara	20,99	3,65	17,40
Gorontalo	10,24	3,77	36,82
Sulawesi Barat	11,45	4,04	35,23
Maluku	21,31	6,04	28,33
Maluku Utara	16,61	4,35	26,17
Papua Barat	33,47	5,64	16,86
Papua	10,88	1,41	12,97
INDONESIA	16,58	0,72	4,34

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020

Keterangan: warna kuning menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi,
 warna merah menunjukkan hasil estimasi kurang akurat

Note: the yellow color indicates the need for caution in using the estimation results, the red color
 indicates the estimation result is less accurate



Tabel

5.14

Table

Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Pernah Melaporkan Kejadian Kejahatan Menurut Provinsi, 2019 (lanjutan)
Sampling Error Percentage of Population Who Have Reported Incidents of Crime by Province, 2019 (continuation)

Perdesaan/Rural

Provinsi/ Province	Selang Kepercayaan/ Confidence Interval		Efek Rancangan Sampel/ Effect of Sampling Design	Jumlah Sampel/ Number of Samples
	Batas Bawah/ Lower Limit	Batas Atas/ Upper Limit		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	5,59	19,76	1,36	18 650
Sumatera Utara	9,18	19,67	2,37	66 495
Sumatera Barat	5,82	19,67	1,69	24 500
Riau	8,38	19,83	1,66	38 286
Jambi	13,95	28,25	0,90	18 221
Sumatera Selatan	11,17	23,82	2,62	58 870
Bengkulu	11,53	24,22	0,71	16 096
Lampung	12,28	23,39	2,57	76 075
Kep. Bangka Belitung	7,68	33,47	0,75	4 595
Kepulauan Riau	25,87	67,02	0,31	149
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	15,27	28,40	3,85	95 154
Jawa Tengah	8,75	16,53	2,47	112 488
DI Yogyakarta	15,89	66,04	1,87	4 481
Jawa Timur	11,02	19,85	3,13	130 920
Banten	10,82	30,87	2,72	27 864
Bali	4,83	32,42	0,80	3 979
Nusa Tenggara Barat	4,98	14,75	1,78	41 433
Nusa Tenggara Timur	6,70	14,69	0,86	32 009
Kalimantan Barat	11,59	30,38	1,22	14 330
Kalimantan Tengah	5,23	29,84	1,88	11 204
Kalimantan Selatan	6,71	19,52	1,04	18 105
Kalimantan Timur	14,62	51,60	2,11	8 538
Kalimantan Utara	-0,22	9,40	0,17	1 959
Sulawesi Utara	6,32	22,44	0,72	8 456
Sulawesi Tengah	12,49	25,88	0,91	19 557
Sulawesi Selatan	20,83	35,73	1,25	28 546
Sulawesi Tenggara	13,83	28,15	0,55	11 163
Gorontalo	2,85	17,64	0,47	4 883
Sulawesi Barat	3,54	19,36	0,61	6 157
Maluku	9,47	33,14	0,89	6 616
Maluku Utara	8,09	25,13	0,68	8 114
Papua Barat	22,41	44,54	0,63	7 154
Papua	8,12	13,65	0,39	31 154
INDONESIA	15,17	17,99	2,21	956 203

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020

Tabel 5.15
Table
Total/Total

Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Pernah Melaporkan Kejadian Kejahatan Menurut Provinsi, 2019
Sampling Error Percentage of Population Who Have Reported Incidents of Crime by Province, 2019

Provinsi/ Province	Nilai Estimasi/ Estimated Value	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	17,27	2,84	16,45
Sumatera Utara	19,56	2,10	10,75
Sumatera Barat	23,15	3,15	13,60
Riau	15,15	2,22	14,63
Jambi	24,38	3,76	15,43
Sumatera Selatan	25,41	3,03	11,92
Bengkulu	20,39	3,10	15,19
Lampung	24,49	2,96	12,09
Kep. Bangka Belitung	18,99	4,58	24,10
Kepulauan Riau	26,30	6,46	24,58
DKI Jakarta	31,00	3,73	12,04
Jawa Barat	28,41	2,05	7,21
Jawa Tengah	16,76	1,52	9,04
DI Yogyakarta	16,85	3,45	20,48
Jawa Timur	20,53	1,75	8,53
Banten	22,07	3,60	16,32
Bali	10,06	3,49	34,70
Nusa Tenggara Barat	10,98	1,76	16,05
Nusa Tenggara Timur	15,63	2,35	15,04
Kalimantan Barat	22,94	3,66	15,96
Kalimantan Tengah	20,01	4,64	23,18
Kalimantan Selatan	13,57	2,75	20,30
Kalimantan Timur	18,10	3,46	19,11
Kalimantan Utara	10,38	3,19	30,72
Sulawesi Utara	27,36	4,14	15,14
Sulawesi Tengah	22,93	3,09	13,48
Sulawesi Selatan	24,94	2,98	11,94
Sulawesi Tenggara	25,15	3,86	15,35
Gorontalo	12,41	3,41	27,45
Sulawesi Barat	22,17	6,38	28,76
Maluku	19,09	3,87	20,29
Maluku Utara	15,70	3,37	21,47
Papua Barat	37,43	4,89	13,07
Papua	19,71	2,11	10,69
INDONESIA	22,19	0,64	2,88

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020

Keterangan: warna kuning menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Note: the yellow color indicates the need for caution in using the estimation results



Tabel

5.15

Table

Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Pernah Melaporkan Kejadian Kejahatan Menurut Provinsi, 2019 (lanjutan)
Sampling Error Percentage of Population Who Have Reported Incidents of Crime by Province, 2019 (continuation)

Total/Total

Provinsi/ Province	Selang Kepercayaan/ Confidence Interval		Efek Rancangan Sampel/ Effect of Sampling Design	Jumlah Sampel/ Number of Samples
	Batas Bawah/ Lower Limit	Batas Atas/ Upper Limit		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	11,70	22,84	0,93	38.654
Sumatera Utara	15,44	23,68	2,08	172.867
Sumatera Barat	16,98	29,32	1,28	53.844
Riau	10,80	19,49	1,43	87.723
Jambi	17,00	31,76	1,00	30.501
Sumatera Selatan	19,47	31,34	2,39	115.356
Bengkulu	14,32	26,46	0,72	28.611
Lampung	18,69	30,30	2,44	120.516
Kep. Bangka Belitung	10,02	27,97	0,58	9.993
Kepulauan Riau	13,63	38,97	2,11	22.842
DKI Jakarta	23,69	38,32	3,42	122.653
Jawa Barat	24,40	32,42	5,06	574.283
Jawa Tengah	13,79	19,74	1,97	279.914
DI Yogyakarta	10,09	23,61	1,90	52.194
Jawa Timur	17,09	23,96	2,61	324.903
Banten	15,01	29,13	3,38	104.800
Bali	3,22	16,90	1,04	18.140
Nusa Tenggara Barat	7,52	14,43	1,13	83.273
Nusa Tenggara Timur	11,03	20,24	0,84	46.605
Kalimantan Barat	15,77	30,12	1,05	32.228
Kalimantan Tengah	10,92	29,10	1,27	22.063
Kalimantan Selatan	8,17	18,96	1,00	36.031
Kalimantan Timur	11,32	24,88	1,56	45.112
Kalimantan Utara	4,13	16,64	0,54	11.651
Sulawesi Utara	19,24	35,48	0,73	19.673
Sulawesi Tengah	16,87	28,99	0,87	37.658
Sulawesi Selatan	19,10	30,78	1,73	85.227
Sulawesi Tenggara	17,58	32,72	0,88	26.088
Gorontalo	5,73	19,09	0,46	10.087
Sulawesi Barat	9,67	34,67	1,05	10.419
Maluku	11,50	26,69	0,90	21.766
Maluku Utara	9,09	22,30	0,54	14.794
Papua Barat	27,84	47,02	0,71	16.211
Papua	15,58	23,84	0,56	46.465
INDONESIA	20,94	23,45	2,76	2.723.145

Sumber/Source : Susenas 2020/National Socio-Economic Survey 2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



BADAN PUSAT STATISTIK
BPS-Statistics Indonesia

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046
Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id

